



UNIVERSITAS INDONESIA

**NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK
CINA-INDONESIA DAN PERAN KONSEP *MIANZI***

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

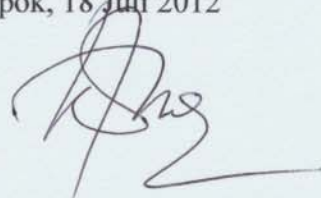
**R. TUTY NURMUTIA ENOCH MUAS
NPM : 070622025**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
Juli 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa disertasi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 18 Juli 2012



R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas

NPM : 070622025

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi yang diajukan oleh :

nama : R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas
NPM : 070622025
Program Studi : Ilmu Sejarah
judul : Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia
dan Peran Konsep *Mianzi*

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

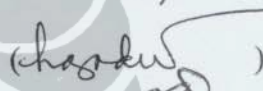
Promotor : Prof. Dr. A. Dahana



Kopromotor : Prof. Dr. Susanto Zuhdi



Kopromotor : Dr. Hariyadi Wirawan



Tim Penguji : Dr. Priyanto Wibowo

(Ketua)



: Prof. Dr. M. I. Djoko Marihandono

(Anggota)



: Prof. Dr. Maswadi Rauf

(Anggota)



: Dr. Oesman Arief

(Anggota)



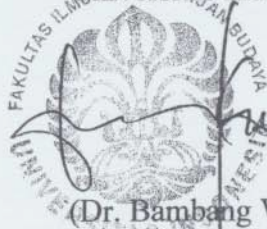
Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juli 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



(Dr. Bambang Wibawarta)

NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrokhmanirrohiim,

Segala puji bagi Allah Penguasa semesta alam. Keinginan untuk mewujudkan disertasi ini akhirnya tercapai setelah kerja keras yang didukung oleh banyak pihak, dan di dalamnya ada kasih sayangMu ya Allah yang membuat semua kesulitan dapat terlewati. Terimakasih yang tak terhingga bagiMu ya Allah.

Disertasi ini mengupas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dengan pisau analisis pendekatan keterkaitan mikro-makro dan kerangka konsep *mianzi*. Cina dan Indonesia dengan segala potensinya dapat menjadi penentu bagi perkembangan di Asia maupun dunia. Pemahaman yang baik atas kondisi dan karakter masing-masing akan mendorong hubungan di antara kedua bangsa ke arah yang lebih baik, sehat, dan seimbang. Itulah salah satu manfaat yang ingin diberikan oleh disertasi ini.

Kepada semua pihak yang telah memungkinkan saya menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini saya mengucapkan terimakasih. Di sini saya hanya bisa menyebutkan beberapa di antaranya. Sebagai dosen, saya selalu didorong untuk meningkatkan kualitas diri dan akademis melalui pendidikan formal. Oleh karenanya pertama saya ucapkan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Indonesia, khususnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB). Terimakasih juga saya sampaikan kepada Dirjen Dikti Kemendikbud RI, khususnya Direktorat Pendidikan dan Tenaga Pendidik yang telah memberikan beasiswa (BPPS) selama enam semester.

Kepada Bapak Dr. Bambang Wibawarta dan jajaran Dekanat FIB UI, saya ucapkan terimakasih atas segala dukungannya sehingga proses pendidikan saya berjalan lancar. Kepada Bapak Dr. Priyanto Wibowo yaitu Ketua Departemen Sejarah dan teman sejawat saya, terimakasih telah selalu mengingatkan tentang batas waktu dan urusan prosedur, juga atas diskusi dan pinjaman bukunya. Buat Koordinator Prodi Cina dan wakilnya yaitu Ibu Nita Madona, MA. dan Ibu Assa Rahmawati, M.Hum. saya berterimakasih atas pengurangan beban mengajar, izin menggunakan koleksi buku Prodi Cina, dan kesediaannya untuk menjadi teman berbagi yang inspiratif.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. A. Dahana, yang telah menjadi Promotor saya. Tugas mengajar Sejarah Diplomasia Cina yang pernah Bapak berikan telah mengantarkan saya pada pilihan topik penelitian disertasi ini. Terimakasih pula untuk semua kritik, saran, arahan, dan kesabaran Bapak selama proses penelitian dan penulisan disertasi ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Susanto Zuhdi, saya berterimakasih atas kesediaannya menjadi Kopromotor dan atas segala bimbingannya yang telah membuat saya lebih mengerti tentang ilmu sejarah dan lebih 'berani' dalam mengungkapkan pandangan dan hasil penelitian saya. Kepada Bapak Dr. Hariyadi Wirawan yang juga telah menjadi Kopromotor saya, terimakasih atas semua bimbingannya terutama yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Rangkaian diskusi dengan Bapak telah menambah cakrawala keilmuan saya.

Kepada para Penguji, Prof. Dr.M.I.Djoko Marihandono saya ucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak membaca disertasi saya dengan teliti. Saran dan

kritik Bapak membuat paparan dalam disertasi ini menjadi lebih lancar. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Maswadi Rauf. Pertanyaan-pertanyaan tajam Bapak khususnya tentang aplikasi pendekatan dalam disertasi ini mengingatkan saya untuk lebih cermat. Saya pun berterimakasih kepada Bapak Dr. Oesman Arief. Penjelasan Bapak tentang konsep-konsep budaya Cina terutama yang berkaitan dengan Konfusianisme telah meningkatkan pemahaman saya. Semua kritik dan saran itu sangat bermanfaat bagi perbaikan disertasi ini.

Saya pun menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada para dosen di Program Pasca Sarjana FIB UI. Prof. Dr. Benny Hoed, Prof. Dr. Melani Budianta, Prof. Dr. Nurhadi Magetsari, Prof. Dr. Toeti Herati, Prof. Dr. Leirissa (alm), Dr. Akhyar Yusuf Lubis, Dr. Y.V. Yolasa, Dr. Haryatmoko, dan Tommy Christomy, Ph.D. Beliau semua telah memberi saya banyak pengetahuan tentang ilmu Humaniora. Demikian pula untuk teman-teman seangkatan, Linda, Abdurahman, Farida, Abdul Syukur, Rosmaida, Bernada, Setia Gumilar, Josana, Danny, Jugiarie, Yusuf, dan Firman (maaf gelarnya tidak disebutkan), terimakasih telah menjadi teman berbagi selama masa perkuliahan. Semoga disertasi-disertasi kita dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pendekatan multi disiplin sebagaimana yang diharapkan dan didiskusikan dalam perkuliahan.

Kepada berbagai lembaga dan stafnya yang telah membantu saya dalam mendapatkan data-data juga saya ucapkan terimakasih. Di antaranya kepada Ibu Mariyah, M.Hum. Kepala Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri RI, Staf di Direktorat ASTIMPAS Kemlu, serta Staf di Direktorat Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan RI. *My sincere gratitude to Mr. Lee Ching Seng, MBA, and his staff of Chinese Library at National University of Singapore (NUS). Also to Mr. James Tan and his staff at East Asian Institute NUS. I am also grateful to Ms. Sherley Leung and her staff at Chinese University of Hongkong Library. All of them has allowed me to get data and academic resources. It would be academically almost imposible to finish this dissertation well without their professional assistance.* Terimakasih pula kepada staf FIB UI, Mba Wiwi, Ari, Pak Nanang, dan Mba Meti, yang telah membantu dalam hal teknis-administratif untuk penyelesaian disertasi ini.

Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ida Sundari Husen, dan teman-teman sejawat dari berbagai Prodi yang kerap bertemu di sepanjang selasar FIB UI. Sapaan hangat dan pertanyaan tentang undangan telah menjadi dorongan kuat bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Kepada Bapak Sia Ka Mou saya pun mengucapkan terimakasih atas copy buku Rizal Sukma yang sangat bermanfaat. Secara khusus saya juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada teman-teman di Prodi Cina. Pak Iwan, Bu Christine, Bu Hermin, Lily, Nurni, Adri, Ira, Tei, Dilah, Nessa, Ina, Utu, Hatmi, Itas, dan Hana (maaf gelarnya tidak disebutkan). Kehangatan yang teman-teman hadirkan membuat ruang Prodi Cina adalah zona paling aman buat saya untuk berbagi suka-duka dalam pekerjaan, tak jarang sejumlah ide juga lahir dari kehangatan obrolan kita. Terimakasih juga buat Agni yang selalu siap mencarikan artikel yang saya butuhkan dari Jerman.

Kepada teman-teman mantan pengurus Komisariat Al Izhar yang telah sekian lama masih tetap kompak, juga teman-teman di Bumi Karang Indah, Alumni Sastera Cina, teman-teman di IKOSIS DKI Jaya, Alumni SMAN XII

Jakarta, serta teman-teman lainnya, saya ucapkan terimakasih atas silaturahmi dan kebersamaan yang telah membuat hidup saya lebih berwarna. Buat Ai (Natalia Soebagyo) terimakasih atas semua perhatian dan copy buku yang amat berguna.

Rasa terimakasih kepada orang tua dan mertuaku yang telah tiada, terwujud dalam doa semoga Allah memberi tempat terbaik di SurgaNya, aamiin. Kepada keluarga besar Bapak R.H. Enoch dan R.Hj. Rumandiah, keluarga besar Bapak Matsyah dan Hj Maemunah. Kakak-kakak dan semua ipar-ipar serta semua keponakan saya tersayang, terimakasih atas dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya mampu mencapai keberhasilan ini. Kesulitan yang saya hadapi ketika menjalani pendidikan sejak masa SMA, dapat terpecahkan karena adanya keluarga yang selalu siap menolong. Semoga Allah membalas semua kebaikan itu dengan berkah melimpah kepada semuanya.

Sesungguhnya penelitian dan penulisan disertasi ini tak akan pernah ada bila saya tidak memiliki kehangatan keluarga kecil yang sekarang semakin besar. Terimakasih yang paling tulus untuk suamiku tercinta H. Muhammad Muas, SH. Semangatmu yang seperti 'ga ada matinya' membuatku cepat terlepas dari kecewa dan duka kala ia datang menerpa. Semua yang telah kau lakukan untukku membuatku kuat dan mampu menikmati kehidupan dengan penuh syukur kepada Yang Kuasa. Terimakasih papa dan maaf untuk segala kealpaan yang pasti ada di sepanjang kebersamaan kita. Kepada anak-anakku, Muska, Asti, Dania, dan Fasya, terimakasih telah jadi anak-anak yang tidak terlalu merepotkan, sehingga mama masih bisa punya kesempatan untuk mencapai semuanya. Terimakasih juga untuk menantu-menantuku, Lila, Ivan, dan Farhan. Tak lupa pula untuk cucu-cucuku, Enzi, Raffa, Safina, dan Zuri. Kehadiran kalian semua telah membuat hidup ini lengkap dan terus bergerak. Maafkan mama untuk hal-hal yang tidak menyenangkan kalian. Mama berharap semoga apa yang telah mama dan papa capai dapat menjadi penyemangat untuk menggapai kehidupan kalian yang terbaik sesuai janji Allah SWT, aamiin.

Pada akhirnya semua tanggungjawab atas disertasi ini ada di tangan saya. Mohon maaf bila di dalamnya terdapat kekeliruan ataupun kealpaan. Saya berharap semoga disertasi ini dapat menjadi inspirasi bagi peminat Studi Cina khususnya, dan bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan. Alhamdulillahirobbilalamiin.

Jakarta, 18 Juli 2012

R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Tuty NurMutia Enoch Muas
NPM : 070622025
Progra Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Disertasi

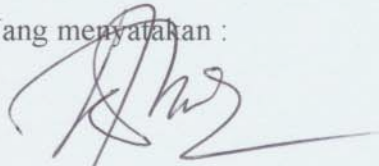
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia dan Peran Konsep *Mianzi* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Juli 2012

Yang menyatakan :



R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas

ABSTRAK

Nama : R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina – Indonesia dan Peran Konsep *Mianzi*

Disertasi ini membahas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dengan tujuan menunjukkan motivasi yang mendorong Cina untuk mewujudkannya. Pendekatan ‘keterkaitan mikro-makro’ digunakan untuk mengangkat bukti-bukti empiris, dipertajam melalui kerangka konsep *mianzi*. Dalam budaya Cina *mianzi* mengandung makna dan nilai-nilai ‘kehormatan’. Hasil penelitian menunjukkan, merosotnya kekuatan kubu sosialis di akhir tahun 1980-an dan peristiwa Tiananmen 1989 telah menyebabkan berubahnya prioritas politik luar negeri Cina. Ancaman terhadap kedaulatan menjadi pusat prioritas karena menyangkut kehormatan dan keutuhan bangsa. Segenap potensi Cina harus digunakan untuk menyelamatkan kehormatan negaranya, itulah *baoquan mianzi*. Kejayaan dan citra internasional RRC harus dikembalikan kembali. Normalisasi hubungan itu terbukti merupakan bagian dari upaya *baoquan mianzi* dan telah memberi peluang besar kepada Cina untuk berperan di forum regional maupun global. Dari sanalah motivasi itu terangkat.

Kata kunci : Normalisasi hubungan, *baoquan mianzi*, peluang

ABSTRACT

Name : R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas
Study Program : History
Title : Normalization of China-Indonesia Diplomatic Relations And The Role of “*Mianzi*” Concept

This dissertation examine the normalization of China-Indonesia diplomatic relations in order to understand China’s main motivation. The "micro-macro linkage" used to uphold empirical evidence that being enhanced through “*Mianzi*” concept. In Chinese culture, *mianzi* consist honorable values and meanings. The result of this research shows that the changes on China foreign policy priority has been caused by the decreasing of socialist power in the late 1980’s and the Tiananmen incident in 1989. Threat to China’s sovereignty and unity has been the main priority to keep the country honor and existence. The term of *baoquan mianzi* is being used on this matter. It means using the whole potential of Chinese people to save the country honor. PRC international image and glory need to be restored. The normalization of diplomatic relations has been proven to be a part of *baoquan mianzi* and has given China a big opportunity to take part in regional and global forums. From there the motivation was raised.

Key words : Normalization of relations, *baoquan mianzi*, opportunities

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.5 Tinjauan Pustaka dan Ruang Lingkup Penelitian	21
1.6 Metode dan Sumber Penelitian	24
1.7 Pendekatan dan Konsep yang Digunakan	29
1.8 Sistematika Penulisan	30
2. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	31
2.1 Pendekatan Keterkaitan Mikro-Makro untuk Menginterpretasikan Politik Luar Negeri Cina	34
2.2 Konsep <i>Mianzi</i>	42
3. POLITIK LUAR NEGERI RRC TAHAP AWAL DAN BEKUNYA SEBUAH HUBUNGAN	50
3.1 Dari <i>Yi bian dao</i> hingga Koeksistensi Damai	52
3.2 Dari <i>Da Yue Jin</i> hingga Strategi Kekuatan Ke Tiga	65
3.3 Dari <i>Wenhua Da Geming</i> hingga Bekunya Hubungan	74
3.4 Simpulan	80
4. DINAMIKA UPAYA PENDEKATAN	83
4.1 Kontroversi atas Sikap Adam Malik	84
4.2 Konflik Kamboja dan Upaya Pendekatan	93
4.3 Kesepakatan CCPIT dengan KADIN	101
4.4 Simpulan	109
5. KEBIJAKAN RRC TENTANG NORMALISASI HUBUNGAN ...	111
5.1 Keterkaitan Mikro-Makro dalam Kebijakan Normalisasi.....	111
5.1.1 Perubahan dalam Dimensi Simbolik	112
5.1.2 Perubahan dalam Dimensi Institusional dan Rejim	127
5.2 Proses Perundingan	137

5.2.1 Penyelesaian Masalah yang Bersifat Prinsipil (<i>yuanzexing</i>)....	140
5.2.1.1 Pengakuan Satu Cina	141
5.2.1.2 Dukungan RRC terhadap Gerakan Komunis/PKI ..	144
5.2.1.3 Status Kaum Tionghoa	148
5.2.1.4 Penyelesaian Hutang Indonesia	154
5.2.2 Penyelesaian Masalah yang Bersifat Fleksibel (<i>linghuoxing</i>) ..	159
5.3. Simpulan	162
6. “MIANZI” DALAM SIKAP RRC TERHADAP INDONESIA	165
6.1 Penarikan Duta Besar Wang Renshu	168
6.2 PP 10 Tahun 1959	172
6.3 Pembekuan Hubungan Diplomatik	176
6.4 Kunjungan Wu Xueqian	183
6.5 Perundingan Normalisasi Hubungan	186
6.5.1 Dari Sudut Temporal	189
6.5.2 Dari Sidut Prosedural	191
6.5.3 Dari Sudut Material	193
6.6 Simpulan	194
7. PENUTUP	197
7.1 Kesimpulan	197
7.2 Catatan Reflektif	204
DAFTAR PUSTAKA	209
LAMPIRAN	
INDEX	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Agreed Minutes of Discussion Between Officials of The People's Republic of China and The Republic of Indonesia on Technical Matters Relating to The Settlement of Outstanding Debt Between The Two Countries, Beijing 23-28 March 1990
2. Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Settlement of Indonesia's Debt Obligations to The People's Republic of China, Beijing July 2, 1990
3. Instruksi Presiden Nomor 9/1985, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia-Cina Angka VIII, 23 Juli 1985, beserta lampirannya
4. Instruksi Presiden Nomor 5/1989 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia-Cina, 25 Mei 1989
5. Joint Press Statement, Jakarta December 9, 1989
6. Joint Press Communique, Beijing, 3 July, 1990
7. Communique of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on the Resumption of Diplomatic Relations between the Two Countries, Beijing 3 July 1990
8. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Resumption of Diplomatic Relations, Jakarta, August 8, 1990
9. 人民日报 (Renmin Ribao/Harian Rakyat), “热烈庆贺 中国印尼恢复外交关系” (Menyambut Hangat Perbaikan Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia), 4 Juli 1990, hlm. 1 (人民日报社论/Renmin Ribao Shelun/Editorial Harian Rakyat)
10. 余文锁 (She Wensuo), “印尼正在迎接中印复交” (Indonesia Sedang Menyambut Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia), 联合早报 (Harian Pagi 'Persatuan'), Singapura, 25 Desember 1989
11. Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China, Jakarta August 8, 1990
12. “祖国尊严不可侮” (Kehormatan Negara Tidak Boleh Dilecehkan). 解放军报 (Koran Tentara Pembebasan), Beijing, 20 April 1966

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layaknya manusia sebagai makhluk sosial, berbagai bangsa di dunia dalam mencapai kesejahteraan masing-masing tak terbebas dari ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu dijalin hubungan antar negara secara bilateral maupun multilateral. Terlebih lagi di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Ketergantungan antar bangsa adalah sesuatu yang tak bisa disangkal dan tak bisa dihindari oleh bangsa atau negara manapun. Pembekuan hubungan diplomatik Cina-Indonesia yang berlangsung sangat lama yaitu sekitar 23 tahun,¹ menjadi tidak sejalan dengan perkembangan globalisasi tersebut. Pasti ada alasan yang amat prinsipil yang menyebabkan pembekuan itu berlangsung sekian lama.

Kebekuan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut dicairkan kembali atau dinormalisir pada tanggal 8 Agustus 1990. Kesepakatan akhir proses normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia tercapai dalam pembicaraan Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 3 Juli 1990 di Wisma Negara *Diaoyutai* Beijing-RRC. Tercapainya kesepakatan akhir ditandai dengan pengumuman komunike bersama tentang perbaikan hubungan, dan penandatanganan kesepakatan penyelesaian hutang Indonesia.² Dalam komunike itu antara lain ditetapkan bahwa peresmian normalisasi hubungan diplomatik akan dilakukan pada saat kunjungan Perdana Menteri Cina ke Indonesia. Tentang tercapainya kesepakatan akhir dalam upaya pencairan hubungan kedua negara, mantan Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen meng gambarkannya dalam kalimat "...acara penandatanganan hanya berlangsung belasan menit,

¹ Hubungan Cina-Indonesia dibuka secara resmi pada bulan April 1950 dan dibekukan pada bulan Oktober 1967. Salah satu penyebab pembekuan itu adalah adanya kecurigaan Indonesia atas keterlibatan Cina dalam peristiwa G 30 S PKI yang terjadi pada tahun 1965

² Hutang yang harus dibayar Indonesia tersebut adalah pinjaman yang diberikan RRC, berkaitan dengan kerjasama di bidang ekonomi/perdagangan pada masa pemerintahan Soekarno

namun ini merupakan hasil dari kerja keras kedua negara selama beberapa tahun, hubungan Cina-Indonesia mulai saat ini memasuki lembaran baru”.³ Pernyataan itu telah menegaskan bahwa, proses pencairan hubungan diplomatik Cina-Indonesia telah melewati jalan yang panjang dan tidak mudah.

Hubungan Cina-Indonesia memang memiliki keunikan. Hal itu terkait dengan berbagai keadaan yang melingkupi perkembangan kehidupan kedua bangsa dan negara masing-masing. Ditinjau dari posisi geografis dan sumber daya alam, jumlah dan kemajemukan penduduk, serta posisi historisnya, keduanya merupakan kekuatan besar di masing-masing kawasan, Cina di Asia Timur dan Indonesia di Asia Tenggara. Secara historis, Cina menyebut dirinya sebagai ‘negara tengah’ atau ‘negara pusat’ yang tercermin dalam sebutan *Zhongguo*. Sejak zaman kedinastian, Cina telah mengembangkan hubungan antar negara dalam bentuk ‘sistem tributer’⁴ yang mengedepankan superioritas Cina secara budaya. Republik Rakyat Cina (RRC) terbentuk sebagai hasil perjuangan Partai Komunis Cina (PKC/*Gongchandang*) melawan kekuatan Partai Nasionalis Cina (PNC/*Guomindang*). Kemenangan itu menyebabkan PKC dan atau RRC menguasai hampir seluruh wilayah kedinastian di Daratan Cina.

Republik Indonesia berdiri sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempersatukan wilayah Nusantara yang merupakan wilayah kepulauan. Setiap wilayah dan suku bangsa di kepulauan Nusantara, memiliki sejarah pemerintahan atau kerajaan dengan pasang surut kekuasaannya masing-masing. Beberapa diantaranya tercatat pernah mengalami masa keemasan dan mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintahan dinasti-dinasti di Cina.

³钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛：外交十记 (Qian Qichen : Sepuluh Catatan Diplomatik)*, 北京：知识世界出版社 (Beijing : Penerbit Dunia Ilmu Pengetahuan), hlm.132

⁴ Sistem Tributer dalam sejarah Cina merupakan tatanan hubungan antara ‘negara pusat’ dengan negara bawahan/vasal’, yang didasari oleh pemahaman bahwa bangsa-bangsa di sekeliling Cina adalah bangsa barbar yang secara budaya harus ‘diCinakan’. Bangsa-bangsa yang ingin mendapatkan pengakuan dari Cina harus melakukan *ketou* yaitu melakukan penghormatan kepada kaisar Cina dengan cara bersujud dan mengirim utusan serta upeti secara berkala. Sebaliknya Cina akan memberi mereka stempel pengakuan, gelar kebangsawanan, dan hak untuk melakukan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Cina, serta barang-barang hadiah dari kaisar. Lihat, Camilleri Joseph, (1980), *Chinese Foreign Policy ; The Maoist Era & Its Aftermath*, Seattle University of Washington Press, hlm. 4-5

Berlandaskan cara pandang itu, maka terlihat bahwa hubungan Cina-Indonesia (Nusantara) telah berlangsung selama ribuan tahun. Secara budaya, banyak kemiripan dalam nilai-nilai moral yang dianut oleh bangsa Cina dan Indonesia. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan martabat, kehormatan, atau harga diri, yang harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai itu terlihat masih mempengaruhi sikap kedua belah pihak dalam hubungan diplomatik yang telah dijalin sejak tahun 1950.

Dalam budaya masyarakat Cina yang bersifat komunal, kehormatan, martabat, ataupun harga diri, berkaitan erat dengan kata *mianzi* atau *lian* yang terjemahan harfiahnya adalah ‘muka’ atau ‘wajah’. Banyak sekali ungkapan yang menggunakan kata *lian* ataupun *mian (zi)* yang umumnya merupakan kiasan yang bermakna kehormatan, kewibawaan, harga diri, dan kepercayaan.⁵ Keberadaan seperti itu menjadi petunjuk tentang pentingnya makna dan nilai yang terkandung dalam kata tersebut. *Mianzi* maupun *lian* merupakan sebuah konsep penting dalam budaya Cina. *Diu mian* atau *diu lian* (kehilangan muka), *baoquan mianzi* (menyelamatkan muka), dan *gei mianzi* (memberi muka), adalah tiga contoh yang sangat menjadi perhatian dalam interaksi sosial bangsa Cina. Di antara ketiga ungkapan itu ada keterkaitan erat yang berpengaruh terhadap terciptanya keharmonisan dalam hubungan antar manusia. .

Secara maknawi di antara *diu mian* dan *diu lian* ada sedikit perbedaan. *Diu mian* mengacu pada hilangnya wibawa atau kehormatan pribadi, yang disebabkan oleh hilangnya jabatan dan reputasi sosial. Sedangkan *diu lian* adalah hilangnya kehormatan atau kewibawaan seseorang, karena hilangnya kepercayaan terhadap integritas maupun loyalitasnya.⁶ Sanksi sosial bagi yang mengalami *diu mian* ataupun *diu lian* demikian berat, karena itu sangat dijaga agar jangan sampai terjadi. Dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat, tindakan atau sikap *baoquan mianzi* merupakan hal yang harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Hilangnya kehormatan ataupun kepercayaan biasanya

⁵ Lihat Hu, Hsien Chin, “The Chinese Concept of ‘Face’”. *American Anthropologist*, 46 (1), 1944, hlm. 45-64 ; Ning Yu, “What Does Our Face Mean to Us?”, *Pragmatics & Cognition* 9:1 (2001), 1–36. John Benjamins Publishing Company, <http://faculty-staff.ou.edu/Y/Ning.Yu-1/Yu-2001.pdf>

⁶ De Mente, Boye Lafayette, (2009), *The Chinese Mind :Understanding Traditional Chinese Beliefs and Their Inflyenceon Contemporary Culture*, Tokyo, Rutland, Vermont, Singapore : Tuttle Publishing, hlm. 159

terjadi karena adanya konflik. Oleh karena itu untuk menghindari konflik. *gei mianzi* adalah sikap yang cenderung dilakukan orang Cina ketika berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain.⁷

Dalam budaya Indonesia, ungkapan 'kehilangan muka' juga berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan kewibawaan. Bangsa Indonesia dalam hubungan sosialnya juga selalu menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang 'kehilangan muka'. Sejumlah suku di Indonesia bahkan menempatkan konsep 'martabat' atau 'kehormatan' diri, keluarga, atau kelompok, sebagai hal yang amat penting, sehingga nyawa pun dapat menjadi taruhannya. Hal tersebut dapat disimak dalam budaya 'Siri' di kalangan suku Bugis/Sulawesi.⁸ atau budaya 'Pi'il'⁹ dalam masyarakat Lampung. Secara selintas budaya-budaya tersebut seperti mencerminkan adanya budaya 'kekerasan', namun inti budaya itu sesungguhnya adalah ketegaran dan ketegasan dalam mempertahankan 'kehormatan' diri, keluarga, maupun kelompoknya.

Pengaruh nilai-nilai budaya yang sangat mementingkan kehormatan, kewibawaan, dan kepercayaan itu dalam sejarah hubungan diplomatik Cina-Indonesia. antara lain terlihat dari sering munculnya kesan *ego-sentris* dalam sikap masing-masing. Beberapa contoh kejadian dapat disebutkan, di antaranya adalah ketika penerapan PP 10 tahun 1959¹⁰ yang berdampak negatif terhadap kaum Tionghoa.¹¹ Saat itu pemerintah Cina mencoba menunjukkan kekuatannya dengan mengirimkan kapal untuk memulangkan warga atau keturunannya ke tanah leluhur.¹² Sedangkan pihak Indonesia (Soekarno) seakan tidak peduli pada sikap Beijing juga bersikeras dan tetap menjalankan keputusannya. Pada saat itu sesungguhnya hubungan kedua negara sedang sangat mesra. Berhubung 'kewibawaan' nya tersentuh, kedua pihak berusaha menunjukkan kekuatan

⁷Hu, Hsien Chin, "The Chinese Concept of 'Face'"..., hlm 56

⁸ <http://bangsabugis.blogspot.com/2011/05> ; konsep-siri-na-pesse-bagi-bangsa-bugis_02.html

⁹ Abdul Syani "Pelestarian Budaya-Budaya Lokal dan Strategi Pemberdayaan masyarakat Adat Lampung" blog.unila.ac.id/abdulsyani/.../artikel-pelestarian-nilai2-budaya-lokal.pdf

¹⁰ PP 10 tahun 1959 adalah Peraturan Presiden Indonesia yang melarang warga negara asing melakukan aktivitas perdagangan eceran di luar wilayah ibukota kabupaten

¹¹ Sebutan "kaum Tionghoa" dalam disertasi ini akan digunakan untuk menunjuk warga berketurunan Cina yang ada di Indonesia

¹² Wayne, "Chinese Policy Toward Burma and Indonesia : A Post mao Perspective", *Asian survey*, vol. 25, (9 September 1985), h. 974

masing-masing. Untunglah perseteruan itu tidak berlarut-larut, sehingga hubungan baik di antara kedua negara dapat dilanjutkan.

Contoh lainnya adalah dalam hal penyebab pembekuan hubungan kedua negara pada tahun 1967, kesan *ego-sentris* juga terlihat di dalamnya. Indonesia bersikukuh bahwa pembekuan dilakukan karena adanya keterlibatan Cina dalam kudeta G30 S PKI. Sementara Cina juga bersikukuh bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan kudeta tersebut, bahkan Cina mengajukan protes keras atas pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Indonesia. Buku *Sejarah Diplomasi Cina Baru*, yang terbit pada tahun 2005 menggambarkan hal itu sebagai berikut,

“。。。对这场突发事变，中国事前一无所知，对印尼局势未立即表态。。。这是两年以来的第43次武装袭击，是国际外交史上少有的法西斯暴行。中国政府曾对此向印尼政府提出强烈抗议和严正要求，但被印尼政府蛮横拒绝。接着，印尼政府来照宣布关闭其驻华大使馆，撤走全部人员；同时无理要求中国政府在印30日以前关闭驻印尼大使馆。。。中国对印尼政府中断两国外交关系的行为，提出强烈抗议。由于印尼政府所采取的严重步骤，中国不得不宣布暂时关闭驻印尼大使馆和各领事馆，撤回使领馆全部人员。”¹³

“...terhadap insiden yang tiba-tiba terjadi tersebut, Cina sebelumnya tidak tahu sama sekali, (karena itu) tidak segera mengumumkan sikapnya atas situasi Indonesia. ... ini adalah serangan bersenjata yang ke 43 (ke kedutaan besar Cina di Jakarta) dalam dua tahun terakhir (1965-67), merupakan tindakan brutal fasis yang jarang terjadi dalam sejarah hubungan internasional. Cina terhadap semua ini mengajukan tuntutan dan protes keras kepada Indonesia, namun ditolak dengan kasar oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengumumkan penutupan kedutaan besarnya di Cina, dan menarik seluruh personilnya ; pada saat yang sama tanpa alasan (juga) menuntut Cina untuk menutup kedutaan besarnya di Jakarta sebelum tanggal 30 (Oktober 1967). ...Sikap Cina atas pemutusan hubungan kedua negara oleh Indonesia, (adalah) mengajukan protes keras. Berhubung berbagai langkah serius yang diambil Indonesia, maka Cina mau tidak mau harus mengumumkan penutupan sementara kedutaan besar dan semua konsulatnya di Indonesia, serta menarik seluruh personilnya kembali ke Cina”

Dari kutipan di atas tergambar jelas bahwa sikap Cina atas segala tuduhan yang dilontarkan Indonesia terkait peristiwa G30S PKI dan pembekuan hubungan

¹³ 黄安余 (Huang Anyu), (2005), *新中国外交史 (Sejarah Diplomasi Cina Baru)*, Beijing : 人民出版社 (Penerbit Rakyat), hlm. 153-155

kedua negara. Memperhatikan tahun terbit dari buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2000-an, pandangan RRC tentang hal itu tidak pernah bergeser. Berlandaskan kondisi di atas, jika Indonesia menuntut permintaan maaf dari Cina atas masalah tersebut, maka tuntutan itu adalah sesuatu yang tidak akan dipenuhi Cina.¹⁴

Pengaruh konsep tersebut juga terlihat di era 1980-an. Secara empiris sesungguhnya masing-masing sudah semakin merasakan pentingnya hubungan diplomatik yang normal. Meskipun demikian, keduanya masih saja menunjukkan sikap ‘menahan diri’. Leifer bahkan mengasosiasikan sikap dan peran Indonesia, khususnya di lingkup ASEAN dengan perilaku Cina, yaitu ingin bertindak sebagai ‘*middle kingdom*’ di lingkungan Asia Tenggara.¹⁵ Sedangkan Cina yang saat itu masih berkonsentrasi penuh pada kelangsungan pembangunan ekonominya, cenderung menunjukkan sikap *low profile*.

Sampai awal tahun 1990, di antara negara anggota ASEAN hanya Indonesia, Singapura, dan Brunei, yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Banyak kajian yang mengungkapkan bahwa, persepsi Indonesia yang menganggap Cina sebagai ‘ancaman’ merupakan kendala utama yang menghambat normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Persepsi ‘ancaman’ itu bersumber dari hegemonisme komunis dan pemanfaatan kaum Tionghoa oleh pemerintah Cina. Menurut Indonesia kedua hal itu dapat mengancam stabilitas dan keamanan Indonesia.¹⁶ Tentang hal ini, Gao Weinong menganggap Indonesia mempunyai alasan yang ‘rumit’. Sedangkan sikap yang ditunjukkan Cina dalam menghadapinya adalah tetap selalu “semangat, pengertian, sabar, dan visioner”.¹⁷

¹⁴高伟农 (Gao Weinong), “印度尼西亚与中国关系正常化的动因”, (“Motivasi Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia”), *东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara)*, No. 3 (1989), hlm. 5

¹⁵ Leifer, Michael, (1999), “Indonesia’s Encounters with China and The Dilemmas of Engagement”, In Alastair Iain Johnston & Robert S. Ross (Eds.), *Engaging China. The Management of an Emerging Power*, London: Routledge, hlm.. 99

¹⁶ Hampir semua karya yang membahas hubungan Indonesia-Cina menyebutkan adanya persepsi Indonesia tentang ancaman tersebut, simak di antaranya dalam karya Rizal, 1999 ; Kroef, “Hesitant Normalization : Indonesia’s Slow Boat to China”, *Asian Survey*, Vol. 26, No.8, 1986, hlm. 903-934 ; Suryadinata, “Indonesia-China Relations : A Recent Breakthrough”, *Asian Survey*, Vol. 30, No. 7, 1990, hlm. 682-696 ; Wayne, “Chinese Policy Toward Burma and Indonesia : A Post Mao Perspective”, *Asian Survey*, Vol. 25, No. 9, 1985, hlm. 963-980

¹⁷高伟农 (Gao Weinong), “印度尼西亚与中国关系...”, hlm. 5

Citra Cina sebagai ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara, yang berkaitan dengan keberadaan kaum *Huaqiao*¹⁸ atau para perantau Cina adalah sangat beralasan. Jumlah *Huaqiao* di Asia Tenggara sangat banyak, dan umumnya mereka memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian negara yang ditinggalinya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah Cina acap kali ‘memanfaatkan’ mereka. Wang Gungwu pengamat senior masalah *Huaqiao* mengatakan bahwa,

*“No one could fail to notice that the reforms introduced by Deng Xiaoping from 1979 onwards had led to breathtaking changes. The fact that he looked favourably towards Southeast Asia, and especially towards the economic contributions of those nationals of Chinese descent in each of the Southeast Asia countries, was duly noted.”*¹⁹

“Tidak seorang pun akan gagal dalam mencatat bahwa reformasi yang dicanangkan Deng Xiaoping dari tahun 1979 dan seterusnya telah membawa perubahan yang mencengangkan. Fakta bahwa ia melihat Asia Tenggara sebagai sesuatu yang menguntungkan, terutama terhadap kontribusi ekonomi dari warga keturunan Cina yang ada di setiap negara di Asia Tenggara, adalah sesuatu yang telah tercatat”

Kecenderungan pemerintah Cina untuk memanfaatkan dukungan kaum *Huaqiao* sudah berlangsung sejak zaman kedinastian. Konfusianisme yang merupakan salah satu pilar budaya bangsa Cina, antara lain mengajarkan bahwa setiap individu harus ‘bhakti’ atau *xiao* kepada orang tua dan para leluhurnya. Kaum *Huaqiao* merasa bahwa leluhur mereka ada di Daratan Cina, karena itulah keterikatan mereka kepada tanah leluhur yang secara *de facto* merupakan negara RRC, menjadi sangat besar. Pemerintah RRC dengan sadar sering kali memanfaatkan ikatan emosional itu, dengan menghimbau kaum *Huaqiao* untuk mendukung pembangunan tanah leluhur.²⁰ Bahkan pada era tertentu penggalangan dukungan moral dan finansial dari kaum *Huaqiao*, juga menjadi

¹⁸*Huaqiao* (华侨) adalah sebutan untuk warga negara atau keturunan Cina yang merantau dan hidup di luar Cina

¹⁹ Wang Gungwu, “China and Southeast Asia : Changes in Strategic Perceptions”, dalam Ho Khai Leong, Samuel C.Y. Ku, (Eds.), (2006), *China and South East Asia*, Singapore : ISEAS, hlm. 9

²⁰ Himbauan semacam ini setidaknya sampai awal tahun 2000 masih terus terjadi walaupun secara resmi Cina telah membuat UU kewarga-negaran tahun 1980 yang menolak kewarga-negaraan ganda sekalipun bagi warga yang berketurunan Cina. (lihat Mette Thuno, *The China Quarterly*, No. 168, Desember 2001)

salah satu tugas yang diemban oleh para diplomat Cina yang ditempatkan di luar negeri.²¹

Politik luar negeri RRC mengalami perubahan drastis ketika Mao Zedong setelah Revolusi Kebudayaan menetapkan “Garis Diplomasi Revolusioner”.²² Kebijakan itu memungkinkan Cina untuk mendekati Amerika Serikat (AS), sehingga terjadilah kunjungan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger ke Beijing tahun 1971. Kemudian diikuti pula dengan kunjungan Presiden Nixon, yang menghasilkan komunique Shanghai pada tahun 1972. Sejak itu Cina mulai memperbaiki citranya, antara lain dengan berupaya menjalin hubungan baik dengan semua negara tetangganya di Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN. Sampai tahun 1975 hanya Filipina dan Malaysia yang menyambut baik keinginan Cina tersebut. Saat itu meskipun Malaysia telah meresmikan hubungannya dengan Cina, namun sampai sekitar tahun 1980 masih melarang warganya yang lahir atau mempunyai keluarga di Cina untuk berkunjung ke Cina.²³ Sedangkan Thailand baru meresmikan hubungan diplomatiknya dengan RRC pada tahun 1979.

Pada era itu kepercayaan negara-negara di Asia Tenggara tidak mudah didapatkan RRC, apalagi kemudian hubungan RRC dengan Vietnam memburuk. Vietnam setelah berhasil menyatukan diri, mengambil sikap condong ke Uni Soviet (USSR), dan melakukan invasi ke Kamboja pada akhir tahun 1978. Tindakan Vietnam itu membangkitkan kemarahan RRC, dan membuat konflik Kamboja semakin rumit. Konflik Cina-Vietnam terus meruncing, hingga akhirnya Cina melakukan apa yang disebutnya sebagai serangan ‘memberi pelajaran’ kepada Vietnam pada tahun 1979. Serangan itu menyebabkan

²¹ Kasus Wang Renshu, yaitu Dubes RRC pertama yang ditempatkan di Jakarta, dapat dijadikan contoh nyata dari adanya kebijakan tersebut.

²² Garis Diplomasi Revolusioner ditetapkan Mao Zedong pada awal tahun 1970-an, berdasarkan asumsi bahwa saat itu Amerika sedang defensif sedangkan Uni Soviet semakin ofensif. Isi kebijakan tersebut adalah, cegah penyebaran pengaruh Soviet, biarkan konflik Amerika-Soviet meruncing, biarkan konflik Amerika-negara-negara Asia meruncing, dan manfaatkan hal-hal tersebut untuk membebaskan Taiwan. Konteks internasional pada era itu adalah hubungan segitiga yang konfliktif antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Cina, masing-masing pihak ingin memainkan kartu mereka melawan yang lain. (Lihat Ilpyong, Kim, (Ed.), (1987), *The Strategic Triangle : China, United State, and Sovyet Union*, New York : Paragon Press)

²³ Ku, Samuel C Y, “The Changing Political Economy of Taiwan and China’s Relations with Southeast Asia”, dalam Ho Khai Leong, Samuel C.Y. Ku, (Eds.), (2006), *China and South East Asia*, Singapore : ISEAS, hlm. 271

terputusnya hubungan diplomatik Cina-Vietnam. Sedangkan hubungan RRC dengan Burma/Myanmar tetap terjaga. Sementara perkembangan di Indocina menjadi beban tersendiri bagi RRC. Dalam konflik Kamboja itu, Cina menjadi pendukung faksi Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot.

Memasuki tahun 1980-an format politik luar negeri Cina terlihat semakin moderat dan pragmatis. Meskipun demikian perkembangan di Indocina dan upaya pendekatannya ke Asia Tenggara, ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sementara itu pembangunan dalam negeri Cina yang berlandaskan program Reformasi dan Keterbukaan atau *gaige kaifang*,²⁴ membutuhkan jaminan keamanan dan stabilitas di kawasan sekitarnya. Menyadari hal itu, Deng Xiaoping sebagai motor program *gaige kaifang* meniru kebijakan Zhou Enlai pada tahun 1950, dan menerapkan ‘kebijakan *peripheral*’. Kebijakan itu didasari pemikiran bahwa “Cina membutuhkan tetangga yang stabil di empat sisi”. Cina membutuhkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk dapat menjalankan pembangunan dengan tenang. Dengan demikian menjadi masuk akal bila dalam periode itu Cina berupaya mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara tetangga di sekelilingnya. Pengembangan itu dilakukan melalui berbagai jalur dan tingkatan, yakni jalur resmi di tingkat antar pemerintahan, antar partai, hubungan ekonomi eksternal (kerjasama dalam kelompok/organisasi tertentu), dan jalur damai dalam penyelesaian konflik.²⁵

Program *gaige kaifang* sendiri pada dasarnya merupakan kebijakan membuka Cina bagi dunia luar, terutama sebagai upaya menarik modal asing untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Prioritas politik luar negeri Cina pun, pada tahap itu ditujukan untuk mengamankan pelaksanaan program tersebut. Diplomasi Cina lebih terarah ke negara-negara yang lebih kaya dan lebih maju.

²⁴ Kebijakan Reformasi & Keterbukaan (改革开放 *gaige-kaifang*) ditetapkan pada sidang pleno ke 3 Komite Sentral PKC ke XI bulan Desember 1978, sasaran utamanya adalah mewujudkan cita-cita empat modernisasi (四个现代化 *si ge xiantaihua*) yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Zhou Enlai. Prinsip dasar program yang dimotori Deng Xiaoping ini adalah atau ‘berjalan di atas jalan sendiri’ (走自己的路 *zou ziji de lu*), yang kemudian terus dikembangkan menjadi konsep yang disebut 中国特色的社会主义 *zhongguo te se de shihui zhuyi* atau Sosialisme dengan karakteristik Cina. (赵鹏飞, 肖根黎, Zhao, Pengfei, Xiao Genli, (1989), *共和国的成长* (Pertumbuhan RRC), 北京: 农村读物出版社 (Beijing: Penerbit Bacaan Pedesaan), hlm. 188-197).

²⁵ Ma Ying & Zhao, 2008, “Evolution of Guiding Principles of China’s Foreign Policy”, http://www.siis.org.cn/en/zhuanti_view_en.aspx?id=10012, diunduh pada 4 Juli 2010, pkl. 19.20

Langkah membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga pada era awal *gaige kaifang tersebut*, tujuan utamanya semata-mata adalah untuk tetap terjaganya kawasan yang aman dan damai, serta tetap memungkinkan kaum *Huaqiao* memasukkan modalnya ke Cina. Dari sisi ini terlihat bahwa dalam hal normalisasi hubungan Cina-Indonesia, sikap "semangat, pengertian, sabar, dan visioner" Cina terhadap Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, adalah lebih disebabkan oleh belum mendesaknya kebutuhan Cina. Bukan semata-mata karena Cina 'memahami' kerumitan domestik yang dihadapi pemerintah Indonesia.

Sikap RRC terhadap masalah normalisasi hubungan mengalami perubahan besar setelah terjadinya peristiwa Tiananmen 1989. Peristiwa itu terjadi di tengah euforia keberhasilan Cina dalam menjalankan *gaige kaifang*. Saat itu perekonomian Cina berkembang sangat pesat, sehingga posisi internasional RRC pun semakin diperhitungkan. Ketidakseimbangan pembangunan di berbagai bidang menyebabkan roda perekonomian Cina memanas, yang membuat kehidupan rakyat kembali sengsara. Harga-harga kebutuhan pokok dan inflasi yang tinggi, kesenjangan sosial yang semakin mengemuka, dan semakin mengkrystalnya tuntutan demokratisasi politik yang dimotori oleh kaum intelektual. Semua hal itu menjadi pemicu terjadinya demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh kota besar Cina yang semakin sulit dikendalikan. Pemerintah akhirnya menjalankan tindak kekerasan untuk membubarkan para demonstran. Terjadilah peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989, yang merupakan peristiwa tragis dan sangat berdarah. Banyak kalangan yang menyebutnya sebagai 'pembantaian Tiananmen 1989'. Insiden itu memberi dampak amat buruk bagi perkembangan domestik maupun posisi internasional Cina.

Sebelum pecahnya peristiwa Tiananmen, posisi internasional Cina sudah mulai berkibar. Terlihat dari angka peningkatan nilai ekspor-impor yang mencapai US \$ 82,68 milyar,²⁶ tujuh kali lipat dibandingkan tahun 1977. Jumlah negara yang menjalin hubungan dagang dengannya telah mencapai lebih dari 170 negara. Setelah peristiwa Tiananmen, posisi itu seketika terpuruk hampir mencapai titik nadir. Tindakan pemerintah Cina terhadap para demonstran di

²⁶ IMF Yearbook, 1989, hlm.134

Tiananmen dianggap telah melanggar hak-hak azasi manusia. Reaksi yang diberikan negara-negara di dunia amat beragam, mulai dari sekedar menyesalkan, mengutuk, dan yang paling parah adalah sanksi embargo dan penundaan pemberian bantuan dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan lembaga keuangan dunia. Amerika Serikat bahkan memblokir proses masuknya Cina ke dalam GATT.²⁷

Beratnya situasi yang dihadapi Cina saat itu merupakan fakta yang tak terbantahkan, Cina menjadi terkucil dari komunitas internasional.²⁸ Kalkulasi yang ekstra cermat dan langkah yang lebih kompromistis dalam diplomasi Cina merupakan pilihan yang tak dapat ditawar lagi. Keterpurukan itu semakin terasa menyulitkan bagi RRC, karena perkembangan internasional juga tidak menguntungkan bagi blok sosialis. Runtuhnya tembok Berlin yang diikuti dengan penyatuan Jerman pada tahun 1989-1990, dan runtuhnya Uni Uni Sovyet pada tahun 1991, membuat RRC seperti tertinggal sendirian membawa payung sosialis di dunia.

Dalam kondisi Cina yang demikian terpuruk saat itu, ditambah dengan kondisi internasional yang tidak kondusif bagi Cina, maka arah diplomasi regional semakin menjadi pilihan. Di titik inilah terlihat Cina berupaya secara maksimal menuai hasil sikap positifnya dalam menunggu dan memproses normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Pembicaraan tentang normalisasi hubungan kedua negara memang menjadi semakin hangat sejak kehadiran Menteri Luar Negeri (Menlu) Cina Wu Xueqian di Bandung. Saat itu Wu ke Indonesia untuk memenuhi undangan perayaan 30 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yaitu pada bulan April 1985. Meskipun demikian kehati-hatian masih kental terlihat dalam setiap langkah yang diambil, terutama dari pihak Indonesia.

Bulan Juli 1985 berhasil ditandatangani kesepakatan perdagangan langsung Cina-Indonesia, oleh CCPIT (*China Council for Promotion on*

²⁷ GATT : *General Agreement on Tariffs and Trade* merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 1946, untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang terbuka yang dilandasi prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan saling menguntungkan. Tahun 1995 namanya dirubah menjadi *World Trade Organization* yang disingkat WTO.

²⁸ Robinson Thomas W., David Shambaugh, (Eds.), (1994), *Chinese Foreign Policy : Theory and Practice*, Oxford : Clarendon Press, hlm. 589

International Trade/Zhongguo guojimaoyi zujin weiyuanhui) dengan KADIN (Kamar Dagang Indonesia). Hal itu merupakan sebuah langkah maju, namun belum menjadi petunjuk bahwa langkah menuju normalisasi hubungan diplomatik kedua negara sudah licin. Bahkan sampai enam bulan setelah pembicaraan Presiden Soeharto dengan Menlu Qian Qichen di Tokyo pada bulan Februari 1989, pembicaraan proses normalisasi masih belum berjalan lancar.

Pertemuan Tokyo terjadi ketika Presiden Soeharto dan Menlu Qian Qichen sama-sama menghadiri pemakaman kaisar Hirohito. Permintaan untuk *courtesy call* telah diterima Jakarta sejak sebelum keberangkatan Presiden ke Tokyo. Kemudian Sekretaris Negara ditugaskan untuk menjajagi apa yang akan disampaikan RRC. Presiden Soeharto bersedia menerima Qian setelah merasa yakin bahwa RRC akan memenuhi persyaratan yang diajukan Indonesia untuk terlaksananya normalisasi hubungan tersebut. Persyaratan itu adalah, ketegasan RRC untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh partainya, termasuk tidak memberi bantuan kepada PKI, serta kesediaan kerja sama yang saling menguntungkan.²⁹

Indonesia sendiri sesungguhnya berkepentingan atas normalisasi hubungan tersebut. Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian Indonesia di antaranya adalah, besarnya potensi pasar Cina, dan dukungan yang mungkin diberikan Cina bagi keinginan Soeharto untuk menjadi pimpinan gerakan non blok. Selain itu sikap Cina yang cenderung kooperatif dan lebih menghargai ASEAN maupun Indonesia, juga merupakan faktor penting yang mendorong Indonesia untuk memproses normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.³⁰

Setelah pertemuan Tokyo pada 23 Februari 1989, normalisasi hubungan mendapat kerangka yang lebih definitif. Pertemuan itu antara lain menyepakati bahwa hubungan Cina-Indonesia akan dilandasi lima prinsip Koeksistensi Damai dan Dasa Sila Bandung. Tentang hubungan RRC atau PKC dengan PKI,

²⁹“Maka mulailah kini 'hui fu jiao ji' berjabat tangan dengan Cina” , *Tempo On line*, 4 Maret 1989

³⁰ Bambang Cipto, MA, Dr., (2007), *Hubungan Internasional di Asia Tenggara ; Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 102

Qian juga menegaskan bahwa, Cina sama sekali tidak berhubungan dengan PKI, bahkan sama sekali tidak tahu kalau partai itu masih ada.³¹ Pembicaraan lanjutan untuk mewujudkan normalisasi hubungan itu akan dilakukan melalui perwakilan masing-masing yang bertugas di PBB.

Pernyataan Qian di atas menunjukkan keoptimisan bahwa hasil pertemuannya dengan Presiden Soeharto itu sangat menjanjikan. Ternyata reaksi Jakarta tidaklah terlalu hangat, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas bahkan menyatakan bahwa "...pertemuan Tokyo memang penting, tapi hanya sebuah langkah dari proses yang akan berlangsung bertahap..."³² Sedangkan kalangan militer, dan beberapa kelompok masyarakat Indonesia masih tetap pada posisi mewaspadaikan proses normalisasi hubungan tersebut. Di lain pihak Cina juga terlihat tidak konsisten dengan kebijakan anti ekspansi yang dicanangkannya. Contohnya bulan April 1989 tentara Cina menguasai salah satu gugusan karang (atol) di kepulauan Spratly yang jelas-jelas milik Vietnam. Cina juga tidak peduli atas protes yang dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, maupun Indonesia.³³ Sikap itu menunjukkan bahwa RRC masih menjalankan diplomasi dengan standar ganda, sehingga masih sulit dipercaya. Sementara itu perundingan normalisasi hubungan masih jalan di tempat.

Peristiwa Tiananmen yang memojokkan posisi pemerintah RRC secara internal maupun eksternal, tampaknya telah memberi dorongan yang amat kuat kepada Cina untuk mempercepat terwujudnya normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia. Konferensi Paris pada bulan Agustus 1989 yang membahas penyelesaian konflik Kamboja, telah dimanfaatkan oleh Qian untuk melakukan pertemuan tidak resmi dengan Menlu Alatas. Di sana Qian mengajukan sejumlah usulan untuk mempercepat proses normalisasi. Sejak itu perundingan-perundingan yang membahas normalisasi mulai berjalan lancar. Dalam proses akhir juga terlihat sikap Cina yang sangat akomodatif. Lima butir kesepakatan

³¹钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛：外交十记...*, hlm. 122

³² *Tempo*, 3 Maret 1989, hlm. 16

³³ Kroef, Justus M van der, "Normalizing with China : Indonesia's Policies and Perception", *Asian Survey*, Vol. 26, No.8 , 1986, hlm.29

yang dihasilkan dari pertemuan Beijing pada bulan Juli 1990 juga mencerminkan hal itu. Butir-butir kesepakatan itu adalah sebagai berikut.³⁴

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk meresmikan normalisasi hubungan pada tanggal 8 Agustus 1990 dan sepakat untuk saling mengirim Duta Besar beserta kelengkapannya.
- b. Perdana Menteri Li Peng akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 6-9 Agustus 1990.
- c. Tentang masalah Taiwan, Cina menghargai sikap Indonesia yang tetap menjalankan kebijakan "Satu Cina". Berhubung hal itu merupakan hal sensitif bagi Cina maka akan diupayakan kesepahaman yang lebih mendalam. Jika ada sesuatu yang dianggap perlu untuk didiskusikan lebih jauh, Cina bersedia mengirim tim negosiatornya ke Indonesia untuk merumuskan nota kesepahaman yang lebih rinci yang akan ditandatangani pada kunjungan Li Peng ke Indonesia.
- d. Karena Ali Alatas ingin kedua pihak menandatangani perjanjian perdagangan pada saat kunjungan Li Peng, Cina akan menyiapkan rancangan perjanjian yang akan dipelajari Indonesia.
- e. Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani komunikasi awal tersebut dan melakukan komunikasi pers bersama pada tanggal 3 Juli 1990.

Uraian di atas menggambarkan secara umum perkembangan sikap RRC dalam proses normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Sejumlah kepentingan dan perkembangan internasional yang melingkupi RRC telah memberi pengaruh besar di dalamnya. Perubahan sikap dari yang sabar menanti menjadi lebih proaktif merupakan bagian yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi. Terutama terkait dengan bagaimana RRC mengelola diplomasinya sejalan dengan konsep *mianzi* yang sangat penting dalam budaya Cina. Penelitian dan penulisan disertasi ini akan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya Cina memandang normalisasi hubungan tersebut, dan bagaimana konsep *mianzi* berperan di dalamnya.

³⁴ 钱其琛 (Qian Qichen), (2003), 钱其琛 : 外交十记..., hlm. 131-132 ; *Joint Press Communique*, July 3, 1990

1.2 Rumusan Masalah

Normalisasi hubungan diplomatik Cina–Indonesia terjadi pada tanggal 8 Agustus 1990 di Jakarta. Peristiwa itu diakui oleh kedua belah pihak sebagai peristiwa yang sangat monumental. Pidato Perdana Menteri RRC Li Peng, pada saat jamuan kenegaraan menyambut peresmian normalisasi hubungan Cina-Indonesia, antara lain menyatakan,

*“This historical date marks an end to the past and the beginning of a new era... We firmly believe that the resumption and development of relations between China and Indonesia not only in conformity with the aspirations and interests of our two countries and peoples, but also conducive to peace, stability and development in our region.”*³⁵

”Hari yang bersejarah ini menandai berakhirnya masa lalu dan dimulainya era baru...Kami sungguh yakin bahwa normalisasi dan perkembangan hubungan Cina-Indonesia ini tidak hanya sesuai dengan harapan dan kepentingan kedua negara dan bangsa, tapi juga kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan perkembangan kawasan”.

Sedangkan pidato Presiden Soeharto pada kesempatan yang sama antara lain menyatakan,

*“Important changes have taken place in our respective centuries ... It would be unjust and unrealistic if we, who are living in the present as well as the coming generation, should constantly bear the burden inherited from the past. ... I sincerely hope that the resumption of diplomatic relation between our two countries will not only be beneficial to our countries, but will also serve as our contribution to the creation of stability and peace in our region.”*³⁶

”Perubahan-perubahan penting telah terjadi dalam abad terakhir ini... Adalah tidak adil dan tidak realistis bila kita, yang hidup sekarang ini sebagaimana juga generasi yang akan datang, harus menanggung beban dari masa lalu... Saya sungguh berharap bahwa perbaikan hubungan diplomatik di antara kedua negara, tidak hanya akan menguntungkan bagi kedua negara kita saja, tapi juga merupakan sumbangan kita untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.”

Normalnya hubungan kedua negara memang mendatangkan berbagai harapan, tidak saja bagi bangsa yang bersangkutan tapi juga bagi seluruh dunia. Normalisasi itu pun tidak akan terjadi bila kedua pihak, atau salah satu di antaranya tidak menginginkannya. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui

³⁵“Further on Banquet for Li Peng”, *XINHUA*, August 8, 1990, *FBIS-C-HI-90-153*, hlm. 7

³⁶“Soeharto Addresses Banquet”, *XINHUA*, August 8, 1990, *FBIS-C-HI-90-153*, hlm. 6

bagaimana proses yang mengantarkan terjadinya peristiwa bersejarah tersebut, khususnya dari sudut pandang RRC. Paparan dalam latar belakang menunjukkan adanya perubahan sikap RRC dalam menangani masalah ini. Pada awalnya RRC cenderung bersikap sabar menunggu sampai pihak Indonesia benar-benar merasa siap, namun setelah peristiwa Tiananmen 1989 sikap RRC berubah menjadi cenderung lebih antusias dibandingkan Indonesia. Asumsi tersebut ternyata berbeda dengan pernyataan resmi pihak RRC berkaitan dengan normalisasi hubungan tersebut. Sejumlah pemberitaan di media resmi RRC menjelang peresmian normalisasi, terlihat ingin menegaskan bahwa pihak Indonesia lah yang memulai pendekatan. Bahkan di dalamnya tertangkap pula kesan bahwa, Indonesia lebih berkepentingan atas normalisasi hubungan tersebut dibandingkan RRC.

Contoh pemberitaan semacam itu dapat disimak antara lain dalam berita-berita tentang kunjungan Ali Alatas ke Beijing pada awal Juli 1990. Ditemukan sejumlah artikel yang mengulas tentang ‘siapa yang terlebih dulu melakukan pendekatan’. Salah satu contohnya adalah artikel yang diterbitkan *Xinhua*, yang didalamnya terdapat ungkapan bahwa,

“But diplomatic relations between were then suspended as a result of various causes, However government heads and many statemen in both countries felt this was an abnormal state. In the early 1970’s the Indonesian Government expressed a hope for normalization, and the Chinese Goverbment has held a positive attitude towards rebuilding and developing good neighbourly relations.”

“Tapi hubungan diplomatik di antara kedua negara dibekukan akibat berbagai sebab. Meskipun demikian para pejabat pemerintah dan banyak negarawan di kedua negara merasa hal ini sebagai sesuatu yang tidak normal. Pada awal tahun 1970-an pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk normalisasi, dan pemerintah Cina bersikap positif terhadap pembangunan kembali dan pengembangan hubungan bertetangga yang baik”.³⁷

Sedangkan pemberitaan di Indonesia yang terlacak terbit pada masa jauh sebelumnya yakni pada bulan Januari 1977, mengungkapkan bahwa, “...Menlu Adam Malik sendiri yang pernah mengungkapkan bahwa ia telah dikontaki oleh

³⁷ “XINHUA Roundup”, *Beijing Xinhua*, 1 July 1990, *FBIS-CHI-90-127*, hlm.12

diplomasi-diplomat RRT di PBB, antara lain Duta Besar Huang Hua...³⁸ Secara empiris pernyataan yang terungkap dalam *Xinhua*, khususnya dalam kalimat “Pada awal tahun 1970-an pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk normalisasi ...”, terasa kurang rasional dan meragukan. Keraguan itu semakin kental bila mengingat perkembangan dalam negeri RRC maupun Indonesia, dan perkembangan regional maupun internasional pada awal tahun 1970-an. Saat itu RRC baru terlepas dari revolusi kebudayaan dan sedang berupaya mengembangkan hubungan baik dengan tetangganya. Sementara Indonesia saat itu masih sensitif terhadap masalah keamanan dan stabilitasnya, serta sedang menjalankan pembangunan ekonomi yang lebih banyak didukung oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Contoh lainnya adalah, dalam kolom internasionalnya *Beijing Review* terbitan bulan Februari 1990 memaparkan bahwa, tekanan ekonomi telah menjadikan “keputusan memperbaiki hubungannya dengan Cina pada awal tahun 1989, adalah sebuah langkah yang dibutuhkan Indonesia”.

“... Soeharto has maintain that foreign diplomacy would be of no importance if it did not pursue the goals of obtaining foreign loans and investment or of developing economics and trade relations with other countries.”³⁹

“Soeharto telah menetapkan bahwa diplomasi luar negeri menjadi tidak penting apabila dilakukan tidak untuk mencapai tujuan mendapatkan pinjaman dan investasi asing, atau untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain”.

Secara keseluruhan isi artikel itu terlihat sangat ingin menunjukkan bahwa, Indonesia lebih membutuhkan segera terlaksananya normalisasi hubungan diplomatik tersebut dibandingkan Cina. Padahal menurut Kroef meskipun telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan Tokyo, namun dalam perkembangannya masih ada sejumlah keraguan dalam sikap Indonesia. Terutama berkaitan dengan hubungan RRC dengan gerakan komunis dan masalah kaum Tionghoa.⁴⁰

³⁸ “Sampai kapan kebekuan hubungan Indonesia=RRT akan berlangsung?”, *Merdeka*, 18 Januari 1977, dalam *Dokumentasi Hubungan Diplomatik RI-RRC*, Jakarta : Biro Informasi dan Data CSIS, 5/HI/VII/1980, hlm. 4

³⁹ Weng Wenzhang, “Indonesia : Improving Relations With China”, *Beijing Review*, February 19-25, 1990, hlm. 9

⁴⁰ Lihat Kroef, Justus M van der, “Hesitant ‘Normalization’ : Indonesia’s Slow Boat to China”, *Asian Affairs*, Vol. 16, No. 1 (Spring, 1989)

Dengan kata lain meskipun akhirnya Indonesia mau menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Cina, tapi Indonesia melakukannya tetap dalam sikap waspada dan tidak tergesa-gesa. Pada saat itu pihak militer dan sejumlah tokoh muslim masih menganggap belum waktunya bagi Indonesia untuk menormalisasi hubungan dengan RRC. Persepsi sebagian warga Indonesia bahwa Cina adalah sebuah ‘ancaman’ sampai saat itu masih belum berubah.⁴¹ Temuan data-data semacam ini memunculkan hipotesis bahwa, ‘ada upaya penyangkalan dan sikap kurang jujur ketika RRC menempatkan posisi Indonesia dalam sejarah diplomasinya’.

Penyangkalan dan sikap kurang jujur RRC tersebut dari sudut pandang budaya, dapat memperlihatkan adanya pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya. Terutama terlihat sebagai bagian dari upaya pemerintah RRC untuk ‘menyelamatkan muka’ atau *baoguan mianzi* di hadapan rakyatnya. Artinya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa meskipun setelah peristiwa Tiananmen RRC terpuruk dan butuh teman-teman baru, tapi normalisasi hubungannya dengan Indonesia adalah untuk memenuhi keinginan yang sudah lama diungkapkan Indonesia, bukan sebaliknya.

Berlandaskan hipotesis dan paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan pertanyaan pokok (*Grand Question*) penelitian ini adalah, “Mengapa akhirnya RRC memutuskan untuk segera mewujudkan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, dan sejauh mana pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya?” Pertanyaan utama itu memunculkan pertanyaan yang bersifat lebih rinci yaitu :

- 1) Bagaimana politik luar negeri RRC dan pasang surut hubungannya dengan Indonesia hingga terjadinya pembekuan hubungan diplomatik?
- 2) Kapan dan bagaimana perkembangan upaya pendekatan yang dilakukan RRC hingga munculnya kesepakatan untuk mulai merundingkan proses normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara?

⁴¹ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China:..* , hlm. 159

- 3) Apa saja faktor yang mendorong RRC untuk segera mewujudkan normalisasi hubungan tersebut, dan bagaimana proses pengambilan keputusan tentang kebijakan tersebut?
- 4) Bagaimana pengaruh konsep *mianzi* dalam proses normalisasi hubungan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan pokok maka tujuan utama penelitian ini adalah mengungkapkan motivasi terpenting yang mendorong RRC untuk mewujudkan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, dengan memperhatikan pula pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya. Motivasi itu dapat terungkap secara komprehensif melalui pengungkapan ‘benang merah’ yang menghubungkan proses pembekuan hubungan, dan dinamika upaya pendekatan, dengan politik luar negeri RRC di saat dilakukannya pengambilan keputusan untuk mewujudkan kebijakan normalisasi hubungan tersebut.

Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan rinci yang telah dirumuskan maka secara khusus tujuan penelitian ini adalah, menjawab semua pertanyaan yang telah ditetapkan dengan analisis yang rasional berdasarkan data yang akurat. Dari sana akan muncul fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fakta yang terungkap dalam jawaban-jawaban tersebut akan terhubung satu sama lain dalam suatu paparan yang lancar. Dengan cara itu akan terlihat dengan jelas motivasi utama yang mendorong RRC menetapkan kebijakan untuk mewujudkan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, serta pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejarah hubungan Cina-Indonesia telah mengalami pasang-surut yang dinamis. Telah ada beberapa hasil kajian tentang hubungan diplomatik Cina-Indonesia di era sekitar normalisasi atau sesudahnya, namun kajian-kajian itu umumnya berfokus pada sudut pandang Indonesia. Penelitian dan penulisan disertasi ini diarahkan untuk mengungkapkan motivasi dan kepentingan Cina dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Pendekatannya

diperkuat dengan mempertimbangkan sudut pandang budaya Cina khususnya konsep *mianzi*. Dengan demikian tekanannya ada pada sudut pandang Cina terhadap masalah tersebut.

Secara akademis penelitian ini akan bermanfaat baik bagi pengembangan Ilmu Sejarah dan Studi Cina di Indonesia, juga bagi upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Studi Cina. Hasil penelitian ini akan memperkaya historiografi Cina dan Indonesia. Dalam hal ini adalah historiografi tentang sejarah hubungan Cina–Indonesia secara umum, dan khususnya tentang peristiwa normalisasi hubungan diplomatik RI-RRC. Penelitian ini juga akan berdampak amat positif bagi pengembangan studi Cina di Indonesia, khususnya di FIB UI yang sampai saat ini masih didominasi oleh pengajaran bahasa Cina.

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi politik luar negeri RRC adalah “RRC sebagai Kekuatan yang tidak Puas”. Faktor ini mengemuka sebagai dampak lanjutan dari perlakuan tidak adil yang dilakukan bangsa-bangsa Barat terhadap Cina pada era Perang Candu.⁴² Wujud dari ketidakpuasan itu adalah adanya perilaku diplomasi RRC yang tidak selalu mengikuti norma-norma pergaulan antar bangsa di dunia. Pengamat Barat terutama di Amerika Serikat pada tahun 1980-an, sering mempertanyakan “apakah Cina sudah menjadi bagian dari komunitas internasional?”. Keraguan itu berkembang menjadi semacam ‘upaya’ untuk menarik Cina ke dalam komunitas dan “bermain sesuai aturan.”⁴³ Dalam kasus hubungannya dengan Indonesia, seperti telah terungkap di bagian Rumusan Masalah, bahwa terkesan ada sikap RRC yang ‘kurang jujur’ ketika menempatkan posisi Indonesia dalam sejarah diplomasinya. Sikap itu muncul dalam kemasan retorika ideologi, kepentingan nasional, dan pandangan RRC tentang perkembangan dunia. Dengan kemasan seperti itu maka sikap ‘kurang jujur’ tersebut sering hanya

⁴² Abdullah Dahana, (1986), *The Evolution of China's Policy Toward Malaysia Since 1949*, A Dissertation Submitted to The Graduate Division of The University of Hawaii in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in History, hlm.11-14

⁴³ Johnston, Alastair Iain “Beijing’s Security Behavior in the Asian-Pacific: Is China a Dissatisfied Power?”, dalam Allen Carlson, Peter Katzenstein, J.J. Suh, (Eds), 2004, *Rethinking Security in East Asia: Identity, Power and Efficiency*, Stanford University Press, hlm. 34

tampak secara tersirat, tidak terlihat jelas di permukaan. Di lain pihak, sikap Indonesia dalam pergaulan internasional terlihat cenderung ‘mengalah’ terhadap RRC.

Manfaat praktis dari penelitian dan penulisan disertasi ini adalah terkait erat dengan fenomena hubungan Cina-Indonesia di atas. Hal itu menarik untuk dibuktikan kebenarannya, dan termasuk di dalamnya apakah sikap ‘kurang jujur’ RRC itu ada kaitannya dengan konsep *mianzi* dalam budaya Cina?. Hasil penelitian ini akan memberi pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat dan pemerintah, tentang proses normalisasi hubungan itu serta tentang cara Cina memandang Indonesia, khususnya pada era sekitar normalisasi tersebut. Dengan demikian secara praktis penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia maupun RRC, untuk meningkatkan saling pengertian di antara keduanya. Saling pengertian yang tinggi akan mendorong terjalinnya hubungan diplomatik yang lebih sehat dan berimbang. Hal itu pada akhirnya akan berdampak positif tidak hanya bagi kedua negara tapi juga bagi perkembangan regional maupun internasional.

1.5 Tinjauan Pustaka dan Ruang Lingkup Penelitian

Kajian tentang hubungan Cina-Indonesia telah banyak dilakukan dan diterbitkan dalam bentuk karya tulis populer maupun ilmiah. Meskipun demikian, hasil penelitian dalam bentuk tesis, disertasi, maupun buku, yang di dalamnya secara khusus menyoroti tentang normalisasi hubungan Cina-Indonesia masih belum banyak. Di antaranya yang berhasil penulis temukan adalah dua buah tesis yaitu, karya Peerre-Francois Landry, (1990), *The dynamics of Sino-Indonesian Relation (1980-1990)*, dari University of Virginia, dan karya Ronny Ariuly Hutahayan, (2006), *Understanding Indonesia-China Strategic Relations : an Indonesian Perspective*, dari Nanyang Technological University. Dua karya lainnya yang penulis temukan sudah berbentuk buku adalah, Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China : The Politic of Troubled Relationship*, London, New York : Routledge, dan Kai He, 2000, *Interpreting China-Indonesia Relations : Good Neighbourliness, Mutual Trust and Allround Cooperation*, Australia National University.

Ke empat karya tulis di atas semuanya membahas hubungan kedua negara dari sudut pandang Indonesia. Karya-karya yang juga berkaitan dengan topik hubungan Cina-Indonesia namun secara khusus membahas topik tertentu, seperti tentang etnis Cina di Indonesia, hubungan dagang, hubungan budaya, dan topik-topik lainnya juga banyak ditemukan. Karya tulis yang membahas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia secara khusus dan dari sudut pandang Cina, masih sangat sedikit. Dalam rangka penelitian ini ditemukan dua artikel yang diterbitkan dalam jurnal *Dongnanya Yanjiu* (东南亚研究 - Kajian Asia Tenggara) yaitu,

- 高伟农(Gao, Weinong), “印度尼西亚与中国关系正常化的动因”, (Motivasi Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia), *东南亚研究*, No. 3 tahun 1989
- 黄道根(Huang, Daogen), “中, 印(尼)复交及两国面临世界形势的桃展” (Perbaikan Hubungan Cina-Indonesia dan Tantangan Perkembangan Dunia yang Dihadapi Kedua Negara), *东南亚研究*, No. 4 tahun 1990.

Berlandaskan hasil temuan itu, maka disertasi ini akan melengkapi karya-karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Terutama sebagai kajian sejarah tentang peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dari sudut pandang dan kepentingan Cina. Kekhususan lain dari disertasi ini adalah, digunakannya pendekatan ilmu hubungan internasional dengan memperhatikan pengaruh nilai-nilai budaya khususnya yang tercakup dalam konsep *mianzi* di dalamnya.

Ruang lingkup disertasi ini adalah sejalan dengan pertanyaan utama dan pertanyaan rincian yang telah dirumuskan. Dari sana terlihat bahwa fokus penelitian ini adalah motivasi RRC yang tercermin dalam berbagai hal yang berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Kata ‘normalisasi’ menunjukkan ada sesuatu yang tidak normal yang harus dinormalkan kembali. Dalam hal ini adalah hubungan diplomatik Cina-Indonesia, yang membeku selama sekitar 23 tahun. Pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor yang menyebabkan membeku atau tidak normalnya

hubungan tersebut, akan memudahkan penjelasan mengapa diperlukan normalisasi. Pasang surut upaya pendekatan yang dilakukan merupakan proses yang tak dapat dipisahkan dari terwujudnya peristiwa normalisasi hubungan itu. Sedangkan inti penelitian dan penulisan disertasi ini mengarah pada faktor-faktor pendorong, dan proses normalisasi itu sendiri. Selain itu, cara pandang yang berbasis budaya, dan berbagai peristiwa yang menunjukkan korelasi antara normalisasi hubungan tersebut dengan perilaku diplomasi kedua belah pihak, juga merupakan bagian inti dari disertasi ini.

Ringkasnya, ruang lingkup disertasi ini akan berawal dari pembahasan tentang kebijakan luar negeri RRC dalam periode 1949-1969. Di bagian ini perhatian khusus ditujukan kepada kebijakan yang terkait dengan Indonesia, dan interaksi di antara keduanya hingga terjadinya pebekuan hubungan diplomatik. Selanjutnya dibahas pasang surut upaya pendekatan untuk memperbaiki hubungan yang mulai terlihat pada pertengahan tahun 1970-an. Pembahasan di bagian ini mencakup hingga munculnya kesediaan Presiden Soeharto untuk membicarakan normalisasi hubungan itu pada tahun 1989. Sedangkan berbagai perkembangan keadaan yang berkaitan dengan proses perundingan tentang normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, yang terjadi pada periode Februari 1989-Agustus 1990, menjadi bahasan berikutnya dan merupakan fokus atau inti pembahasan disertasi ini.

Dalam upaya menemukan motivasi Cina yang paling kuat untuk menormalisasi hubungannya dengan Indonesia, pendekatan budaya melalui konsep *mianzi* juga dilakukan secara intensif pada bagian yang menjadi fokus pembahasan tersebut. Cara pembuktian terbalik juga dilakukan, yaitu dengan menunjukkan data-data manfaat langsung yang diraih Cina setelah normalisasi hubungan tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan peningkatan peran Cina di lingkup regional maupun internasional. Data-data tersebut akan menjadi bagian pembahasan yang bersifat integral. Dengan demikian dari sisi waktu, ruang lingkup penelitian ini adalah berbagai peristiwa sejarah hubungan Cina-Indonesia, pada periode tahun 1949 hingga tahun 1990-an, dengan fokus utama pada periode 1989-1990.

1.6 Metode Penelitian dan Sumber

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup rangkaian proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian dan penulisan sejarah pada dasarnya adalah upaya untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Penelitian sejarah memanfaatkan sarana penata waktu, tempat, dan pokok persoalan atau topik, sebagai suatu cara untuk membantu memilih data yang relevan, mempertalikan data satu dengan yang lain dan menentukan batas-batas bagi topik yang dipilih.⁴⁴ Semua itu akan menentukan hasil rekonstruksi dalam mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya atau suatu 'kebenaran'. Data yang memadai dari segi kuantitas, dan sah dari segi kualitas akan semakin memungkinkan untuk mendekati 'kebenaran' tersebut.

Proses heuristik atau pengumpulan data dimulai dengan mempertimbangkan dua hal pokok. Pertama, tujuan pokok penelitian ini adalah mengungkapkan motivasi dan kepentingan utama Cina dalam normalisasi, dengan memperhatikan peran konsep *mianzi* di dalamnya. Artinya sumber-sumber primer seharusnya bersumber dari Cina. Ke dua, peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Meskipun demikian dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peristiwa itu belum semuanya boleh dipublikasikan. Dokumen negara yang bersifat 'terbatas' atau 'rahasia' biasanya baru dibuka untuk umum setelah 30 tahun, demikian pula di Cina maupun di Indonesia. Hal itu menyebabkan upaya untuk mendapatkan sumber primer yang berbentuk surat atau dokumen diplomatik tersebut tidaklah mudah. Mengacu pada kondisi di atas, maka harus dilakukan upaya untuk mensiasati kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam memperoleh data-data yang akurat.

Ada sebuah kenyataan menarik dalam meneliti sejarah diplomasi Cina. Politik luar negeri Cina adalah "mempesona tapi membuat frustrasi", demikian ungkapan Allen Whitting, dalam pengantar buku *Interpreting Chinese Foreign*

⁴⁴ Holsti, K.J. (1988), *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*, (M.Tahir Azhary, Penerjemah), Jakarta : Penerbit Erlangga, hlm.15

Policy.⁴⁵ ‘Mempesona’, karena Cina sebagai bangsa, memiliki sejarah panjang yang penuh warna dan makna, namun Cina pun membuat orang luar termasuk para peneliti ‘frustasi’ karena tidak mudah untuk memahaminya. Kendala utama adalah faktor bahasa dan ketertutupan bangsa Cina, sehingga sangat sulit untuk mendekati atau mendapatkan sumber primer. Menghadapi masalah ini maka jalan keluarnya adalah menemukan sumber yang paling bisa dipercaya yang bisa didapatkan, dan atau melakukan kritik sumber yang lebih intensif.

Berdasarkan pada kondisi di atas, maka pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan mengarahkan pencarian ke media massa RRC yang terbit pada sekitar tahun peristiwa. Mempertimbangkan bahwa sumber harus mewakili suara resmi pemerintah Cina maka pilihan pertama adalah, *Renmin Ribao* (Harian rakyat) yang dikenal sebagai corong pemerintah Cina, *Xinhua* yaitu Kantor Berita Cina, *Hong Qi* (Bendera Merah) yang telah berganti nama menjadi *Qiushi* (Mengungkap Kebenaran) yang merupakan media Partai Komunis Cina (PKC), *Lishi Yanjiu* (Kajian Sejarah) yang merupakan jurnal ilmu sejarah terkemuka di Cina, dan *Peking Review* yang kemudian menjadi *Beijing Review* yaitu majalah mingguan berbahasa Inggris yang dikelola oleh PKC.

Pencarian data tahap pertama dilakukan di perpustakaan *National University of Singapore (NUS)*, terutama di bagian Koleksi Cina dan perpustakaan *East Asian Institute (EAI-NUS)*. Dari sini diperoleh sejumlah berita dan opini yang terbit di *Renmin Ribao*, *Qiushi*, dan *Beijing Review*. Dalam koleksi *Lishi Yanjiu* terbitan tahun 1989-1990 tidak ditemukan artikel dengan topik terkait, sedangkan arsip berita *Xinhua* juga tidak ditemukan. Sejumlah artikel dengan topik terkait ditemukan di jurnal *Dongnanya Yanjiu* (Kajian Asia Tenggara), *Beijing Shihui Kexue zazhi* (Majalah Ilmu Sosial Beijing), dan *Waijiao Pinglun* (Telaah Hubungan Luar Negeri).

Penelusuran sumber selanjutnya dilakukan di Perpustakaan *Chinese University of Hongkong*. Di sana didapatkan data dari *Foreign Broadcast Information Service (FBIS)*. Data FBIS mencakup berita dan opini yang terbit pada bulan Februari 1989, Maret 1990, dan Juni – Agustus 1990. Sumber-

⁴⁵ Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy ; The Micro-Macro Linkage Approach*, Oxford, New York : Oxford University Press, hlm. ix

sumber FBIS adalah *Renmin Ribao*, *Renmin Ribao Overseas Edition*, *Zhongguo Xinwen Shi*, *China Daily*, *Xinhua News*, *Beijing International Service*, *Beijing Domestic Service*, *Beijing Xinhua Domestic Service*, *Wen Wei Bao*, *Da Gong Bao*, *Xin Wan Bao*, *Hongkong The China Morning Post*, *Hongkong Standard*, dan *Tokyo KyodoNews*.

Berhubung topik penelitian menyangkut kepentingan dua negara, maka pengumpulan data harus memperhatikan pula kemungkinan pengungkapan data yang berbeda. Data-data dari Indonesia juga dibutuhkan sebagai petunjuk, pembandingan, maupun penguatan atas data-data yang diperoleh. Pencarian data dari sumber primer di Jakarta mula-mula dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tapi tanpa hasil. Kemudian dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan RI, menghasilkan lima salinan naskah Perjanjian dan satu Notulen Diskusi. Semua naskah itu berkaitan dengan proses normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, yang ditandatangani oleh wakil negara masing-masing. Naskah-naskah tersebut adalah, *Joint Press Statement*, Jakarta December 9, 1989, *Financial Agreed Minutes*, Beijing March 28, 1990, *Financial Agreement*, Beijing July 2, 1990, *Joint Press Communique*, *Government Joint Communique*, Beijing July 3, 1990, *MoU on The Resumption of Diplomatic Relation*, Jakarta August 8, 1990, dan *Trade Agreement*, Jakarta, August 8, 1990.

Selain itu digunakan juga *Dokumentasi Hubungan Diplomatik RI-RRC*, yang merupakan kumpulan berita tentang hubungan Cina-Indonesia di tahun 1977-1980 yang dimuat di berbagai media massa Indonesia. Dokumentasi tersebut diterbitkan oleh *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* pada tahun 1980. Pidato ataupun pernyataan pemimpin Cina Deng Xiaoping yang terangkum dalam buku, *Deng Xiaoping Wenxuan* (Karya Terpilih dari Deng Xiaoping) karena bentuk awalnya merupakan dokumen negara, maka dapat dikategorikan sebagai sumber primer, demikian pula dengan buku *Mao Zedong Xuanju* (Kumpulan Karya Terpilih dari Mao Zedong).

Buku berjudul *Qian Qichen : Waijiao Shiji* (Qian Qichen : Sepuluh Catatan Diplomasi), khususnya bab 4 yang berjudul “*Dongjingde ‘zangli waijiao’*” (‘Diplomasi Upacara Pemakaman’ Tokyo). Buku ini ditulis oleh

mantan Menteri Luar Negeri RRC Qian Qichen, yang menangani langsung proses normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Atas pertimbangan itu maka buku ini juga dijadikan sumber utama. Penetapan itu diperkuat oleh keterangan yang tertulis dalam Kata Pengantar buku tersebut, bahwa “semua tulisan didalam buku itu dibuat sesuai arsip dan catatan pribadi yang dibuat Qian selama menjalankan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri Cina”. Artikel “*Yinni zhengzai yingjie Zhong Yin fujiiao*” (Indonesia Sedang Menyambut Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia), yang terbit dalam *Lianhe zaobao* (Harian Pagi ‘Persatuan’), di Singapura, 25 Desember 1989, juga dijadikan sumber primer. Hal itu dikarenakan artikel tersebut merupakan satu-satunya tulisan yang memuat data lengkap hasil perundingan Jakarta pada bulan Desember 1989.

Selain data yang diperoleh dari sumber primer juga digunakan data dari sumber sekunder yang membahas topik terkait. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, karya tulis di jurnal ilmiah, koran, majalah, maupun yang diunduh dari internet. Sumber sekunder diperlukan untuk mendukung analisa dan atau sebagai pembanding atas data yang diperoleh dari sumber lainnya. Fungsi lain dari sumber sekunder adalah sebagai rambu-rambu pengingat. Secara umum karya-karya yang dijadikan sumber sekunder tersebut diterbitkan dalam rentang waktu yang jauh dari saat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan terhadap sumber semacam itu diperlukan, agar tidak terjadi pengulangan materi atau hasil penelitian yang tumpang tindih. Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia bahkan menganjurkan untuk menggunakan referensi terbaru sampai 70 %, atau setidaknya harus ada referensi yang diterbitkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.⁴⁶

Tahap kritik sumber merupakan tahapan yang dilakukan selanjutnya, setelah diperolehnya data-data sebagaimana terurai di atas. Pekerjaan di tahap ini butuh kewaspadaan yang tinggi, mengingat bahwa data yang akan dijadikan sumber primer sebagian besar adalah yang dimuat dalam media massa. Terbitan yang berbentuk berita, hasil wawancara, tajuk atau editorial, maupun opini

⁴⁶ Universitas Indonesia, (2009), *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*, Depok, hlm. 6

publik pasti tidak terlepas dari kepentingan penerbitnya. Kritik dimulai dengan meneliti siapa penerbit media tersebut, untuk mengetahui arah dan kepentingannya, sehingga mempermudah proses selanjutnya yaitu interpretasi atas data yang tersaji. Langkah kritik selanjutnya adalah membandingkan data dari satu media dengan data dari media lainnya, dan atau dengan dokumen terkait, juga dengan data dari sumber sekunder. Pemeriksaan dan kritik data semacam ini menimbulkan keyakinan bahwa data yang diperoleh adalah tinggi tingkat akurasi atau sahih.

Dari penelitian tentang penerbit media massa yang dijadikan sumber primer tersebut, diperoleh hasil bahwa semua media massa tersebut di atas kecuali *Tokyo Kyodo News*, merupakan media resmi atau paling tidak berafiliasi dengan pemerintah Cina dan atau PKC. Hal itu mendukung keyakinan bahwa data yang tersaji adalah mewakili suara pemerintah Cina. Mengingat bahwa pemerintah Cina dikenal sebagai pemerintahan yang cenderung tertutup, maka data-data terbuka itu belumlah cukup untuk disebut sebagai fakta. Pekerjaan di dua tahap selanjutnya yaitu interpretasi dan sintesa, mengantarkan data itu menjadi fakta sejarah.

Interpretasi data merupakan tahap ke tiga dari rangkaian metode sejarah yang harus dijalankan. Tahap ini menuntut ke hati-hatian agar tidak terjebak ke dalam keberpihakan. Topik penelitian ini menyangkut dua negara yang mempunyai kepentingan dan kecenderungan perilaku diplomasi yang berbeda. Keberpihakan yang tidak terkendali akan membuat hasil penelitian ini tidak berarti, bahkan mungkin dapat merugikan si peneliti sendiri, atau bagi salah satu atau kedua pihak yang diteliti. Kondisi tersebut menyebabkan di tahap interpretasi data ini, dibutuhkan instrumen penelitian lainnya, yaitu pendekatan dan konsep yang relevan dengan masalah normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Berbagai instrumen itu membantu peneliti dalam mendudukkan data-data yang telah didapat ke dalam analisis yang rasional. Rasionalisasi data semacam itu mempermudah pemahaman dan melancarkan paparan dalam tahap sintesa. Sintesa atau penulisan hasil penelitian atau historiografi, merupakan pekerjaan tahap akhir dari penelitian ini.

Historiografi atau penulisan sejarah berlandaskan hasil penelitian dalam bentuk paparan analisis yang rasional akan mengantarkan data-data yang sudah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasikan, menjadi fakta sejarah. Penulisan hasil penelitian dalam disertasi ini menggunakan kaidah penulisan sejarah naratif yang didefinisikan oleh M.C. Lemon. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penulisan sejarah naratif yaitu, 1) bersumber dari “apa yang terjadi”, 2) dipaparkan dalam level “Ini lalu (menyebabkan, menghasilkan, dll) Itu, dan seterusnya”, dan 3) tidak semata-mata “kronologi”. Dengan demikian sejarah naratif bertolak dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi, bukan fiksi. Selain itu dalam ilmu sejarah ada keterikatan yang tak terlepas antara “peristiwa, naratif, dan perubahan”. Sejarah naratif mengungkapkan situasi atau sesuatu yang berubah yang disebabkan oleh terjadinya suatu peristiwa.⁴⁷ Penulisan hasil penelitian tentang normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia ini, kelak dapat menjadi fakta baru, dan atau melengkapi fakta yang sudah terungkap sebelumnya, dan atau memancing minat peneliti lain untuk melakukan kajian yang lebih dalam lagi tentang topik terkait atau berbagai masalah lain yang melingkupinya.

1.7 Pendekatan dan Konsep yang digunakan

Berhubung topik penelitian ini merupakan bagian dari sejarah diplomasi maka pendekatan yang digunakan adalah dari disiplin ilmu hubungan internasional. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan ‘keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan politik luar negeri Cina’. Pendekatan ini dikembangkan oleh Zhao Quansheng. Sedangkan untuk mempertajam hasil penelitian, juga digunakan pendekatan budaya yaitu dengan menggunakan konsep *mianzi*. Sejumlah hasil penelitian berlandaskan disiplin ilmu komunikasi dan psikologi, menunjukkan bahwa dalam masyarakat Cina, konsep *mianzi* berpengaruh besar terhadap hasil interaksi dengan ataupun antar personal. Sepanjang pengetahuan penulis, konsep ini belum pernah digunakan secara khusus dalam sebuah penelitian sejarah diplomasi. Meskipun demikian, diplomasi adalah bagian dari keahlian berkomunikasi, maka konsep *mianzi*

⁴⁷ Lemon, M.C. (2003), *Philosophy of History ; A guide for Students*, London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, hlm. 298-301

dapat digunakan dalam penelitian ini. Penjabaran yang lebih terinci tentang pendekatan dan konsep yang digunakan dibuat dalam bab tersendiri, yaitu dalam bab 2 dari disertasi ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 dari disertasi ini merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan ruang lingkup penelitian, metode dan sumber penelitian, gambaran ringkas tentang pendekatan dan konsep yang digunakan, serta sistematika penulisan. Rincian pendekatan dan konsep yang digunakan dipaparkan dalam bab 2 yang diberi judul “Kerangka Teoritis dan Konseptual”. Sedangkan bab 3 membahas politik luar negeri RRC di tahap awal, dengan penekanan pada kebijakan RRC terhadap Indonesia sampai terjadinya pembekuan hubungan diplomatik.

Bab 4 merupakan pembahasan tentang politik luar negeri RRC pasca revolusi kebudayaan, dan dinamika upaya pendekatan yang dilakukan oleh RRC terhadap Indonesia. Pembahasan mencakup hingga tercapainya kesepakatan Tokyo pada bulan Februari 1989. Dilanjutkan dengan bab 5 yang merupakan fokus utama disertasi ini. Di dalamnya dibahas kebijakan RRC tentang normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, baik dalam kerangka pendekatan keterkaitan mikro-makro maupun dari sudut pandang konsep *mianzi*.

Bab 6 merupakan paparan yang secara khusus mengulas pengaruh konsep *mianzi* terhadap berbagai kebijakan Cina terhadap Indonesia, dalam kurun waktu 1950-1990. Sedangkan bab 7 akan menjadi bab penutup, yang berisi kesimpulan penelitian secara keseluruhan, dan catatan reflektif tentang hubungan Cina-Indonesia. Catatan itu dimaksudkan sebagai sumbang saran baik bagi pengembangan keilmuan yaitu ilmu sejarah dan studi Cina, maupun bagi kemajuan hubungan di antara kedua negara dan bangsa, yaitu Cina dan Indonesia.

BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan topik normalisasi hubungan diplomatik di antara dua negara yaitu Cina dan Indonesia, sehingga penelitian ini berada pada ruang lingkup sejarah diplomasi. Menurut Akira Iriye metodologi dan pendekatan dalam meneliti sejarah diplomasi dapat dibagi dalam empat katagori. Pertama pendekatan tradisional yang mengandalkan kepada penelitian terhadap arsip dua negara atau lebih (multi arsip). Ke dua, pendekatan yang berorientasi domestik, yang memperhatikan pengaruh tekanan atau perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri terhadap politik luar negeri suatu negara. Ke tiga, pendekatan yang lebih sistemik yaitu menganalisis diplomasi suatu negara dalam kaitan dengan perubahan di dunia secara keseluruhan. Sedangkan pendekatan ke empat disebut sebagai pendekatan budaya atau pendekatan intelektual, yang melihat hubungan internasional sebagai hubungan intelektual. Di sini sejarawan dituntut untuk memahami budaya negara-negara yang ditelitinya dan membandingkannya, sehingga dapat memahami persepsi bangsa yang satu terhadap bangsa yang lainnya.⁴⁸

Empat pendekatan di atas bersifat sangat spasial. Apabila dalam penelitian hanya menggunakan salah satunya saja akan beresiko tidak terungkapnya kebenaran secara utuh. Sementara bila menggabungkan keempat pendekatan di atas akan menyebabkan penelitian menjadi rumit dan tidak fokus. Sedangkan topik penelitian ini adalah sejarah hubungan Cina-Indonesia dengan segala dinamika dan keunikannya. Di samping itu penelitian juga difokuskan pada peristiwa normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang bersifat lebih komprehensif, yang memungkinkan pengungkapan fakta secara lebih akurat dan utuh.

Sejarah sebagai peristiwa objektif akan mencakup segala hal yang dipikirkan, dikatakan, dilakukan, dirasakan, dan dialami oleh manusia.⁴⁹ Peristiwa sejarah itu bukan hanya kejadian fisik tapi juga merupakan peristiwa bermakna

⁴⁸Iriye, Akira, "What Is Diplomacy History...?", dalam Gardiner, Juliet, (Ed.), (1988), *What Is History Today ...?*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, and London : Macmillan Education. INC hlm. 137- 139

⁴⁹Kuntowijoyo, (1994). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta ; Tiara Wacana, hlm 17

yang mengandung proses pertumbuhan, kejayaan, dan keruntuhan. Rekonstruksi peristiwa sejarah diharapkan dapat mengungkap berbagai makna yang melingkupi peristiwa tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi peradaban manusia di masa kini maupun masa yang akan datang. Terkait dengan berbagai tuntutan tersebut dan untuk menjaga nilai keilmiahannya, dalam pemberian makna atas faktor-faktor yang melingkupi peristiwa, peneliti harus menggunakan konsep, teori, ataupun pendekatan, dari ilmu-ilmu lain yang relevan.⁵⁰ Berlandaskan pemikiran itu maka, dalam penelitian ini penulis memanfaatkan pendekatan dari Ilmu Hubungan Internasional (HI) yang relevan, yaitu 'pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan kebijakan luar negeri Cina'. Pendekatan ini dikembangkan oleh Zhao Quansheng, seorang peneliti yang ahli dalam politik luar negeri Cina.

Pendekatan keterkaitan mikro-makro dapat mengarahkan penelitian ini kepada pengungkapan fakta secara konprehensif dan ilmiah. Meskipun demikian, perilaku diplomasi Cina sering sulit ditebak karena ada keunikan tersendiri di dalamnya. Selain itu dalam perjalanan sejarah hubungan diplomatik Cina-Indonesia yang diawali pada tahun 1950, juga ada hal-hal yang bersifat khas. Keunikan dan kekhasan yang berkaitan erat dengan budaya masing-masing, menyebabkan analisis terasa kurang tajam bila hanya menggunakan pendekatan yang dikembangkan Zhao saja. Dalam peristiwa normalisasi hubungan, pengaruh budaya yang tercermin dari nilai-nilai yang melekat pada aktor atau pelakunya baik di tingkat penentu kebijakan maupun eksekutor, juga berpengaruh terhadap proses dan hasil perundingan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang peneliti politik luar negeri Cina bahwa, "budaya dan perkembangan sosial di RRC pasti berpengaruh sangat dalam terhadap politik luar negeri Cina."⁵¹ Nilai-nilai budaya dalam masyarakat Cina telah diwariskan selama ribuan tahun. Walaupun dewasa ini generasi muda Cina mungkin terlihat mengabaikannya, namun akar nilai-nilai itu

⁵⁰ Kartodirdjo, Sartono, (1992), *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : PT. Gramedia, hlm. 3

⁵¹ Wang Jisi, "International Relations Theory and the Study of Chinese Foreign Policy : A Chinese Perspective", dalam Robinson & Shambaugh. (Ed.), 1994, *Chinese Foreign Policy : Theory and Practice*, Oxford : Clarendon Press, hlm.505

pasti tetap tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai budaya tersebut termanifestasikan dalam berbagai cara, tingkatan, serta bentuk yang berbeda-beda.⁵²

Berlandaskan hal itu, maka konsep *mianzi* digunakan untuk mempertajam analisis atas rangkaian proses perundingan tersebut. Konsep *mianzi* mengandung makna reputasi, kehormatan, kewibawaan, dan kepercayaan. Semua itu merupakan unsur nilai yang amat penting dalam budaya masyarakat Cina yang bersifat komunal. Berhubung maknanya menyangkut kehormatan diri, maka konsep ini berada pada ranah etika atau sopan santun dalam hubungan sosial antar individu. Hal itu pula yang menyebabkan konsep ini biasanya dikaji dalam ruang lingkup ilmu komunikasi dan psikologi, khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan orang Cina.

Topik penelitian ini adalah normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Dalam proses normalisasi hubungan tersebut, komunikasi di antara kedua belah pihak merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan, dan faktor psikologis juga berpengaruh di dalamnya. Oleh karena itu menggunakan konsep *mianzi* untuk menganalisis proses perundingan yang membahas normalisasi hubungan kedua negara, adalah sebuah pilihan yang tepat. Ditambah lagi dengan adanya keunikan yang mewarnai hubungan Cina-Indonesia, maka konsep ini sangat berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atas perilaku maupun hasil-hasil perundingan. Khususnya, dalam upaya mengungkapkan motivasi utama yang mendorong RRC untuk mewujudkan normalisasi tersebut. Sejauh penelitian yang dilakukan berlandaskan topik disertasi ini, belum ada penelitian sejarah yang secara khusus menggunakan konsep *mianzi* untuk menganalisis sebuah peristiwa. Meskipun demikian, alasan-alasan yang telah terurai di atas menunjukkan bahwa penggunaan konsep *mianzi* dalam penelitian ini adalah sangat relevan dan mungkin dilakukan.

⁵²Wang Gungwu, "The Cultural Implication of the Rise of China On the Region", dalam Ryosei, Konkubun, Wang Jisi, (Eds.). (2004), *The Rise of China and a Changing East Asian Order*, Tokyo, New York : Japan Center for International Exchange (JCIE), hlm. 86-87

2.1 Pendekatan Keterkaitan Mikro-Makro untuk Menginterpretasikan Politik Luar Negeri Cina

Dalam paparan sebelumnya, telah diungkapkan bahwa meneliti politik luar negeri Cina itu penuh tantangan. Pernyataan Wang Jisi berikut ini menegaskan pandangan tersebut,

*“... I do believe that there are distinctive Chinese approaches to observing international politics in general and that Chinese international relations specialists are keen to learn how Chinese foreign policy is interpreted in the West.”*⁵³

"...Saya percaya ada perbedaan antara pendekatan Cina dalam mengamati politik internasional secara umum dengan para spesialis hubungan internasional yang dengan tekun mempelajari bagaimana politik luar negeri Cina diterjemahkan di Barat."

Bahkan Lampton menggambarkan bahwa, dewasa ini memang banyak perubahan dalam perilaku diplomasi Cina, namun tetap tidak mudah memahaminya. Dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri Cina "...tangan kiri pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan".⁵⁴ Pendapat-pendapat seperti di atas menegaskan pandangan bahwa politik luar negeri Cina itu tertutup dan unik. Sejalan dengan retorika yang mengedepankan keunikan Cina, muncul kelompok yang ingin membangun teori-teori HI berkarakteristik Cina.⁵⁵ Bahkan muncul pula retorika tentang kebangkitan 'mazhab Cina'⁵⁶ dalam studi Hubungan Internasional. Berkembangnya pemikiran tersebut adalah berkaitan dengan kenyataan bahwa, menggunakan teori dan pendekatan HI yang berkembang di Barat untuk menganalisis politik luar negeri Cina hasilnya sering tidak akurat.

Zhao Quansheng adalah salah satu ahli politik luar negeri Cina yang punya keyakinan bahwa Cina akan terus melakukan perubahan besar dengan wajah dan caranya sendiri. Hal itu mendorongnya mengembangkan pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan politik luar negeri Cina. Dengan

⁵³ Wang Jisi, "International Relations...", hlm. 481

⁵⁴ Lampton, David M., (Ed). (2001), *The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the era of Reform, 1978-2000*, Stanford, California : Stanford University Press, hlm. 2

⁵⁵ Song, "Building International Relations Theory with Chinese Characteristics", *Journal of Contemporary China*, , 10 (26), 2001, h. 61

⁵⁶ Wang Yiwei, "Akhir Teori Hubungan Internasional dan Bangkitnya Mazhab Cina", dalam Asrudin & Mirza Jaka Suryana, (Eds.), 2009, h. 385-405

pendekatan ini peneliti diharapkan dapat mendefinisikan perubahan besar tersebut, dan menunjukkan wajah dan cara yang spesifik Cina. Tidak hanya dalam perilaku politik luar negerinya tapi juga dalam politik domestik yang berpengaruh terhadap politik luar negeri Cina.⁵⁷ Pendekatan yang dikembangkan Zhao dalam bukunya yang berjudul *Interpreting China Foreign Policy*, adalah sejalan dengan teori studi HI klasik yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz.

Menurut Waltz, dalam kaitan pertanyaan “dimanakah dapat ditemukan sebab-sebab terjadinya perang?”, jawaban atas pertanyaan itu bisa sangat variatif. Meskipun demikian di antara berbagai variasi tersebut, jawaban dapat dikategorikan dalam tiga sumber yaitu, “di antara manusianya, di antara level masing-masing negara terkait, dan di dalam sistem antar negara”.⁵⁸ Perang dan damai adalah situasi atau permasalahan yang menyangkut hubungan antar negara atau hubungan internasional. Analisis pengambilan keputusan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lainnya untuk memahami penyebab terjadinya permasalahan perang dan damai tersebut, dapat dilakukan dalam tiga level. Ketiga level tersebut adalah, level individual, negara (internal), dan sistem internasional (eksternal). Persoalannya adalah, “analisis pada unit atau level yang mana yang paling tepat untuk mempelajari kebijakan luar negeri suatu negara?”. Pertanyaan itu membuat pendekatan yang berkembang di seputar teori klasik tersebut terbelah dalam dua kelompok yaitu “Analisis Level Tunggal” dan “Analisis Multi Level” (*single & multi-level analysis*).⁵⁹

Dalam analisis level tunggal, penentu kebijakan adalah faktor internal (*domestic determinant*), atau faktor eksternal (*international constraints*), atau faktor tokoh (*decision makers influence*). Proses di masing-masing level itulah yang menjadi fokus penelitian. Hasil analisis semacam ini ternyata mempunyai banyak kelemahan, terutama karena pastilah terlalu 'naif' bila suatu kebijakan luar negeri ditentukan hanya dengan mempertimbangkan satu faktor saja. Analisis multi level meneliti fenomena yang berkaitan di berbagai level, guna mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap atas ditetapkannya satu kebijakan luar negeri suatu

⁵⁷ Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy ; The Micro-Macro Linkage Approach*, Oxford, New York : Oxford University Press, hlm. 33

⁵⁸ Waltz, Kenneth, (1959), *Man, The State, and War: a Theoretical Analysis*, (With a new Preface, 2001), New York : Columbia University Press, hlm. 14

⁵⁹ Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy....*, hlm. 9.

negara. Salah satu pendekatan yang berbasis analisis multi level adalah pendekatan “Keterkaitan Internasional-Domestik” yang dikembangkan oleh James Rosenau (1969) dalam bukunya yang berjudul *Linkage Politics : Essay on The Convergence of National and International System*. Pendekatan itu menganalisis kombinasi pengaruh perkembangan internasional dan domestik untuk menjelaskan politik luar negeri satu negara.

Menurut Zhao, pendekatan Keterkaitan Internasional-Domestik sendiri dapat dikatakan sebagai hasil dari pengembangan pendekatan multi disiplin yang disebut “Integrasi Mikro-Makro”. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan, terutama karena meskipun sistem internasional dan domestik berbeda satu sama lain, tapi keduanya ada pada level yang sama yaitu level makro. Cara seperti itu menyebabkan ada bagian yang tereleminir dalam prosesnya yaitu, interaksinya dengan para pengambil keputusan di level mikro. Kondisi itu pula yang menjadi kelemahan teori-teori politik dunia, yakni cenderung mengabaikan keterkaitan dinamika level makro dengan level mikro. Dengan kata lain pendekatan keterkaitan internasional-domestik kurang masuk ke level mikro. Berbagai kelemahan itulah antara lain yang menyebabkan Zhao Quansheng kemudian mengembangkan pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan politik luar negeri Cina.

Berkaitan dengan kesulitan dalam 'menginterpretasikan' politik luar negeri Cina, pendekatan keterkaitan mikro-makro dikembangkan sebagai upaya menutupi kurangnya kekuatan interpretasi dalam analisis level tunggal. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai elemen yang menjadi masukan dalam proses penetapan suatu kebijakan luar negeri. Pengertian 'interpretasi' yang digunakan Zhao adalah paralel dengan teori heurmenetik dalam ilmu sosial. Dalam hal ini interpretasi diarahkan untuk mengungkapkan pertalian internal di antara berbagai ide, religi, maksud, dan tindakan, mempengaruhi pemahaman partisipan. Dari sana juga dapat terlihat bagaimana pemahaman partisipan tersebut masuk akal dalam konteks hubungan kelembagaan yang melingkupinya.⁶⁰

Kebijakan luar negeri suatu negara pada kenyataannya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor di level makro. Oleh karena itu pendekatan

⁶⁰Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy...*:hlm. 18-21

keterkaitan mikro-makro berupaya menemukan hubungan sebab-akibat antara fakta di level makro dengan fakta di level mikro, ataupun sebaliknya. Secara umum dalam ilmu sosial, level mikro didefinisikan sebagai “kenyataan atau realitas empiris dari kehidupan sehari-hari individu”. Sedangkan level makro adalah “kenyataan sosial atau lingkungan sosial”. Bernhard Giesen kemudian memperkaya rumusan ini dengan membagi level makro atau kenyataan sosial menjadi tiga dimensi yaitu, simbolik, praktis, dan material. Masing-masing dimensi dalam level makro tersebut mempunyai proses, situasi, dan levelnya sendiri yang akan berpengaruh pada proses di level mikro. Dengan demikian akan terlihat manifestasi dimensi-dimensi level makro di level mikro yang tercermin pula dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.⁶¹

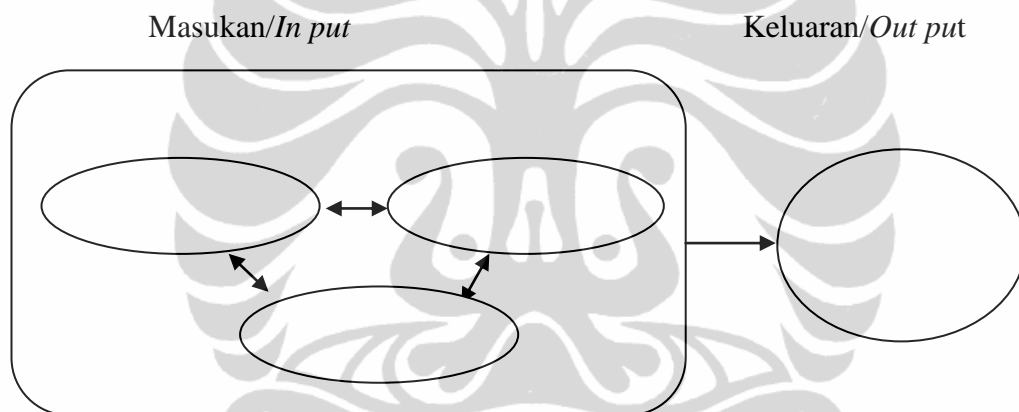
Zhao kemudian mempertajam berbagai rumusan di atas, dan menerapkannya dalam pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasi politik luar negeri Cina. Level mikro didefinisikan sebagai “hal-hal atau proses yang mengacu kepada pengambil keputusan baik perorangan maupun kelompok”. Sedangkan level makro berfokus pada “elemen internasional dan domestic”. Tentang pengembangan level makro sebagaimana telah dilakukan oleh Giesen, Zhou membagi level makro dalam dimensi simbolik, institusional, dan penguasa atau rejim. Dalam hal ini dimensi penguasa atau rejim adalah paralel dengan dimensi material dalam rumusan Giesen, sedangkan level mikro menjadi arena proses pengambilan keputusan.

Dimensi pertama pada pendekatan yang dikembangkan Zhao, yaitu dimensi simbolik berfokus pada, bagaimana perubahan mendasar (misalnya perubahan konstalasi kekuatan dunia, arus pemikiran, dll) di level makro – dalam hal ini perkembangan internasional dan domestik - berpengaruh terhadap interpretasi Cina atasnya. Dalam kaitan ini yang terpenting adalah memahami perubahan prioritas yang terjadi dalam politik luar negeri Cina berkaitan dengan pengaruh lingkungan tersebut. Ke dua, dimensi institusional - adalah berkaitan dengan pengaruh perubahan politik luar negeri Cina terhadap kinerja maupun tingkat kelembagaan. Hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana sistem yang ditetapkan harus dijalankan oleh pengambil keputusan, termasuk di dalamnya

⁶¹ Giesen, “Beyond Reductionism : Four Models Relating Macro and Micro Levels”, dalam Jeffrey Alexander, (Ed.), 1987, hlm. 347-349

berbagai aturan dan norma politik, mekanisme proses pengambilan keputusan, dan derajat keleluasaan yang diberikan oleh struktur politik. Ke tiga, dimensi penguasa/rejim dalam level makro, secara khusus berfokus pada berbagai isu seperti, bagaimana berbagai sumber berbeda dialokasikan dalam lingkungan politik luar negeri Cina, dan bagaimana mereka dimobilisasi oleh berbagai kelompok berbeda untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan. Dengan demikian di sini harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi rejim, taktik, strategi, dan pola yang berlaku dalam politik luar negeri Cina.

Dalam bagan, kinerja pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan kebijakan luar negeri Cina akan terlihat seperti berikut,⁶²



Bagan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa untuk menginterpretasikan atau memahami satu kebijakan luar negeri Cina, peneliti harus menganalisis kebijakan itu dalam sebuah kerangka yang utuh. Kebijakan tersebut harus dipahami sebagai hasil interaksi dinamis berbagai fakta di kedua level (mikro-makro), yang mengacu pada perkembangan internasional, perkembangan institusi domestik, serta peran para tokoh atau pemimpinnya.

Dalam praktiknya, menggunakan pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan kebijakan luar negeri Cina, mula-mula analisis harus berpusat pada tiga dimensi. Dalam dimensi pertama, menganalisis perubahan interpretasi Cina terhadap 1) perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal

⁶² Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy* ..., hlm. 23

maupun internalnya, 2) hasil adaptasi kebijakan luar negeri Cina, dan 3) perubahan prioritas para pemimpin Cina dalam kebijakan luar negerinya. Dalam dimensi ke dua, memperjelas pengaruh masyarakat dan institusi atau lembaga dalam kebijakan luar negeri Cina. Termasuk di dalamnya memperjelas pengaruh perubahan peraturan maupun norma-norma dalam mekanisme proses pengambilan keputusan. Dalam dimensi ke tiga, mempelajari sumber kewenangan dan kekuasaan politik Cina, legitimasi rejim, pengaruh para tokoh secara individual, pola perilaku, taktik, dan strategi politik luar negeri Cina. Hasil analisis dalam ketiga dimensi yang ada di level makro tersebut, kemudian akan tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diputuskan atau dieksekusi di level mikro.

Berlandaskan pemahaman atas pendekatan keterkaitan mikro-makro yang telah dikembangkan oleh Zhao di atas, maka secara garis besar aplikasinya dalam penelitian tentang normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia adalah sebagai berikut. Perhatian pertama diarahkan kepada perkembangan arus globalisasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi yang semakin tidak terbendung. RRC juga ikut dalam arus perubahan tersebut, dan sejak akhir tahun 1970-an telah mencanangkan program *gaige-kaifang* untuk membawa bangsa Cina kepada kesejahteraan yang dicita-citakannya. Sangat disayangkan, program yang sudah berjalan satu dekade dan menunjukkan hasil yang sangat positif, harus terhenti karena pecahnya peristiwa Tiananmen 1989. Peristiwa itu menyebabkan kondisi domestik maupun posisi internasional RRC terpuruk. Bersamaan dengan memburuknya kondisi RRC, situasi internasional juga menuju perubahan drastis. Terutama karena dipengaruhi oleh menurunnya kekuatan kubu sosialis-komunis. Kecenderungan itu ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, dan mulai terjadinya guncangan di dalam negeri Uni Uni Sovyet yang merupakan pusat kekuatan sosialis-komunis.

Dalam perkembangan internasional seperti terurai di atas, berbagai negara lebih memilih jalan modernisasi daripada jalan revolusi untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan bangsanya. Kerjasama regional atau yang berlandaskan kepentingan yang sama, lebih diminati daripada beraliansi berdasarkan ideologi. Menghadapi perkembangan domestik dan internasional yang tidak menyenangkan tersebut, sejumlah langkah terobosan harus diambil RRC.

Situasi itu memberi beban ganda kepada RRC, yakni harus mempertahankan eksistensi negara dan bangsanya, dan sekaligus mempertahankan eksistensi kekuatan sosialisme dan komunisme di dunia.

Ringkasnya langkah-langkah terobosan yang cerdas diperlukan di tahap awal adalah untuk mempertahankan dan atau mengembalikan roda pembangunan ekonomi ke relnya. Seiring dengan itu upaya penting lainnya yaitu mempertahankan kedaulatan, dan keutuhan bangsa Cina juga dilakukan dengan sekuat tenaga. Perubahan institusional pun dilakukan RRC, khususnya dalam bentuk ditetapkannya peraturan-peraturan baru. Hal itu menungkinkan otoritas bergerak lebih leluasa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika peristiwa Tiananmen, rejim juga mengalami guncangan, menyebabkan berubahnya peta kekuatan politik RRC. Semua perubahan itu berpengaruh besar terhadap format dan target politik luar negeri Cina. Menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, dan menjalin persahabatan dengan berbagai bangsa di dunia menjadi target kebijakannya.

Jalan-jalan pintas yang mungkin ditempuh RRC menjadi perhatian penelitian ini selanjutnya. Hal itu juga dimaksudkan terutama untuk mengetahui dengan pasti apakah normalisasi hubungannya dengan Indonesia juga merupakan bagian dari langkah-langkah terobosan tersebut?. Hasil pengamatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan terjadinya berbagai perubahan keadaan yang melingkupi Cina pada akhir tahun 1980-an tersebut, menghasilkan tabel kerangka analisis dasar. Tabel ini merupakan analisis dasar yang mengaplikasikan pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan kebijakan Cina dalam masalah normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia pada tahun 1990.

Kerangka Analiis Dasar Tentang Kebijakan RRC Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia⁶³

Level Makro	Perubahan di Level Makro	Proses di Level Mikro
Dimensi Simbolik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modernisasi RRC dilakukan melalui <i>gaige kaifang</i> ✓ Peristiwa Tiananmen turunkan pamor tapi bangkitkan nasionalisme ✓ Guncangnya kubu sosialis membuat RRC waspada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meninggalkan diplomasi revolusioner ✓ Mengembalikan eksistensi dengan prinsip koeksistensi damai ✓ Mencari teman sebanyak-banyaknya
Dimensi Institusional	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Gaige kaifang</i> sebabkan perubahan norma dan aturan ✓ Otorisasi berubah dari vertikal ke horizontal, dari individual ke kolektif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperluas partisipasi masyarakat & lembaga ✓ Menerapkan pedoman kerjasama yang lebih fleksibel
Dimensi Kekuasaan/Rejim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengaruh Tokoh tua semakin berkurang ✓ Peristiwa Tiananmen sebabkan rejim ada di antara moderat dan konservatif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wewenang yang lebih luas di level Menlu ✓ Menjalankan strategi dan taktik yg lebih pragmatis, fleksibel & rasional

Dari kerangka di atas tergambar bahwa ada perubahan substantif di level makro dalam ketiga dimensinya yaitu simbolik, institusional, dan rejim, yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di level mikro. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka analisis dasar yang menjadi pedoman dalam proses historiografi atas data-data yang telah dikumpulkan dan melalui tahapan kritik serta interpretasi. Adanya kerangka analisis dasar ini memungkinkan tersusunnya

⁶³ Diolah dari model yang dikembangkan oleh Zhao Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese...*, hlm. 25

paparan fakta sejarah yang rasional tentang peristiwa normalisasi hubungan disiplomatik Cina-Indonesia. Melalui analisis itu akan terlihat apa saja faktor yang telah mendorong Cina untuk mewujudkan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, serta bagaimana proses pengambilan keputusan tentang kebijakan tersebut.

2.2 Konsep *Mianzi*

Di bab Pendahuluan telah disinggung bahwa, dalam hubungan Cina-Indonesia yang amat dinamis dalam rentang waktu tahun 1950 - 1967, di antaranya pernah terjadi beberapa kali ketegangan. Uniknya, pemicu maupun penyelesaian ketegangan tersebut selalu diwarnai oleh upaya kedua pihak untuk 'menjaga muka' masing-masing. Sesungguhnya konsep 'muka' yang berkaitan dengan kehormatan dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Secara alamiah 'muka' memang merupakan bagian penting dari tubuh manusia, merupakan pembeda utama antara manusia yang satu dengan yang lain. 'Muka' juga merupakan jendela hati manusia. Artinya 'muka' bisa menjadi acuan tentang suasana hati atau emosi seseorang, atau bahkan menjadi gambaran karakter seseorang. Selain itu dalam komunikasi, 'muka' juga menjadi fokus perhatian. Seseorang akan menghadap atau memperhatikan muka orang lain yang sedang berbicara padanya, demikian pula sebaliknya. Dalam kaitan ini Stela Ting-Toomey mengatakan bahwa, setiap orang dalam semua budaya mencoba untuk menjaga dan mengelola 'muka' dalam semua situasi komunikasi, 'menyelamatkan atau menjaga muka' dan 'kehilangan muka' adalah dua dimensi umum yang dicakupnya.⁶⁴

Jelaslah bahwa secara umum 'muka' sebagai konsep budaya tidaklah spesifik Cina. Meskipun demikian, berbeda dengan budaya Barat yang menekankan bahwa setiap individu bertanggungjawab atas perilakunya, dalam budaya Cina tidaklah demikian. Dalam budaya Barat bila seseorang berbuat yang memalukan atau dipermalukan maka hanya dia sendiri yang menanggung sanksi yang diberikan masyarakat atau lingkungannya. Sedangkan dalam budaya Cina, tidak ada seorang pun yang bisa membuat keputusan hanya bersandarkan atas

⁶⁴ Ge Gao, Stela Ting Toomey, 1998, *Communicating Effectively with The Chinese*, Sage Publication, hlm. 54

kepentingannya sendiri. Setiap individu hampir sepenuhnya tergantung kepada orang lain dalam hal nilai dan kedudukannya dalam masyarakat.⁶⁵

Sistem sosial seperti itu telah membuat kepekaan bangsa Cina terhadap ‘muka’ bersifat sangat obsesif. Tindakan memalukan atau dipermalukan tidak hanya membuat dirinya sendiri yang kehilangan muka, namun keluarga, kelompok, ataupun komunitasnya juga bisa merasa terhina. Kondisi itu menyebabkan tuntutan untuk segera dilakukannya permintaan maaf atau bahkan balas dendam, adalah sesuatu yang wajar terjadi. Idiom yang berbunyi, “manusia perlu muka, pohon perlu kulit”⁶⁶ atau nasehat orang tua kepada anaknya yang berbunyi, “jangan membuat keluarga kita kehilangan muka”,⁶⁷ telah mencerminkan pentingnya kehormatan yang direpresentasikan dalam kata ‘muka’ tersebut. Nilai-nilai itu ditanamkan sejak dini sehingga melekat dalam diri seorang anak. Selanjutnya selalu ada upaya untuk menjaganya, baik secara sadar ataupun secara spontan.

Memperhatikan bahwa dalam sejarah hubungan Cina-Indonesia banyak hal-hal sensitif yang ada di sekitar dan mempengaruhinya, maka proses pencairan atau normalisasi hubungan diplomatik kedua negara pasti juga diwarnai juga oleh dua dimensi konsep ‘muka’ tersebut. Terlebih lagi bila mengingat bahwa, pembekuan hubungan kedua negara terjadi karena alasan yang amat peka pula, yakni hilangnya kepercayaan Indonesia terhadap RRC. Pembekuan hubungan itu pun berlangsung selama lebih dari dua dekade dan proses pencairannya pun tidak mudah. Berdasarkan fakta itu maka faktor saling menjaga kehormatan masing-masing pasti sangat kental dalam proses normalisasi hubungan tersebut. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana pengaruh konsep *mianzi* terhadap proses normalisasi hubungan Cina-Indonesia, berikut ini adalah paparan tentang konsep ‘muka’ atau *mianzi* dalam budaya Cina dan aplikasinya dalam penelitian ini.

Dalam bahasa Cina padanan untuk kata benda ‘muka’ atau ‘wajah’ adalah ‘*lian*’ dan ‘*mianzi*’. Selain merepresentasikan benda kongkrit yaitu muka atau wajah, kata *lian* dan *mianzi* juga mengandung makna kiasan yang berhubungan dengan kehormatan, reputasi, kepercayaan, dan wibawa. Di antara kata *mian* dan

⁶⁵De Mente, Boye Lapayette, (1996), *NTC's Dictionary of China's Cultural Code Words*, Illinois : NTC Publishing Group, hlm. 247

⁶⁶人要脸, 枢要皮 (ren yao lian, shu yao pi)

⁶⁷别丢咱们家的脸 (bie diu zanmenjia de lian)

lian ada perbedaan makna dalam pemakaiannya. Definisi yang dengan jelas membedakan makna yang dikandung oleh kedua kata tersebut, diberikan oleh Hu Hsien Chin yaitu sebagai berikut,

*“Verbally the two sets of criteria are distinguished by two words which on the physical level both mean “face.” One of these, **mien-tzd**, stands for the kind of prestige ...: a reputation achieved through getting on in life, through success and ostentation. This is prestige that is accumulated by means of personal effort or clever maneuvering. For this kind of recognition ego is dependent at all times on his external environment. The other kind of “face,” **lien**,.... It is the respect of the group for a man with a good moral reputation: the man who will fulfill his obligations regardless of the hardships involved, who under all circumstances shows himself a decent human being.”⁶⁸*

“Secara verbal ada dua kriteria yang membedakan dua kata yang di tingkat fisik sama-sama berarti “muka”. Salah satunya adalah, *mien-tzu*, yang mewakili sejenis prestise ... ; sebuah reputasi yang dicapai melalui keberhasilan dalam kehidupan, melalui kesuksesan dan gaya yang ditonjolkan. Ini adalah prestise yang merupakan akumulasi dari upaya personal atau manuver yang cerdas. Pengakuan atas ego (prestise) semacam ini, selamanya tergantung kepada lingkungan eksternalnya. Jenis lainnya dari “muka” adalah *lien*,... Ini adalah penghormatan kelompok terhadap seseorang dengan reputasi moral yang baik ; seseorang yang akan memenuhi kewajibannya tanpa menghiraukan kesengsaraannya, yaitu seseorang yang dalam segala keadaan selalu menunjukkan dirinya sebagaimana layaknya manusia”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa, makna ‘kehormatan’ yang dikandung *lian* menyangkut dimensi moral yang bersifat internal. Sedangkan dalam *mianzi* ‘kehormatan’ itu berhubungan dengan citra sosial yang diperoleh berdasarkan pencapaian prestasi di bidang-bidang tertentu, dan karenanya bersifat eksternal. Abstraksi makna yang terkait dengan moralitas tersebut, juga menunjukkan bahwa *lian* maupun *mianzi* merupakan konsep nilai yang mendasar dalam budaya Cina.

Kehormatan adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan perilaku individu ketika berinteraksi dalam komunitasnya, sehingga ia layak atau tidak layak untuk mendapat ‘kehormatan’ tersebut. Fokus penelitian ini adalah normalisasi hubungan dua negara, berarti di dalamnya ada interaksi antar negara. Dalam kaitan ini yang menjadi perhatian adalah perilaku negara yang direpresentasikan oleh aktor atau

⁶⁸ Hu, Hsien Chin, “The Chinese Concept of ‘Face’”. *American Anthropologist*, 46 (1), hlm. 45

personal yang mendapat mandat dari negaranya. Kehormatan sebuah negara diperolehnya atau diberikan oleh rakyatnya maupun negara lain, berdasarkan prestasi yang dicapainya. Oleh karena itu yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *mianzi*, bukan *lian*. Selain itu makna kehormatan yang terkandung dalam kata *mianzi* lebih bersifat komunal, sehingga lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Pentingnya *mianzi* dalam budaya Cina adalah tidak terbantahkan,⁶⁹ dan akarnya ada pada ajaran Konfusius. Hal itu antara lain diungkapkan oleh Cheng Yingchang bahwa, “Konfusianisme, secara teori maupun praktik, tak dapat dibantah, adalah dasar dan latar belakang ideologis yang paling tegas dari konsep ‘muka’ dan ‘pengelolaan muka’ dalam bahasa Cina.”⁷⁰ Ajaran Konfusius yang menjadi landasannya adalah *wulun* atau lima hubungan, yang antara lain dapat disimak dalam kitab *Zhong yong* berikut ini,

“天下之达道五，所以行之者三，曰君臣也，父子也，夫妻也，昆弟也，朋友之交也，五者，天下之达道也，知，仁，勇，三者，天下之达德也，所以行者一也。”⁷¹

“Kewajiban utama di dunia ada lima, dan kebajikan yang harus diamalkan ada tiga, yaitu hubungan antara raja dengan menteri, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, kakak dengan adik, dan hubungan di antara kawan, kelimanya merupakan kewajiban yang harus dijalankan di dunia. Pengetahuan/kebijaksanaan, keluhuran budi, dan keberanian, ketiganya merupakan kebajikan/moral yang harus diamalkan di dunia; menjalankannya haruslah dalam kesatuan.”

Wulun mengatur tata hubungan manusia di dunia, berdasarkan legalitas (raja dengan menteri), kedekatan (ayah dengan anak), perbedaan (suami dengan istri), keteraturan (kakak dengan adik), dan kesetiaan (sesama teman), yang semuanya dilaksanakan berpedoman pada *de* (德) atau nilai-nilai kebajikan. Dalam kutipan terungkap tiga nilai kebajikan yaitu kebijaksanaan, keluhuran budi, dan

⁶⁹ Ge Gao, Stela Ting Toomey, 1998, *Communicating Effectively...*, hlm. 53

⁷⁰“Confucianism, with its theory and practice, no doubt, is the unequivocal ideological background and foundation of the concept of face and face-work in the Chinese language.”, Cheng, Yingchang, (1986), “The concept of face and its Confucian roots”. *Journal of Chinese Philosophy*, 13, hlm. 337

⁷¹ 中庸 (*Zhongyong*/ Tengah Sempurna), Bab XX, ayat 8, dalam James Legge, D.D. LL D., *The Four Books : Confucian Analects, The Great Learning, The Doctrine of The Mean, and The Works of Mencius*. With English Translation and Notes, hlm. 384-385 ; *Su Si* (Kitab Agama Khonghucu), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, hlm. 61

keberanian yang harus diamankan dalam kehidupan. Menurut Usman Arif, dalam kehidupan di dunia, penganut Khonghucu⁷² harus selalu berpegang dan mengamalkan *ba de* atau delapan kebajikan yaitu, *xiao-di-zhong-xin-li-yi-lian-chi* atau berbakti - rendah hati – setia - dapat dipercaya - cinta kebenaran - suci hati - tahu malu.⁷³

Pola hubungan dalam *wulun* menuntut manusia untuk berperilaku sesuai posisinya dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta keharmonisan.⁷⁴ Seseorang yang berperilaku sesuai dengan posisi dan prinsip moral yang melingkupinya, akan mendapatkan kehormatan ataupun wibawanya dalam masyarakat, dan ketentuan ini dapat berlaku sebaliknya. Artinya bila perilaku seseorang menyalahi ketentuan ini maka konsekwensinya adalah hilangnya rasa hormat orang lain bagi dirinya. Dengan demikian inti dari *wulun* adalah ‘bagaimana manusia harus menghormati dirinya dan orang lain sesuai dengan keberadaannya’ berlandaskan etika dan moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Dari sini terlihat bahwa ajaran Konfusius, khususnya tentang *wulun* adalah akar dari konsep *mianzi* yang terkait erat dengan kehormatan, kepercayaan, dan kewibawaan.

Paparan di atas mengungkapkan bahwa *mianzi* mempunyai akar yang amat kuat dalam budaya Cina. Konsep ini terkait erat dengan kebanggaan sosial, kehormatan, kewibawaan, celaan, rasa malu, aib, kerendahan hati, kepercayaan, ketidakpercayaan, rasa hormat, dan reputasi. *Mianzi* adalah sesuatu yang harus ada, dan itu berpengaruh terhadap bagaimana orang Cina melihat dirinya ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan konsep *mianzi* secara maknawi dapat masuk lebih jauh lagi sampai ke identitas dan integritas seseorang.⁷⁵ Begitu besarnya pengaruh *mianzi* dalam interaksi di antara warga

⁷² Di Indonesia Khonghucu merupakan salah satu agama yang diakui negara, penganut Khonghucu mengamalkan ajaran Konfusius dan kitab sucinya adalah *Si shu –Wu jing* yang merupakan karya-karya Konfusius dan Mengzi

⁷³八德：孝 - 第 - 忠 - 信 - 礼 - 义 - 廉 - 耻, kedelapan nilai ini mempunyai bobot keharusan yang sama dalam pengamalannya, (hasil wawancara dengan Dr. Usman Arif, Ahli Konfusianisme dan Pendeta Khonghucu, Solo, 11 Oktober 2011)

⁷⁴ Ajaran Konfusius lainnya yang berkaitan dengan masalah ini adalah yang disebut *zhengming* (正名), yang padanannya adalah ‘nama/penamaan yang tepat’ sedangkan prakteknya adalah bahwa segala sesuatu harus menempatkan atau ditempatkan sesuai nama, posisi, ataupun predikat, yang melekat padanya.

⁷⁵ Ge Gao, Stela Ting Toomey, (1998), *Communicating Effectively...*, hlm. 54 dan 90

masyarakat Cina, juga terlihat dari banyaknya ungkapan yang menggunakan kata *mianzi*.

Kata *mianzi* terdiri dari dua karakter Han yaitu *mian* (面) dan *zi* (子). Padanan kata bagi *mian* sendiri setidaknya ada 13, yaitu wajah, menghadap, permukaan, berhadapan muka, sisi luar, bidang, aspek, sisi/segi, lunak, sisi/sebelah, helai, tepung terigu, dan serbuk.⁷⁶ Sedangkan padanan untuk *mianzi* adalah, bagian luar, permukaan, muka, reputasi, dan gengsi. Hu Hsien Chin mencatat setidaknya ada 21 ungkapan yang menggunakan kata *mian* ataupun *mianzi*.⁷⁷ Sedangkan Ning Yu dalam kajiannya menguraikan *mianzi* secara sangat rinci,⁷⁸ namun tidak semua maknanya relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Objek penelitian ini adalah peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, yang di dalamnya ada unsur kehormatan atau kewibawaan bangsa dan negara yang dipertaruhkan. Pertaruhan itu terjadi baik dalam proses maupun hasil yang dicapainya. Berhubungan dengan itu maka konsep *mianzi* yang akan menjadi perhatian di antaranya adalah,

- 1) *Diu mian* (丢面), atau ‘kehilangan muka’. Ungkapan ini menggambarkan hilangnya reputasi akibat tindakan tercela, seperti berbuat curang, korupsi, perselingkuhan, dan lainnya. Negara yang kalah perang karena salah strategi dapat disebut *diu mian*, namun bila kalah karena mempertahankan prinsip atau kedaulatan, maka tidak dapat disebut *diu mian*.⁷⁹ Posisi ini merupakan posisi yang amat dihindari, karena itu bangsa Cina cenderung menghindari konflik frontal, namun bila suasana konflik tak dapat dihindari maka tiada jalan lain kecuali menerima kenyataan yang ada.⁸⁰ Selain itu membuat orang lain atau suasana menjadi tidak nyaman sehingga membuat orang lain atau mitranya merasa ‘kehilangan muka’, juga merupakan perbuatan yang cenderung dihindari.

⁷⁶ Tim Perkamusan Universitas Indonesia, (1997), *Kamus Mandarin-Indonesia*, Jakarta UI Press, hlm. 346

⁷⁷ Lihat, Hu, Hsien Chin, (1944), “The Chinese Concept of ‘Face’... hlm. 55-60

⁷⁸ Ning Yu, “What does our face mean to us?”, *Pragmatics & Cognition* 9:1 (2001), 1–36. John Benjamins Publishing Company

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Usman Arif

⁸⁰ Li Sihui (李思辉). “论面子观念” (Lun mianzi guannian/Mengkaji Konsep Mianzi), <http://www.naweeklytimes.com/xingling/xingling24.htm>, diakses 15 Juni 2011, pkl. 19.30

Contohnya, pernyataan ketidaksetujuan di depan umum adalah tindakan yang boleh dilakukan, karena dapat menyebabkan orang lain atau mitra kehilangan muka. Bahkan sering kali “menjaga suasana menjadi lebih penting dibandingkan kejujuran dan kebenaran”.⁸¹ Hal itu menyebabkan munculnya pernyataan-pernyataan yang bermakna ganda, atau menimbulkan salah paham bagi lawan bicara yang tidak memahami budaya Cina dengan baik. Dalam kaitan konsep ini orang Cina cenderung menerapkan gaya komunikasi yang ‘tidak tegas’, sehingga sering dibutuhkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau penghubung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perundingan.

- 2) *Baoquan mianzi* (保全面子), atau ‘menyelamatkan muka’. Ungkapan ini sangat erat kaitan dengan *diu mian*, menyelamatkan muka harus dilakukan agar tidak kehilangan muka. Bila sampai terjadi hal-hal yang mengarah pada kehilangan muka, maka tindakan menyelamatkan muka harus segera dilakukan. Seberat dan sesulit apapun caranya, tindakan itu mutlak harus dilakukan. Upaya *baoquan mianzi* juga dapat tercermin dalam ungkapan lainnya. Di antaranya dalam ungkapan *Gu mianzi* (顾面子) yang secara harfiah juga berarti ‘menjaga muka’ atau memperhatikan penampilan untuk meningkatkan kewibawaan maupun prestise. Ungkapan *zengjia mianzi* (增加面子) atau ‘menambah muka’ juga sering kali menjadi bagian dari upaya *baoquan mianzi*.
- 3) *Gei mianzi* (给面子), atau ‘memberi muka’. Ungkapan ini menunjuk pada tindakan menghormati pihak lain, misalnya dengan memberi pujian, atau mengungkapkan keunggulan dan kemampuan orang lain di depan umum, atau memperlakukannya secara istimewa, dan tindakan lainnya yang membuat pihak lain tersebut meningkat wibawa atau kehormatannya. Umumnya tindakan ini dilakukan berlandaskan azas resiprokal atau berbalasan. Artinya

⁸¹ Ge Gao dan Stela Ting Toomey, 1998, *Communicating Effectively...*, hlm. 64

ketika seseorang ‘memberi muka’ pada mitranya, sesungguhnya ia berharap mitranya suatu saat juga bisa melakukan hal yang sama untuknya. Menariknya, ketidakpekaan orang yang ‘diberi muka’ dapat menimbulkan konflik.

Pilihan untuk fokus pada tiga ungkapan di atas adalah karena mempertimbangkan perkembangan internal maupun internasional yang melingkupi Cina pada tahun 1989-1990. Saat itu Cina masih terpuruk karena peristiwa Tiananmen. Apakah posisi Cina itu dapat dikategorikan sebagai *diu mian?*, dan apakah relevan bila normalisasi hubungannya dengan Indonesia dianggap sebagai salah satu cara Cina dalam *baoquan mianzi?*. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat tergantung pada sudut pandang dan bukti-bukti yang dapat ditemukan.

Dari data yang berhasil dikumpulkan terlihat bahwa, selain masalah pengakuan kedaulatan penuh di antara kedua negara, setidaknya ada tiga masalah lainnya yang mengganjal proses normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Masalah itu adalah tentang kewarganegaraan kaum Tionghoa, dukungan RRC kepada gerakan PKI, dan masalah penyelesaian hutang Indonesia. Ketiga masalah itu memiliki kadar kepekaan yang tinggi, sehingga pasti ada upaya untuk menghindari terjadinya ‘*diu mian*’. Selain itu pasti ada pula sejumlah langkah kompromi ataupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *gei mianzi* di dalamnya.

Semua hal itu harus dibuktikan dalam penelitian ini, dan didalamnya harus pula diingat bahwa dalam konsep *mianzi* juga ada ketentuan khusus lainnya. Ketentuan itu tercakup dalam ungkapan ‘*women you mianzi*’ atau ‘*dajia you mianzi*’ yang artinya ‘kita semua punya muka’. Dengan demikian, karena orang lain pun punya muka, maka ketika berhubungan dengan orang lain kita harus saling menghormati demi kokohnya persahabatan. Tampaknya hal itu sejalan dengan ajaran Konfusius bahwa, “apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan lakukan kepada orang lain”⁸².

⁸² “己所不欲，勿施於人” (*ji suo bu yu, wu shi yu ren*), *Lun Yu*, Jilid XIV ayat 23; Legge, James, D.D. LL D., *中英对照四书* (*The Four Books: Confucian Analects, The Great Learning, The Doctrine of The Mean, and The Works of Mencius. With English Translation and Notes*), hlm. 229

BAB 3 POLITIK LUAR NEGERI RRC TAHAP AWAL DAN BEKUNYA SEBUAH HUBUNGAN

Republik Rakyat Cina (RRC – *Zhonghua Renmin Gongheguo*) berdiri pada tanggal 1 Oktober 1949, setelah Partai Komunis Cina (PKC – *Gongchandang*) mengalahkan rejim Partai Nasionalis Cina (PNC – *Guomindang*) yang saat itu menguasai pemerintahan Republik Cina (*Zhonghua Minguo*).⁸³ Presiden Chiang Kaishek yang juga merupakan pemimpin PNC waktu itu, karena terdesak kemudian membawa sisa-sisa kekuatannya ke pulau Taiwan. Dengan bantuan dari Amerika Serikat PNC melanjutkan pemerintahan Republik Cina di pulau tersebut. Bertahannya Republik Cina di Taiwan menyebabkan RRC masih harus bertarung untuk mendapatkan pengakuan internasional, khususnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). RRC menolak adanya dua perwakilan Cina di forum internasional. Oleh karena itu cita-cita menyatukan Taiwan ke dalam wilayah kedaulatannya merupakan bagian dari kepentingan nasional RRC yang terus diperjuangkan sampai sekarang.

Dalam upaya menunjukkan eksistensinya di dunia, hubungannya dengan Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Secara historis hubungan bangsa Cina dengan bangsa Indonesia telah melewati kurun waktu yang panjang. Menurut Kong Yuanzhi bila dilihat dari asal usul kedua bangsa, bukan mustahil ada hubungan darah di antara kedua bangsa itu. Terutama bila diyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia juga berasal dari sekitar wilayah Yunnan, di Tiongkok Barat daya.⁸⁴ Catatan sejarah tentang hubungan tradisional antara kedua bangsa, dalam hal ini antara bangsa Cina dan suku-suku bangsa di wilayah Nusantara, masih banyak yang berserakan. Dewasa ini catatan tersebut banyak digali kembali dan ditelaah ulang, khususnya dalam upaya meningkatkan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Saling pengertian tersebut sangat

⁸³ Dalam sejarah PKC/RRC perang melawan PNC disebut sebagai *Renmin jiefang zhanzheng* (人民解放战争) atau Perang Pembebasan Rakyat, yang berlangsung sejak 1946 yaitu saat pecahnya Front Persatuan ke dua yang sebelumnya dibentuk untuk melawan Jepang.

⁸⁴ Kong Yuanzhi, (2005), *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Xie Zhiqiong, Kong Yuanzhi, Xie Yinghua, Penerjemah), Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer, bab 1

bermanfaat bagi pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik antara Cina dan Indonesia.

Hubungan diplomatik RRC-RI mulai terjalin secara resmi pada tahun 1950. Sejak itu hubungan di antara kedua negara berlangsung dengan amat dinamis. Dinamika itu secara umum terkait erat dengan persepsi 'Cina sebagai ancaman', yang melekat di pikiran bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam studi hubungan internasional, persepsi bangsa-bangsa Asia Tenggara terhadap RRC tersebut dikenal sebagai '*China Factor*', yang mencakup tiga kenyataan empiris. Pertama, RRC menguasai suatu wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kondisi itu menyebabkan perkembangan positif maupun negatif yang terjadi di RRC akan berpengaruh besar terhadap kawasan sekitarnya, khususnya Asia Tenggara.

Ke dua, adanya hubungan pemerintah RRC dengan kaum *Huaqiao*. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah domisili kaum *Huaqiao* terbesar di dunia, sehingga kedekatan hubungan pemerintah RRC dengan mereka menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pemerintah setempat. Ke tiga, kebijakan luar negeri RRC secara historis sering mengarah pada sikap 'hegemonisme'. Terutama berkaitan dengan penyebaran ideologi Komunis. Bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara dua fakta empiris terakhir adalah ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas negaranya. Stigma RRC sebagai ancaman semakin melekat karena sikap yang ditunjukkan RRC di dunia khususnya terhadap bangsa-bangsa di Asia, cenderung ambigu atau bahkan kontradiktif. Hinton merumuskan kecenderungan sikap RRC terhadap bangsa-bangsa di Asia Tenggara tersebut dalam ungkapan, "mau berkuasa tapi tidak mau berkorban". Kerapnya RRC berperilaku seperti itu menyebabkan RRC sulit dipercaya dan kurang disukai.⁸⁵

Sejauh mana persepsi ancaman itu berpengaruh terhadap hubungan Cina-Indonesia?. Dalam bab ini akan dibahas politik luar negeri RRC di masa-masa awal dan kebijakan yang diambilnya dalam menjalin hubungan dengan Indonesia, Rentang waktu yang dicakup di dalamnya adalah sejak berdirinya RRC pada tahun 1949, sampai berakhirnya Revolusi Kebudayaan yaitu sekitar tahun 1969.

⁸⁵ Hinton, dalam Robinson Thomas W., David Shambaugh, (1994), *Chinese Foreign Policy : Theory and Practice*, Oxford : Clarendon Press, hlm. 370-371

Dalam periode ini hubungan RRC dengan Indonesia mengalami pasang surut yang amat kontras. Dimulai dengan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan RRC yang terlihat spontan di awal namun kemudian tersendat. Setelah itu tercipta masa bulan madu dalam hubungan kedua negara, hingga akhirnya hubungan itu memburuk dan dibekukan. Pembahasan akan terbagi dalam tiga periode berdasarkan perubahan kebijakan luar negeri yang diambil RRC dalam kurun waktu tersebut dan ditutup dengan sebuah simpulan. Ketiga periode itu adalah, “Dari *Yi bian dao* hingga Koeksistensi Damai”, “Dari *Da Yuejin* hingga Strategi Kekuatan ke Tiga”, dan “Dari *Wenhua dageming* hingga Bekunya Hubungan”.

3.1 Dari *Yi bian dao* hingga Koeksistensi Damai

Republik Rakyat Cina terbentuk setelah Cina mengalami masa perjuangan yang seperti tidak berujung. Ketika revolusi Xinhai berhasil menggulingkan Dinasti Qing dan Sun Yatsen dinyatakan sebagai Presiden Republik Cina pada awal tahun 1912, ternyata rakyat Cina tidak segera terbebas dari penindasan bangsa sendiri maupun bangsa asing. Saat itu kaum ‘*Junfa*’ atau Panglima Perang merongrong, sehingga Sun Yatsen tidak bisa meneruskan jabatannya sebagai presiden Republik Cina.⁸⁶ Bangsa-bangsa asing (Barat) juga tidak segera menyerahkan wilayah-wilayah konsesinya, bahkan cenderung berupaya untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Dengan hasil seperti itu, maka dikatakan bahwa, “Revolusi Xinhai memang berhasil merubah bentuk negara Cina, tapi tidak berhasil merubah nasib bangsa Cina.”⁸⁷

Wusi yundong atau Gerakan 4 Mei 1919 membawa semangat perubahan yang besar bagi rakyat Cina. Dari sini berkembang pesat Marxisme dan kemudian lahir PKC pada tahun 1921. PKC berkembang dan mampu menghimpun massa, namun tidak serta merta dapat bergandengan tangan dengan PNC untuk menyelamatkan Cina. Sulitnya menyatukan kekuatan PNC dan PKC juga menjadi

⁸⁶ Untuk menghindari pertumpahan darah dan kekacauan yang lebih buruk Sun Yatsen menyerahkan jabatan presiden Republik Cina kepada Yuan Shikai, yaitu seorang jenderal Dinasti Qing yang menguasai kaum Junfa di utara dan menjanjikan penyerahan kekuasaan dinasti secara penuh (Chesneau, at.al. (1977), *China From The 1911 Revolution To Liberation*, New York : Pantheon Books, hlm. 7

⁸⁷ Lihat Chesneau, at.al. (1977), *China From...* bab 2 & 3

beban tersendiri bagi rakyat Cina. Dua kali front persatuan yang berhasil disepakati kedua belah pihak selalu mengalami kegagalan. Kegagalan front persatuan ke dua bahkan membuat keduanya semakin bersebrangan dan berujung pada perang saudara. Dalam sejarah Cina pertentangan dua kekuatan tersebut merupakan ‘bagian penuh darah’.

Dengan gambaran fakta sejarah di atas maka terlihat bahwa, berdirinya RRC tidak hanya merupakan bukti kemenangan PKC atas PNC. RRC dapat juga disebut sebagai titik awal kembali bersatunya Cina di satu tangan kekuasaan yang solid, yang ternyata tetap bertahan sampai sekarang. RRC berdiri di atas puing-puing kekuasaan yang berserakan, PKC sebagai penguasa baru dapat dikatakan benar-benar harus mulai menata Cina dari titik nol. Di dalam negeri tidak banyak kekayaan tersisa yang dapat segera dijadikan sebagai modal. Demikian juga sumber daya manusianya, tidak cukup banyak personil yang dapat diandalkan untuk membangun pemerintahan yang efektif. Hubungan dengan luar negeri juga tidak mudah, apalagi saat itu suasana perang dingin semakin terasa.

Perang dingin memecah dunia ke dalam dua blok kekuatan yaitu blok Timur dan Barat. Blok Timur identik dengan Uni Uni Sovyet dan sekutunya yang berpaham Sosialis atau Komunis, dan blok Barat identik dengan Amerika Serikat dan sekutunya yang disebut juga sebagai kekuatan kapitalis. Berhubung sebutan kapitalis sering dikonotasikan buruk, maka muncul pula istilah ‘kekuatan dunia bebas’ untuk menyebut blok Barat. Dalam disertasi ini istilah ‘Barat’ cenderung digunakan untuk menunjuk kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya.

Pengakuan internasional atau negara-negara di dunia terhadap kedaulatan RRC tidak mengalir dengan lancar. Selain karena tidak semua negara mau berhubungan dengan pemerintahan yang berideologi komunis, juga karena RRC sendiri di bawah pimpinan Mao Zedong sangat berhati-hati dalam memilih negara yang akan menjalin hubungan diplomatik dengannya. Di bawah pengaruh Mao Zedong, Cina bahkan menetapkan tiga kelompok negara dengan tiga prosedur yang berbeda bagi masing-masing kelompok, bila akan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Ketiga kelompok itu adalah, negara-negara sosialis, kapitalis, dan imperialis.⁸⁸ Pengelompokan secara hitam putih itu dilatar

⁸⁸“The Downing of New Diplomacy”, www.washington.edu/uwpress/search/chapters/LIUCHC.pdf

belakangi oleh semangat anti kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme yang sangat menggebu, dan kurang mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Pada praktiknya prosedur-prosedur itu banyak mengalami penyesuaian, bahkan tidak efektif sama sekali. Sedangkan secara strategis, sejak tahun 1946 Mao telah mengemukakan pemikirannya tentang pembagian kekuatan dunia, yang bterangkum dalam konsep *zhongjian didai* atau zona perantara.⁸⁹

Dengan berlandaskan sentimen anti imperialis itu pula, maka dalam masalah hubungan luar negeri, Mao menetapkan pedoman kebijakan awal yang disebut *lingqi luzao* atau ‘nyalakan kompor lain (baru)’, dan *dasao ganjing wuzi zai qingke* atau ‘bersihkan rumah dulu, baru mengundang tamu.’⁹⁰ Maksud dari ‘nyalakan kompor baru’ adalah, sebagai penegasan bahwa RRC tidak mewarisi pemerintahan dari PNC sehingga tidak akan melanjutkan pengakuan terhadap perwakilan negara lain yang telah ada sebelumnya. RRC juga tidak akan mengakui atau melanjutkan perjanjian dengan negara lain yang disepakati oleh pemerintahan PNC. RRC akan menjalin hubungan baru dengan berbagai negara didasari prinsip yang baru. Sedangkan pedoman ‘bersihkan rumah dulu, baru mengundang tamu’, dimaksudkan sebagai tanda bahwa RRC tidak tergesa-gesa dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Cina akan mengkonsolidasikan diri dulu, baru kemudian mengembangkan hubungannya dengan luar negeri. Penerapan pedoman itu menyebabkan dalam lima tahun pertama pemerintahan RRC, tidak ada jaminan terhadap hak-hak maupun keselamatan orang asing beserta aset-aset mereka di Cina, termasuk para missionaris Barat.⁹¹ Hal itu pulalah yang mengganjal proses pembukaan hubungan diplomatik RRC dengan negara-negara Barat (Eropa).

Dalam buku *Mao : Kisah-Kisah yang Tak Diketahui*, diungkapkan interpretasi dan latar belakang yang berbeda atas kedua pedoman tersebut. Khususnya terhadap pedoman ‘bersihkan rumah dulu, baru mengundang tamu’.

⁸⁹ Lihat sub bab 3.2

⁹⁰ 另起炉灶 — 打扫干净屋子再请客, Huang Anyu (黄安余), (2005), *新中国外交史 (Sejarah Diplomasi Cina Baru)*, Beijing : 人民出版社 (Penerbit Rakyat), hlm. 7 ; Chen Yi, “Stands Guard on the Bund, *Shanghai Star*. (31 October 2002) ; Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy ; The Micro-Macro Linkage Approach*, Oxford, New York : Oxford University Press, hlm. 46

⁹¹ Walker. Richard L., (1955), *China Under Communism*, New Heaven : Yale University Press, hlm. 239

Dikatakan bahwa, yang dimaksudkan Mao Zedong dalam kebijakan ‘bersihkan rumah’ adalah membersihkan Cina dari segala macam anasir yang berbau liberal dan Barat. Dengan demikian termasuk didalamnya mengusir orang Barat yang ada di Cina. Hal itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Mao terhadap kemungkinan pengaruh buruk anasir-anasir Barat tersebut. Mao juga khawatir terhadap kemungkinan pemanfaatan kaum intelektual Cina oleh kekuatan asing/Barat. Sebagian besar kaum intelektual Cina mendapat pendidikan Barat, sehingga menurut Mao, dapat membahayakan posisi dan kekuasaan PKC maupun dirinya. Setelah Cina dianggap bersih atau ‘aman’, barulah Cina mengundang atau menerima bangsa asing namun tetap dalam pengawasan yang ketat.⁹² Interpretasi di atas menunjukkan bahwa, sentimen anti imperialis, kolonialis, ataupun anti Barat dalam diri Mao, tumbuh bukan semata-mata karena kekejaman yang pernah dilakukan bangsa asing terhadap bangsa Cina. Melainkan karena Mao Zedong takut hal itu akan mengancam eksistensi diri dan kekuasaannya. Menurut Chang dan Halliday, alasan terakhir itulah yang justru menjadi perhatian utama Mao Zedong.

Terlepas dari data kontroversial yang baru terungkap tersebut, dua pedoman kebijakan itu telah menjadi landasan yang mengantarkan Cina untuk menjalankan kebijakan *yi bian dao* atau ‘bersandar ke satu sisi’. RRC memutuskan untuk bersandar ke blok sosialis yang saat itu dipayungi oleh kekuatan Uni Sovyet. Kebijakan *yi bian dao* disampaikan Mao zedong ketika memperingati ulang tahun ke 28 PKC, kutipan pernyataannya adalah seperti berikut,

“一边倒，是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利，必须一边倒。积累四十年和二十八年的经验，中国人不是倒向帝国主义一边，就是倒社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。我们反对倒向帝国主义一边的蒋介石反动派，我们也反对第三条道路的幻想。”⁹³

⁹² Jung, Chang, Jon Halliday,(2005), *Mao : Kisah-Kisah yang Tidak Diketahui*, (Martha Wijaya & Widya Kirana,Penterjemah), (2007), Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 451

⁹³“论人民民主专政” (“Pembahasan Kediktatoran Demokrasi Rakyat”), *毛泽东选读 (Karya-karya Terpilih Mao Zedong)*. (1960), 第四卷 (jilid IV), 北京 : 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 1477-1478

“Bersandar ke satu sisi, adalah pelajaran yang diperoleh dari 40 tahun pengalaman Sun Yatsen dan 28 tahun pengalaman PKC, (dari pengalaman itu) diketahui bahwa untuk mendapatkan kemenangan dan mengokohkan kemenangan itu, harus bersandar ke satu sisi. Berlandaskan pengalaman 40 tahun dan 28 tahun tersebut, rakyat Cina tidak bersandar ke pihak Imperialisme, tapi bersandar ke pihak sosialisme, sama sekali tidak ada kekecualian, tidak berpihak (netral) adalah tidak dibenarkan, tidak ada jalan ke tiga. Kita menentang kaum reaksioner Chiang Kaishek yang berpihak ke Imperialis, kita juga menentang ilusi tentang jalan ke tiga.”.

Pernyataan tersebut merupakan penegasan atas sikap anti imperialis Cina. Meskipun pernyataan itu tidak secara khusus menyebutkan bahwa Cina akan menyandarkan diri atau menaruh harapan untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan dari Uni Sovyet, namun arahnya sudah sangat jelas. Hal itu semakin nyata ketika Mao Zedong tak lama setelah proklamasi RRC segera berangkat ke Moskow yaitu pada tanggal 16 Desember 1949. Kunjungan itu sesungguhnya adalah dalam rangka ulang tahun Stalin, namun di dalamnya juga dibicarakan tentang perjanjian persahabatan di antara kedua negara. Perjanjian yang disebut *Zhong Su youhao tongmeng huzhu tiaoyue* atau perjanjian persahabatan, aliansi, dan saling bantu antara Cina dan Uni Sovyet, ditandatangani pada tanggal 14 Februari 1950.⁹⁴ Di dalamnya antara lain disepakati bahwa Uni Uni Sovyet akan memberi pinjaman kepada Cina senilai USD 300 juta, dan perjanjian itu akan berlaku selama 30 tahun.

Memperhatikan perkembangan yang melingkupi RRC dan sikap dunia terhadap RRC saat itu, menyebabkan penerapan kebijakan *yi bian dao* merupakan pilihan rasional bagi Cina, dan bukan sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Kekecewaan Mao Zedong dan para pemimpin, serta rakyat Cina pada umumnya atas sikap dan perlakuan negara-negara Barat, AS, dan sekutunya terhadap PKC maupun RRC telah membuat Cina sangat anti imperialisme. Hal itu juga telah membuat Cina dikenali sebagai ‘kekuatan yang tidak puas’.⁹⁵ Contoh peristiwa yang paling nyata mengecewakan Cina saat itu adalah, walaupun RRC telah memproklamirkan kemerdekaannya, ternyata tidak serta

⁹⁴ Choudhury Golam W., (1982), *China in World Affairs : The Foreign Policy of the PRC since 1970*, Boulder, Colorado : Westview Press, hlm. 18-19

⁹⁵ Camilleri Joseph, (1980), *Chinese Foreign Policy ; The Maoist era & its aftermath*, Seattle University of Washington Press, hlm. 47

merta menjadikannya wakil Cina di forum PBB. Upaya RRC untuk duduk di sana gagal karena Amerika Serikat lebih memilih Republik Cina (Taiwan), untuk mewakili Cina di forum dunia tersebut. AS bahkan membuat RRC semakin terisolasi dari dunia, dengan menerapkan ‘politik pembendungan’ atau *containment policy*.⁹⁶ Amerika Serikat juga terus mempropagandakan ‘bahaya komunis’, yang membuat banyak negara termasuk negara-negara tetangga RRC mengambil sikap ‘menunggu’ untuk membuka hubungan dengan RRC.⁹⁷

Di sisi lain, sebagai negara yang baru merdeka dan harus membangun berbagai aspek kehidupan bagi negara dan rakyatnya, RRC juga membutuhkan dukungan finansial. Dukungan itu tak mungkin didapatnya dari negara-negara Barat yang jelas-jelas sangat anti komunis. Uni Sovyet saat itu telah mampu menjadi pesaing bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Berlandaskan kesamaan ideologi dan hubungan yang telah terjalin sebelumnya,⁹⁸ Mao dan para pemimpin Cina lainnya menjadikan Uni Sovyet sebagai panutan, dan menganggapnya sebagai model yang harus dipelajari dan ditiru.⁹⁹ Dari sisi strategis Mao juga mengharapkan Uni Sovyet dapat memberikan perlindungan keamanan terhadap Cina. Mao bahkan ingin agar Stalin membantu Cina di bidang pertahanan tidak hanya dengan memberikan senjata, melainkan juga mengajarkan teknologinya. Cina pun berharap USSR bisa membantunya membangun infrastruktur untuk memproduksi senjata, sehingga kelak Cina mampu menjadi kekuatan dunia.¹⁰⁰

Perang Korea yang meletus pada bulan Juni 1950 turut mempersempit ruang gerak dan pilihan RRC. Alasan keterlibatan RRC dalam perang Korea adalah karena merasa berkewajiban membantu negara tetangga dan Kim Il Sung

⁹⁶ Kebijakan Pembendungan (*containment policy*) diterapkan Amerika pada masa perang dingin untuk membendung penyebaran paham komunis di dunia. Kebijakan ini didasari oleh kepercayaan Amerika Serikat atas kebenaran ‘Teori Domino’, yang berasumsi bahwa bila satu negara jatuh ke tangan komunis maka itu akan membahayakan negara tetangganya dan kawasan sekitarnya, juga membahayakan Eropa dan Amerika Serikat. Lihat Robert M. Blum, (1982). *Drawing The Line : The Origin of The American Containment Policy in East Asia*, New York : Norton

⁹⁷ Lanteigne, Marc, 2009, *Chinese Foreign Policy ; An Introduction*, London & New York : Routledge, hlm.3

⁹⁸ Uni Sovyet melalui Komintern telah berperan dalam proses berdirinya PKC dan terus mengikuti perkembangan dan membantu PKC walaupun di dalamnya terjadi juga beberapa ketegangan.

⁹⁹ Abdullah Dahana, (1986), *The Evolution of China's Policy Toward Malaysia Since 1949*, A Dissertation Submitted to The Graduate Division of The University of Hawaii in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy hlm. 91

¹⁰⁰ Jung, Chang, Jon Halliday, *Mao ...* Martha Wijaya & Widya Kirana (Penerjemah), 2007, hlm. 450

yang sama-sama berpaham komunis. Alasan lainnya adalah karena ketegangan di Korea juga mengancam keamanan dan keutuhan wilayah kedaulatan RRC. Landasan kekhawatiran Cina adalah berkaitan dengan tindakan yang dilakukan AS dalam perang itu. Tiga hari setelah pecahnya perang AS telah mendatangkan bantuan militernya ke Korea Selatan, dan mengirim pasukan Armada ke tujuh ke selat Taiwan dengan tujuan mencegah kemungkinan serangan terhadap Taiwan. RRC menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, oleh karena itu masuknya pasukan Amerika Serikat ke wilayah Taiwan merupakan pelanggaran, dan dianggap sebagai tindakan agresi. Mao Zedong segera melakukan protes dan menyerukan agar AS tidak mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Zhou Enlai bahkan telah meminta Duta Besar India untuk memperingatkan AS agar tidak melanggar batas garis lintang 38°, namun AS tidak menggubrisnya. Menyikapi perkembangan tersebut, Cina pun kemudian mengirimkan pasukannya dan terlibat langsung dalam perang Korea tersebut.¹⁰¹

Keterlibatan Cina dalam perang Korea mendatangkan banyak kerugian yang harus ditanggungnya. Salah satu konsekwensi langsung yang diterima RRC atas keterlibatannya itu adalah terhentinya proses negosiasi pembukaan hubungan diplomatik RRC dengan beberapa negara, termasuk dengan Inggris.¹⁰² Di sisi lain keterlibatan Cina dalam perang Korea menjadi sebuah tebusan yang sangat mahal, yang harus dibayar Mao dan Cina untuk mendapatkan kepercayaan Stalin.¹⁰³ Awalnya Cina berharap dengan keterlibatannya dalam perang itu akan semakin melicinkan jalan untuk memperoleh bantuan dan meningkatkan hubungannya dengan USSR. Harapan Cina ternyata meleset, karena bantuan yang dikirimkan USSR tidak seperti yang dijanjikannya.¹⁰⁴

Kerugian yang harus ditanggung Cina terus berlanjut ke bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan Cina untuk mengirim pasukan telah membebani anggaran belanja negaranya, sehingga mengganggu jalannya roda perekonomian Cina. Beban ekonomi itu menjadi semakin berat ketika Stalin meninggal pada

¹⁰¹ Hu Sheng (Chief Ed.), (1994), *A Concise History of The Communist Party of China*, Beijing : Foreign Languages Press, hlm. 410-411

¹⁰² "The Downing of New Diplomacy", www.washington.edu/uwpress/search/chapters/LIUCHC.pdf

¹⁰³ Hsu, Immanuel C Y, (1990), *The Rise of Modern China*, hlm. 675

¹⁰⁴ Dalam buku Hu Sheng, (1994), *A Concise History of...* digambarkan bahwa Uni Sovyet di saat-saat terakhir ternyata tidak mengirimkan pasukan udara yang dijanjikannya untuk mendukung pasukan RRC dalam perang tersebut, hlm. 415

tahun 1953. Nikita Khrushchev yang terpilih untuk menggantikan Stalin sebagai pemimpin Uni Sovyet ternyata menetapkan kebijakan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa, bantuan senjata yang dikirimkan Uni Sovyet untuk digunakan dalam perang Korea tersebut, adalah bagian dari hutang yang harus segera dibayar Cina. Pernyataan itu benar-benar menohok Cina, dan masalah ini kemudian menjadi salah satu sebab retaknya hubungan serta pecahnya aliansi RRC-Uni Sovyet.

Sempitnya ruang gerak RRC di tahun pertama tercermin pada kenyataan bahwa, sampai ulang tahun pertama kemerdekaan RRC baru 17 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Negara-negara itu adalah Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Hungaria, Korea, Czechoslovakia, Polandia, Mongolia, Jerman, Albania, Burma, India, Vietnam, Denmark, Swedia, Swiss, dan Indonesia.¹⁰⁵ Perdana Menteri Indonesia Mohammad Hatta mengirimkan kawat yang berisi keinginan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan RRC pada tanggal 15 Januari 1950. Mao Zedong yang saat itu sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow, pada tanggal 26 Januari 1950 mengirimkan kawat kepada Liu Shaoqi sebagai Ketua negara ad interim agar mempersiapkan pembukaan hubungan tersebut.¹⁰⁶ Meskipun demikian jawaban kepada Indonesia tidak segera dikirimkan. Zhou Enlai yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri merangkap menteri luar negeri, baru mengirimkan kawat jawaban kepada Hatta pada tanggal 28 Maret 1950. Lambatnya pengiriman jawaban itu tampaknya disebabkan oleh adanya keraguan RRC terhadap Indonesia.

Keraguan RRC terutama disebabkan oleh masih adanya tujuh konsulat Republik Cina (Taiwan) di Indonesia. RRC menduga Indonesia akan menjalankan kebijakan dua Cina, di sisi lain RRC saat itu masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari kekuatan pro Barat. Keberadaan tujuh konsulat itu merupakan bagian dari hubungan pemerintahan kolonial Belanda dengan Republik Cina di masa lalu. Pemerintah RI tidak menjalin hubungan diplomatik

¹⁰⁵ Zhou Enlai, "Chinese People Will not Tolerate Aggression", *World News and Views*, Vol. 30, No. 41 (October 14, 1950), Pidato pada peringatan hari Kemerdekaan Republik Rakyat Cina yang pertama, <http://www.marxists.org/reference/archive/zhou-enlai/1950/10/x01.htm>, diunduh pada 12 Januari 2011, pukul 22.00.

¹⁰⁶ File no. 105-00003-07, Archives of the Ministry of Foreign Affairs, PRC. Dikutip dari Hong Liu, (2011), *China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965*, Singapore : NUS Press in association with Kyoto University Press, Japan, hlm. 175

dengan Republik Cina, bahkan RI tidak menanggapi surat pengakuan kedaulatan yang dikirimkan Republik Cina pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu pemerintahan Republik Cina sedang dalam proses kepindahan ke Taiwan. Menurut Mozingo, sebenarnya ketika Hatta mengirim kawat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan RRC, Ia juga mengirim nota kepada perwakilan Taiwan untuk segera menutup konsulatnya di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada maksud Indonesia untuk mengakui atau menjalin hubungan diplomatik dengan dua pemerintahan Cina.¹⁰⁷ Fakta-fakta di atas menghapus keraguan RRC dan segera dikirimkanlah kawat yang menyatakan pengakuan RRC terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Hatta kemudian menjawab kawat RRC tersebut pada tanggal 13 April 1950, maka sejak saat itu secara resmi telah terjalin hubungan diplomatik Cina- Indonesia.

Kedua belah pihak sudah saling mengakui kedaulatan masing-masing, namun hubungan yang lebih definitif dan kongkrit tidak segera berjalan. Pada bulan Mei 1950 pemerintah RRC melanjutkan proses hubungan itu dengan menetapkan Wang Renshu sebagai Duta Besar. Wang datang ke Jakarta pada bulan Juli 1950 dan menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Soekarno pada bulan Agustus. Berbeda dengan RRC yang segera mengirimkan duta besarnya, Jakarta baru mengirim Isak Mahdi sebagai kuasa usaha pada bulan Januari 1951. Tertunda dan tidak setaranya tingkat perwakilan yang dikirim Indonesia ke Cina, adalah disebabkan oleh masih adanya keberatan dari sejumlah pihak di Indonesia atas pembukaan hubungan diplomatik RI-RRC. Keberatan yang berkaitan dengan ideologi komunis yang dianut RRC itu terutama datang dari para tokoh Islam dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Mereka belum bisa melupakan peristiwa Madiun tahun 1948 yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tokoh-Tokoh itu khawatir kehadiran perwakilan RRC di Indonesia selain akan membesarkan PKI juga akan membangkitkan simpati kaum Tionghoa terhadap nasionalisme Cina.¹⁰⁸

Duta Besar Indonesia untuk RRC yang pertama yaitu Arnold Mononutu baru menempati posnya di Beijing pada bulan Oktober 1953. Tertundanya

¹⁰⁷ Mozingo, David, (2007), *Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967*, Jakarta, Kuala Lumpur : Equinox Publishing, hlm. 89

¹⁰⁸ Mozingo, *Chinese Policy...* hlm. 86-87

pengiriman pejabat setingkat duta besar itu selain disebabkan oleh kondisi politik di dalam negeri Indonesia yang terus berganti kabinet, juga dikarenakan perilaku Dubes Wang Renshu. Setibanya di Jakarta Wang secara agresif berupaya mendekati kaum Tionghoa Indonesia. Wang juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan dibukanya kembali ketujuh konsulat yang ditinggalkan pemerintahan Republik Cina. Melalui perundingan yang alot akhirnya pemerintah Indonesia mengizinkan RRC membuka kantor konsulat di tiga kota besar lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Banjarmasin, dan Makasar. Hanya dalam waktu sekitar satu tahun, Wang Renshu dan koleganya berhasil menarik sekitar 600 - 700 ribu orang kaum Tionghoa untuk menjadi warga negara RRC dan menolak kewarganegaraan Indonesia. Jumlah itu cukup besar karena merupakan 40% dari seluruh kaum Tionghoa yang saat itu berada di Indonesia. Selain itu, RRC juga berhasil menarik *Banf of China* yang semula berafiliasi ke Taiwan, untuk bergabung dengan RRC.¹⁰⁹ Aktivitas Wang dan kawan-kawan itu membuat pihak Indonesia tidak nyaman dan mengajukan protes kepada RRC. Bahkan Indonesia kemudian menyatakan Wang Renshu sebagai *persona non grata*. Perkembangan yang tidak menyenangkan itu menyebabkan Wang ditarik dari Jakarta pada akhir tahun 1951. Posisi Wang digantikan oleh Huang Zhen yang mulai bertugas pada bulan November 1954.

Pengiriman Mononutu sebagai Duta Besar Indonesia pertama tersebut menandai mulai membaiknya hubungan kedua negara. Peristiwa itu diikuti dengan penandatanganan nota kerja sama Cina-Indonesia. Sejalan dengan perkembangan di dalam negeri masing-masing hubungan kedua negara pun terus meningkat. Di Cina, penerapan 'model Sovyet' dalam pembangunannya membuat kondisi sosial-ekonomi mulai stabil, namun secara politis Mao Zedong merasa tidak puas. Menurut Mao penerapan pembangunan model Sovyet telah menyebabkan kesenjangan kaya-miskin, buruh-petani, desa-kota, semakin lebar. Mao juga menegaskan bahwa. "melaksanakan *yi bian dao* dengan bersandar pada Uni Sovyet adalah strategi yang bagus, tapi tidak perlu secara membabi buta meniru kebijakan Uni Sovyet."¹¹⁰ Sedangkan dalam hubungan luar negeri Cina mulai melihat bahwa, dampak dari kebijakan *yi bian dao* dan keterlibatannya

¹⁰⁹ *Tempo-on line*, 04 Maret 1989 ; 11 Agustus 1990 (<http://majalahlm.tempointeraktif.com/#>)

¹¹⁰ Lanteigne, Marc, 2009, *Chinese Foreign Policy ...*, hlm. 3

dalam Perang Korea telah membuat diplomasi Cina tidak leluasa. Kebijakan-kebijakan itu membuat Cina semakin terisolir dari pergaulan antar bangsa di kawasan maupun di dunia. Hal itu juga telah menyebabkan Amerika Serikat semakin menegatkan kebijakan pembendungannya terhadap Cina.

Pembukaan UUD RI yang ditetapkan pada tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia berkewajiban “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Berlandaskan itu maka sejak awal Indonesia telah mencanangkan politik luar negeri yang ‘bebas aktif’. Prinsip itu membuat sikap Indonesia cenderung untuk tidak mau terikat oleh kekuatan manapun. Di tengah persaingan dua kubu yang semakin meningkat di dunia, sikap itu ternyata telah membuat Indonesia mempunyai posisi tawar tinggi dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Menlu AS saat itu Dean Acheson menyatakan bahwa. “mempertahankan Indonesia sebagai kekuatan anti komunis semakin lama semakin penting”.¹¹¹ Posisi tawar Indonesia semakin tinggi dan bermakna di era pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo, yang dikenal memiliki cara pandang yang sangat anti kolonialis. Cara pandang Ali tersebut sangat bermanfaat bagi Cina, namun berbahaya bagi Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat saat itu merasa sangat berkepentingan atas perkembangan di Asia Tenggara, dan sangat yakin akan kebenaran ‘teori domino’, sehingga menjadi sangat perhatian terhadap sikap yang akan diambil Indonesia. John Foster Dulles yang menggantikan Dean Acheson menggambarkan efek domino tersebut di Asia Tenggara sebagai berikut,

“...jika Indocina dilanda komunisme dan pemerintahan non komunisnya tersingkir, serta suatu pemerintahan yang sepenuhnya komunis dibentuk, maka hampir pasti bahwa gerakan berikutnya adalah Siam yang sudah lemah, gerakan berikutnya mungkin di Malaya Utara atau Burma, atau keduanya, dan gerakan berikutnya lagi di Indonesia, dan pada saat itu seluruh Asia Tenggara akan hilang”¹¹²

Kekhawatiran Amerika Serikat tersebut semakin bertambah dengan mundurnya Perancis dari Indocina, karena kealahannya atas tentara Ho Chi Minh. Hal itu

¹¹¹ Hong Liu, (2011), *China and the Shaping of ...*, hlm. 176

¹¹² US Congress, Senate, 83rd Congress, 1st Session, Executive Sessions, Vol. V (Washington DC 1977), hlm. 385, dikutip dari Said, 1998, hlm. 82

membuat Amerika Serikat merasa perlu untuk membuat pakta pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Gagasan Amerika Serikat tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk *South East Asia Treaty Organization* (SEATO) pada tahun 1954.¹¹³ Indonesia menolak bergabung di dalamnya, karena Presiden Soekarno menganggap SEATO sebagai alat agresi Barat dengan nama baru. Menurutnya kehadiran SEATO lebih merupakan ancaman daripada solusi bagi keamanan dan kedamaian Asia Tenggara. Selain Indonesia, Burma juga tidak bergabung dengan SEATO dengan alasan Cina adalah tetangga dekatnya, sehingga lebih aman bila Burma burhubungan baik dengan RRC. Tidak bergabungnya Indonesia dan Burma ke dalam SEATO merupakan kelemahan organisasi itu, karena justru di kedua negara inilah ancaman komunis lebih serius, ditambah lagi Malaya saat itu cenderung masih bersikap netral.

Perkembangan Asia Tenggara seperti di atas menguntungkan bagi Cina, dan pada tahun 1954 Cina mulai secara intensif mengumandangkan prinsip koeksistensi damai sebagai landasan politik luar negerinya.¹¹⁴ Kehadiran dan peran RRC dalam konferensi Jenewa yang membahas penyelesaian konflik di Korea dan Indocina, telah memperbaiki citra buruknya sebagai kekuatan yang selalu mengambil jalan revolusi. Hal itu juga meningkatkan statusnya sebagai salah satu kekuatan di Asia.¹¹⁵ Sementara itu Indonesia bersama empat negara lainnya yaitu India, Pakistan, Srilangka, Burma bertemu di Kolombo, bersepakat untuk menyelenggarakan konferensi negara-negara Asia dan Afrika. Upaya itu dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian regional maupun internasional.

Konferensi Asia Afrika (KAA) terselenggara di Bandung pada bulan April 1955 diikuti oleh 29 negara. Cina hadir memenuhi undangan penyelenggara, dan Perdana Menteri Zhou Enlai menjadi salah satu bintang selama konferensi. Pada kesempatan itu Zhou mengajukan Tujuh Prinsip¹¹⁶ yang menjadi pedoman

¹¹³ SEATO terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

¹¹⁴ "Peaceful Coexistence—Two Diametrically Opposed Policies", <http://www.marxist.org/subject/china/documents/polemic/peaceful.htm>, diunduh pada 23 Mei 2011, pkl.10.15

¹¹⁵ Camilleri Joseph, (1980), *Chinese Foreign Policy ; ...*, hlm. 79

¹¹⁶ Tujuh prinsip itu adalah 1) prinsip saling menghormati kedaulatan, 2) tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, 3) tidak saling ancam atau agresi, 4) mengakui persamaan antar ras,

Cina dalam menjalin hubungan dengan negara-negara Asia dan Afrika. KAA berhasil mendeklarasikan Lima Prinsip Koeksistensi Damai dan Dasa Sila Bandung.¹¹⁷ Kedua deklarasi itu kemudian menjadi pedoman bagi pengembangan hubungan di antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam persidangan PBB ke 15 tahun 1960, Dasa Sila Bandung menjadi landasan bagi ‘Deklarasi Pembeneran Kemerdekaan’ kepada negara-negara dan bangsa yang terjajah. Deklarasi PBB itu kemudian lebih dikenal sebagai ‘Deklarasi Dekolonisasi’.

Hubungan RI-RRC semakin baik dengan ditandatanganinya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan di sela-sela berbagai kegiatan KAA. Perjanjian tersebut mengizinkan kaum Tionghoa memilih untuk menjadi warga RI atau RRC dalam jangka waktu dua tahun sejak diterapkannya perjanjian tersebut. Pada saat itu untuk pertama kalinya kaum Tionghoa mempunyai hak menentukan kewarganegaraannya sendiri, bahkan mereka dapat memiliki kewarganegaraan non Cina. Seperti tercatat dalam sejarah bahwa, sejak zaman Dinasti Qing (1644-1911) pemerintah Cina menggunakan asas *ius sanguinis* dalam penentuan kewarganegaraan rakyatnya. Dengan demikian semua orang yang berdarah Cina, oleh pemerintah Cina dianggap sebagai warga negaranya. Penerapan azas itu membuat kaum *Huaqiao* maupun keturunannya berkewarganegaraan ganda. Hal itu tentu bisa sangat merugikan negara yang ditinggali oleh kaum *Huaqiao*

5) persamaan antar bangsa, (6) menghargai hak masing-masing untuk memilih sistem politik dan ekonominya, (7) saling menguntungkan dalam hubungan ekonomi dan budaya. Ketujuh prinsip ini kemudian terakomodasi dalam rumusan lima prinsip koeksistensi damai yang dijadikan pedoman dasar hubungan antar bangsa (Camilleri, 1980, hlm. 79-80).

¹¹⁷ **Lima Prinsip Koeksistensi Damai** adalah : 1) Saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing, 2) Saling tidak menyerang, 3) Saling tidak mencampuri urusan masing-masing di dalam negeri, 4) Persamaan dan Saling menguntungkan, 5) Koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai ; **Dasa Sila Bandung** yaitu : 1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas yang termuat di dalam piagam PBB, 2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. 4) Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soal-soal dalam negeri negara lain. 5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB. 6) (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. 7) Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB. 9) Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional

tersebut. Pola perjanjian dwi kewarganegaraan tersebut dianggap sebagai salah satu solusi tepat, dalam menyelesaikan ketegangan akibat kewarganegaraan ganda yang tidak diakui di Indonesia ataupun di negara lainnya.

KAA merupakan peristiwa monumental yang menandai munculnya 'wilayah bebas', yang terlepas dari tekanan dua blok kekuatan yang tengah bersaing saat itu. Semangat Bandung menjadi kekuatan bagi gerakan kemerdekaan nasional, dan memperkuat ikatan di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika yang baru merdeka. Kehadiran Cina dalam KAA merupakan langkah baru dan strategis dalam politik luar negerinya. Langkah itu telah memperbesar peluang RRC untuk keluar dari pembendungan Amerika Serikat, maupun untuk menyudahi kebijakan bersandar kepada Uni Soviet. Sejak kehadirannya di KAA, Cina terus mengembangkan hubungannya dengan negara-negara manapun di dunia, termasuk dengan negara-negara non sosialis.

3.2 Dari *Da Yue Jin* hingga Strategi Kekuatan Ke Tiga

Keberhasilan Zhou Enlai dalam penampilannya di KAA, memberi kepercayaan diri yang besar kepada Cina untuk tampil lebih mandiri di pergaulan internasional. Di sisi lain, terjadi beberapa peristiwa yang menimbulkan ketegangan dalam hubungannya dengan Uni Soviet. Ketegangan itu umumnya dipicu oleh ketidakpuasan Cina atas sikap Uni Soviet yang sering terlihat kurang menghargai Cina. Sesungguhnya persahabatan Cina-Uni Soviet memang bukanlah sebuah persahabatan yang tulus, secara personal Stalin tidak pernah benar-benar menyukai Mao Zedong, demikian juga sebaliknya. Hal itu sudah terlihat sejak munculnya konflik antara kaum Bolsheviks¹¹⁸ dengan kaum Maois dalam tubuh PKC di era Republik Sino- Soviet pada akhir tahun 1920-an.¹¹⁹

Dalam sejarah tercatat bahwa, Uni Soviet mengakui kedaulatan Cina sehari setelah RRC diproklamirkan, dan pada hari berikutnya hubungan diplomatik kedua negara pun diresmikan. Cina punya harapan tinggi atas hubungan itu, namun kenyataannya tidaklah semulus itu. Ada kejadian menarik

¹¹⁸ Dalam kaitan ini yang dimaksud adalah para mahasiswa atau intelektual Cina yang pernah belajar di Uni Soviet dan cenderung patuh pada kebijakan-kebijakan Komintern (Lihat Chesneaux, at.al. (1977), *China From...* hlm. 227-228

¹¹⁹ Chesneaux, at.al. (1977), *China From...* bab 8

ketika bulan Desember 1949, Mao berkunjung ke Moskow dalam rangka ulang tahun Stalin ke 70, sekaligus untuk membicarakan perjanjian persahabatan kedua negara dan bantuan Uni Sovyet untuk Cina. Huang Anyu menggambarkan bahwa pada saat pembicaraan, Mao sempat merasa kesal atas sikap Stalin yang seperti tidak mengerti keinginannya sehingga Mao meminta Zhou Enlai untuk ikut menyelesaikan pembicaraan tersebut.¹²⁰ Sikap Stalin tersebut didasari pemikiran bahwa USSR adalah pemimpin gerakan komunis dunia, dan RRC adalah bagian dari satelitnya. Sedangkan perjanjian persahabatan antara Cina-USSR akan menunjukkan kesetaraan posisi RRC dengan USSR, sehingga Stalin merasa kurang nyaman dengan posisi tersebut. Alhasil pertemuan Mao-Stalin tidak menghasilkan kesepakatan yang kongkrit. Setelah dilakukan negosiasi selama sekitar dua bulan, barulah Stalin melunak dan perjanjian pun ditandatangani pada tanggal 14 Februari 1950. Hal-hal seperti itu merupakan konflik terselubung, yang membuat hubungan kedua negara semakin lama semakin sulit dipertahankan.

Ketegangan hubungan Sino-USSR mulai muncul ke permukaan, ketika Nikita Khrushchev terpilih sebagai pengganti Stalin dalam Kongres Partai Komunis Uni Sovyet (PKUS) ke 20 tahun 1956. Saat itu Khrushchev mengkritik Stalin sebagai “tidak bijaksana”, kritik itu menandai mulai terjadinya de-Stalinisasi. Cina atau tepatnya Mao Zedong melihat hal itu merupakan tanda kehancuran pemerintahan komunis di Uni Sovyet,¹²¹ Selain itu muncul pula perbedaan pendapat di antara kedua pihak tentang prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam hubungan antara negara-negara sosialis dan non sosialis. Mao mengatakan bahwa, Khrushchev adalah sosok yang ‘lemah’ yang terlalu ambisi untuk meninggalkan doktrin revolusioner, dan terlalu berharap untuk bisa berkoeksistensi damai dengan Amerika Serikat dan Barat.¹²² Sedangkan Khrushchev berpendirian bahwa jalan revolusi akan memicu perang dunia ke III yang akan merugikan umat manusia.

¹²⁰ Huang Anyu (黄安余), (2005), *新中国外交史...*, hlm. 31

¹²¹ Tatsumi, Okabe, “Hubungan Cina dengan Negara-Negara dan Parta-Partai Komunis”, dalam Scalapino & Jusuf Wanandi (Eds.), *Masalah Keamanan Asia, 1990*, hlm. 138

¹²² Lanteigne, Marc, 2009, *Chinese Foreign Policy...*, hlm. 4

Pertikaian Cina-USSR yang berawal dari perbedaan interpretasi atas Marxisme-Leninisme, berpengaruh pula terhadap tingkat kepercayaan satu sama lain, dan merebak ke masalah-masalah lainnya sehingga mengganggu hubungan kedua negara. Contohnya pada tahun 1958 Uni Sovyet mengusulkan untuk membentuk gabungan armada bersama di perairan Cina, dan gabungan pengawasan radar bersama. Bagi Cina usulan itu merupakan intervensi terhadap urusan dalam negeri dan kedaulatannya, karena itu Cina menolaknya. Penolakan itu tentu saja mengecewakan Uni Sovyet, ketegangan hubungan kedua negara pun mulai menyeruak¹²³ Di pihak lain RRC juga melakukan langkah-langkah yang pada akhirnya membuat hubungannya dengan USSR semakin merenggang.

Di tengah krisis hubungan itu RRC beberapa kali mengirim perwakilan untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat. RRC ingin meredakan ketegangan dengan AS khususnya di selat Taiwan, namun pembicaraan itu selalu gagal. Amerika Serikat bahkan semakin memperkuat armadanya di sana dan semakin memperketat pembendungannya terhadap Cina.¹²⁴ Menghadapi kenyataan itu, pada tanggal 29 Agustus 1958 Radio Beijing mengumumkan bahwa RRC akan membebaskan Taiwan. Hal itu diwujudkan Cina dengan melakukan pengeboman ke pulau Quemoi, padahal armada Amerika Serikat terus siaga di selat Taiwan. Sesuai perjanjian persahabatan RRC-USSR, sebenarnya Cina mengharapkan Uni Sovyet mendukung dan membantunya, namun USSR tidak memenuhinya. Uni Sovyet bukan saja tidak menanggapi langkah Cina dengan jelas, tapi bahkan meminta Cina menghentikan serangan tersebut karena khawatir akan merusak hubungan USSR-AS.¹²⁵ Banyak pengamat yang menilai bahwa langkah provokasi itu sengaja dilakukan Cina untuk menguji solidaritas Uni Sovyet, dan ternyata Uni Sovyet telah mengecewakan Cina.

Pada tahun 1960, Uni Sovyet mulai menarik ahli-ahlinya yang diperbantukan di Cina. Padahal dalam perjanjian persahabatan tahun 1950 dikatakan bahwa, bantuan dan kerjasama akan berlangsung selama 30 tahun. Perjanjian itu juga menyebutkan bahwa kedua pihak akan saling membantu

¹²³ Tatsumi, Okabe, dalam Scalapino & Jusuf Wanandi (Eds.), (1990), *Masalahm...*, hlm. 139

¹²⁴ Choudhury, Golam W., (1982), *China in World Affairs...* hlm. 31

¹²⁵ Hu Sheng (Chief Ed.), (1994), *A Concise History of...*, hlm. 597

ketika salah satu di antaranya terlibat konflik dengan negara lain. Ternyata Uni Sovyet tidak melakukannya ketika Cina berhadapan dengan AS dalam kasus Taiwan, demikian pula ketika Cina bersengketa dengan India berkaitan dengan masalah perbatasan pada tahun 1962. Kekecewaan Cina semakin memuncak ketika Uni Sovyet bersama Amerika Serikat menandatangani *Test Ban Treaty*, yaitu perjanjian yang melarang percobaan senjata nuklir di luar angkasa dan bawah laut. Bagi Cina perjanjian USSR-AS tersebut merupakan bukti persekongkolan untuk menghentikan pengembangan nuklir Cina yang saat itu sedang berjalan.¹²⁶ Cina merasa ditinggalkan dan hal itu kemudian mendorong Cina melakukan percobaan bom nuklirnya yang pertama pada bulan Oktober 1964.¹²⁷ Sejak saat itu Cina menyebut Uni Sovyet sebagai revisionis, dan hubungan diplomatik di antara kedua negara pun terputus.

Upaya Cina atau Mao Zedong untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Uni Sovyet sebenarnya telah dimulai sejak 1958. Saat itu RRC menghentikan penggunaan 'model Sovyet' dalam pembangunan negaranya, dan menggantinya dengan menetapkan program pembangunan *da yue jin* atau 'lompatan jauh ke depan'. Program pembangunan ini mencerminkan 'kebijakan kiri' yang revolusioner dan merupakan pembuktian bahwa Cina telah ada di tahap 'transisi menuju negara sosialis'.¹²⁸ Targetnya antara lain adalah, Cina akan menjadi negara industri yang menyamai Inggris dalam 15 tahun, dan salah satu langkahnya adalah dengan sentralisasi produksi dan pembentukan komune-komune rakyat.¹²⁹

Da yue jin adalah program pembangunan yang lebih banyak bermodalkan semangat revolusi dan tanpa persiapan yang matang, sehingga tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang datang membelitnya. Alih-alih mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, program itu justru semakin menyengsarakan rakyat. Dampak kegagalan *da yue jin* semakin parah dengan terjadinya bencana alam berupa kekeringan yang berkepanjangan dan gempa bumi, penderitaan rakyat

¹²⁶ Choudhury, Golam W., (1982), *China in World Affairs...* hlm. 32

¹²⁷ Kornberg Judith F & John F Faust, (2005), *China World Politic : Policies, Processes, Prospects*, Boulder, London : Lynne Rienner Publisher, hlm. 103

¹²⁸ Pada tahun 1958 Mao Zedong menyatakan RRC telah ada di tahap 'transisi ke sosialisme', alasannya adalah karena Cina telah selesai melaksanakan kolektivisasi pertanian dan mulai menerapkan sistem komune.

¹²⁹ Lihat Hu Sheng (Chief Ed.), (1994), *A Concise History of...*, hlm. 532-565

Cina pun semakin lengkap. Pada akhirnya keadaan itu juga mengguncang stabilitas sosial-politik Cina, yang berujung pada terjadinya perubahan konstalasi politik dalam negeri Cina. Mao Zedong tergusur dari posisi sebagai Ketua Negara, jabatan presiden dihidupkan kembali dan yang menempatinya adalah Liu Shaoqi. Pergeseran posisi Mao itu menyebabkan Ia kemudian membangun markas kekuatan baru di Shanghai. Dengan dukungan dari militer khususnya Tentara Pembebasan Rakyat, yang saat itu dipimpin oleh Lin Biao, Mao kemudian melancarkan Revolusi Kebudayaan.

Sesungguhnya *da yue jin* merupakan langkah Mao untuk menunjukkan kemandirian Cina dan melepaskan diri dari bayang-bayang Uni Sovyet. Dengan pilihan langkah itu berarti Cina siap menghadapi tekanan dari dua kubu sekaligus yaitu dari kubu sosialis maupun kapitalis. Kebijakan itu membawa konsekwensi tersendiri bagi posisi internasional Cina yang saat itu belumlah kuat. Jumlah negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRC masih sedikit, Cina masih harus berupaya untuk mendapatkan kawan yang lebih banyak, Demi mencapai tujuan itu Cina terus mengumandangkan prinsip koeksistensi damai serta menawarkan kerja sama dan bantuan ke berbagai negara di Asia dan Afrika. Sayangnya sikap itu juga dibarengi dengan langkah provokatif Cina di selat Taiwan, pertikaian dengan India, dan percobaan bom nuklir. Semua kebijakan itu telah membuat sikap Cina terlihat kontradiktif, sehingga membuat bangsa-bangsa lain tidak mudah untuk mempercayainya. Kondisi itu menyebabkan RRC sulit untuk keluar dari isolasi AS, maupun untuk bersaing dengan Uni Sovyet. Peluang untuk mendapatkan teman baru, atau berperan lebih menonjol di dunia pun menjadi tidak mudah didapatkan.

Memperhatikan perkembangan dunia dan keberadaan Cina saat itu, Mao Zedong kemudian mengemukakan penyesuaiannya atas konsep 'zona antara' atau *zhongjian didai*. Menurut Mao, zona antara adalah daerah penyangga yang terletak di antara dua kekuatan adi daya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di dalam zona antara itu terdapat negara-negara kapitalis non Amerika Serikat, daerah-daerah jajahan, setengah jajahan, serta negara-negara yang baru merdeka. Bila salah satu kubu ingin menjadi supremasi dunia maka harus menguasai dulu seluruh wilayah atau negara di zona antara, agar dapat meruntuhkan kubu yang

lainnya. Konsep ini pertama kali dikemukakan Mao pada tahun 1946 dalam sebuah wawancara dengan wartawan Amerika Serikat Anna Louise Strong. Saat itu kekuatan sosialis masih monolit dibawah payung Uni Sovyet. Berikut ini adalah kutipan ucapan Mao,

“美國和蘇聯中間隔著極其遼闊的地帶，這裡有歐、亞、非三洲的許多資本主義國家和殖民地、半殖民地國家。美國反動派在沒有壓服這些國家之前，是談不到進攻蘇聯的”¹³⁰

“Di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dipisahkan oleh sebuah daerah yang sangat luas, di dalamnya ada Eropa, Asia, Afrika, di tiga benua itu ada sejumlah negara kapitalis, kolonialis, dan semi-kolonialis. Sebelum kaum reaksioner AS mampu menaklukkan negara-negara tersebut, maka tidak akan bisa menjatuhkan Uni Soviet.”

Berkaitan dengan semakin merebaknya konflik Cina-Uni Sovyet pada akhir tahun 1950-an, Mao mengatakan bahwa di dunia selain ada dua kekuatan adi daya juga ada ‘kekuatan ke tiga’. Kekuatan itu terdiri dari negara-negara demokratis yang dikenal juga dengan sebutan ‘kekuatan zona antara’ atau *zhongjian lilian*.¹³¹ Konsep itu kemudian dikembangkan lagi menjadi *di er zhongjian didai* atau ‘zona antara ke dua’. Pengembangan tersebut dilakukan sejalan dengan terputusnya hubungan Cina-Uni Sovyet dan terlihatnya kecenderungan konflik di antara negara-negara kapitalis, terutama berkaitan dengan sikap beberapa negara Eropa yang menentang Amerika Serikat. Tentang *di er zhongjian didai* Mao mengatakan bahwa, zona antara itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu zona antara pertama meliputi negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin. Sedangkan zona antara ke dua adalah negara-negara Eropa, Kanada, Amerika Utara, Oceania, dan Jepang.

Berlandaskan konsep zona antara itu, Cina mengembangkan politik luar negeri yang berupaya menggalang kekuatan ke tiga. Dengan cara itu Cina bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Para pengamat Barat khususnya David Mazingo menyebut langkah RCC tersebut sebagai ‘strategi kekuatan ke tiga’ atau *third force strategy*. Terkait dengan

¹³⁰“和美国記者安娜·路易斯·斯特朗的谈话“(Percakapan dengan wartawan Amerika Anna Louise Strong), 1946年8月6日(6 Agustus 1946), dalam *毛澤東選集 (Karya-karya Terpilih Mao Zedong)*, (1960), 第四卷 (jilid IV), hlm. 1191.

¹³¹ Huang Anyu (黃安余), (2005), *新中國外交史*, hlm. 11

kebijakannya tersebut RRC juga menolak masuk ke PBB selama PBB tidak bisa bersikap netral, atau bebas dari tekanan Amerika Serikat maupun Uni Soviet. RRC berupaya mengembangkan pengaruhnya dengan menawarkan kerjasama dan bantuan, kepada berbagai negara yang baru merdeka, terutama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, atau negara-negara zona antara pertama. Dalam suatu wawancara Mao Zedong bahkan mengatakan bahwa, “Perancis, Jerman, Itali, Inggris, bila mereka tidak bisa berhenti menjadi agen Amerika Serikat, maka Jepang dan kami (RRC) adalah kekuatan ke tiga itu”.¹³²

Konsep zona antara itu pada tahun 1973 dikembangkan lagi menjadi Teori Tiga Dunia, yang dipergunakan RRC dalam melihat tatanan dunia internasional. Dunia pertama adalah kekuatan adi daya Amerika Serikat dan Uni Soviet. dunia ke dua adalah negara-negara di zona antara ke dua, dan dunia ke tiga adalah negara-negara yang baru tumbuh atau sedang berkembang yang umumnya ada di zona antara pertama. Hubungan di antara ketiga dunia ini menurut Mao adalah hubungan eksploitatif di mana negara yang kuat mengeksploitasi negara lain yang lebih lemah. Dengan pola hubungan itu maka negara di dunia ke dua berkarakter dualistik, di satu sisi mengeksploitasi dan di sisi lain juga dieksploitasi oleh yang lebih kuat. RRC menempatkan dirinya ke dalam dunia ke tiga dan akan bekerja sama dengan negara lainnya dalam melawan sang adidaya.¹³³

Sementara itu hubungan RRC dengan Indonesia yang sejak tahun 1953 semakin membaik, pada akhir tahun 1959 mengalami guncangan yang cukup keras. Ketegangan terjadi sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 (PP 10 Tahun 1959) oleh pemerintah Indonesia. Peraturan itu melarang warga asing berniaga eceran di luar wilayah tingkat kabupaten, dalam rangka melindungi pengusaha lokal. Di beberapa daerah pelaksanaan PP tersebut dibarengi dengan pelarangan dan bahkan pengusiran terhadap warga asing yang tinggal di wilayah pedesaan (seperti terjadi di Jawa Barat). Oleh karena itu terjadilah kerusuhan anti asing, yang akhirnya menjadi kerusuhan anti Tionghoa. Kerusuhan itu menimbulkan kerugian materil yang besar dan jatuhnya korban luka-luka maupun korban jiwa.

¹³² Camilleri Joseph, (1980), *Chinese Foreign Policy ; ...*, hlm. 19-20

¹³³ Huang Anyu (黄安余), (2005), *新中国外交史...*, hlm. 10-13

Jatuhnya korban menyulut ketegangan dalam hubungan Cina-Indonesia. Pemerintah RRC yang di dalam negerinya saat itu sedang mengobarkan semangat revolusi dan kemandirian, bereaksi keras dan mengajukan protes kepada pemerintah Indonesia. Bahkan RRC mengirimkan kapal untuk mengangkut warga Tionghoa ‘pulang’ ke Cina. Jumlah warga Tionghoa yang akan pulang diperkirakan mencapai seratus ribu orang lebih,¹³⁴ dalam angka yang lebih rinci dikatakan bahwa jumlahnya mencapai 119.000 orang. Menurut Mazingo, RRC telah mencoba ‘memanfaatkan’ peristiwa itu untuk menekan Indonesia. Cina berasumsi bahwa, bila banyak warga Tionghoa yang ditarik pulang maka perekonomian Indonesia akan terganggu, dan hasil akhirnya diharapkan Indonesia akan merasa tergantung kepada RRC. Selain itu RRC juga melihat kemungkinan adanya sejumlah modal yang akan dibawa oleh kaum Tionghoa tersebut.

Harapan RRC itu ternyata merupakan harapan kosong, karena Cina harus menghadapi kenyataan bahwa warga Tionghoa yang ingin pulang kebanyakan sudah berusia lanjut atau paruh baya. Latar belakang mereka pun rata-rata adalah pedagang biasa, yang tidak mempunyai manfaat berarti bagi pengembangan modal atau perekonomian Cina secara umum. Hal itu membuat adaptasi mereka terhadap kehidupan di Cina tidaklah mudah. Kenyataan itu membuat RRC meninjau kembali sikapnya, dan menghentikan kegiatan penjemputan tersebut. RRC bahkan menyerukan kepada seluruh warga Tionghoa untuk taat kepada peraturan pemerintah setempat.¹³⁵ Tentang perlakuan pemerintah RRC terhadap warga Tionghoa yang memilih pulang ke Cina digambarkan seperti berikut,

“Orang-orang Cina Indonesia yang kembali ke RRC mendapat perlakuan buruk, dijadikan target kampanye menentang agen-agen kapitalis; mendapat tugas re-edukasi. Orang Cina Indonesia yang mempunyai *remittance* besar kepada RRC selama berada di Indonesia, mendapat perlakuan istimewa ; sebaliknya, yang miskin dikonsentrasikan bekerja di sektor buruh kasar”¹³⁶

¹³⁴ Suryadinata Leo, Dr., (1984), *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Press, hlm. 142

¹³⁵ Mazingo, David, (2007), *Chinese Policy ...*, hlm. 175

¹³⁶ Kerjasama Litbang Deplu & USU, (1989), “Prospek Hubungan RI-RRC dan Negara-Negara Sosialis Eropah Timur”, Jakarta : Departemen Luar Negeri RI, hlm. 104

Ketegangan yang sempat merebak cukup jauh itu tidak sampai menyebabkan rusaknya hubungan kedua negara. Sebaliknya Beijing kemudian menunjukkan sikap yang lebih kooperatif. RRC bahkan kemudian mendukung Indonesia ketika Indonesia memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962. RRC juga mendukung ketika Indonesia berkeinginan untuk merebut kembali Irian Barat. Dalam kaitan ini RRC cukup jeli untuk segera mengambil peluang dari kemungkinan Indonesia berpaling ke Uni Sovyet. Soekarno saat itu menjadikan upaya merebut Irian Barat sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan yang belum selesai. Dalam upaya mewujudkan keinginan tersebut Soekarno mencoba memanfaatkan kekuatan negara-negara komunis. Soekarno paham bahwa Uni Sovyet punya kepentingan dalam menciptakan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.¹³⁷

Adanya faktor 'Uni Sovyet' menyebabkan RRC merubah sikap. Cina menyadari bahwa walaupun hubungannya dengan PKI sangat baik, namun penentu kebijakan di Indonesia adalah Soekarno. Berdasarkan itu sudah sewajarnya bila RRC memperhatikan kepentingan hubungannya dengan Indonesia secara keseluruhan. Itulah yang dilakukan RRC ketika Indonesia tak bergeming, dan hubungan kedua negara hampir mencapai titik terendah. RRC mengambil sikap 'mengalah', sehingga hubungannya dengan Indonesia dapat tetap berjalan. Sikap itu juga terlihat ketika pada tahun 1963 terjadi lagi beberapa kali kerusuhan anti Tionghoa yaitu sekitar bulan Maret-Mei di daerah Bandung dan Sukabumi, Jawa Barat,¹³⁸ RRC tidak lagi menanggapi secara emosional. RRC bahkan menyatakan hal itu sebagai urusan dalam negeri Indonesia yang tidak luput dari rongrongan kaum imperialis. Pemerintah Indonesia pun menyikapi kerusuhan itu sebagai gerakan protes dan mencegah meluasnya kerusuhan dengan menangkap serta mengadili para penggeraknya.

Pada era awal tahun 1960-an itulah tercipta poros Jakarta-Peking yang kemudian berkembang menjadi poros Jakarta-Peking-Pyongyang.¹³⁹ Bagi

¹³⁷ Badan Litbang Deplu, (1982), *RRC Sebagai Kekuatan di Asia*, Jakarta : Badan Litbang Luar Negeri Deplu RI, hlm. 76

¹³⁸ Lihat Coppel, Charles A., (1994), *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 86

¹³⁹ Kroef, Justus M van der, "The Sino-Indonesian Rupture", *The China Quarterly*, (January-March 1968), Reprint in New York : American-Asian Educational Exchange. INC, hlm. 2

Soekarno, poros ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mematahkan “*old established forces*” dan menggalang “*new emerging forces*”. Langkah itu kemudian diikuti dengan diselenggarakannya GANEFO¹⁴⁰ pada tahun 1963, untuk menandingi pesta olahraga olimpiade. Cina mendukung semua langkah Soekarno, juga memuji sikap Indonesia ketika pada awal tahun 1965 menyatakan akan keluar dari PBB, sebagai protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu RRC juga memberikan dukungan penuh ketika pada tahun 1965 Indonesia mendirikan CONEFO¹⁴¹ sebagai tandingan PBB.

Sebaliknya Indonesia pun menanggapi sikap manis Cina itu dengan memberi dukungan penuh terhadap langkah-langkah Cina di dunia. Termasuk perjuangannya untuk merebut kedudukan perwakilan Cina di PBB, yang saat itu masih ditempati Republik Cina atau Taiwan. Hubungan mesra itu juga terlihat di sektor perdagangan, neraca perdagangan antar kedua negara yang terlihat menurun pada tahun 1960, sejak tahun 1963 kembali meningkat, dan melonjak cukup pesat pada tahun 1965. Armstrong menilai bahwa, dalam periode itu Cina memang sangat membutuhkan hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Hal itu terkait dengan upaya Cina untuk memenangkan persaingannya dengan Uni Sovyet dan upayanya untuk semakin jauh keluar dari pembendungan Amerika Serikat.¹⁴²

3.3 Dari *Wenhua Dageming* hingga Bekunya Hubungan

Pada pertengahan tahun 1960-an RRC dilanda kerusuhan politik dalam negeri. Perkembangan itu merupakan klimaks dari konflik antar faksi, yang dipicu oleh kegagalan program *da yue jin*. Mao Zedong yang tergusur dari jabatan Ketua Negara maupun Ketua PKC, dibantu oleh istrinya yaitu Jiang Qing,¹⁴³ dan didukung oleh pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) yaitu

¹⁴⁰ GANEFO atau Games of The New Emerging Forces. Tercatat 51 negara ikut ambil bagian dalam pesta olah raga ini.

¹⁴¹ CONEFO atau Conference of The New Emerging Forces. Soekarno mendirikan ini untuk menggalang negara-negara yang tidak mau terlibat dalam konflik antara dua kubu, Timur dan Barat, Komunis dan Kapitalis. Gedung megah yang sekarang dipakai untuk Dewan Perwakilan Rakyat semula direncanakan sebagai gedung penyelenggaraan CONEFO pertama.

¹⁴² Lihat Armstrong, J.D., 1977, *Revolutionary Diplomacy ; Chinese Foreign Policy and The United Front Doctrine*, Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, Bab 4.

¹⁴³ Jiang Qing adalah istri ke 3 Mao Zedong, seorang mantan pemain film. Ketika Revolusi Kebudayaan Ia menjadi ketua Kelompok Shanghai atau Panitia Revolusi Kebudayaan . Ia

Lin Biao, menggalang dukungan kaum muda dengan membentuk ‘Pengawal Merah’.¹⁴⁴ Dengan berpegang pada alasan bahwa kader-kader PKC dan kaum birokrat telah terjebak dalam rutinitas sehingga kehilangan semangat perjuangan kelas, maka dikembangkanlah slogan ‘belajar (tentang) revolusi dengan melakukan revolusi’. Dengan slogan tersebut, ‘revolusi besar kebudayaan’ atau *wenhua dageming*¹⁴⁵ pun diluncurkan.

Sasaran gerakan ini adalah menghancurkan ‘empat unsur lama’ yaitu pemikiran, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lama. Mao dan kawan-kawan ingin menggantinya dengan unsur-unsur baru yang revolusioner, yang identik dengan anti imperialisme, anti kapitalisme, anti Barat, anti intelektual, dan anti kemewahan. Tentang ‘anti kemewahan’ ini kemudian lebih ditujukan kepada perilaku para diplomat Cina di luar negeri, yang dianggap terlalu berlebihan dan terlalu berkiblat ke budaya Barat. Alasan-alasan itulah yang menyebabkan mereka dipanggil pulang dan mengalami ‘pengganyangan’ yang hebat.¹⁴⁶ Gerakan itu tidak hanya telah membuat partai, negara, dan rakyat Cina mengalami kemunduran dan penderitaan yang amat serius, tapi juga telah mengakibatkan kerusakan amat parah dalam tatanan kehidupan masyarakat Cina, serta menelan korban nyawa yang tidak sedikit.¹⁴⁷

Wenhua dageming berlangsung pada tahun 1966-1969, dalam kurun waktu itu sejumlah pejabat partai dan negara mengalami pengganyangan. Presiden Liu Shaoqi sendiri termasuk tokoh yang mengalami nasib yang tragis,

kemudian juga dikenal sebagai pimpinan *si ren bang* (四人邦) atau ‘Kelompok Empat’, yang terdiri dari Jiang Qing, Yao Wenyan, Wang Hongwen, dan Zhang Chunqiao

¹⁴⁴ Pengawal Merah atau *hong weibing* (红卫兵) adalah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda, yang diorganisir untuk menjalankan revolusi kebudayaan pada tahun 1966, dan dibubarkan pada tahun 1968 karena tindakan-tindakan brutalnya yang tidak terkendali lagi. (Lihat Fairbank, John King, Merle Goldman, 2006, *China : A New History*, Cambridge, Massachuset, London : The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 392-393)

¹⁴⁵ Dalam sejarah Cina revolusi ini dianggap sebagai sebuah kesalahan. Mao Zedong dianggap telah salah menilai perkembangan situasi Cina saat itu, dan salah dalam menterjemahkan ‘perjuangan kelas’. Gerakan ini disebut sebagai revolusi kebudayaan/*wenhua geming* (文化革命) adalah karena berawal dari polemik tentang sebuah karya sastra (sastra adalah bagian dari kebudayaan), dan Mao menyebutnya sebagai ‘revolusi besar’/*da geming* (大革命) adalah karena pada dasarnya gerakan ini diarahkan sebagai sebuah revolusi politik (Hu Sheng (Chief Ed.), (1994), *A Concise History of...*, hlm. 627-628)

¹⁴⁶ USA Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence, *Intelligence Report : Mao's Red Guard Diplomacy : 1967*, Reference Title : POLO XXXI, 21 June 1968, diakses melalui <http://www.foia.cia.gov/CPE/POLO/polo-21.pdf>, pada 12 Maret 2011, pkl. 21.15, hlm. 4

¹⁴⁷ 姜华宜 (Jiang Huayi), (1990), *新编 中国革命史 (Sejarah Baru Revolusi Cina)*, 北京: 北京东光印刷厂 (Beijing : Percetakan Cahaya Timur Beijing), hlm. 408-409

Ia disiksa dan sempat tidak diketahui keberadaannya. Seluruh lapisan masyarakat Cina dipaksa untuk berevolusi. Seluruh duta besar Cina yang sedang bertugas di berbagai negara di dunia, juga dipanggil pulang untuk menjalankan revolusi. Sebagian dari mereka yang dianggap sebagai 'pejalan kapitalis' mendapatkan perlakuan yang amat buruk. Kementerian luar negeri diambil alih oleh Pengawal Merah. Chen Yi yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri semula ingin mempertahankan agar hubungan dengan luar negeri terbebas dari pengaruh kejadian di dalam negeri. Keinginan itu kandas dan ia dipaksa untuk melakukan 'kritik diri'. Urusan luar negeri kemudian ditangani oleh kantor Perdana Menteri. Banyak program kerjasama bilateral ataupun program bantuan yang telah disepakati Cina terutama dengan negara-negara di kawasan Afrika, akhirnya dibatalkan. Termasuk di dalamnya rencana penyelenggaraan konferensi negara-negara dunia ke tiga yang semula akan dilaksanakan di Alzajair.¹⁴⁸

Politik luar negeri RRC saat itu menjadi amat 'kiri', penyebaran *Mao sixiang* atau 'pemikiran Mao' menjadi kegiatan utama dari diplomasi RRC. Hal itu menimbulkan kesan bahwa RRC/PKC adalah satu-satunya negara/partai revolusioner di dunia yang mencoba memaksakan ideologinya kepada negara lain. Semua itu benar-benar telah merusak citra Cina sebagai negara yang sebelumnya selalu mengumandangkan prinsip-prinsip koeksistensi damai dalam politik luar negerinya. Kekacauan semakin bertambah ketika Mao mengatakan bahwa revolusi juga harus dijalankan di luar negeri.¹⁴⁹ Ide Mao itu menyebabkan munculnya perilaku para diplomat Cina yang tidak lagi memperhatikan tata-krama internasional, bahkan cenderung brutal. Contohnya kasus Yao Dengshan Kuasa Usaha RRC di Jakarta. Pada bulan April 1967 Yao dipersonanongrata dan diusir dari Jakarta. Hal itu terjadi karena Yao dianggap telah memobilisir dan memprovokasi kaum Tionghoa untuk berevolusi, dengan memanfaatkan upacara penguburan seorang warga Tionghoa yang kebetulan meninggal dalam tahanan aparat keamanan Indonesia. Pada saat itu hubungan RRC-Indonesia memang sedang tegang karena peristiwa G 30 S PKI. Tindakan Yao dianggap telah

¹⁴⁸ Fairbank, John King, Merle Goldman, 2006, *China :...*, hlm. 396

¹⁴⁹ USA Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence, *Intelligence Report...* hlm. 14

memicu kerusuhan anti Tionghoa dan serangan para demonstiran Indonesia ke kedutaan RRC sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.¹⁵⁰

Perlakuan sebaliknya diterima Yao Dengshan ketika kembali ke RRC, ia disambut hangat sebagai pahlawan. Setibanya di Beijing Yao Dengshan segera terlibat langsung dalam gerakan Pengawal Merah. Pada bulan Agustus 1967, ia bersama Wang Li kemudian mengambil alih departemen luar negeri Cina.¹⁵¹ Selama masa pengambilalihan yang berlangsung dua minggu tersebut, Yao mengirimkan kawat instruksi kepada semua kedutaan besar RRC dan perwakilan RRC di negara-negara lain. Isi kawat itu adalah seruan untuk ikut serta dalam revolusi. Instruksi tersebut ternyata juga ditujukan kepada kaum *Huaqiao*¹⁵² terutama yang berada di Asia Tenggara. Terjadilah kerusuhan yang melibatkan kaum *Huaqiao* di beberapa tempat, antara lain terjadi di Kamboja dan Burma.. Masalah lainnya yang juga menyebabkan posisi RRC menjadi semakin tidak disukai adalah, pertentangannya dengan beberapa negara netral. Misalnya dengan India, yang terjadi akibat sengketa wilayah perbatasan. Sikap RRC yang secara terang-terangan mendukung setiap gerakan komunis atau gerakan anti pemerintah, terutama di negara-negara kawasan Indocina, juga semakin memojokkannya .

Dampak dari semua kejadian tersebut adalah kemunduran yang amat parah dalam diplomasi Cina. Di era *Wenhua dageming* itu dari 40 negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Cina, hampir 30 negara di antaranya terlibat dalam perselisihan dengannya. Penyebabnya adalah karena ulah Cina sendiri.¹⁵³ RRC menjadi terkucil dan dijauhi tidak hanya oleh kalangan negara-negara non komunis dan Barat, tetapi juga oleh negara-negara kubu sosialis sendiri yang pada masa itu masih kuat dipayungi oleh Uni Soviet. Dapat dikatakan telah terjadi kevakuman diplomatik sepanjang era *wenhua dageming* tersebut. Praktik-praktik revolusi yang radikal telah membuat banyak negara menahan diri dalam berhubungan dengan RRC.

¹⁵⁰ Suryadinata Leo, Dr., (1984), *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Press, hlm. 194

¹⁵¹ Farquhar, Roderick Mac, John King Fairbank, (1991), *Cambridge History of China*, Vol. 15, Part 2, New York : Cambridge University Press, hlm. 247

¹⁵² AbdullahDahana, *Dirangkul atau Merangkul Cina*, <http://www.inilahlm.com/read/detail/118537/dirangkul-atau-merangkul-cina>, Senin, 22 Juni 2009, diunduh pada tanggal 18 Maret 2011

¹⁵³ Hu Sheng (Chief Ed.), (1994), *A Concise History of...*, hlm. 684-685

Wenhua dageming mengalami peredaan setelah terjadinya bentrokan antara Pengawal Merah, TPR, dan masyarakat, di kota Wuhan. Bentrokan itu hampir saja menyebabkan terjadinya ‘perang saudara’. Menyadari bahaya itu Mao mulai mengambil langkah yang lebih kooperatif. Pemerintahan dan partai mulai ditata ulang, antara lain melalui penyelenggaraan Kongres PKC IX tahun 1969. Meskipun kongres tersebut menghasilkan kepemimpinan yang dikuasai kubu radikal, namun sedikit mengubah wajah RRC, terutama dalam bidang hubungan luar negeri. Kongres menetapkan agar RRC segera memperbaiki dan membangun kembali citra internasionalnya, dengan menjadikan negara-negara Barat sebagai sasaran utama diplomasinya. Sejak saat itu dikirimlah duta besar untuk beberapa negara seperti Perancis, Swedia, Inggris, dan lain-lain. Langkah tersebut menunjukkan bahwa RRC telah mengubah politik luar negeri yang amat radikal, dan kembali ke jalur sebelumnya.

Faktor lain yang menyebabkan RRC harus segera membenahi diri dalam urusan luar negerinya ialah munculnya ketakutan terhadap agresivitas Uni Soviet dengan doktrin Brezhnevnya. Berbagai kebijakan Uni Soviet di beberapa negara Eropa Timur, dianggap Cina sebagai upaya pengembangan hegemonisme, karena itulah Cina menyebut Uni Soviet sebagai negara sosialis imperialis. Pasca *wenhua dageming* langkah-langkah Cina untuk mampu bersaing dengan Uni Sovyet dalam merebut pengaruh internasional terlihat semakin efektif.

Hubungan mesra dengan Indonesia yang tercermin dari terbentuknya poros Jakarta-Peking, tidak bertahan lama. Sesungguhnya sampai tahun 1965 hubungan kedua negara masih sangat baik. Hubungan itu guncang ketika pada tanggal 30 September 1965, di Indonesia terjadi peristiwa berdarah yang menyebabkan tewasnya enam orang jenderal Angkatan Darat RI. Peristiwa itu kemudian diketahui merupakan gerakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam sejarah Indonesia peristiwa itu dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat) berhasil mengendalikan keadaan yang kacau karena peristiwa tersebut. Selanjutnya Soeharto menjadi pemimpin Indonesia yang baru menggantikan Presiden Soekarno yang mulai sakit-sakitan dan kehilangan legitimasi politiknya.

Pandangan politik Soeharto sangat berbeda dengan Presiden Soekarno. Secara tegas Soeharto yang didukung oleh Angkatan Bersenjata RI (ABRI), sangat anti komunis. Soeharto dan ABRI sangat yakin bahwa PKI merupakan satu-satunya otak dan penggerak G 30 S. Keduanya juga yakin bahwa RRC telah memberikan dukungannya kepada PKI untuk melakukan gerakan tersebut. Ketika semua surat kabar menuliskan berita tentang keterlibatan RRC dalam G 30 S tersebut, maka reaksi negatif terhadap Cina dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia pun tak terhindarkan. Sikap negatif itu semakin tak terhindarkan karena Kedutaan Besar RRC di Jakarta menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan penguasa baru Indonesia. Dalam gelombang protes ke Kedutaan Besar dan Kantor Perwakilan RRC itu, kaum Tionghoa juga menjadi salah satu sasaran utama kaum demonstran. Kaum Tionghoa menjadi sasaran kemarahan karena dianggap sebagai pemasok dana bagi gerakan PKI.¹⁵⁴ Tak ayal lagi maka sentimen anti Cina atau anti Tionghoa pun kembali merebak hampir di seluruh Indonesia.

Ketegangan hubungan Cina-Indonesia terus berlanjut, hal itu juga berkaitan dengan perkembangan di dalam negeri RRC yang sedang melaksanakan *wenhua dageming*. Sepanjang tahun 1967 ketegangan hubungan itu semakin memuncak, terjadi balas membalas serangan fisik terhadap Kedutaan Besar RRC di Jakarta dan terhadap kedutaan besar RI di Beijing. Bulan Februari 1967, pemerintah Indonesia mengusir Asisten Angkatan laut Kedutaan Besar RRC di Jakarta karena sikap bermusuhannya kepada pemerintah RI. Tindakan itu dibalas Beijing dengan mempersonanongratakan Atase Pertahanan KBRI Beijing pada akhir bulan yang sama. Selanjutnya, perilaku Kuasa Usaha RRC Yao Dengshan sebagaimana telah terurai di atas, turut memperkeruh suasana. Tindakan Jakarta yang mengusir Yao Tengshan. dibalas Beijing dengan mempersonanongrata dan mengusir Kuasa Usaha ad interim KBRI Beijing Baron Sutadisastra.

Bulan Agustus 1967 sejumlah Pengawal Merah menyerang KBRI Beijing. Kedubes RRC di Jakarta juga diserang oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia. Ketegangan mencapai puncaknya pada 1 Oktober 1967, saat itu terjadi

¹⁵⁴ Suryadinata Leo, Dr., (1984), *Dilema...*, hlm.191

lagi kerusuhan di Kedutaan Besar RRC di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa itu kemudian membawa pada keputusan pembekuan hubungan Cina-Indonesia. Pembekuan itu ditandai dengan diumumkannya penutupan KBRI Beijing oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1967, yang kemudian disusul dengan pengumuman penutupan Kedutaan Besar RRC di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1967.¹⁵⁵

Bagaimana sebenarnya peran Cina di dalam gerakan 30 September tersebut, sampai saat ini belumlah jelas benar. RRC menyangkal tuduhan mendukung kudeta tersebut, dengan alasan situasi sebelum kudeta sangat menguntungkan bagi Beijing sehingga tidak masuk akal bila Beijing merusaknya. Selain itu menurut RRC tidak mungkin PKI sebagai partai besar mau diatur oleh pemerintah Cina.¹⁵⁶ Berbagai tulisan yang mengkaji peristiwa itu umumnya berpendapat bahwa Cina setidaknya tahu adanya rencana kudeta tersebut.¹⁵⁷ Seberapa rinci pengetahuan Cina yang dapat menunjukkan kadar keterlibatannya, hal itu menurut Hunter hanya dapat diketahui bila beberapa fakta dapat diungkapkan. Fakta-fakta itu antara lain percakapan antara DN Aidit dengan pimpinan Partai Komunis Cina di Beijing pada Agustus 1965, dan negosiasi rahasia antara Marsekal Madya Oemar Dani¹⁵⁸ dengan pimpinan Cina pada bulan September 1965.¹⁵⁹ Kudeta itu tidak mengantarkan PKI sebagai penguasa di Indonesia, tapi telah membawa akibat rusaknya hubungan baik Cina-Indonesia. Hubungan itu berakhir dengan pembekuan yang secara resmi terjadi pada tanggal 31 Oktober 1967.¹⁶⁰

3.4 Simpulan

Hubungan Republik Rakyat Cina - Republik Indonesia diawali dengan preseden yang kurang baik, yakni kecurigaan RRC kepada Indonesia terkait dengan masih adanya beberapa kantor perwakilan *Guomindang* di Indonesia.

¹⁵⁵ KBRI di RRC, *Informasi Singkat...*, 1996, hlm. 5

¹⁵⁶ Suryadinata, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta: LP3ES, hlm. 130

¹⁵⁷ Taylor, Jay, (1976), *China and Southeast Asia : Peking's Relations with Revolutionary China Movements*, (2nd.ed.), New York : Praeger Publisher ; Mozingo, (1976), *Chinese Policy...*

¹⁵⁸ Oemar Dani pada saat kejadian menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara RI.

¹⁵⁹ Hunter Helen-Louise, (2007), *Sukarno and The Indonesian Coup : The Untold Story*, Westport, Connecticut, London : Praeger Security International, hlm. 181

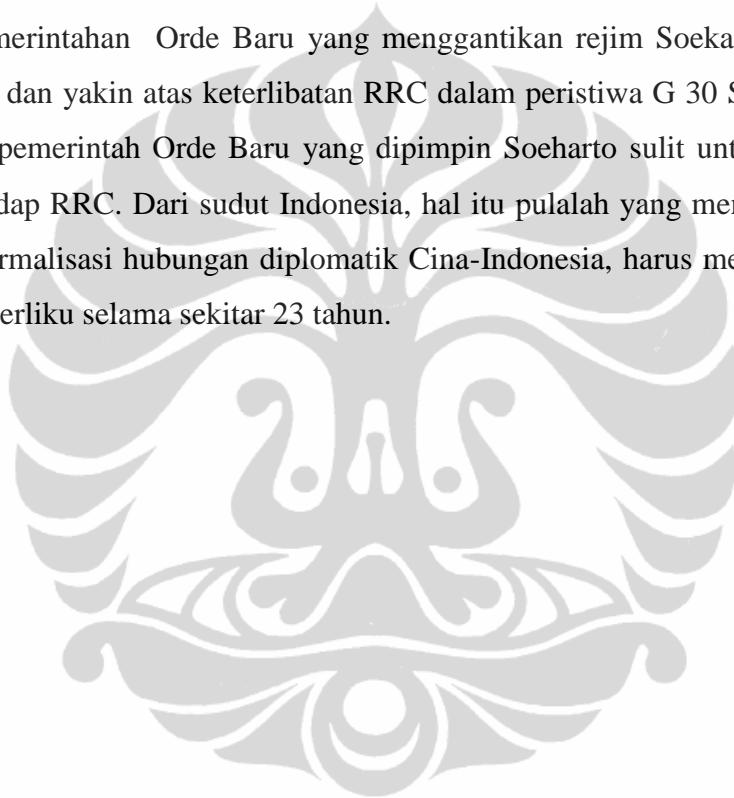
¹⁶⁰ Mozingo, (1976), *Chinese Policy...* bab 8 ; Kroef, (1968), "The Sino-Indonesian... .

RRC butuh waktu sekitar tiga bulan untuk menjawab surat Indonesia yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengannya. Uniknya, seperti hendak ‘menebus kesalahan’ atau karena ‘mengendus’ manfaat lain, setelah itu RRC bersikap pro-aktif. Hanya dalam waktu sekitar empat bulan RRC telah membuka Kedutaan Besar dan menempatkan Duta Besarnya di Jakarta. Saat itu giliran Indonesia yang ‘mogok’ sehingga hanya mengirim pengirim pejabat setingkat Kuasa Usaha saja. Baru sekitar tiga tahun kemudian Indonesia mengirimkan Duta Besarnya ke Beijing. Sikap Indonesia itu terkait dengan keraguan beberapa bagian masyarakat Indonesia terhadap ketulusan RRC, dan ditambah dengan perilaku para diplomat RRC yang membuat keraguan itu semakin beralasan.

Hambatan pertama dalam hubungan kedua negara dapat dilalui, namun preseden awal yang kurang baik itu menunjukkan bahwa hubungan kedua bangsa memang banyak menanggung beban sejarah yang kurang menyenangkan. Terutama menyangkut masalah kaum Tionghoa, dan penyebaran paham komunis. Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya cenderung menganggap RRC sebagai ‘ancaman’. Stigma buruk kaum Tionghoa yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda sulit dihapuskan dari benak rakyat Indonesia. Hal itu dalam kurun waktu tertentu diperburuk oleh kebijakan pemerintah RRC sendiri. Demikian pula dalam hal penyebaran paham komunis, sikap RRC yang cenderung *ambigu* berpengaruh terhadap hubungan kedua negara.

Bila diamati dengan teliti terlihat bahwa, bahkan ketika hubungan kedua negara sedang mesra sekalipun, yaitu yang berlangsung selama sekitar 12 tahun pada tahun 1953-1965, juga terjadi sejumlah konflik. Lagi-lagi konflik yang terjadi itu di antaranya berhubungan dengan kaum Tionghoa dan paham komunis. Seperti dalam kasus PP 10 Tahun 1959 dan G 30 S PKI. Dalam konflik tersebut juga tercatat di dalamnya ada upaya RRC untuk mencoba ‘mendikte’ Indonesia, namun upaya itu cenderung tidak berhasil. Meskipun Presiden Soekarno tidak menolak untuk bekerja sama dengan kaum komunis, namun dalam hal kepentingan nasional Indonesia Soekarno tidak mudah terbujuk. Di era tersebut Indonesia cenderung mengesampingkan persepsi RRC sebagai ancaman, namun tetap saja hubungan itu tidak terbebas dari friksi.

Dari sisi kepentingan nasional RRC, terlihat bahwa hubungan baik kedua negara umumnya tercipta ketika RRC benar-benar membutuhkan dukungan Indonesia. Tahun 1960-an adalah era di mana RRC masih berada dalam ‘pembendungan’ Amerika Serikat dan mengalami ‘kekecewaan’ terhadap Uni Uni Sovyet. Hingga pertengahan tahun 1960-an itu terlihat jelas upaya RRC untuk merebut simpati Indonesia dengan menjalin kerja sama dan menawarkan bantuan di berbagai bidang. Hubungan kedua negara pun berlangsung dengan sangat erat. Terjadinya peristiwa G 30 S PKI menghentikan langkah RRC tersebut. Pemerintahan Orde Baru yang menggantikan rejim Soekarno sangat anti komunis, dan yakin atas keterlibatan RRC dalam peristiwa G 30 S PKI. Hal itu membuat pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sulit untuk merasa percaya terhadap RRC. Dari sudut Indonesia, hal itu pulalah yang menjadi salah satu sebab normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, harus melalui jalan panjang dan berliku selama sekitar 23 tahun.



BAB 4

DINAMIKA UPAYA PENDEKATAN

Hubungan diplomatik Cina-Indonesia membeku dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sekitar 23 tahun. Apakah dalam kurun waktu tersebut kedua bangsa benar-benar tidak berhubungan dalam bidang apapun?. Bila ya mungkinkah itu terjadi di dunia yang terus berkembang?, dan bila tidak, dalam bidang, bentuk, dan level seperti apa hubungan itu terjadi?. Cina dan Indonesia adalah negara dan bangsa yang memiliki peran penting dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Oleh karenanya asumsi bahwa selama masa pembekuan hubungan diplomatik Cina dan Indonesia sama sekali tidak saling berhubungan, harus dikesampingkan. Terlebih lagi secara *de facto* keduanya secara resmi telah menunjuk negara ke tiga sebagai penghubung masing-masing, dalam hal ini RRC menunjuk Rumania dan Indonesia menunjuk Kamboja.

Kapan tepatnya mulai ada upaya pendekatan dan siapa yang lebih dulu memulai untuk menormalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia sulit ditentukan. Pembekuan hubungan diplomatik di antara kedua negara terjadi disebabkan oleh hilangnya kepercayaan Indonesia terhadap RRC, dan RRC tidak bisa menerima sikap Indonesia tersebut. Oleh karenanya permasalahan siapa yang memulai pendekatan menjadi sebuah masalah yang peka. Masalah itu sering dikaitkan dengan ‘kehormatan’ atau ‘wibawa’ masing-masing pihak, terlebih bila hal itu dipertajam lagi dengan pertanyaan ‘siapa membutuhkan siapa?’. Dalam bab ini akan dibahas berbagai aktivitas dan atau peristiwa di masa pembekuan hubungan diplomatik, yang memungkinkan kedua belah pihak tetap terhubung meskipun tidak secara langsung. Perhatian terutama diarahkan kepada aktivitas dan peristiwa yang mengindikasikan adanya upaya pendekatan kedua belah pihak untuk dapat menormalisasi hubungan diplomatik tersebut.

Cina dan Indonesia adalah negara dan bangsa yang mempunyai banyak potensi untuk berpengaruh besar secara regional maupun internasional. Hubungan di antara dua bangsa yang sudah berlangsung sejak masa kedinastian atau kerajaan, menyebabkan banyak kemiripan dalam budaya kedua bangsa. Misalnya tentang kehormatan atau kewibawaan bangsa yang maknanya tercakup

dalam konsep *mianzi* dalam budaya Cina, juga dimiliki oleh budaya Indonesia. Sejauh mana konsep tersebut terlihat menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap langkah kedua belah pihak ketika berupaya menormalisasi hubungan diplomatik, menjadi bagian pembahasan di bab ini.

Pembahasan di bab ini akan terdiri dari empat bagian yaitu diawali dengan membahas tindakan Adam Malik yang menimbulkan kontroversi. Bagian ini berupaya menunjukkan siapa sebenarnya yang mulai melakukan upaya pendekatan. Dilanjutkan dengan membahas perkembangan di Indocina khususnya berkaitan dengan konflik Kamboja. Peristiwa itu diyakini berpengaruh besar terhadap maju-mundurnya upaya pendekatan yang terjadi. Proses terjadinya kontak antara CCPIT dan KADIN yang melahirkan kesepakatan hubungan dagang langsung di antara kedua negara menjadi bahasan berikutnya. Perubahan sikap Indonesia atas masalah normalisasi hubungan diplomatik tersebut akan tercakup dalam bagian ini. Kemudian pembahasan diakhiri dengan sebuah simpulan. Keseluruhan pembahasan dalam bab ini akan menggambarkan pasang surut upaya kedua belah pihak dalam mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik yang membeku selama 23 tahun tersebut.

4.1 Kontroversi atas Sikap Adam Malik

Pada bulan Juli-Agustus 1990 yaitu ketika proses normalisasi hubungan diplomatik berada di tahap akhir, kantor berita resmi pemerintah RRC *Xinhua* merilis setidaknya tiga artikel dengan judul berbeda. Ketiga artikel itu mengulas sejarah hubungan Cina-Indonesia, satu di antaranya merupakan artikel di halaman utama. Dalam ketiga artikel itu diungkapkan bahwa, Indonesia telah mulai melakukan pendekatan untuk menormalisasi hubungan pada awal tahun 1970-an.¹⁶¹ Selain artikel yang bersumber dari kantor berita *Xinhua* tersebut, Radio Beijing juga menyiarkan hasil wawancaranya dengan mantan menteri luar negeri RRC Huang Hua. Didalamnya antara lain dikatakan bahwa,

¹⁶¹Zhao Jinchuan, "Roundup News : Beginning in Sino-Indonesian Relations", *Xinhua Headline*, OW0107140590, Beijing Xinhua in English, (1 Juli 1990), *FBIS-CHI-90-127* 2 Juli 1990, hlm.11 ; "PRC-Indonesian Ties Reviewed", OW0107125990, Beijing Xinhua Domestic Service, (1 Juli 1990), *FBIS-CHI-90-127* 2 Juli 1990, hlm. 12 ; "Roundup on Restoration of Indonesia Ties", OW 0508103290, Beijing Xinhua Domestic Service, (4 Aug 1990), *FBIS-CHI-90-151*, 6 Agustus 1990, hlm. 11

“...this normalization process has taken a lot of time. In early 1970’s the Indonesian Government indicated that it wanted to normalize relations with China, Since then, representatives of two government have had many contacts.”¹⁶²

“...proses normalisasi ini telah memakan waktu yang panjang. Pada awal tahun 1970-an Pemerintah Indonesia mengindikasikan keinginan untuk menormalisasi hubungannya dengan Cina. Sejak itu perwakilan kedua pemerintah telah melakukan banyak kontak.”

Dalam artikel maupun pemberitaan di Beijing itu tidak disebutkan dengan jelas sumber yang menjadi acuan pernyataan bahwa Indonesia sudah menunjukkan keinginan untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan RRC. Kemungkinan besar *Xinhua* telah mengacu kepada pernyataan Adam Malik yang muncul di media massa pada bulan November 1969. Saat itu Malik dikutip telah menyatakan bahwa “Indonesia berharap untuk meningkatkan kontak-kontaknya dengan Cina”. Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada bulan Februari 1970 juga telah membuat pernyataan yang mengindikasikan bahwa Indonesia selalu terbuka untuk membicarakan kemungkinan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan RRC. Bahkan lebih jauh lagi Malik pada bulan Oktober 1970 telah mengirim Aboe Bakar Loebis untuk menjajaki kontak dengan pihak Cina, namun misi Loebis gagal. Konsulat Jenderal RI di Hongkong telah menghentikan upaya Loebis tersebut, karena tidak sejalan dengan kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Masalah itu selanjutnya ditangani oleh Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN). Usaha pendekatan ke RRC itu dinyatakan sebagai ‘usaha gelap’ dan sepenuhnya hanya merupakan inisiatif Adam Malik belaka. Sama sekali bukanlah merupakan sikap resmi pemerintah Indonesia.¹⁶³

Tindakan dan ucapan Adam Malik yang terurai di atas menjadi kontroversial dan menimbulkan polemik yang panjang di kalangan masyarakat Indonesia. Hal itu bisa terjadi karena pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru, penentuan

¹⁶² OW0708145490 Beijing in English to Western North America 0400 GMT 7 Aug 90, *FBIS-CHI-90-155*, 10 August, 1990, hlm. 6

¹⁶³ *Djakarta Times*, 6 November 1969, dalam Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*, London: Routledge, hlm. 84

kebijakan luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya ada di tangan Departemen Luar Negeri. Ada pihak atau lembaga lain yang turut berperan atau berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan yaitu, Militer dan Sekretariat Negara. Turut berperannya militer adalah dalam rangka mengikis anggota dan simpatisan PKI. Pihak militer ini mencakup unsur Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), BAKIN, dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).¹⁶⁴ Adam Malik saat itu memang Menteri Luar Negeri Indonesia, namun mengingat pola pengambilan keputusan saat itu, maka apa yang diucapkan atau dilakukannya tidaklah secara otomatis merupakan kebijakan Indonesia seutuhnya.

Sikap Adam Malik yang sering kontroversial itu juga diakui oleh Presiden Soeharto dan dianggap telah menyulitkan pemerintah Indonesia. Khusus berkaitan dengan masalah normalisasi hubungan Cina-Indonesia dengan tegas Presiden Soeharto mengatakan bahwa, Malik telah ‘salah’ dalam menginterpretasikan sikap Indonesia. Sikap Presiden Soeharto itu kemudian terungkap dalam biografinya yang tertulis seperti berikut,

“Yang sedikit merepotkan di antara pernyataan Bung Adam waktu itu adalah mengenai pembukaan kembali hubungan diplomatik dengan RRC. Waktu itu kita masih membatasi, tapi pernyataan Bung Adam Malik seolah-olah hal itu akan kita lakukan di tahun depan. Pernyataan Bung Adam itu merupakan jawaban yang menyulitkan”¹⁶⁵

Polemik cukup panjang yang dipicu oleh sikap Adam Malik tentang normalisasi hubungan Cina-Indonesia untuk sementara waktu berakhir pada kesimpulan bahwa, hubungan Cina-Indonesia belum bisa dicairkan. Saat itu, kalangan elite politik dan masyarakat Indonesia umumnya tetap berkeyakinan bahwa, Cina dengan ideologi komunisnya masih merupakan ancaman bagi Indonesia.

Selanjutnya sikap Adam Malik sendiri juga terlihat mengalami perubahan. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika menanggapi berita tentang Komunike Shanghai yang merupakan hasil dari pertemuan Zhou Enlai dengan Presiden Nixon. Malik mengatakan bahwa, “Ya tidak yakin sepenuhnya” kalau pertemuan

¹⁶⁴ Suryadinata, Leo, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta : LP3ES, hlm. 50

¹⁶⁵ Soeharto, (1989), *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Seperti dituturkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Jakarta : Citra Lamtoro Gung Persada, hlm. 333

itu telah membahas tuntas semua masalah yang ada di antara Cina dan Amerika Serikat. Meskipun demikian Malik berharap kedatangan Nixon ke Cina akan mengurangi upaya kekuatan subversi di Asia Tenggara. Bahkan Malik menandakan, “jika Cina menghentikan upaya subversinya ke Indonesia, barulah kunjungan Nixon itu berguna bagi Indonesia.”¹⁶⁶ Perubahan sikap Malik tersebut semakin terlihat jelas dalam pernyataannya kepada pers sehubungan dengan masalah normalisasi hubungan Cina-Indonesia pada sekitar bulan April 1973. Bunyi pernyataan itu antara lain, “... tidak ada kemajuan berarti dalam proses perbaikan hubungan Cina-Indonesia. ... tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tergesa-gesa menormalisasi hubungan itu.”¹⁶⁷

Dalam salah satu bab biografinya yang berjudul “Setahun Mengemban Perserikatan Bangsa-Bangsa”, Adam Malik menggambarkan suasana ketika pada tahun 1971 menerima delegasi RRC yang baru saja disahkan sebagai anggota PBB menggantikan Taiwan. Saat itu Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Umum PBB, dalam bukunya itu Malik menulis seperti berikut,

“... sebagai wakil Indonesia secara informal saya terangkan kepada wakil RRC tersebut bahwa soal pemulihan hubungan bilateral RI-RRC itu tergantung pada kemauan baik kedua belah pihak, dan itu akan makan waktu. Dari Menteri Luar Negeri RRC pada waktu pertemuan itu saya mendapat keterangan bahwa RRC juga memerlukan waktu untuk memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia”¹⁶⁸

Dari kutipan di atas terlihat bahwa ketika Malik berbicara secara resmi mewakili pemerintah Indonesia, ia telah menyampaikan dengan tegas bahwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia belum bisa dilakukan. Normalisasi masih membutuhkan waktu yang panjang. Dengan demikian pernyataan Malik di tahun 1969/1970 yang pada dasarnya memang merupakan pandangannya sendiri, dengan jelas telah dianolir sendiri olehnya secara resmi pada tahun 1971 tersebut.

Pernyataan Presiden Soeharto yang telah dikutip di atas juga merupakan penegasan bahwa sikap Adam Malik adalah sikap pribadi, dan sama sekali tidak mewakili sikap pemerintah Indonesia. Tentang sikap Indonesia dalam hal

¹⁶⁶ Kroef, “Before the Thaw Recent Indonesian Attitudes toward People’s China”, *Asian Survey*, Vol. 13, No. 5, May 1973, hlm. 513 (<http://www.jstor.org/pss/2642799>)

¹⁶⁷ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China*: hlm. 84-88

¹⁶⁸ Adam Malik, (1979), *Mengabdikan Republik ; Angkatan Pembangunan*, (Jilid III), Jakarta : PT. Gunung Agung, hlm. 180

normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Cina, telah banyak kajian yang dilakukan oleh ahli Indonesia maupun asing.¹⁶⁹ Semua kajian itu menegaskan bahwa Presiden Soeharto merupakan tokoh kunci dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, bila menjelang normalisasi pihak Cina masih menjadikan sikap Adam Malik sebagai landasan fakta sejarahnya, hal itu tentu menjadi tidak sah lagi. Pasti ada motivasi lain yang mendorong Cina melakukan hal tersebut.

Fakta itu semakin kuat dengan memperhatikan perkembangan kondisi RRC berikut ini. Pasca *wenhua dageming* Mao Zedong menetapkan garis Diplomasi Revolusioner yang memungkinkan Cina untuk semakin mendekat ke Amerika Serikat. Sejak itu kebijakan luar negerinya pun lebih menampilkan sikap bersahabat terutama kepada negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Sampai tahun 1975 RRC berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan tiga negara anggota ASEAN. Hal itu merupakan sebuah sukses bagi RRC, namun di antara anggota ASEAN, Indonesia adalah negara terbesar dan memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap perkembangan regional maupun global. Oleh karena itu sangat masuk akal bila RRC sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.

Qian Qichen tanpa menyebutkan sumbernya mengatakan bahwa, karena Malaysia, Thailand, dan Filipina telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Presiden Soeharto pada tahun 1975 pernah menyatakan bahwa Indonesia sedang bersiap untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan RRC.¹⁷⁰ Pernyataan Qian itu berlawanan dengan hasil analisis Rizal Sukma. Menurut Rizal pada tahun 1975-78 resistensi militer dan pemerintahan Soeharto terhadap masalah normalisasi hubungan Cina-Indonesia, masih sangat tinggi. Kondisi itu muncul karena mulai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagaimana terwujud dalam peristiwa 15 Januari (Malari) tahun 1974. Saat itu Soeharto juga masih harus berupaya keras untuk menstabilkan posisinya agar dapat memenangkan pemilihan umum tahun 1978.¹⁷¹ Berhubung Qian tidak

¹⁶⁹Contoh kajian itu a.l. Rizal, 1999 ; Suryadinata 1996 ; Kroef, "Hesitant 'Normalization' : Indonesia's Slow Boat to China, *Asian Affairs*, Vol. 16, No. 1 (Spring, 1989), dll.

¹⁷⁰钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛 : 外交十记 (Qian Qichen : Sepuluh Catatan Diplomatik)*, 北京: hlm.118

¹⁷¹ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China*: hlm. 110-113

menyebutkan sumbernya secara jelas maka analisis Rizal menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya perbincangan mengenai normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina di Jakarta kembali menghangat pada tahun 1977. Pemicunya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Papua Nugini Michael Somare yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Jakarta. Somare mengatakan bahwa, dalam perbincangannya dengan Wakil Ketua Polit Biro PKC Li Xiannian ketika ia berkunjung ke RRC beberapa waktu sebelumnya, terungkap kesediaan RRC untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, kalau Indonesia siap membuka kembali hubungan itu.¹⁷² Hangatnya perbincangan tentang normalisasi itu terus bergulir sepanjang tahun 1977, dan baru mereda setelah Menlu Adam Malik mengeluarkan pernyataan. Malik menegaskan bahwa ia baru saja bertemu dengan Menteri Luar Negeri RRC Huang Hua di New York dalam rangka Sidang Umum PBB, keduanya sempat berbicara tentang normalisasi, namun Malik telah meminta agar Huang Hua bersabar.¹⁷³

Pada November 1977 sebuah delegasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) hadir di *Canton Fair*. Pemerintah Indonesia memberi izin keberangkatan delegasi tersebut, namun menegaskan bahwa delegasi itu merupakan kegiatan yang bersifat interen KADIN yang tidak melibatkan pemerintah. Tahun berikutnya delegasi KADIN kembali hadir di *Canton Fair*. Pada saat itu KADIN menerima undangan tuan rumah untuk melanjutkan perjalanan ke Beijing. Di sana delegasi KADIN bertemu dengan sejumlah pejabat dari kementerian yang menangani bidang perdagangan dan ekonomi RRC. Berhubung pihak Indonesia (KADIN) bukan merupakan utusan resmi pemerintah maka tidak membicarakan kemungkinan dibukanya hubungan dagang langsung antara kedua negara. Menurut Sukamdani langkah delegasi KADIN bertemu dengan sejumlah pejabat Cina tersebut, merupakan ‘kesalahan yang amat besar’ karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Sekembalinya ke Jakarta, pemerintah memberikan teguran keras yang amat tidak menguntungkan bagi KADIN.¹⁷⁴

¹⁷² *Suara Karya*, 15 Januari 1977, CSIS, 1980, hlm.1-2

¹⁷³ *Merdeka*, 3 Oktober 1977, CSIS, 1980, hlm. 9

¹⁷⁴ Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid Gitosardjono: Wirausaha Mengabdikan Pembangunan*, (Otobiografi), Jakarta : CV. Haji Masagung, hlm. 343

Perbincangan tentang normalisasi hubungan diplomati Cina-Indonesia terus mengalami pasang-surut. Di akhir dekade 1970-an topik itu semakin menghangat dengan munculnya pemberitaan pada tanggal 26 Februari 1978 tentang pernyataan Perdana Menteri RRC Hua Guofeng. Diberitakan dalam laporannya di pembukaan Sidang Kongres Rakyat Nasional ke V di Beijing, Hua antara lain menyatakan,

“... persahabatan tradisional yang mempersatukan Cina dengan Asia Tenggara, dan Cina telah membuka hubungan diplomatik dengan Malaysia, Filipina dan Thailand. Juga merupakan keinginan kami untuk memulihkan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di wilayah itu.”¹⁷⁵

Laporan Hua itu tampak dengan jelas mengisyaratkan keinginan Cina untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. Di antara negara-negara di Asia Tenggara selain Singapura hanya Indonesia yang juga tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Cina. Singapura dapat dipastikan bukanlah negara yang menjadi sasaran ucapan Hua, karena sejak kunjungan Lee Kuan Yew ke Cina pada tahun 1976 sikap Singapura sudah sangat jelas. Singapura akan menunggu Indonesia. Alasan Singapura atas sikapnya tersebut adalah berkaitan dengan komposisi warga negaranya yang 97% etnis Cina. Singapura “tidak ingin dicurigai Indonesia” karena itu peresmian hubungan diplomatiknya dengan RRC akan ditunda sampai Indonesia melakukannya.¹⁷⁶

Laporan resmi Hua Guofeng di depan KRN itu merupakan acuan penting yang menunjukkan keseriusan Cina untuk memulai pendekatan kepada Indonesia. Hal itu sejalan dengan perkembangan dalam negeri Cina pada awal dasawarsa 1970-an, yang sedang melakukan penataan ulang terkait dengan berbagai dampak negatif peristiwa *wenhua dageming*, dan arah diplomasi RRC yang sudah berubah. Selain itu, pernyataan Hua tersebut disampaikan dalam sebuah forum resmi di lembaga tinggi negara RRC yakni KRN. Disampaikan dalam format lembaran negara karena merupakan laporan kerja seorang Perdana Menteri. Dengan demikian laporan Hua itu sangat bisa disebut sebagai sikap resmi RRC

¹⁷⁵ *Berita Buana*, 7 Maret 1978, CSIS, 1980, hlm. 14

¹⁷⁶ Yahuda, Michael, (1983), *Towards the End of Isolationism ; China's Foreign Policy After Mao*, London : The Macmillan Press LTD, hlm. 224 ; Suryadinata, “Indonesia-China Relations : A Recent Breakthrough”, *Asian Survey*, Vol. 30, No. 7, July 1990, hlm. 695

tentang kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Asia Tenggara umumnya, dan terhadap Indonesia khususnya.

Rangkaian fakta yang terurai di atas menunjukkan bahwa, adalah sulit atau bahkan mustahil bila harus menentukan dengan pasti siapa yang memulai pendekatan untuk membuka jalan bagi normalnya kembali hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Apalagi bila didasari oleh asumsi ‘siapa membutuhkan siapa?’. Setiap jawaban selalu dapat diperdebatkan kebenarannya. Sebagai sesama negara berkembang dan masing-masing memiliki potensi untuk saling menguntungkan, maka sesungguhnya kedua pihak saling membutuhkan. Masalahnya ada faktor nilai budaya tentang kehormatan yang melekat erat pada diri masing-masing, sehingga membuat keduanya cenderung menahan diri.

Masalah menjadi lebih peka ketika dihubungkan dengan penyebab pembekuan hubungan kedua negara pada tahun 1967. Paparan di sub bab 3.3 mengungkapkan bahwa Indonesia membekukan hubungannya dengan Cina adalah karena memiliki kekecewaan, kecurigaan, dan ketakutan, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap RRC. Hal itu berkaitan dengan peristiwa G 30 S PKI dan kebijakan ‘impor’ revolusi RRC di era *wenhua dageming*. Meskipun RRC bersikeras untuk mempertahankan hubungan tersebut, namun Indonesia tidak menggubrisnya. (lihat kutipan dari Huang Anyu, di Bab 1) Dalam konsep *mianzi*, kepercayaan mitra adalah bagian dari kehormatan diri. Hilangnya sebuah kepercayaan seorang mitra terhadap diri seseorang adalah sebuah *diu mian* atau ‘kehilangan muka’.

Kesan *diu mian* itulah yang tak ingin disandang oleh Cina. Oleh karenanya berhubung Indonesia lah yang membekukan hubungan dan Cina tidak pernah mengakui tuduhan Indonesia, maka Cina berharap Indonesia pula yang harus mencairkannya. Harapan Cina itu tercermin dari ungkapan bahwa, “pemerintah Cina selalu menyambut positif upaya pengembangan hubungan bertetangga yang baik dan persahabatan dengan Indonesia.”¹⁷⁷ Hal senada

¹⁷⁷ Zhao Jinchuan, “Roundup News : Beginning in Sino-Indonesian Relations”, *Xinhua Headline*, OW0107140590, Beijing Xinhua in English, (1 Juli 1990), *FBIS-CHI-90-127* 2 Juli 1990, hlm.11 ; “PRC-Indonesian Ties Reviewed”, OW0107125990, Beijing Xinhua Domestic Service, (1 Juli 1990), *FBIS-CHI-90-127* 2 Juli 1990, hlm. 12 ; “Roundup on Restoration of Indonesia Ties”, OW 0508103290, Beijing Xinhua Domestic Service, (4 Aug 1990), *FBIS-CHI-90-151*, 6 Agustus 1990, hlm. 11

diungkapkan pula oleh Menlu Wu Xueqian pada tahun 1985 bahwa, “Sejauh menyangkut normalisasi hubungan diplomatik, kami secara konsisten mengambil sikap positif, kami bisa menunggu bila Indonesia masih punya kesulitan.”¹⁷⁸ Tak heran bila pengamat Cina menyebut sikap Cina terhadap Indonesia dalam masalah upaya normalisasi hubungan itu dalam ungkapan, “Cina tetap selalu semangat, pengertian, sabar, dan visioner.”¹⁷⁹

Pernyataan-pernyataan sikap seperti di atas menunjukkan Cina telah melakukan tindakan untuk *gu mianzi* (menjaga muka). Dalam visi yang lebih luas tindakan tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk *baoquan mianzi* atau ‘menyelamatkan muka’, sebelum terjadi *diu mian* atau ‘kehilangan muka’. Pernyataan-pernyataan itu juga menyiratkan bahwa Cina telah menahan diri, dan tidak melakukan desakan. Tidak dilakukannya desakan dapat disebabkan oleh belum adanya kebutuhan, namun dapat juga karena RRC telah melakukan *gei mianzi*. Ucapan Wu Xueqian “... kami bisa menunggu bila Indonesia masih punya kesulitan” menunjukkan bahwa, Cina memberi ‘keleluasaan’ kepada Indonesia karena Cina mengerti dan menghormati Indonesia.

Sebaliknya Indonesia sesungguhnya mengharapkan Cina lah yang harus memulai pendekatan. Indonesia berasumsi bahwa Cina telah melakukan ‘kesalahan’ kepada Indonesia. Hal ini terungkap dalam pernyataan Presiden Soeharto sebagaimana diceritakan oleh mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja seperti berikut.

“... Saya diberitahu Pak Harto bahwa bila ada pendekatan, itu harus datang dari pihak Cina...karena, pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967 adalah akibat dari kesalahan Cina. Di sini, masalah simbolisme menjadi sangat penting... seperti masalah siapa yang memulai dulu... Bagi Pak Harto sebagai orang Jawa, masalah simbolisme adalah benar-benar penting”¹⁸⁰

Dari kutipan itu terlihat jelas bahwa, Indonesia yang secara budaya juga sangat memperhatikan perilaku yang berkaitan dengan kehormatan, adalah tidak mungkin mengakui telah melakukan pendekatan lebih dulu kepada RRC.

¹⁷⁸ Kroef, Justus M van der, “Normalizing with China :...”, hlm. 915

¹⁷⁹ Gao, Weinong (高伟农), “印度尼西亚与中国关系正常化的动因”, (“Motivasi Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia”), 东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara), No. 3 (1989), hlm. 5

¹⁸⁰ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: ...*, hlm. 188

Andaipun harus melakukan pendekatan, pasti kemasannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga terhindar dari kesan kehilangan muka.

Selanjutnya bila melihat upaya pendekatan itu dari sisi perkembangan domestik masing-masing negara, maka terlihat hambatan lebih banyak datang dari pihak Indonesia. Sejak berakhirnya *wenhua dageming*, sangat jelas terlihat Cina telah membuka diri dan sangat membutuhkan hubungan yang baik dengan para tetangganya. Hal itu diperlukan Cina untuk menjamin kelangsungan pembangunan negaranya. Selain itu pemerintahan Cina dikuasai oleh partai tunggal yaitu PKC, sehingga penentuan kebijakan khususnya dalam kebijakan luar negeri relatif lebih mudah dan solid. Sedangkan di Indonesia sampai awal tahun 1980-an pemerintah Orde Baru cenderung mengandalkan bantuan Barat dan Jepang dalam pelaksanaan pembangunannya. Masalah stabilitas nasional menjadi prioritas dengan salah satu tekanannya pada kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran paham komunis. Ditambah dengan masih kuatnya penolakan berbagai kelompok masyarakat menyebabkan masalah normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC menjadi masalah yang rumit dan sulit untuk diputuskan. Berlandaskan kenyataan itu maka maju mundurnya upaya normalisasi hubungan tersebut sampai tahun 1989 masih sangat tergantung pada sikap Indonesia. Sepanjang masa tersebut Cina tetap bertahan dengan sikap di antara *gu mianzi*, *baoquan mianzi*, dan *gei mianzi*.

4.2 Konflik Kamboja dan Upaya Pendekatan

Politik Luar negeri RRC di tahun 1970-an memasuki era baru. Setelah didera oleh gegap gempita *wenhua da geming* yang merusak hampir semua hasil kerja diplomasi RRC era sebelumnya. Mao Zedong menilai kekuatan yang sedang mengancam dunia saat itu adalah kekuatan sosialis imperialis Uni Sovyet. Sedangkan kekuatan kapitalis Amerika Serikat sedang menurun terkait dengan keterlibatannya dalam perang Vietnam, dan krisis ekonomi yang melanda dalam negerinya. Berlandaskan penilaian Mao tersebut, maka garis besar politik luar negeri RRC tahun 1970-an adalah menggalang kerjasama dengan Amerika Serikat dan Barat untuk menghadapi ancaman Uni Sovyet. Menurut Yahuda ini adalah fase terakhir dari politik luar negeri RRC di bawah pengaruh Mao Zedong,

setelah melewati dua fase sebelumnya. Dua fase lainnya itu adalah, pertama tahun 1950-an ketika RRC merasa nyaman berada di bawah payung Uni Sovyet dalam menghadapi ancaman Amerika Serikat. Fase ke dua tahun 1960-an ketika RRC menggalang kekuatan ke tiga untuk meredam kekecewaannya terhadap Uni Sovyet dan mencoba keluar dari pembendungan Amerika Serikat.¹⁸¹

Perubahan kebijakan luar negeri RRC yang cenderung mendekat dan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Barat, juga merubah tatanan kekuatan dunia saat itu. Bagi Cina langkah tersebut telah memberi keleluasaan yang dibutuhkannya. Membaiknya hubungan RRC dengan Amerika Serikat membuat negara-negara sekutu AS seperti Jepang, Thailand, dan Filipina, juga berhubungan baik dengannya. Selain itu langkah tersebut juga telah mengucilkan Taiwan, karena Amerika Serikat dalam Komunike Shanghai telah setuju untuk mengakui 'satu Cina'. Meskipun demikian secara *de facto* Amerika Serikat belum menarik atau menghentikan semua bantuannya terhadap Taiwan.

Perubahan sikap Cina juga berpengaruh terhadap perkembangan di Asia Tenggara. Meskipun perubahan itu belum bisa membuat negara-negara di Asia Tenggara bisa bernafas lega sepenuhnya, namun telah membuat mereka mulai mempertimbangkan kebijakannya terhadap RRC. Tiga negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Thailand, dan Filipina, segera mengikuti langkah Amerika Serikat dengan meresmikan hubungan diplomatiknya dengan RRC pada sekitar tahun 1974-75. Berakhirnya perang Vietnam yang ditandai dengan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Vietnam pada tahun 1975, untuk beberapa saat membuat suasana konflik di kawasan Indocina mereda. Sayangnya situasi itu tidak bertahan lama, karena ternyata Vietnam menginterpretasikan pendekatan Cina-Amerika Serikat secara berbeda.

Menurut Cina, Vietnam telah 'salah' dalam menanggapi langkah Cina, berikut ini pandangan Cina atas perkembangan sikap Vietnam saat itu.

“20 世纪 70 年代初，中美关系缓和，这使越南做出了错误的反映。但当时越南国内战争尚未结束，还需要中国的援助。1975 年抗美战争结束后，越南获得统一。于是，越南对外政策实行大调整，基本倾向是亲苏反华”¹⁸²

¹⁸¹ Yahuda, Michael, (1983), *Towards the End of Isolationism ;... ,* hlm. 25-37

¹⁸² Huang Anyu (黄安余), (2005), *新中国外交史。。* , hlm, 177

“Pada awal tahun 70-an abad ke 20 (1970-an), hubungan Cina-Amerika Serikat menghangat, hal ini menyebabkan Vietnam telah membuat gambaran yang salah. Tapi saat itu perang di dalam negeri Vietnam belum berakhir, masih membutuhkan dukungan Cina. Tahun 1975, setelah perang melawan Amerika Serikat selesai, Vietnam mendapatkan persatuannya. Karena itu, Vietnam melakukan regulasi besar terhadap kebijakan luar negerinya, (dengan) arah utamanya adalah mendekat ke Uni Sovyet-melawan Cina”

Pandangan Cina di atas terlihat masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa Vietnam adalah negara vasal yang akan selalu setia kepadanya. Hubungan Cina-Vietnam secara tradisional telah berlangsung ribuan tahun, dan selama itu umumnya Vietnam telah berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Cina. Oleh karenanya Vietnam mempunyai arti yang amat strategis bagi Cina. Sebaliknya bagi Vietnam posisi itu tidak selalu menyenangkan, terutama ketika dihubungkan dengan keharusan Vietnam untuk menaati Cina.

Hubungan diplomatik kedua negara diawali dengan pengakuan Cina atas berdirinya Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) pada tanggal 18 Januari 1950. RRC bersama Uni Sovyet merupakan yang pertama menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Vietnam. Selama era Perang Dingin hubungan RRC-Vietnam mengalami pasang surut sejalan dengan tarik-menarik di antara dua kubu kekuatan dunia, dan di antara Cina dengan Uni Sovyet. Ketika kubu sosialis masih monolit ketiganya bersama-sama menentang AS. Setelah itu ketika Amerika Serikat bercokol di Vietnam dan Uni Sovyet berkoeksistensi damai dengan Amerika Serikat, Vietnam bersama Cina menentang keduanya (AS dan USSR). Kemudian ketika Cina memutuskan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat, Vietnam pun berpaling dari Cina dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Sovyet.

Tahun 1975 perang Vietnam berakhir ditandai dengan penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat dari wilayah itu. Vietnam pun berhasil mempersatukan diri menjadi Republik Sosialis Vietnam. Pada awalnya Vietnam mencoba untuk tetap berhubungan bahkan mengharapkan dukungan, baik dari Cina, Uni Sovyet maupun Amerika Serikat. Hingga tahun 1977 upaya pendekatan itu tidak digubris Amerika Serikat. Pendekatannya ke Cina yang antara lain dilakukan dengan pembicaraan dan kunjungan beberapa pejabat tingginya ke Beijing, sampai akhir

tahun 1977 juga tidak mendapatkan hasil kongkrit seperti dalam bentuk perjanjian kerjasama ataupun bentuk lainnya.¹⁸³ Thayer menggambarkan posisi Vietnam saat itu sebagai “kekuatan musuh bersatu menyerang perut Vietnam, tidak ada satu pun yang mau memberi pinjaman atau berdagang dengannya.”¹⁸⁴ Kondisi itu menyebabkan tiada pilihan lain bagi Vietnam selain mendekat ke Uni Sovyet dan negara-negara Eropa Timur.¹⁸⁵ Uni Sovyet sendiri membutuhkan kerjasama dengan Vietnam, terutama untuk membatasi ruang gerak Cina. Posisi geografis Vietnam menyebabkannya dapat menjadi penghubung Uni Sovyet ke Asia Tenggara. Oleh karena itu Uni Sovyet juga membangun pangkalan militer di Vietnam untuk memudahkan aksesnya ke Asia Tenggara.¹⁸⁶

Keputusan Vietnam untuk mendekat ke Uni Sovyet telah membuat hubungan Cina-Vietnam selanjutnya terus memburuk. Apalagi pada akhir tahun 1978 Vietnam melakukan serangan ke Kamboja dan membentuk pemerintahan baru di sana menggantikan rezim Pol Pot yang didukung Cina. Serangan Vietnam ke Kamboja telah menguak konflik Cina-Vietnam yang sebelumnya terselubung. Setelah terkuaknya tabir tersebut terlihat upaya keras masing-masing pihak untuk merebut simpati dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN. Contoh persaingan itu antara lain tampak dalam polemik berikut ini. Tak lama setelah serangan Vietnam ke Kamboja pimpinan Cina Deng Xiaoping maupun pimpinan Vietnam Pham Van Dong, melakukan kunjungan ke beberapa negara anggota ASEAN. Cina menuduh kunjungan Vietnam itu sebagai upaya membentuk hegemoni baru di bawah payung Uni Uni Sovyet. Sedangkan Vietnam menjawabnya dengan mengingatkan negara-negara Asia Tenggara tentang keberadaan sejumlah besar kaum *Huaqiao* yang akan menjadi “kekuatan laten komunis Cina”.¹⁸⁷

Ketegangan itu terus berlanjut dalam bentuk konflik perbatasan dan perlakuan buruk terhadap etnis Cina di Vietnam. Editorial *Renmin ribao*

¹⁸³ Yahuda, Michael, (1983), *Towards the End of Isolationism ;...* , hlm. 226

¹⁸⁴ Thayer, Carlyde A, “Vietnam: Beleaguered Outpost of Socialism”, *Current History*, Vol. 79, no 461, December 1980, hlm. 167

¹⁸⁵ Choudhury Golam W., (1982), *China in World Affairs ...*hlm. 222

¹⁸⁶ Porter, Gareth, “ The Great Power Triangle in Southeast Asia”, *Current History*, Vol. 79, no 461, December 1980, hlm. 163

¹⁸⁷ Rodney Tasker, “Eival for ASEAN Hands,” *Far Eastern Economic Review*, September 15, 1978, hlm. 19-20. Dikutip dari, Choudhury Golam W., (1982), *China in World Affairs :...*, hlm. 242-243

mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus-Desember 1978 telah terjadi lebih dari 100 kali pelanggaran perbatasan oleh tentara Vietnam. Dikatakan juga bahwa pelanggaran itu disengaja dan direncanakan.¹⁸⁸ Ketegangan mencapai puncaknya ketika terjadi eksodus etnis Cina dari Vietnam, akibat dari diterapkannya kebijakan untuk melepaskan perekonomian Vietnam dari tangan asing, termasuk bangsa Cina. Peristiwa itu memicu terjadinya ‘serangan hukuman’¹⁸⁹ dari Cina kepada Vietnam yang berlangsung selama sekitar 17 hari saja. Serangan militer Cina itu telah menyebabkan putusya hubungan diplomatik Cina-Vietnam.

Alasan yang dikemukakan Vietnam ketika menyerang Kamboja adalah untuk menghentikan kekejaman tentara Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot, yang telah membantai sekitar sejuta warga sipil di Kamboja.¹⁹⁰ Setelah berhasil merebut Kamboja dari tangan Khmer Merah, Vietnam kemudian mendirikan rezim baru di bawah pimpinan Heng Samrin dan Hun Sen. Sedangkan Pol Pot mencari perlindungan ke Cina. Serangan Vietnam itu telah menyulut konflik baru di Indocina. RRC yang telah melindungi Pol Pot juga mendukung kekuatan Khmer Merah untuk melawan Hanoi, dan memberi perlindungan kepada raja Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk. Sedangkan Vietnam terjebak dalam stigma sebagai agresor karena rejim Heng Samrin yang dibentuknya tidak diakui dunia. Perwakilan Kamboja di PBB ditempati oleh pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja atau *Coalition Government of Democratic Kampuchea* (CGDK) yang dibentuk Sihanouk.

Pecahnya konflik Kamboja membuat ASEAN sebagai perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan ke dalam dilema. ASEAN harus menentukan sikap, apakah mendukung CGDK termasuk Khmer Merah di dalamnya yang didukung Cina dan mengutuk Vietnam, atau sebaliknya?. Posisi dilematis ASEAN adalah berkaitan dengan kepentingan dan persepsi ‘ancaman’ yang dihadapi masing-masing anggotanya yang tidak bisa dikesampingkan.

¹⁸⁸ Renmin Ribao Editorial, “There is a limit to China’s forbearance”, *Peking Review*, No. 52, December 29, 1978, hlm. 22-24

¹⁸⁹ Lihat R. Tuty Nur Mutia, “Serangan Hukuman Cina Terhadap Vietnam” , Laporan Hasil Penelitian, Pusat Pengembangan Penelitian FIB UI, 2005

¹⁹⁰ Curtis, Grant, “Trnsition to What? ; Cambodia, UNTAC, and The Peace Process”, United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) paper, November 1993, diunduh dari <http://www.peacedividendtrust.org/EIPdata/Library/Economic%20Impact%20of%20Peacekeeping/UNTAC%20in%20Cambodia.pdf>, November 2010

Vietnam secara geografis terletak di Asia Tenggara dan Thailand berada pada posisi berhadapan langsung dengannya. Padahal secara politis Thailand cenderung mengikuti Amerika Serikat yang sekarang sudah mendekat ke Cina. Dengan demikian Vietnam adalah ancaman utama bagi Thailand. Sementara Indonesia dan Malaysia sesuai dengan pengalaman historisnya, walaupun tidak bisa menutup mata terhadap ancaman Vietnam, namun lebih cenderung menganggap RRC sebagai ancaman utama.¹⁹¹

Khusus bagi Indonesia yang dianggap sebagai anggota ASEAN yang paling berpengaruh, dilema itu menjadi lebih sulit. Kesulitan itu erat kaitannya dengan kondisi hubungan diplomatik Indonesia-RRC yang masih membeku. Tentang posisi Indonesia tersebut, sebagian kalangan menekankan bahwa masalah Kamboja itu akan lebih mudah diselesaikan bila Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan Cina. Menghadapi tekanan tersebut pemerintahan Soeharto yang didukung militer tidak bergeming. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa, “lebih menguntungkan untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Cina saat itu, karena Cina sedang memanfaatkan ASEAN untuk kepentingan politiknya, dan ASEAN telah menjalankan kebijakan Cina”.¹⁹²

Berpegang pada pandangan tersebut Indonesia selanjutnya terlihat lebih mendekat ke Vietnam. Indonesia mengusulkan agar Vietnam dan Amerika Serikat memperbaiki hubungan untuk memudahkan penyelesaian masalah Kamboja. Langkah Indonesia itu sesungguhnya dapat menjadi tekanan kepada Cina maupun Uni Sovyet. Bila Vietnam berhubungan baik dengan Amerika Serikat, maka tidak ada alasan bagi semua pihak untuk memperpanjang ketegangan di kawasan tersebut. Agresi Vietnam menimbulkan konflik yang rumit di kawasan, karena itu membutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyelesaikannya. Indonesia bereaksi keras terhadap agresi Vietnam tersebut, Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN *Standing Committee*, mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan peningkatan dan perluasan konflik di Indocina. Mochtar juga segera melakukan pertemuan tingkat Menlu ASEAN di Bangkok pada tanggal 12 Januari 1979.

¹⁹¹ Ba, Alice D, “China and ASEAN”, *Asian Survey*, Vol. XLIII, No. 4, July/August 2003, hlm. 625-626

¹⁹²Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: ...*, hlm. 96

Pertemuan itu menghasilkan seruan agar semua kekuatan asing meninggalkan Kamboja namun Vietnam tidak mempedulikannya. Meskipun demikian, Indonesia tetap melakukan upaya lainnya, bahkan karena anggota ASEAN menunjuk Indonesia sebagai *interlocutor*. Penunjukan itu dilakukan karena anggota ASEAN menganggap Indonesia mempunyai kedekatan hubungan dengan Vietnam maupun Kamboja. Sebagai *interlocutor* Indonesia harus berperan sebagai ‘rekan dialog’ bagi Vietnam dalam rangka menemukan jalan keluar bagi masalah Kamboja.¹⁹³

Konflik Kamboja menjadi rumit karena secara langsung maupun tak langsung, telah melibatkan hampir semua kekuatan dunia yang sedang berebut pengaruh saat itu. Cina menyikapi perkembangan itu dalam pandangan seperti berikut,

“这时，作为东盟六国之首的印尼，与中国的关系如何发展，成为决定东南亚地区和平与稳定的关键”¹⁹⁴

“Dalam perkembangan seperti ini, hubungan RRC dengan Indonesia sebagai pemimpin dari enam negara ASEAN, menjadi kunci yang menentukan perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara”

Pandangan Cina di atas tidak salah. Indonesia memang memiliki peran strategis di kawasan dan dipilihnya Indonesia sebagai *interlocutor* dalam rangka menyelesaikan konflik di Kamboja, semakin menegaskan hal itu.

Sejumlah langkah dijalankan Indonesia dan ASEAN, diantaranya dengan apa yang disebut sebagai *cocktail party*, yang merupakan forum tidak resmi agar pihak-pihak yang bertikai bisa bertemu dan berbicara. Langkah itu berlanjut dengan diselenggarakannya *Jakarta Informal Meeting (JIM) I* tahun 1988, yang kemudian diikuti dengan pertemuan Sino-Uni Sovyet pada September 1988. Semua langkah itu telah meredakan ketegangan di antara Cina dan Vietnam. Pembicaraan lanjutan antara Vietnam-Cina, Vietnam-Kamboja dan Thailand, serta pelaksanaan JIM II pada tahun 1989, membawa hasil yang amat penting,

¹⁹³ Luhulima, C. P. F. (1997). *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, hlm. 242

¹⁹⁴ ¹⁹⁴钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛：外交十记 ...*, hlm. 118

yaitu kesediaan Vietnam untuk menarik semua pasukannya pada akhir tahun 1989.¹⁹⁵

Dalam hal peran yang harus dijalankan oleh Cina dan Indonesia demi tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Khususnya untuk menyelesaikan krisis Kamboja, telah menyebabkan terjadinya kontak-kontak di antara para pejabat kedua negara. Uniknya, seperti ingin menepis salah paham dari Cina, Menlu Mochtar dalam perannya tersebut selalu menegaskan bahwa kontak-kontak itu terjadi adalah dalam kerangka kerjasama ASEAN, bukan mewakili kepentingan Indonesia semata.¹⁹⁶ Di sisi lain Mochtar juga selalu menegaskan tentang masih belum siapnya Indonesia untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan RRC. Pada kenyataannya kontak-kontak antar pejabat tersebut yang ditambah dengan semakin banyaknya kontak informal antar kelompok masyarakat kedua bangsa telah menyebabkan prospek normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia terlihat semakin cerah.

Tentang cerahinya prospek normalisasi hubungan, RRC bahkan mengambil langkah nyata yang amat positif antara lain dengan mengirim delegasi resmi untuk menghadiri peringatan 25 tahun KAA pada tahun 1980.¹⁹⁷ RRC juga menyambut hangat usulan KADIN untuk membicarakan perdagangan langsung Cina-Indonesia. Sambutan hangat RRC itu terlihat dari kesediaan Menteri Luar Negeri Wu Xueqian untuk menerima kunjungan Sukamdani di Singapura pada 29 Januari 1985.¹⁹⁸ Kehadiran Menteri Luar Negeri Wu Xueqian dalam peringatan 30 tahun KAA di Bandung pada tahun 1985, juga menunjukkan sikap positif tersebut. Prospek itu semakin jelas ketika para pengusaha kedua negara berhasil menandatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan perdagangan langsung, pada bulan juli 1985 di Singapura. Diakui ataupun tidak, perkembangan regional yang rumit itu ternyata telah membawa manfaat bagi tumbuhnya kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dari sana mulai terbuka

¹⁹⁵ Findlay, Trevor, (1995), *Cambodia : The Legacy and Lessons of UNTAC*, SIPRI Report no. 9, Oxford University Press, hlm. 4-5

¹⁹⁶ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: ...*, hlm.123

¹⁹⁷ "Roundup on Restoration of Indonesia Ties", OW 0508103290, Beijing Xinhua Domestic Service, (4 Aug 1990), *FBIS-CHI-90-151*, 6 Agustus 1990, hlm. 11

¹⁹⁸ Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid... hlm. 353*

peluang bagi terjadinya pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia, meskipun prosesnya masih panjang dan rumit.

4.3 Kesepakatan CCPiT dengan KADIN

Bila dilihat dari sudut hubungan dagang sesungguhnya hubungan Cina-Indonesia tak pernah terputus secara total. Hanya saja kegiatan itu dilakukan melalui perantara pihak ke tiga yaitu Singapura, Hongkong, dan Jepang. Hal itu dapat disimpulkan dari tetap mudahnya menemukan barang-barang buatan Cina di pasar Indonesia, walaupun belum tentu demikian pula sebaliknya di Cina. Kenyataan bahwa Cina memiliki potensi pengembangan modal dan pangsa pasar yang amat besar menyebabkan pengusaha Indonesia amat berminat berdagang dengan Cina. Pertimbangan itulah yang mendorong para pengusaha Indonesia tahunan *Canton Fair* yang diselenggarakan di Canton atau Guangzhou. Peluang bisnis yang mempunyai kemungkinan amat menguntungkan tentu tak mudah dilepaskan oleh para pengusaha. Oleh karena itulah meskipun kunjungan KADIN itu tidak direstui pemerintah Indonesia, namun tetap berlangsung. Bahkan sampai terjadi kasus tahun 1978 yang menyebabkan KADIN menerima teguran keras dari pemerintah dan menurut Sukamdanihal itu sangat merugikan pihaknya.

Suatu hubungan tak dapat berlangsung hanya dari satu pihak, demikian pula dalam hubungan dagang Cina-Indonesia. Pihak Cina juga sangat berkepentingan atas berlangsungnya hubungan dagang dengan Indonesia. Pelaksanaan program *si ge xiandahua* (empat modernisasi) dan *gaige kaifang* (reformasi dan keterbukaan) telah membuat dunia usaha menjadi harapan utama masyarakat Cina. Huang Dagen menggambarkan situasi itu dalam ungkapan seperti berikut,

“中国自 1978 年起实施四个现代化措施, 接着 又开始采取改革开放的政策。邀请外资流入 并鼓励联合投资。在社会上成一般企业主义浪潮, 中国年轻一代及知识阶层已有了新认识。加上经济持续开放, 似乎显示出这个亚洲巨人正面临着缓慢 而深刻的转型, 它 正重新燃起外国人涉足 这个全球最大的潜在市场的希望之火”¹⁹⁹

¹⁹⁹ Huang, Daogen, (黄道根), “中, 印 (尼) 复交及两国面临世界形势的桃展“ (Perbaikan Hubungan Cina-Indonesia dan Tantangan Perkembangan Dunia yang Dihadapi Kedua Negara”, *东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara)*, No. 4 (1990), hlm. 68

“Sejak tahun 1978 Cina mewujudkan berbagai fasilitas terkait dengan empat modernisasi (*sige xiandaihua*), selanjutnya juga melaksanakan kebijakan reformasi dan keterbukaan (*gaige kaifang*), mengundang masuknya investasi asing dan mendorong kerjasama penanaman modal, dalam masyarakat terbentuk kecenderungan umum terhadap paham korporasi, di kalangan generasi muda dan intelektual Cina muncul pemahaman baru, dan ditambah pula dengan dilanjutkannya liberasi ekonomi, nampak terlihat bahwa raksasa Asia sedang menghadapi transformasi yang lambat namun mendalam. Dia sedang menyalakan kembali api harapan dari keterlibatan asing dalam pasar yang paling besar dan potensial di seluruh dunia”

Gambaran kecenderungan masyarakat Cina yang terungkap di atas, adalah sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah Cina yang menetapkan bidang ekonomi sebagai titik sentral pembangunannya. Pemerintah Cina menjadikan tingkat produktivitas sebagai salah satu acuan dan penerapan ekonomi pasar termasuk di dalamnya. Berikut ini adalah rangkaian kutipan pernyataan pemimpin Cina Deng Xiaoping yang menjadi pedoman kebijakan tersebut,

“...我们的生产力发展水平很低，远远不能满足人民和国家的需要。这就是我们的目前时期的主要矛盾，解决这个主要矛盾就是我们的中心任务”²⁰⁰

“... tingkat kekuatan produksi kita sangat rendah, sejak lama tidak dapat memenuhi kebutuhan negara dan rakyat, ini adalah kontradiksi utama yang kita hadapi dewasa ini, memecahkan/mengatasi kontradiksi utama ini adalah tugas pokok kita”

Pernyataan di atas adalah bagian dari pidato Deng dalam forum diskusi tentang masalah teoritis dalam partai (PKC) pada tanggal 30 Maret 1979. Deng masih mengemas dasar pemikirannya tentang tantangan yang menimbulkan keharusan menjalankan reformasi ekonomi, dalam teori kontradiksi. Hal itu merupakan salah satu langkah pragmatis Deng, karena kemas teori kontradiksi memudahkan pemahaman para kader sekaligus dapat memompa semangat dan dukungan mereka. Dalam pemerintahan Cina, teori kontradiksi merupakan salah satu kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan selama kepemimpinan Mao Zedong. Hal itu menyebabkan kerangka berpikir seperti itu sudah sangat dipahami oleh para kader PKC maupun masyarakat Cina.

²⁰⁰ 邓小平 (Deng Xiaoping), (1979), “坚持四项基本原则”(“Mempertahankan Empat Prinsip Dasar”), dalam *邓小平文选*, 第二卷 (Jilid II), hlm. 182

Selanjutnya dalam sebuah kumpulan laporan terpilih juga ditemukan pernyataan seperti berikut,

“...为了解决现阶段的主要矛盾，就必须大力发展商品经济，提高劳动生产率，逐步实现工业，农业，国防和科学技术的现代化”²⁰¹

“... untuk mengatasi kontradiksi utama dalam tahap sekarang ini, maka harus sekuat tenaga mengembangkan ekonomi perdagangan, meningkatkan angka produksi buruh, secara bertahap mewujudkan modernisasi teknik industri, pertanian, pertahanan, dan teknologi”

Kutipan di atas menegaskan bahwa fokus pembangunan RRC untuk mewujudkan program empat modernisasi adalah, pembangunan bidang ekonomi dan perdagangan. Pelaksanaan pembangunan itu tidak dapat menghindarkan Cina dari keharusan menerapkan ekonomi pasar,

“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义市场经济，这肯定不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义，我们是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。”²⁰²

“dikatakan ekonomi pasar hanya ada dalam masyarakat kapitalis, jika hanya ada ekonomi pasar kapitalis, hal ini sama sekali tidaklah tepat. (penyebab) Mengapa sosialisme tidak boleh menjalankan ekonomi pasar, hal ini tidak dapat dikatakan (karena) kapitalisme, kita menjadikan ekonomi terencana sebagai dasar, dan mengkombinasikannya dengan ekonomi pasar, ini adalah ekonomi pasar sosialis.”

Berlandaskan arah dan landasan pembangunan ekonomi RRC sebagaimana terungkap dalam kutipan-kutipan di atas, di awal tahun 1980-an pemerintah Cina mendorong peningkatan pendapatan rakyat melalui pengembangan usaha pribadi. Langkah itu dikenal dengan sebutan *xia hai* (turun ke lautan). Maksudnya, rakyat dibolehkan menjalankan usaha sendiri dan diperkenalkan pada sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan pemerintah RRC tetap memfokuskan diri dalam peningkatan

²⁰¹ “十三大报告” (“Tiga Belas Laporan Utama”), dikutip dari 赵金康，席副群，翁有为(Zhao, Jinkang, Xi Fuqun, Weng Youwei), (1999) *当代中国政治思想史(Sejarah Pemikiran Politik Cina Modern)*, 河南大学出版社 (Penerbit Universitas Hunan), hlm. 359

²⁰² 邓小平 (Deng Xiaoping) (1979), “社会主义也可以搞市场经济”(Sosialisme juga boleh menjalankan ekonomi pasar), dalam *邓小平文选*, 第二卷 (jilid II), hlm. 236

perdagangan dan investasi asing sebagai roda pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di bagian ini ditetapkan empat wilayah sebagai zona ekonomi khusus tahap pertama, yaitu Shenzhen, Zhuhai, Shantou dan Xiamen. Beberapa langkah strategis yang diambil pemerintah RRC tersebut telah memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu didorong pula oleh pemberdayaan dan penciptaan nilai tambah atas usaha atau industri lokal, sehingga dunia usaha atau perdagangan dapat merebak ke semua lapisan masyarakat yang berminat. Perubahan yang sangat bermakna dalam tatanan sosial-ekonomi Cina, telah mendorong pihak Cina untuk menyambut baik delegasi pengusaha Indonesia yang hadir di Guangzhou tahun 1977. Bahkan saat itu sudah mulai didiskusikan kemungkinan dilakukannya hubungan dagang langsung antara Cina dengan Indonesia, namun Jakarta kecuali sejumlah pengusahanya, menyambut dingin gagasan tersebut.²⁰³

Perkembangan domestik RRC yang sangat menjanjikan untuk peningkatan hubungan dagang itu, membuat para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam KADIN terus mengembangkan gagasan untuk membuka hubungan dagang langsung dengan RRC. Pihak kementerian luar negeri Indonesia sendiri tercatat beberapa kali mengemukakan gagasan tersebut. Deplu RI berpendapat bahwa sebagai negara anggota ASEAN yang berpengaruh seharusnya Indonesia dapat mengambil manfaat dari perubahan yang terjadi di RRC. Pada awal tahun 1980-an harga minyak di pasaran dunia merosot tajam, hal itu mendorong pemerintah Indonesia menggalakkan usaha ekspor non minyak dan gas bumi. Meskipun demikian, Presiden Soeharto sampai akhir tahun 1984 belum menunjukkan respon yang positif terhadap gagasan hubungan dagang langsung dengan RRC tersebut.²⁰⁴

Menurut Sukamdani, ia sebagai ketua KADIN beberapa kali mencoba menyampaikan gagasan itu kepada Presiden Soeharto, namun tidak mendapat tanggapan pasti. Barulah pada tanggal 8 November 1984 Presiden Soeharto memberi lampu hijau untuk dilakukannya penjajagan pemulihan hubungan dagang langsung Cina-Indonesia. Beliau juga menunjuk Mochtar Kusumaatmadja (Menlu) , Yoga Soegomo (Kepala BAKIN), dan Benny Moerdani sebagai orang-

²⁰³ Kroef, Justus M van der, "Normalizing with China : Indonesia's Policies and Perception", *Asian Survey*, Vol. 26, No.8 (1986), hlm. 921

²⁰⁴ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China:...* hlm. 143-144

orang yang bisa dimintai pendapatnya tentang hal itu. Beberapa waktu kemudian ditetapkan bahwa urusan penjajagan hubungan dagang langsung akan dikoordinasikan oleh Menteri muda Sekretaris Kabinet (Menmud Sekab), yang saat itu dijabat oleh Moerdiono.²⁰⁵

Setelah menerima lampu hijau dari Presiden Soeharto, langkah selanjutnya yang dilakukan KADIN adalah menghubungi organisasi perdagangan RRC yaitu CCPIT (*China Council for Promotion on International Trade/Zhongguo guojimaoyi zujin weiyuanhui*). Tujuannya adalah untuk membicarakan kemungkinan pelaksanaan hubungan dagang langsung Cina-Indonesia. Sambutan hangat pihak RRC terhadap inisiatif KADIN terlihat dari pernyataan juru bicara kementerian luar negeri RRC bahwa, “Cina akan memperkuat semua bentuk hubungan dan kerjasama dengan Indonesia.”²⁰⁶

Dalam proses pendekatan KADIN kepada pihak Cina atau CCPIT khususnya, peran Tong Djoe seorang pengusaha Indonesia yang juga berpengaruh di Singapura tidak dapat dikesampingkan. Tong Djoe lah yang membuat Sukamdani bisa bertemu dengan Menlu RRC Wu Xueqian di Singapura. Dalam kesempatan itu Wu menyarankan agar pembicaraan dilanjutkan dengan perwakilan dagang RRC di Singapura. Tong Djoe pula yang melicinkan jalan KADIN untuk melakukan pendekatan selanjutnya ke pihak CCPIT. Pentingnya peran Tong Djoe tampak ketika proses negosiasi macet karena pihak RRC meminta ‘mandat tertulis’ bahwa langkah KADIN itu direstui pemerintah Indonesia. Padahal saat itu pemerintah Indonesia berkeras tidak mau memberikan mandat semacam itu. Bagi pemerintah Indonesia semua upaya itu sepenuhnya merupakan inisiatif KADIN dan semata-mata hanya untuk kepentingan perdagangan.²⁰⁷ Tong Djoe berhasil menjembatani kedua belah pihak sehingga CCPIT dapat memahami posisi KADIN. Kehadiran dan peran penting Tong Djoe dalam proses pendekatan KADIN-CCPIT atau bahkan pendekatan Cina-Indonesia, menguatkan kebenaran pendapat Toomey bahwa “peran mediator atau penghubung dalam bernegosiasi dengan Cina adalah sangat penting.”²⁰⁸

²⁰⁵ Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid...*, hlm. 344-351

²⁰⁶ Kroef, Justus M van der, “Normalizing with China : Indonesia’s Policies and Perception”, hlm. 923

²⁰⁷ “Berdaganglah sampai ke negeri Cina”, *Tempo (on line)*, 13 Juli 1985

²⁰⁸ Lihat Bab 2

Kehadiran Menteri Luar Negeri RRC Wu Xueqian dalam peringatan 30 tahun KAA pada bulan April 1985, menjadi peristiwa penting selanjutnya. Wu Xueqian menjadi pejabat tinggi RRC pertama, yang berkunjung ke Indonesia sejak hubungan diplomatik kedua negara dibekukan. Meskipun kehadiran Menteri Wu mendapat perhatian istimewa dari media massa, namun tidak memberi pengaruh berarti terhadap pembicaraan normalisasi. Pada kesempatan itu tidak terjadi pertemuan khusus antara Wu dengan Presiden Soeharto sebagaimana diramalkan atau diharapkan banyak orang. Tentang tidak terjadinya pertemuan khusus antara Wu dengan Presiden Soeharto, ditemukan beberapa alasan berbeda yang menunjukkan adanya sikap kedua pihak yang saling 'menjaga muka'. Alasan resmi yang diumumkan Indonesia adalah karena Wu meminta bertemu pada tanggal 25 April, tapi Wu dijadwalkan akan diterima pada keesokan harinya. Saat itu Wu tidak bisa menunggu dan segera meninggalkan Indonesia. Sedangkan kisah tidak resmi mengungkapkan bahwa hal itu disengaja pihak Indonesia karena Pak Harto beranggapan bahwa, belum waktunya untuk membicarakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina.²⁰⁹ Kisah yang beredar di Hongkong menyebutkan bahwa, gagalnya pertemuan Wu-Soeharto adalah karena Wu tidak membawa surat permintaan maaf pemerintah Cina kepada Indonesia berkaitan dengan keterlibatannya dalam peristiwa G30S PKI sebagaimana yang diharapkan Indonesia²¹⁰

Meneliti lebih jauh tentang kesimpangsiuran penyebab tidak terjadinya pertemuan Wu-Soeharto, ditemukan bahwa kisah tidak resmi yang beredar di Jakarta mempunyai kecocokan dengan yang dikisahkan Sukamdani. Dikatakan bahwa Sukamdani harus mencari alasan untuk tidak berada di Jakarta selama berlangsungnya peringatan ulang tahun KAA, yaitu dengan melakukan kunjungan ke Papua. Hal itu harus dilakukannya untuk memberi 'alasan yang cukup manis' atas tidak terjadinya pertemuan KADIN dengan Menteri Wu. Padahal dalam pertemuan di Singapura diharapkan pembicaraan lebih rinci tentang hubungan dagang langsung dapat dilakukan dalam kunjungan Wu ke Jakarta tersebut. Penyebab yang sebenarnya dari tindakan Sukamdani itu adalah

²⁰⁹ Suryadinata, Leo, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia...* hlm137

²¹⁰ Gao, Weinong (高伟农), "印度尼西亚与中国关系正常化的动因...", hlm. 5

karena adanya pesan Pak Harto bahwa, “tidak usah tergesa-gesa” dalam membicarakan hubungan dagang langsung yang sudah diawali dengan pertemuan di Singapura tersebut.²¹¹

Dari sana terlihat kisah tidak resmi itu lebih beralasan. Jika sejak awal Wu Xueqian tahu pasti bahwa pertemuannya dengan Presiden Soeharto telah dijadwalkan, maka tindakannya melepaskan begitu saja kesempatan tersebut adalah sangat tidak logis. Sedangkan tentang keinginan Indonesia agar Cina mengirimkan surat permintaan maaf berkaitan dengan peristiwa G 30 S PKI, telah dibantah secara tegas oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya, Indonesia tidak pernah mengajukan hal seperti itu. Indonesia hanya ingin Beijing secara resmi menyatakan telah menghentikan dukungannya kepada organisasi anti pemerintah di Asia Tenggara.²¹² Dalam peristiwa Wu Xueqian itu sangat terasa pengaruh nilai-nilai konsep *mianzi* di dalamnya, khususnya dalam upaya menghindari *diu mian*. Cina maupun Indonesia sama-sama tidak ingin mempermalukan atau dipermalukan, karena itu dibuat alasan-alasan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Meskipun tidak terjadi pertemuan Wu dengan Presiden Soeharto, namun tetap tercapai kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan hubungan dagang langsung yang dilakukan oleh KADIN dan CCPIT. Kesepakatan itu merupakan hasil pembicaraan yang dilakukan oleh Menlu Mochtar dan Menlu Wu Xueqian, di sela-sela kegiatan peringatan ulang tahun KAA. Berlandaskan kesepakatan dua menteri tersebut KADIN dan CCPIT melanjutkan negosiasi tentang pelaksanaan hubungan dagang langsung. Nota Kesepakatan antara KADIN dan CCPIT tentang hubungan dagang langsung Cina-Indonesia akhirnya ditandatangani di Singapura, dalam tiga bulan berikutnya yaitu pada tanggal 5 Juli 1985. Kesepakatan tersebut mengatur perdagangan langsung antara Cina dan Indonesia, namun tidak menyentuh masalah lain di luar hal itu. Pemerintah Indonesia menunjukkan pengakuannya atas kesepakatan itu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 1985, pada tanggal 23 Juli 1985.

Tercapainya kesepakatan KADIN-CCPIT tidak serta merta melancarkan laju perdagangan di antara kedua negara. Hal itu terutama disebabkan oleh belum

²¹¹ Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid...*, hlm 366-369

²¹² Kroef, Justus M van der, “Normalizing with China :...”, hlm. 914

siapnya beberapa unsur pendukung seperti peraturan, maupun sarana dan prasarana teknis yang seharusnya disiapkan oleh kedua belah pihak. Hubungan dagang langsung juga tidak segera mematikan pihak ke tiga yang selama ini menjadi mediator. Masih adanya para mediator bukan hanya terkait dengan peran ekonomi dan strategis yang telah mereka mainkan selama ini, tapi juga karena Cina tidak ingin memutus jalur atau hubungan perdagangan tradisional yang telah terjalin sebelumnya.²¹³ Pihak militer Indonesia dan birokrat RRC lebih menyukai perdagangan melalui pihak ke tiga, karena hal itu memungkinkan mereka mendapatkan komisi darinya.²¹⁴

Proses yang dilalui untuk terjadinya hubungan yang normal memang masih sangat jauh. Meskipun demikian penandatanganan nota kesepakatan hubungan dagang langsung itu telah menjadi momentum yang turut melicinkan jalan menuju normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Terjadinya hubungan dagang langsung telah memberi peluang lebih banyak kepada kedua belah pihak untuk berkomunikasi. Hambatan dalam upaya menuju normalisasi hubungan diplomatik memang masih belum tersentuh, namun upaya kedua belah pihak tampak tidak pernah berhenti. Pembicaraan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia kemudian mendapat landasan yang lebih kongkrit ketika Presiden Soeharto menyatakan bersedia bertemu dengan utusan RRC dalam rangkaian upacara pemakaman kaisar Hirohito di Tokyo.

Pertemuan itu merupakan hasil pendekatan para diplomat Cina kepada para diplomat Indonesia yang bertugas di PBB. Pembicaraan untuk pendekatan yang bersifat informal itu terjadi sekurangnya sepuluh kali.²¹⁵ Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan bersedia menerima Menteri Luar negeri RRC Qian Qichen di Tokyo pada tanggal 23 Februari 1989. Dalam jumpa pers yang dilakukan Presiden setelah kunjungannya ke Tokyo itu diungkapkan bahwa, sebelumnya Presiden telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk menjajaki masalah-masalah yang akan dibicarakan RRC dalam pertemuan tersebut.²¹⁶

²¹³ Chan, Paul, "Politics, Mechanisms, and Institutions Affecting ASEAN-China Economic Relations", dalam Chia, Siew Yue, Cheng Bifan (eds.), (1989), *ASEAN-China : Economic Relations Development in ASEAN and China*, Singapore : ISEAS, hlm. 62

²¹⁴ Suryadinata, Leo, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia...* hlm. 136

²¹⁵ Suryadinata, Leo, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia...* hlm.138

²¹⁶ "Maka mulailah kini 'huifu jiaoji' berjabat tangan dengan Cina", *Tempo On line*, 4 Maret 1989

Setelah pertemuan Tokyo seharusnya langkah menuju normalisasi semakin jelas. Kenyataannya tidaklah demikian, prosesnya tidak berjalan semulus yang diharapkan atau diperkirakan. Ketidاكلancaran itu disebabkan oleh masih adanya beberapa masalah yang mengganjal yang harus diselesaikan atau dikompromikan oleh kedua belah pihak.

4.4 Simpulan

Jalan menuju terwujudnya normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia sungguh tidak mudah. Di tahap pendekatan saja telah terjadi proses yang demikian dinamis. Inti masalahnya ada di antara 'kebutuhan', 'kehormatan', dan 'kepercayaan'. Ditinjau dari sudut kebutuhan, kedua pihak sesungguhnya saling membutuhkan, terutama dengan semakin rumitnya perkembangan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi negara dan peran internasional masing-masing. Hingga akhir tahun 1980-an, terlihat Cina sangat ingin mengembalikan hubungan itu, namun kebutuhan atas normalnya hubungan dengan Indonesia belum terlalu mendesak. Membaiknya hubungan Cina-Amerika Serikat dan keberhasilan RRC merebut kedudukan di PBB, serta hubungan yang membaik antara RRC dengan sebagian anggota ASEAN, telah membuat Cina cukup leluasa untuk menunjukkan eksistensinya di dunia. Bahkan Cina juga berani bersaing dengan Uni Sovyet dalam merebut pengaruh dunia. Berlandaskan itu maka dalam hal normalisasi hubungannya dengan Indonesia, 'kehormatan' masih menjadi prioritas utama yang diwujudkan dalam sikap *gu mianzi*, *baoquan mianzi* dan *gei mianzi*.

Dari sisi Indonesia, terjadinya tarik menarik dalam upaya pendekatan itu lebih disebabkan oleh belum tumbuhnya 'kepercayaan' kembali terhadap Cina. Hal itu tercermin dari syarat yang terus diajukan Indonesia untuk tercapainya normalisasi hubungan. Menurut Menlu Mochtar Indonesia ingin agar Cina mengeluarkan pernyataan secara resmi, terbuka, tegas, dan konsisten bahwa "tidak ada lagi keinginan untuk mendukung gerakan yang menentang pemerintahan yang sah di Asia Tenggara."²¹⁷ Masalahnya menjadi rumit bagi

²¹⁷ Kroef, Justus M van der, "Normalizing with China : Indonesia's Policies and Perception", hlm. 911

Indonesia karena sampai akhir tahun 1980-an pernyataan-pernyataan Cina masih cenderung bermakna ganda. Beberapa tindakan RRC juga tidak sesuai dengan prinsip koeksistensi damai yang dipropagandakannya. Contoh pernyataan Cina yang tidak menenangkan Indonesia, di antaranya adalah pernyataan Wu Xueqian ketika menghadiri peringatan KAA di Bandung. Dikatakan bahwa, “Cina masih memelihara hubungan moral dengan partai komunis (negara) lain, meskipun demikian Cina tidak akan memanfaatkan hubungan itu untuk mencampuri urusan domestik negara lain.”²¹⁸ meskipun dalam beberapa hal Cina sudah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan lebih menghargai Indonesia, namun pernyataan seperti ini membuat Indonesia masih sulit untuk mempercayai Cina.

Selain itu di dalam negeri Indonesia tarik-menarik antar kelompok pro dan kontra normalisasi hubungan dengan Cina cukup kuat. Hal itu turut membuat pemerintah tidak mudah dalam mengambil keputusan. Adanya kelompok pro dan kontra normalisasi dalam masyarakat Indonesia, menyebabkan tidak terhindarkannya posisi Soeharto sebagai ‘penentu utama’ jalannya proses normalisasi hubungan dengan RRC. Hal itu terjadi bukan saja karena fungsi yang melekat padanya sebagai Presiden, tapi juga karena ketokohnya mampu menghentikan atau setidaknya mengkompromikan pro dan kontra tersebut.

²¹⁸ *Asia Week*, Hongkong : 10 May 1985, hlm. 30

BAB 5

KEBIJAKAN RRC

TENTANG NORMALISASI HUBUNGAN

Paparan dalam bab ini akan terbagi dua yaitu, pembahasan yang berlandaskan pendekatan keterkaitan mikro-makro dan pembahasan tentang proses perundingan. Bagian pertama akan menggunakan pendekatan keterkaitan mikro-makro secara utuh, yakni dengan mengungkapkan berbagai perubahan di tiga dimensi (simbolik, institusional, dan rejim) dalam level makro, dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di level mikro. Pengaruh itu akan terlihat dari kebijakan atau keputusan yang dihasilkan. Dari bagian ini akan terungkap berbagai faktor yang telah mendorong Cina untuk melakukan normalisasi dan proses pengambilan keputusan yang menetapkan kebijakan Cina tentang normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Sedangkan bagian ke dua akan mengungkapkan proses perundingan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi kendala bagi terwujudnya normalisasi tersebut. Analisis berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi selama berlangsungnya perundingan akan dilakukan dalam kerangka konsep *mianzi*. Dari sana dapat terungkap bagaimana normalisasi hubungan itu telah menjadi salah satu keberhasilan Cina dalam upaya *baoguan tade mianzi*, dan menaikkan kembali citra internasionalnya.

5.1 Keterkaitan Mikro-Makro dalam Kebijakan Normalisasi

Secara ringkas aplikasi pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan kebijakan RRC tentang normalisasi hubungannya dengan Indonesia telah tergambar dalam tabel kerangka analisis dasar yang terdapat di bab 2. Paparan berikut ini merupakan pembahasan yang lengkap dan menyeluruh yang akan menunjukkan dengan jelas berbagai perubahan di masing-masing dimensi dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan serta kebijakannya.

5.1.1 Perubahan dalam Dimensi Simbolik

Dimensi simbolik dalam pendekatan ini berfokus pada bagaimana interpretasi Cina terhadap perubahan mendasar di level makro – dalam hal ini perkembangan internasional dan domestik - berpengaruh terhadap cara pandangnya, sehingga terjadi perubahan prioritas dalam politik luar negeri Cina. Perkembangan dunia pada tahun 1980-an semakin kencang dipengaruhi oleh semangat perubahan. Salah satunya seperti yang dikembangkan oleh Gorbachev yang menjadi pemimpin baru Uni Sovyet dengan slogannya ‘*Glasnost, Perestroika, & Demokratizatsiia*’, Konstelasi politik dunia saat itu masih terbelah dalam dua kutub kekuatan atau bi-polar yaitu, Timur dan Barat, atau kutub sosialis yang identik dengan Uni Sovyet serta sekutunya, dan kutub kekuatan kapitalis yang identik dengan Amerika Serikat, negara-negara Barat serta sekutunya.

Gorbachev ternyata tidak mampu mengendalikan semangat perubahan yang dibawanya, semangat itu telah menjadi bumerang. Kebijakan restrukturisasi politik dan ekonomi yang tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang, telah mengguncang berbagai sektor kehidupan di Uni Sovyet. Sedangkan kebijakannya untuk meninggalkan ‘doktrin Brezhnev’ membuat negara-negara sekutunya di Eropa Timur kehilangan pegangan. Kebijakan itu berakibat fatal yaitu runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989. Runtuhnya Tembok Berlin menandai runtuhnya kekuatan sosialis di Eropa Timur dan menjadi pertanda buruk bagi kubu sosialis-komunis di dunia. Semangat perubahan yang semakin keras bergaung setelah runtuhnya tembok Berlin menyebabkan banyaknya negara komunis atau sosialis yang berubah menjadi negara demokrasi. Di pihak lain secara umum kerjasama antar negara di dunia cenderung mengarah kepada pengelompokan berdasarkan letak geografis, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, maupun kepentingan politis.

Perkembangan tersebut menyebabkan polarisasi dunia menjadi beragam, konstelasi dunia mulai mengarah menjadi multi polar. Terlebih ketika kekuatan sosialis semakin melemah dengan bubarnya Pakta Warsawa pada bulan Juli 1991, dan akhirnya Republik Sosialis Uni Sovyet pun secara resmi dinyatakan bubar pada 26 Desember 1991, berganti dengan Federasi Rusia. Amerika Serikat untuk

sementara waktu muncul sebagai adidaya tunggal, namun tidak dengan kekuatan yang utuh. Pada akhir tahun 1980-an tersebut dua arus besar perkembangan dunia muncul bersamaan. Pertama arus globalisasi yang terutama erat terkait dengan kemajuan teknologi komunikasi. Ke dua arus regionalisasi sebagai dampak dari tekanan berbagai kepentingan masing-masing negara di berbagai kawasan dunia.

RRC adalah negara berideologi sosialis-komunis, namun sejak tahun 1963 telah melepaskan diri dari bayang-bayang Uni Sovyet, dan Cina telah memilih jalannya sendiri. Perkembangan dunia yang cenderung menjadi multi polar dengan regionalisasi yang tidak hanya berlandaskan letak geografis tapi lebih dilandasi kepentingan nasional masing-masing negara, juga memberi pengaruh besar kepada para pemimpin Cina dalam menginterpretasikan kepentingan nasionalnya. Bagi RRC arus perkembangan dunia yang demikian itu merupakan ancaman sekaligus peluang. Bila RRC salah dalam mengantisipasi, maka arus itu dapat mengancam eksistensi ideologi dan kedaulatannya. Sebaliknya, antisipasi yang tepat akan memberi peluang bagi RRC untuk tampil sebagai kekuatan alternatif.

Secara historis telah tercatat bahwa politik luar negeri Cina selama kepemimpinan Mao Zedong cenderung menjalankan diplomasi revolusioner. Dalam hal ini diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan ideologi sosialis-komunis di dunia melalui jalan revolusi. Sejak berakhirnya *wenhua dageming*, yaitu di awal tahun 1970-an, RRC telah mengambil langkah perubahan diplomasi yang amat strategis. RRC mulai bekerjasama dengan Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan seteru utamanya. Amat disayangkan di tengah semangat perubahan itu pada bulan Januari 1976 Perdana Menteri Cina Zhou Enlai yang merupakan motor perubahan tersebut meninggal dunia. Mao Zedong tidak menunjuk wakil Zhou yaitu Deng Xiaoping untuk menggantikan Zhou, Mao dengan mengandalkan kharismanya telah menunjuk Hua Guofeng sebagai pengganti Zhou, sehingga untuk beberapa tahun politik domestik Cina kembali bergejolak. Terutama ketika Deng digusur dari semua jabatannya akibat tuduhan sebagai penggerak peristiwa Tiananmen 1976.

Meninggalnya Mao pada bulan September tahun yang sama, memberi peluang kepada Deng dan pendukungnya untuk muncul kembali ke panggung

politik Cina. Saat itulah terjadi perubahan drastis dalam sistem perpolitikan Cina. Deng pada tahun 1978 mencanangkan perubahan mendasar bagi RRC yaitu dengan menetapkan program *gaige kaifang*. Inti dari program ini adalah tekad untuk menjalankan reformasi khususnya di bidang ekonomi dan membuka pintu Cina bagi dunia luar. Kebijakan itu memungkinkan masuknya modal asing untuk membangun perekonomian dengan lebih leluasa, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kejayaan eksistensi RRC di dunia.

Dalam pidato di hadapan para kader PKC di awal tahun 1980, Deng Xiaoping menyatakan bahwa ada tiga tugas utama yang harus dilakukan di era tahun 1980-an yaitu, 1) melawan hegemonisme dan menjaga perdamaian dunia, 2) mewujudkan persatuan nasional dengan menyatukan Taiwan, dan 3) meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan empat modernisasi.²¹⁹ Pernyataan Deng itu merupakan pernyataan strategis yang menunjukkan bahwa kepentingan nasional Cina saat itu adalah mewujudkan utuhnya kedaulatan dan program modernisasi melalui pembangunan ekonomi. Oleh karena itu Cina harus melawan hegemonisme dan menjaga dunia agar tetap damai. Dunia yang damai dibutuhkan Cina untuk menjamin kelancaran program pembangunan ekonominya. Sedangkan sikap melawan hegemonisme harus ditegaskan Cina, karena hal itu juga dapat menjadi sebuah jaminan bagi dunia luar bahwa Cina tidak lagi menjalankan diplomasi revolusioner, dan yang lebih penting lagi adalah tidak akan mengembangkan hegemonisme.

Program *gaige kaifang* kemudian dilaksanakan sebagai cara utama Cina untuk mencapai kesejahteraan, kejayaan, dan tentu saja kedaulatan, serta kehormatannya. Oleh karenanya sejak awal program tersebut dijalankan dengan berpedoman pada semangat *zou ziji delu*²²⁰ atau berjalan pada jalan/caranya sendiri. Hal itu juga menjadi penunjuk bahwa prinsip independen dan mandiri tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan reformasi Cina. Pidato Deng Xiaoping di depan Kongres PKC ke XII tahun 1982 menegaskan bahwa,

²¹⁹邓小平, (Deng Xiaoping), (1980), “目前的形势和任务“ (Tugas dan Situasi Dewasa ini), dalam 邓小平, (Deng Xiaoping), (2008), *邓小平文选*, (*Pilihan Tulisan Deng Xiaoping*), 第二卷 (jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing: Penerbit Rakyat), hlm. 239-240

²²⁰ 走自己的路

“中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的力量来办，独立自主，自力更生，无论过去，现在，和将来，都是我们的立足点。。。中国人民有自己的民族自尊心和自豪感，以热爱祖国，贡献全部力量建设社会主义祖国为最大光荣，以损害社会主义祖国利益，尊严和荣誉为最大耻辱”²²¹

“Masalah Cina harus diselesaikan sesuai dengan kondisi dan oleh orang Cina sendiri, independensi dan kemandirian, dulu, sekarang, maupun nanti. selalu menjadi pijakan utama kita. ... Rakyat Cina mempunyai kehormatan dan kebanggaan diri, menjadikan cinta tanah air yang mendalam dan membaktikan seluruh tenaga untuk membangun negara sosialis sebagai kemuliaan yang paling utama, dan (menganggap) penggunaan kejayaan, kehormatan, dan keuntungan negara untuk menghancurkan sosialisme sebagai hal yang paling memalukan”.

Penegasan Deng seperti itu diperlukan karena langkah *gaige kaifang* juga mengundang kekhawatiran sejumlah pihak atas kemungkinan tercemarnya ideologi yang dianut Cina. Berlandaskan prinsip *zou zijidelu* itu pula ditetapkan bahwa sosialisme yang diterapkan di Cina adalah ‘sosialisme berkarakteristik Cina’ atau *you Zhongguotese de shehuizhuyi*.²²² Konsep Sosialisme berkarakteristik Cina ini mencakup sembilan garis pokok kebijakan pemerintah RRC, di antaranya adalah bahwa Cina saat ini ada di ‘tahap awal sosialisme’ atau *shehuizhuyi chuji jieduan*.²²³ Semua itu memungkinkan RRC menerapkan ekonomi pasar yang sebenarnya merupakan ciri dari ekonomi kapitalis. Dalam hal ini Cina mengembangkan retorika bahwa ekonomi pasar bukanlah mutlak milik sistem kapitalis. Dalam ekonomi terencana yang menjadi ciri sistem sosialis juga dimungkinkan untuk menjalankan ekonomi pasar, itulah yang disebut sebagai ekonomi pasar sosialis. (lihat sub bab 4.3). Apapun alasan Cina yang pasti hal itu menjadi petunjuk bahwa di era awal 1980-an itu, Cina telah melonggarkan ideologi agar sejalan dengan kepentingan nasionalnya yang lain yaitu pembangunan ekonomi. Bahkan kemudian program reformasi tersebut

²²¹邓小平, (Deng Xiaoping), (1982), “中国共产党地十二次全国代表大会开翁词” (Pidato pada Pembukaan Kongres PKC ke 12), dalam *邓小平文选*, 第三卷 (jilid III), hlm. 3

²²² (有中国特色的社会主义), lihat, 赵鹏飞, 肖根黎, (Zhao, Pengfei, Xiao Genli), (1989), *共和国的成长* (Pertumbuhan RRC), 北京: 农村读物出版社 (Beijing: Penerbit Bacaan Pedesaan), hlm. 188

²²³ (社会主义初级阶段), lihat, 赵金康, 席副群, 翁有为, (Zhao, Jinkang, Xi Fuqun, Weng Youwei), (1999) *当代中国政治思想史* (*Sejarah Pemikiran Politik Cina Modern*), 河南大学出版社 (Penerbit Universitas Hunan), hlm. 351

ditekankan sebagai bagian dari perjuangan revolusi Cina. Hal itu terungkap dalam kalimat '*gaige shi zhongguo diercigeming*' yang artinya 'reformasi adalah revolusi ke dua bagi Cina'.²²⁴

Pembangunan yang menekankan bidang ekonomi tersebut sampai pertengahan tahun 1980-an menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, posisi internasional Cina pun meningkat pesat. Situasi itu menjadi berbeda ketika di akhir dekade inflasi tidak terkendali, kehidupan sebagian besar rakyat Cina terhimpit, rakyat Cina kembali menderita. Masyarakat pun mulai protes, tidak hanya terkait masalah ekonomi tapi juga karena terjadinya kesenjangan di berbagai bidang, serta mulai tumbuhnya keinginan untuk keterbukaan yang lebih luas termasuk di bidang politik. Dimotori oleh sejumlah intelektual dan mahasiswa, protes berlangsung dalam bentuk demonstrasi massa dan mencapai titik puncak pada bulan Mei-Juni 1989. Demonstrasi yang semakin tidak terkendali itu memaksa pemerintah RRC melakukan tindak kekerasan untuk membubarkannya. Pada tanggal 4 Juni 1989 lapangan Tiananmen pun bersimbah darah, ribuan orang meninggal dan sejumlah tokoh maupun mahasiswa ditangkap. Tindakan pemerintah Cina itu memicu protes bahkan sanksi dari berbagai negara, terutama dari Amerika Serikat, negara-negara Barat, dan Jepang. Reaksi negatif dari dunia itu menjadi tekanan beban tersendiri bagi RRC.

Peristiwa berdarah itu kemudian dikenal sebagai tragedi Tiananmen 1989. Kejadian itu di satu sisi merupakan puncak protes rakyat kepada pemerintah Cina terutama untuk mendapatkan hak-hak politik yang lebih luas, namun di sisi lain menjadi titik nadir bagi posisi internasional Cina. Sanksi yang berupa embargo dan isolasi yang dijatuhkan sejumlah negara besar kepada Cina menyudutkan posisi Cina, bahkan ada sejumlah negara yang mengalihkan arah diplomasinya dari Beijing ke Taipei.²²⁵ Hal itu berarti bukan hanya bidang ekonomi dan ideologi saja yang terancam tapi kedaulatan serta kehormatan RRC juga dipertaruhkan. Sehubungan dengan kondisi yang dihadapi Cina saat itu, Deng Xiaoping mengeluarkan pernyataan seperti berikut,

²²⁴邓小平 (Deng Xiaoping), (1985), “改革是中国第 而次革命” (“Reformasi adalah Revolusi Ke Dua Bagi Cina”), dalam 邓小平文选, 第三卷 (jilid III), hlm. 113

²²⁵Dittmer, Lowell, “China in 1989”, *Asian Survey*, Vol. XXX, No. 1, Januari 1990, hlm. 41

“我不说西方国家的政府，但至少西方有一些人要推翻中国的社会主义制度，这只能激起中国人民的反感，使中国人奋发图强。人们支持人权。但不要忘记还有一个国权。谈到人格，不要忘记还有一个国格。特别是像我们这样第三国家的发展中国家，没有民族自尊心，不珍惜自己民族的独立，国家是立不起来的。”²²⁶

“Saya tidak mengatakan pemerintah negara Barat, namun di sebagian kecil negara Barat ada orang-orang yang ingin meruntuhkan sistem sosialisme Cina, hal ini hanya bisa menimbulkan rasa perlawanan rakyat Cina, membuat rakyat Cina bekerja keras untuk berhasil (kuat). Manusia menjunjung hak azasi . tapi jangan lupa masih ada (sebuah) hak negara. Jika bicara tentang kehormatan, jangan lupa masih ada (sebuah) kehormatan negara. Terutama negara yang sedang berkembang di dunia ke tiga seperti negara kita, jika tidak mempunyai rasa hormat terhadap bangsa sendiri, (dan) tidak menghargai kedaulatan bangsa sendiri, maka negara tidak mungkin berdiri.”

Pernyataan Deng itu merupakan penegasan bahwa kedaulatan dan kehormatan Cina sedang terancam. Oleh karenanya rakyat Cina harus bekerja keras dan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dan menyelamatkannya, Segenap bangsa Cina harus mendahulukan hak dan kehormatan negara daripada hak-hak pribadi. Masalah kedaulatan adalah masalah yang amat peka bagi bangsa Cina. Hal itu berkaitan erat dengan pengalaman sejarah yang amat pahit, yaitu ketika wilayah Cina dibagi-bagi oleh kekuatan asing menjadi wilayah konsesinya. Mao Zedong menggambarkan keadaan Cina pasca berbagai perang melawan bangsa asing itu seperti berikut,

“。。。帝国主义列强强迫中国订立了许多不平等条约，根据这些不平等条约，取得了在中国驻扎海军和陆军的权利，取得了领事裁判，并把全中国福分为几个帝国主义国家的势力范围”²²⁷

“...kekuatan imperialisme telah memaksa Cina untuk menandatangani berbagai perjanjian tidak seimbang, berdasarkan perjanjian tidak seimbang itu, telah mendapatkan hak untuk menempatkan pasukan darat dan laut di Cina, telah mendapatkan hak untuk membuat keputusan, bahkan membagi seluruh Cina menjadi beberapa wilayah pengaruh (konsesi) negara imperialis”

²²⁶邓小平 (Deng Xiaoping), (1989), “结束严峻的中美关系 要由 美国采取主动” (“Mengakhiri hubungan Cina-Amerika yang Kaku Harus dari Amerika Menerapkan Kesukarelaan” , dalam 邓小平文选, 第三卷 (jilid III), hlm. 331

²²⁷毛泽东 (Mao Zedong), (1939), “中国革命和中国共产党”(Revolusi Cina dan Partai Komunis Cina”, dalam 毛泽东选读 (Karya-Karya Terpilih Mao Zedong) , (1960) , 第二卷 (jilid 2) , 北京 : 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat) , hlm. 622

Pengalaman terjajah oleh lebih dari satu negara yang terjadi di akhir dinasti Qing, membuat bangsa Cina merasa amat dipermalukan. Keinginan bangkit dan mencapai kembali kedaulatan dan kehormatan bangsanya membuat nasionalisme bangsa Cina cenderung lebih menonjol. Tingginya tingkat kepekaan bangsa Cina atas masalah kedaulatan yang juga identik dengan keutuhan dan kehormatan bangsa, diungkapkan pula oleh seorang Jenderal Tentara Merah Li Jijun seperti berikut,

“...This was a period of humiliation that the Chinese can never forget. This is why the people of China show such strong emotions in matters concerning our national independence, unity, integrity of territory and sovereignty. This is also why the Chinese are so determined to safeguard them under any circumstances and at all cost”²²⁸

“...Ini merupakan periode penghinaan yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Cina. Inilah sebabnya mengapa bangsa Cina selalu menunjukkan emosi yang kuat dalam hal kebebasan nasional, persatuan, integritas dan kedaulatan wilayah. Ini pula sebabnya mengapa bangsa Cina begitu bertekad untuk menjaganya dalam keadaan apapun dan dengan biaya berapapun.”

Pengalaman sejarah yang amat pahit itu kemudian berhasil menumbuhkan ‘kegeraman historis’ di dada seluruh bangsa Cina. Pada akhirnya hal itu menumbuhkan tekad untuk memperkuat diri sehingga dapat bersaing dengan negara lain dan bahkan menguasai dunia.²²⁹ Tekad tersebut dalam sejarah Cina dikenal sebagai *qiangguomeng* atau ‘mimpi (menjadi) negara kuat’. Peristiwa Tiananmen 1989 seperti merobek luka lama. Peristiwa itu juga menimbulkan sejumlah persoalan pokok yang harus segera diselesaikan. RRC harus dengan segera mengendalikan dampak negatif peristiwa tersebut terhadap kondisi dalam negeri maupun posisi internasionalnya. Beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan itu antara lain adalah, memulihkan keutuhan kepemimpinan, kesetiaan militer, ketertiban masyarakat, pengendalian daerah, pembangunan

²²⁸Li Jijun, “Traditional Military Thinking and The Defensive Strategy of China”, Carcisle Barracks, PA : Strategic Studies Institute, 1997, hlm. 4, dikutip dari Thomas, Kane, “China’s Foundations : Guiding Principles of Chinese Foreign Policy”, dalam Guoli Liu (ed), 2004, hlm. 102

²²⁹I. Wibowo, (2004), *Belajar Dari Cina*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm. 218-219

ekonomi, dan memulihkan peran internasional Cina.²³⁰ Pemerintah dan rakyat Cina benar-benar harus bekerja keras dan menerapkan strategi yang tepat untuk mewujudkan eksistensi dan kedaulatan negaranya secara utuh sebagaimana dicita-citakannya.

Mulai pertengahan sampai akhir tahun 1989 RRC berada dalam posisi yang amat sulit. Secara domestik peristiwa Tiananmen telah mengoyak hasil jerih payah pembangunan selama satu dekade. Sementara itu perkembangan situasi internasional juga tidak menguntungkan. Runtuhnya negara-negara komunis di Eropa Timur diikuti oleh situasi Uni Sovyet yang tidak menentu. Padahal RRC dan Uni Sovyet baru saja menormalisasi hubungannya setelah terputus pada tahun 1960-an. Semua perkembangan itu mendatangkan kebingungan dan kegalauan tersendiri. Perkembangan internasional itu diakui ataupun tidak pasti telah memberi beban moral. RRC seperti ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan atau bahkan menjadi pusat kekuatan baru bagi kubu sosialis-komunis di dunia. Menghadapi situasi yang demikian rumit itu, Deng Xiaoping dalam pidatonya di pertemuan Komite Sentral PKC 4 September 1989 menyatakan,

“。。。现在的问题,不是苏联的旗帜到不到,苏联肯定要乱。而是中国的旗帜到不到。因此,首先中国自己不要乱,认真地真正地把改革开放下去。没有改革开放就没有希望。。。总之,对于国际局势概括起来就是三句话:第一句话,冷静观察,第二句话,稳住阵脚,第三句话,沉着应付。不要急也急不得,要冷静,冷静,再冷静,埋头实干,做好一件事,我们自己的事。”²³¹

“... Persoalannya sekarang, bukanlah bendera Uni Sovyet turun atau tidak, Uni Sovyet jelas sudah kacau. Tapi, (persoalannya adalah) bendera Cina turun atau tidak. Karena itu, yang utama Cina sendiri tidak boleh kacau, harus dengan sungguh-sungguh dan tepat melanjutkan *gaige kaifang*. Tidak ada *gaige kaifang* maka tidak ada harapan.... Singkatnya, terhadap perkembangan situasi internasional saat ini, cara menghadapinya terangkum dalam tiga kalimat. Pertama, amati/analisa situasi dengan tenang. Ke dua, stabilkan pijakan/posisi. Ke tiga, hadapi dengan percaya diri. Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa tak berguna. Harus tenang,

²³⁰ Shambaugh, David, (1991), “China in 1990 : The Year of Damage Control”, *Asian Survey*, Vol. 31, no. 1, hlm. 36

²³¹邓小平 (Deng Xiaoping), (1989), “改革开放稳定, 中国大有希望” (“Reformasi dan Keterbukaan Stabil, Cina mempunyai harapan besar”), dalam *邓小平文选*, 第三卷,(jilid III), hlm. 320-321

tenang, sekali lagi tenang. Benamkan kepala/diri dalam pekerjaan nyata, selesaikan pekerjaan, yaitu pekerjaan kita sendiri”

Kutipan pidato Deng di atas sangat jelas menunjukkan bahwa perkembangan dunia dan di Uni Sovyet khususnya, serta perkembangan di dalam negeri pasca peristiwa Tiananmen telah menimbulkan ‘kepanikan’ di lingkungan elite Cina. Seruan Deng di bagian akhir pidato yang meminta agar semuanya bersikap tenang, tenang, dan tenang, membuktikan hal itu. Selain itu, ketiga kalimat yang diajukan sebagai strategi untuk mengatasi masalah, menunjukkan bahwa posisi Cina saat itu sedang ‘goyah’. Secara ringkas ketiga strategi Deng itu adalah agar Cina bersikap waspada, *low profile*, dan cermat. Setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan Deng juga menegaskan bahwa yang utama yang harus dijaga adalah agar Cina tidak jatuh. Oleh karenanya harus meneruskan *gaige kaifang* dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang tepat.

Munculnya kekhawatiran dan bahkan kepanikan tersebut adalah dapat dimengerti. Ancaman terhadap kelangsungan modernisasi dan pembangunan ekonomi Cina ada di depan mata. Dampak negatif yang langsung terlihat dalam bidang ekonomi di antaranya adalah, menurunnya industri pariwisata, menurunnya bantuan ekonomi dari negara donor, serta menurunnya laju perdagangan dan investasi. Sementara itu pinjaman luar negeri meningkat mencapai \$47 milyar pada bulan Oktober 1989, padahal pinjaman Cina pada tahun 1988 hanya mencapai \$ 40 milyar saja. Sedangkan ekspor juga menurun hingga 6,5 % dan impor meningkat 26,7%, sehingga menimbulkan defisit perdagangan sebesar \$5,7 milyar.²³² Bila situasi ini tidak dapat segera diatasi, kesulitan hidup akan semakin dirasakan rakyat Cina. Bila kondisi itu terjadi tentu bisa berujung pada kerusuhan yang lebih berbahaya, yang bahkan mungkin dapat meruntuhkan Cina. Hal itulah yang paling dikhawatirkan oleh para pemimpin Cina saat itu.

Keterpurukan yang tergambar di atas mendorong Cina untuk mencari jalan keluar dengan memanfaatkan berbagai peluang yang masih dimilikinya. Semangat ‘mencari atau menemukan teman baru’ adalah salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Hal itu tercermin dalam editorial surat kabar *Wen Wei Bao*

²³² Dittmer, “China in 1989”, hlm. 37-38

yang terbit di Hongkong pada tanggal 30 Juni 1990, sehari sebelum kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas ke Beijing. Dalam editorial itu antara lain tertulis seperti berikut,

“After the ‘Beijing contretemps’ some people believe China is isolated and no longer ‘has friends all over the world.’ In fact, the remark that ‘we have friends all over the world’ was made by the late Chinese leader Chairman Mao Zedong in the 1960’s. At that time, China was facing a campaign of containment in the international community, ...China, for its part, held high the banner of the Five Principles of Peaceful Existence and took every opportunity to make as many friends as possible... China at last resumed its membership in the United Nations in 1971... Since China could well proudly say ‘we have friends all over the world’ in the 1960’s, is it not true that it can still rest more assured of this now. China has a population of 1.1 billion which accounts for one-fourth of the world’s population.... World affairs cannot go without China’s participation. ... Indonesia is a large country with a population of 170 million and China is third largest export market next only to Japan and the United States. ... Asian countries are all pursuing peace and development and they regard China as a reliable partner.”²³³

“Setelah ‘peristiwa Beijing’ banyak orang percaya bahwa Cina telah terisolir dan tidak punya teman lagi di dunia. Faktanya, slogan bahwa ‘kita punya banyak teman di dunia’ telah diucapkan pemimpin Cina Ketua Mao Zedong pada tahun 1960. Saat itu Cina menghadapi kampanye pembendungan dari komunitas internasional, ... menghadapi itu, Cina dengan menjunjung tinggi bendera Lima Prinsip Koeksistensi Damai dan mengambil semua kesempatan untuk menjalin sebanyak mungkin persahabatan... akhirnya Cina berhasil menjadi anggota PBB pada tahun 1971.... Sejak Cina dapat dengan bangga mengatakan bahwa ‘kami punya teman di seluruh dunia’ pada tahun 1960-an, maka apakah tidak benar bila hal itu masih berlaku bahkan sekarang lebih meyakinkan. Cina mempunyai 1,1 milyar penduduk atau seperempat penduduk dunia... Masalah dunia tidak dapat diselesaikan tanpa partisipasi Cina... Indonesia adalah negara besar dengan 170 juta penduduknya, dan Cina adalah negara tujuan ekspor Indonesia terbesar ke tiga setelah Jepang dan Amerika Serikat ... Negara-negara Asia semuanya menginginkan perdamaian dan kemajuan dan mereka menganggap Cina sebagai mitra yang dapat diandalkan.”

Kutipan di atas di satu sisi menunjukkan bahwa ada kekecewaan Cina atas sikap dunia terhadapnya, namun di sisi lain juga mengungkapkan optimisme Cina atas kemampuan dirinya menghadapi sikap dunia tersebut. Sikap optimis Cina itu dilandasi kenyataan bahwa ada sejumlah potensi yang dimiliki Cina, dan ada

²³³ “Indonesian Foreign Minister’s Visit to China, and China Foreign Relations”, *FBIS-CHI-90-127*, July 2, 1990, h.10

sejumlah negara khususnya di Asia yang bisa memberi peluang baginya. Indonesia adalah salah satu di antara sejumlah negara itu. Selain itu reaksi yang diberikan dunia atas peristiwa Tiananmen memang tidak homogen. Negara-Negara di Asia kecuali Jepang umumnya bersikap lebih lunak. Korea Selatan misalnya, hanya mengatakan bahwa “sangat menyesalkan terjadinya tragedi itu”, sedangkan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, cenderung menanggapi hal itu sebagai “urusan dalam negeri RRC.”²³⁴

Sikap tegas dan terus mencari peluang yang ditunjukkan Cina di atas, dapat dikatakan sebagai sikap khas para pemimpin Cina. Ketika bangsa sedang tersudut tidak berarti harus menyerah dan tercerai-berai. Apalagi bila diyakini bahwa penyebab ketersudutannya adanya upaya sekelompok orang yang ingin menjatuhkan Cina. Seluruh bagian bangsa Cina harus bangkit untuk membela dan menyelamatkan kehormatan bangsa dan negara. Berlandaskan itulah Deng Xiaoping dengan tegas mengatakan bahwa, “di antara hak azasi manusia juga ada hak negara, di antara kehormatan juga ada kehormatan negara”. Prinsip itu menjadi sebuah legitimasi atas tindak kekerasan militer yang telah dilakukan Cina terhadap para demonstran di lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989. Bahkan sesudah kejadian itu Deng hanya menyatakan bela sungkawa untuk para prajurit yang tewas, sedangkan mahasiswa dan penduduk yang tewas, terluka, tertangkap, atau dipenjara disebut sebagai ‘para perusuh’.²³⁵ Pernyataan itu semakin menegaskan tentang pentingnya upaya menyelamatkan kehormatan bangsa dan negara. Dalam konsep *mianzi* semua itu merupakan bagian dari *Baoquan mianzi*.

RRC mencoba bangkit dengan berupaya sungguh-sungguh dalam memperbanyak teman. Pada tanggal 20 Maret 1990 ketika Republik Namibia memproklamkan kemerdekaannya, selang sehari kemudian RRC mengumumkan pengakuan terhadap kedaulatan Namibia dan meresmikan hubungan diplomatik dengannya.²³⁶ Setelah itu RRC juga meresmikan hubungan diplomatiknya dengan Arab Saudi pada bulan Juli 1990. Di tengah semangat RRC untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, proses normalisasi hubungan

²³⁴ Shambaugh, David, “China Engages Asia: Reshaping the Regional Order”, dalam *International Security*, Vol. 29, No. 3 (Winter, 2004/2005), hlm. 67

²³⁵ Jean- Philippe Béja, (2009) “China Since Tiananmen ; The Massacre’s Long Shadow”, dalam *Journal of Democracy*, Vol. 20, No. 3, July 2009, hlm 5

²³⁶ *Beijing Review*, Vol 33, No. 14, April 2-8, 1990

Cina-Indonesia sedang jalan di tempat. Sejak pertemuan Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen dengan Presiden Soeharto pada 23 Februari di Tokyo, hampir tidak ada langkah berarti yang membahas kelanjutan proses normalisasi. Hingga pada bulan Agustus 1989 Qian bertemu dengan Menlu Ali Alatas di Paris dalam konferensi yang membahas penyelesaian masalah Kamboja.²³⁷ Sejak pertemuan Paris itulah baru muncul langkah-langkah kongkrit menuju terwujudnya normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia.

Posisi internasional Indonesia pada tahun 1980-an sangat baik. Meskipun di dalam negeri pemerintahan Soeharto mulai banyak mendapat kritik, namun secara keseluruhan hasil pembangunan Indonesia cukup baik. Saat itu Presiden Soeharto mulai secara intensif berupaya meningkatkan peran internasional Indonesia. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan adanya stabilitas dalam negeri dan kebutuhan akan investasi dan pengembangan pasar yang lebih luas. Perluasan pasar dibutuhkan Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan ekspor komoditi non minyak dan gas bumi. Sedangkan untuk wilayah ASEAN tak dapat dipungkiri besarnya peran dan pengaruh Indonesia di dalamnya. Fakta-fakta itu juga dipahami oleh Cina sebagaimana terungkap dalam tulisan Qian Qichen berikut ini,

“我们考虑到，印尼是东盟国家的老大，在东盟国家中有举足轻重的地位，争取早日同印尼复交，不仅可带动另外两个东盟国家新加坡和文莱同中国建交，有利于进一步打开我们同东盟国家的关系，还可以有效遏制台湾当局力推行的‘弹性外交’，打破西方国家对中国的制战。”²³⁸

“Kami mempertimbangkan, Indonesia (adalah) senior negara-negara ASEAN, mempunyai posisi yang memainkan peran penting di dalam ASEAN, memperjuangkan perbaikan hubungan diplomatik dengan Indonesia lebih awal, tidak saja akan membuat dua negara anggota ASEAN lainnya yaitu Singapura dan Brunei membuka hubungan diplomatik dengan Cina. hal itu juga berguna untuk membuka lebih luas hubungan kami dengan negara-negara ASEAN. Langkah ini juga berdampak bagi tetap terpantaunya ‘diplomasi elastis’ yang ditawarkan Taiwan dan akan melemahkan penentangan/sanksi negara-negara Barat terhadap Cina.”

²³⁷ 钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛：外交十记 (Qian Qichen : Sepuluh Catatan Diplomatik)*, 北京：知识世界出版社 (Beijing : Penerbit Dunia Ilmu Pengetahuan), hlm. 127

²³⁸ 钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛：...* hlm. 128-129

Ungkapan Qian yang saat itu menjadi penanggung jawab operasional perundingan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, memuat satu pesan utama yaitu “Cina memahami benar strategisnya posisi Indonesia”. Ada banyak keuntungan yang akan didapat Cina bila normalisasi hubungan diplomatiknya Indonesia terlaksana. Keuntungan itu adalah, 1) dapat ‘memanfaatkan’ posisi Indonesia sebagai pimpinan ASEAN, 2) menambah teman baru karena normalisasi hubungan dengan Indonesia akan menarik teman yang lebih banyak – setidaknya ada Singapura dan Brunei yang sudah siap berhubungan -, 3) hubungannya dengan ASEAN sebagai lembaga akan terbuka, 4) mengalahkan Taiwan dalam persaingan merebut pengaruh di ASEAN, dan 5) dapat keluar dari isolasi dan embargo ekonomi negara-negara Barat. Di samping itu Indonesia juga merupakan negara dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan sumber daya alam yang besar. Hal itu merupakan potensi yang amat menjanjikan bagi pengembangan pasar dan sumber bahan baku RRC.

Dengan demikian terlihat bahwa perkembangan internasional maupun domestik yang melingkupi RRC di akhir tahun 1980-an telah mendorong RRC untuk merubah prioritas politik luar negerinya. Terutama karena RRC menganggap perkembangan itu telah ‘mengancam’ kedaulatan dan kehormatannya. Segala cara dan jalan untuk segera keluar dari keterpurukan ditempuh Cina, untuk itu landasan yang kuat dalam diplomasi mutlak diperlukan. Oleh karena itulah ketiga kalimat strategi yang diucapkan Deng Xiaoping dalam pidato yang telah dikutip di atas, selanjutnya dikembangkan menjadi tujuh kalimat atau dikenal sebagai ‘strategi 28 aksara’.²³⁹ Secara praktis strategi itu kemudian dirumuskan menjadi *si bu liang chao* atau ‘empat tidak & dua luweskan’. Empat ‘tidak’ mencakup, jangan mengibarkan bendera sosialisme, jangan memimpin, jangan berkonfrontasi, dan jangan cari musuh. Dua ‘luweskan’ adalah, luweskan ideologi, dan luweskan diri.²⁴⁰ Semua strategi itu

²³⁹ Rincian ‘Strategi 28 aksara’ adalah, *leng jing guan cha* (冷静观察) – *wen zhu zhen jiao* (稳住阵脚) – *chen zhe ying fu* (沉着应付) – *tao guang yang hui* (韬光养晦) – *shan yu shou you* (善于守拙) – *jue bu dang tou* (绝不当头) – *you suo zuo wei* (有所作为). Terjemahan bebas 28 aksara itu adalah: perhatikan dan analisa dengan tenang – stabilkan posisi – hadapi dengan percaya diri – sembunyikan kemampuan – pandai-pandai bersikap ‘merendah’ – jangan memimpin – berikan kontribusi.

²⁴⁰ Zhao, “Chinese Foreign Policy in the Post Cold War Era”, dalam Liu, (Ed.), *Chinese Foreign Policy in Transition*, 2004, hlm. 296

kemudian mewarnai dan bahkan menjadi pedoman politik luar negeri RRC era 1990-an, dan terbukti mampu membawa Cina keluar dari keterpurukannya.

Normalisasi hubungan diplomatinya dengan Indonesia adalah salah satu jalan keluar penting, karena membawa banyak keuntungan bagi Cina. Terutama setelah terjadinya peristiwa Tiananmen Juni 1989, tulisan dalam jurnal *Dongnanya Yanjiu*, menegaskan bahwa,

“对中国来说，中印（尼）复交 可视为中国的一项重大外交成就。因为自 1989 年” 6。4 “事 以来，中国因西方制裁，面临着外交上的多困难，中印（尼）复交 对北京则是一个莫大的激励。”²⁴¹

“Dilihat dari sudut Cina, normalisasi hubungan Cina-Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah sukses diplomasi yang besar bagi Cina. Karena sejak peristiwa 4 Juni 1989, sebagai dampak dari sanksi negara-negara Barat, Cina menghadapi banyak masalah dalam hubungan luar negeri, normalisasi hubungan Cina-Indonesia Bagi Beijing adalah sebuah inspirasi yang amat besar.”

Meskipun setelah peristiwa Tiananmen Cina tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk bangkit, namun proses normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia menjadi matang pada saat yang amat dibutuhkan yakni di saat dunia mengucilkan Cina. Peluang yang muncul di saat yang tepat sudah tentu mempunyai arti yang lebih bermakna. Apalagi ketika peluang itu juga membawa manfaat lain yang jauh lebih besar lagi. Hal itulah yang tercakup dalam peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dan karenanya menjadi peristiwa yang amat penting dalam proses kebangkitan kembali Cina.

Secara ringkas paparan di atas memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang telah mendorong Cina untuk menormalisasi hubungannya dengan Indonesia tercakup dalam tiga kategori seperti di bawah ini.

A. Faktor Strategis

Kecenderungan perubahan konstalasi kekuatan dunia dari bipolar menjadi multi polar mempengaruhi cara pandang RRC terhadap dunia. Hal itu juga memberi beban moral kepada RRC untuk membuktikan kemampuannya sebagai salah satu kekuatan alternatif dari kubu sosialis. Kemampuannya

²⁴¹ 黄道根 (Huang, Daogen), “中，印（尼）复交及两国面临世界形势的桃展“(Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia dan Tantangan Perkembangan Dunia yang Dihadapi Kedua Negara”, *东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara)*, No. 4 (1990), hlm. 68

berperan di tingkat regional akan menaikkan citra dan posisi tawarnya di dunia. Oleh karena itu RRC mengubah arah diplomasinya ke negara-negara tetangga yang ada di sekelilingnya, terutama di kawasan Asia Tenggara. RRC sadar betul bahwa Indonesia adalah aktor penting di Asia Tenggara dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Normalisasi hubungan kedua negara menjadi strategis bagi RRC, karena dapat mengangkat kembali posisi tawarnya secara regional maupun global. Terlebih saat itu seiring dengan semakin merosotnya kekuatan USSR, maka AS cenderung menjadi adi daya tunggal. Hubungan baik Cina dengan Indonesia akan mampu mengimbangi kekuatan pengaruh AS di Asia Tenggara.

B. Faktor Ekonomi

Pelaksanaan *gaige kaifang* yang menekankan pada pembangunan ekonomi tidak akan berjalan mulus tanpa lingkungan yang aman, stabil, dan kondusif. Selain itu kemudahan mendapatkan bahan baku dan pasar juga menjadi pertimbangan. Indonesia adalah negara besar dengan 170 juta penduduk dan wilayahnya yang luas adalah pangsa pasar yang menjanjikan. Sumber daya alamnya dapat menjadi jaminan bagi pasokan bahan baku dan sumber energi baru. Tak kalah pentingnya di Indonesia juga ada sejumlah kaum Tionghoa yang bermodal besar, yang dapat 'dihimbau' untuk menanamkan modalnya di Cina, tanah leluhurnya.

C. Faktor Sosial

Peristiwa Tiananmen 1989 telah menurunkan posisi internasional RRC, saat itu Cina benar-benar ada dalam posisi terpuruk. Orang luar dapat menyebut Cina telah 'kehilangan muka' atau *diumian*, karena mendapat perlawanan dari rakyatnya sendiri dan kecaman dari dunia. Sedangkan dari sudut pandang Cina keterpurukan itu bukan karena Cina telah berbuat sesuatu yang memalukan. Melainkan sebaliknya Cina terpuruk karena berjuang untuk *baoquan mianzi* atau menyelamatkan muka dengan mempertahankan kedaulatan negaranya dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar, dan itu merupakan suatu kehormatan. Terlepas dari kontroversi itu keterpurukan tersebut telah memberi tekanan sosial yang

amat besar dan di sisi lain juga mengancam kelangsungan *gaige kaifang* yang merupakan kunci pembangunan RRC. Berlandaskan semangat ‘mencari teman’ dan mempertimbangkan faktor strategis dan ekonomi seperti terurai di atas, maka normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia merupakan langkah terobosan yang telah memberi manfaat beruntun bagi Cina. Normalisasi hubungan itu telah membuat Cina dapat segera kembali berkiprah dan diakui dunia.

5.1.2 Perubahan dalam Dimensi Institusional dan Rejim

Dimensi institusional dan rejim mempunyai keterkaitan yang amat erat, karena itu pembahasannya dilakukan dalam sub bab yang sama. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi di masing-masing dimensi tetap dapat dikenali dengan jelas. Hanya saja berhubung keterkaitan yang erat itu cenderung menunjukkan pengaruh yang tumpang tindih terhadap proses pengambilan keputusan di level mikro, maka paparan tentang pengaruhnya dibuat secara inklusif. Perubahan dalam dimensi institusional dan rejim di level makro juga terjadi sebagai dampak dari perkembangan internasional maupun domestik yang melingkupi Cina di akhir tahun 1980-an. Perubahan institusional terjadi terutama karena munculnya perubahan tuntutan atau kebutuhan sejalan dengan pelaksanaan *gaige kaifang*. Sedangkan perubahan rejim terjadi terutama sebagai akibat dari peristiwa Tiananmen yang telah mengguncang hampir semua sisi kehidupan negara dan bangsa Cina.

Secara institusional, pola ‘*one man show*’ dalam proses pengambilan kebijakan, yang menjadi ciri utama era Mao Zedong, di era 1980-an tidak dapat dipertahankan lagi. Barnett menjelaskan perubahan institusional semacam itu sebagai perubahan cara pengambilan keputusan dari ‘individual ke kolektif’.²⁴² Pengganti Mao, yaitu Deng Xiaoping meskipun mempunyai kekuasaan politik yang cukup besar, namun tidak mampu mendominasi seluruh kekuatan, karena masih ada sejumlah tokoh senior lain yang tidak selalu sepaham dengannya. Budaya faksionalisme dalam elite politik Cina adalah sesuatu yang nyata pengaruhnya. Selain itu sejak dicanangkannya *gaige kaifang*, permasalahan yang

²⁴² Barnett, Doak, (1985), *The Making Foreign Policy in China : Structure and Process*, Boulder, Colo : Westview Press, hlm. 16

dihadapi semakin beragam dan rumit, menuntut tidak hanya teknik-teknik baru dalam penyelesaian masalah tapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih handal. Berbagai kondisi itu menyebabkan kekuasaan untuk pengambilan keputusan tentang satu kebijakan tidak bisa lagi hanya diserahkan atau mengandalkan satu orang saja. Keputusan yang bersifat kolektif dianggap lebih bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu juga memberi peluang dan mendorong tampilnya peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.

Sejalan dengan bergesernya pola pengambilan keputusan dari individual ke kolektif, maka garis komando pengambilan keputusan pun mengalami perubahan dari 'otorisasi vertikal' menjadi 'otorisasi horizontal'. 'Otorisasi vertikal' adalah pengambilan keputusan dalam bentuk garis komando dari atas ke bawah, dari para pemimpin kepada bawahan. Sedangkan 'otorisasi horizontal' disebut juga 'otorisasi kolektif' dimana peran personal dalam proses pengambilan keputusan sangat kurang, namun peran institusi atau lembaga lebih dominan. Beberapa ciri otorisasi kolektif adalah adanya 1) kutub-kutub kekuatan dan perdebatan di tingkat pimpinan, 2) terwakilinya kepentingan birokrasi di lembaga partai, 3) agenda permasalahan yang lebih luas, 4) adanya keterlibatan pemimpin daerah di pusat, 5) bertambahnya partisipasi kaum intelektual, 6) adanya pengaruh perkembangan ekonomi dan politik, serta 7) bertambahnya kepekaan pemimpin terhadap pendapat rakyat²⁴³

Setelah peristiwa Tiananmen ada dua masalah besar yang dihadapi RRC yaitu 'krisis reformasi setengah jalan' dan 'krisis suksesi kepemimpinan'. Kedua masalah tersebut memunculkan perubahan parameter dalam pengambilan keputusan dan mengangkat sejumlah persoalan ke permukaan.²⁴⁴ Pendapat Dittmer tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi RRC semakin beragam dan rumit. Proses pengambilan keputusan pun berubah, menyebabkan perhatian masyarakat dari waktu ke waktu terus bergeser dari satu masalah ke masalah lainnya. Permasalahan itu juga memberi beban berat kepada politik luar negeri RRC. Pembangunan ekonomi RRC sangat tergantung kepada

²⁴³ Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy ; The Micro-Macro Linkage Approach*, Oxford, New York : Oxford University Press, hlm. 80-82

²⁴⁴ Dittmer, "China in 1989", hlm. 25

investasi modal asing dan membutuhkan lingkungan yang aman dan stabil, sedangkan posisi internasional RRC saat itu justru terpuruk.

Berbagai upaya menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan urusan institusional, telah menghidupkan peran kaum intelektual dan mendorong berkembangnya Ilmu Hubungan Internasional di Cina. Peneliti studi HI itu terbagi dalam tiga kelompok yaitu 1) peneliti di bawah lembaga pemerintah, sehingga lebih berorientasi pada studi tentang kebijakan karena fungsinya sebagai pendukung dan penyedia laporan bagi pemerintah, 2) peneliti di universitas yang berorientasi pada pengembangan HI sebagai ilmu, dan 3) peneliti yang tergabung dalam *Chinese Academy of Social Sciences* (CASS) di Beijing maupun di tingkat propinsi, mereka merupakan peneliti yang orientasi studinya lebih bebas, dapat saja berada di antara dua kelompok sebelumnya.²⁴⁵

Munculnya berbagai kelompok kajian itu menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau urun rembug dalam proses pengambilan keputusan. Terlepas dari apakah pendapat itu digunakan atau tidak, namun setidaknya hal itu telah memperkaya wawasan para pengambil keputusan. Tentang hal ini Zhao Quansheng menegaskan bahwa, meskipun semakin banyak aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Cina, namun tidak ada kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil voting.²⁴⁶ Dengan kata lain meskipun semua orang dapat memberikan pendapatnya namun kata akhir tetaplah di tangan pemimpin yang paling berpengaruh atau pemimpin tertinggi. Selain itu dalam perpolitikan Cina, kaum intelektual umumnya hanya bebas membicarakan berbagai kebijakan pemerintah secara internal, namun secara eksternal mereka tetap harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan atau dijalankan.

Perubahan rejim yang dapat menunjukkan tidak homogenya elite penguasa Cina telah terlihat jelas sejak tahun 1987, yaitu ketika Hu Yaobang diturunkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jendral Partai Komunis Cina (PKC). Tarik-menarik pengaruh di antara elite pemimpin Cina pun semakin terbuka ke publik. Contohnya perbedaan pendapat antara Deng Xiaoping dengan

²⁴⁵ Song, Xining, "Building International Relations Theory with Chinese Characteristics", *Journal of Contemporary China*, No. 10 (26), 2001, hlm.: 63

²⁴⁶ Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese ...* hlm. 115

Chen Yun²⁴⁷ dalam hal pelaksanaan dan kecepatan reformasi adalah hal yang sudah diketahui publik. Artinya kedua tokoh senior itu sepakat untuk menjalankan reformasi, namun hal-hal teknis sering membuat keduanya atau antar pendukungnya terlibat dalam perdebatan maupun polemik panjang.

Sebuah rejim dalam pemerintahan Cina selalu dipengaruhi oleh perkembangan kekuatan politik di sekitarnya. Cina menerapkan sistem politik dengan partai tunggal, namun faksionalisasi di dalamnya telah merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hu Yaobang diturunkan karena dianggap terlalu liberal dalam menjalankan reformasi. Zhao Ziyang yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dipilih untuk menggantikan Hu sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKC. Li Peng terpilih menggantikan Zhao sebagai Perdana Menteri. Setelah peristiwa Tiananmen 1989 Zhao yang dianggap telah banyak memberi angin kepada kaum demonstran diturunkan dari semua jabatannya dan digantikan oleh Jiang Zemin. Terpilihnya Jiang adalah merupakan ‘kemenangan’ bagi Deng Xiaoping, karena dominasi pilihan saat itu ada di antara Yao Yilin yang didukung Chen Yun dan Qiao Shi yang direkomendasikan oleh Peng Zhen.²⁴⁸

Jiang Zemin merupakan tokoh alternatif yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris PKC Shanghai. Jiang adalah teknokrat lulusan Moskow yang hampir satu angkatan dengan Li Peng dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Li Xiannian. Kemunculan Jiang diharapkan Deng sebagai penyeimbang kekuatan di Polit Biro Komite Sentral PKC untuk mendukung langkah-langkah perubahan. Dengan terpilihnya Jiang maka perimbangan kekuatan politik di Cina saat itu ada di antara empat kelompok yaitu, 1) kekuatan konservatif dengan tokoh utamanya Chen Yun, Peng Zhen, Bo Yibo, Yang Yilin, dan lainnya, 2) kekuatan konservatif lunak dengan tokohnya antara lain Deng Xiaoping, Li Xiannian, Yang Shangkun, dan lain-lain, 3) kekuatan moderat yang di dalamnya ada Li Peng, Qiao Shi, dan Jiang Zemin, meskipun demikian Jiang tidak sepenuhnya sealiran dengan Li Peng, dan faksi lainnya adalah 4) kekuatan

²⁴⁷ Chen Yun atau Liao Chenyun (1905-1995), adalah salah satu tokoh moderat Cina, yang ikut mengendalikan jalannya program Reformasi & Keterbukaan. Chen dikenal dengan gagasannya agar Cina mengembangkan “ekonomi sangkar burung”, yaitu memberi keleluasaan kepada burung untuk terbang mencari makan tapi harus tetap diberi kandang, sehingga tidak keluar dari jalur Sosialisme (<http://chineseposters.net/themes/chenyun.php>)

²⁴⁸ Dittmer, “China in 1989”, hlm. 36

reformis yang di antaranya ada Li Ruihuan, Wan Li, Tian Jiyun, dan sejumlah tokoh daerah.²⁴⁹ Dengan konstalasi kekuatan seperti itu, di mana tokoh-tokoh reformis tidak memegang jabatan strategis maka di era pasca Tiananmen secara umum kecenderungan garis kebijakan ada di antara garis moderat dengan sedikit pengaruh reformis dan konservatif.

Lebih tegasnya lagi faksionalisasi kekuatan politik di Cina saat itu memang dapat dikenali dari tokoh-tokohnya, namun sesungguhnya keterikatan individu atas pengelompokan itu amat cair. Terutama setelah Deng Xiaoping menyatakan pensiun pada November 1989, sehingga pengaruh tokoh-tokoh senior dalam pengambilan keputusan semakin berkurang. Hanya Deng Xiaoping yang masih dianggap sebagai pemimpin paling berpengaruh dan dihormati. Pemimpin rejim Cina Pasca Tiananmen 1989 cenderung sepakat bahwa tugas utama mereka saat itu adalah mengangkat kembali pamor, kehormatan, dan kedaulatan Cina dari segala keterpurukan yang telah menimpa negaranya. Dalam kerangka pendekatan budaya, saat itu Cina sedang berupaya *baoguan mianzi* atau menyelamatkan muka. Oleh karena itu langkahnya terutama dalam kebijakan domestik cenderung konservatif.

Sikap yang cenderung konservatif itu tercermin dari beberapa kutipan pernyataan Li Peng ketika mencabut keadaan darurat bulan Januari 1990. Di antaranya, “kita masih harus membasmi pengacau politik dan gerakan kontra revolusi”, dan “masih ada masalah dengan liberalisasi borjuis”, sehingga “fungsi kediktatoran dari aparat negara harus ditingkatkan”.²⁵⁰ Sedangkan untuk masalah-masalah yang terkait dengan hubungan luar negeri dan reformasi ekonomi, langkah-langkah yang diambil cenderung lebih moderat atau bahkan reformis. Dengan demikian perubahan rejim setelah peristiwa Tiananmen 1989, didominasi oleh pemimpin yang berorientasi ke modernisasi dan reformasi, namun masih mempertahankan langkah-langkah konservatif bila berhubungan dengan stabilitas dan kedaulatan negara.

Berkembangnya otorisasi horizontal dengan rejim yang cenderung moderat-reformis menyebabkan para pejabat Cina lebih leluasa dalam menyatakan pendapat, maupun mengambil keputusan yang bersifat operasional di

²⁴⁹Shambaugh, “China in 1990” : hlm. 37

²⁵⁰Ibid. hlm. 38

lapangan. Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen mengungkapkan bahwa ketika menangani normalisasi hubungan Cina-Uni Sovyet, Deng Xiaoping memberi wewenang penuh kepadanya untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi antar kedua negara. Wewenang itu dipegangnya sampai berlangsungnya pertemuan Deng dan Gorbachev pada bulan Mei 1989.²⁵¹ Perkembangan tersebut dibarengi dengan tiga kalimat pedoman pelaksanaan diplomasi yang kemudian dikembangkan menjadi 'strategi 28 aksara' (lihat sub bab 5.1.1). Semua perubahan tersebut membuat proses pengambilan keputusan maupun langkah-langkah diplomasi Cina menjadi sangat pragmatis, rasional, dan fleksibel.

Pragmatis, rasional, dan fleksibelnya diplomasi RRC di awal tahun 1980-an juga tercermin dalam sikapnya terhadap Indonesia. Pada saat itu Indonesia pun mulai melonggarkan syarat-syarat untuk normalisasi hubungan, namun masih menunjukkan kesulitan untuk memprosesnya secara kongkrit. Contoh peristiwa yang dapat mewakili adanya kelenturan dalam diplomasi RRC saat itu adalah peristiwa gagalnya pertemuan Menlu Wu Xueqian dengan Presiden Soeharto. Menurut Gao Weinong sesungguhnya dari kunjungan Menlu Wu Xueqian ke Indonesia untuk menghadiri peringatan 35 tahun KAA, RRC berharap dapat melicinkan proses normalisasi hubungan, namun ternyata hasilnya tidak demikian. RRC kecewa atas kegagalan tersebut, namun masih bisa menunjukkan pengertiannya kepada Indonesia. Tepatnya ungkapan Gao dalam opininya itu adalah seperti berikut,

“中国最清晰的信号是在第二次亚非会议上发出。。。由于复杂的原因，吴学谦这次访问没有取得突破性的成就。但他从印尼回来后表示，中国对于与印尼复交采取积极态度。如果印尼有困难我们可以等等。”²⁵²

“Sinyal Cina yang paling jelas ditunjukkan pada Konferensi Asia Afrika ke 2 ... Karena alasan yang rumit, kunjungan Wu Xueqian kali ini tidak mendapatkan hasil yang bersifat terobosan (mendasar). Tapi setelah kunjungannya ke Indonesia Wu menyatakan, Cina bersikap positif terhadap normalisasi hubungan dengan Indonesia. Kalau Indonesia masih mempunyai kesulitan maka kita bisa menunggu.”

²⁵¹钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛: 外交十记* ... hlm. 34

²⁵²高伟农 (Gao Weinong), “印度尼西亚与中国关系正常化的动因”, (“Motivasi Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia”), *东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara)*, No. 3 (1989), hlm. 5

Seperti telah diungkapkan di bab 4 bahwa, kunjungan Wu Xueqian adalah kunjungan pejabat tinggi Cina ke Indonesia yang pertama kali setelah 18 tahun masa pembekukan hubungan. Sudah pasti banyak pihak yang berharap kunjungan itu akan mempercepat terwujudnya normalisasi hubungan kedua negara. Sangat disayangkan ternyata acara Menlu Wu Xueqian benar-benar hanya menghadiri perayaan 30 tahun KAA. Wu tidak berhasil melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto. Bahkan Wu juga tidak bertemu dengan pihak KADIN yang sebelumnya sudah menemuinya di Singapura. Pertemuan Wu dengan pihak KADIN semula diharapkan oleh kedua belah pihak, agar bisa melanjutkan pembicaraan masalah hubungan dagang langsung. Rencana itu pun tidak terwujud. Pembicaraan tentang kelanjutan proses hubungan dagang langsung hanya dibicarakan secara informal oleh Wu dan Menlu Mochtar saja. Cina sudah sepantasnya merasa kecewa dengan kejadian itu, namun normalisasi hubungan adalah menyangkut kepentingan dan kemauan dua negara. Cina tak mungkin dan tak perlu memaksa Indonesia, karena itu bersikap positif, pengertian, dan sabar, adalah langkah rasional yang harus diambil Cina.

Menlu Cina berikutnya yaitu Qian Qichen adalah yang menangani proses normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia hingga ke tahap akhir. Dalam bukunya Qian memaparkan dengan gamblang keleluasaan dan dominasi perannya dalam proses pengambilan keputusan. Rentang waktu perundingan yang dilalui untuk mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, bila dihitung dari pertemuan Tokyo (pertemuan Qian Qichen dengan Presiden Soeharto) hingga saat ditandatanganinya Nota Kesepakatan Normalisasi di Jakarta, adalah sekitar 18 bulan (23 Februari 1989 – 08 Agustus 1990). Sesuai kesepakatan seharusnya setelah pertemuan Tokyo pembicaraan lebih lanjut tentang persiapan normalisasi dilakukan oleh perwakilan masing-masing negara yang bertugas di PBB, namun tampaknya hal itu tidak berjalan maksimal.

Qian baru bertemu dengan Menlu RI Ali Alatas dalam konferensi penyelesaian masalah Kamboja di Paris pada bulan Agustus 1989, dalam pertemuan Tokyo Alatas tidak ikut hadir. Pertemuan Paris itu adalah pertemuan antar pejabat tinggi kedua negara yang pertama sejak pertemuan Tokyo, namun

itu pun merupakan pertemuan tidak resmi. Dalam pertemuan itu Cina mengusulkan agar masing-masing pihak membentuk tim atau kelompok kerja khusus, agar dapat langsung melakukan perundingan di Jakarta atau Beijing. Menurutnya hal itu diperlukan karena perwakilan Cina di PBB sering kali tidak terlalu paham masalah teknis.²⁵³ Perundingan resmi antara Alatas dan Qian untuk menindaklanjuti pertemuan Tokyo baru terjadi pada 4 Oktober 1989, di New York.²⁵⁴ Sejak itu barulah dilakukan pertemuan perundingan di Jakarta pada bulan Desember 1989 yang dilanjutkan di Beijing pada bulan Maret 1990 dan di Hongkong pada bulan Mei 1990. Hasil pertemuan tim perundingan itu dimatangkan dalam kunjungan Alatas ke Beijing bulan Juli 1990. Hingga akhirnya mencapai kesepakatan bahwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia akan diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1990 di Jakarta.

Kronologi di atas menunjukkan bahwa ada jeda waktu yang cukup lama dari pertemuan Tokyo ke pertemuan Paris, yaitu sekitar enam bulan. Selama itu hampir dapat dipastikan tidak hasil kongkrit dalam proses perwujudan normalisasi hubungan tersebut. Kesepakatan pertemuan Tokyo untuk memanfaatkan para diplomat perwakilan Cina dan Indonesia yang ada di PBB ternyata tidak efektif. Dilihat dari sisi Indonesia hal itu dapat terjadi karena masalah normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia masih mendapat tentangan terutama dari kalangan militer. Selain itu, masalah normalisasi ini adalah masalah yang langsung ditangani oleh Presiden Soeharto. Dalam masalah yang satu ini Presiden Soeharto tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tapi juga mengatur tahapannya. Bahkan hal-hal yang lebih teknis lagi seperti pemilihan waktu dan tempat juga mendapat pengarahan darinya. Hal itu tercermin dari kenyataan bahwa sampai bulan Juni 1990, Ali Alatas masih belum tahu kapan normalisasi akan terlaksana.²⁵⁵

Peran kunci yang dipegang oleh Presiden Soeharto juga diungkapkan dalam berbagai tulisan lainnya, termasuk dalam buku “Politik Luar negeri Indonesia Di Bawah Soeharto” yang ditulis oleh Leo Suryadinata. Dengan

²⁵³钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛: 外交十记* hlm 127-128

²⁵⁴ Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, *Informasi Singkat Mengenai Fakta Perkembangan Hubungan RI-RRC Sejak KBRI di Beijing Didirikan Pada Tahun 1950*, 1996, h. 9

²⁵⁵Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*, London: Routledge, hlm. 183-192

demikian dapat dimengerti bila dalam tenggang waktu itu pihak Indonesia tidak mengurus kelanjutan proses normalisasi melalui perwakilannya di PBB. Bahkan tercatat dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9/1985 bahwa, yang bertugas sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dengan Cina sejak disepakatinya hubungan dagang langsung adalah Menteri Muda/Sekretaris kabinet.²⁵⁶ Selanjutnya sejalan dengan perubahan kabinet RI, Inpres tersebut diperbaharui dengan Inpres nomor 5/1989. Perubahan itu perlu dilakukan karena Moerdiono yang semula menjabat sebagai Menteri Muda/Sekretaris Kabinet, di kabinet yang baru menjadi Menteri Sekretaris Negara.²⁵⁷ Hal itu menunjukkan bahwa Presiden Soeharto mempercayakan masalah hubungan dengan Cina itu hanya kepada Moerdiono yang akan berkoordinasi langsung dengannya. Pihak Departemen Luar Negeri Indonesia maupun Departemen terkait lainnya berperan dalam teknis operasional dan pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan.

Merujuk pernyataan Qian bahwa Indonesia setelah terjadinya peristiwa Tiananmen mengambil sikap *wait and see* atau agak menahan diri, dan bahwa pertemuan Paris Agustus 1989 adalah pertemuan tingkat tinggi pertama sejak pertemuan Tokyo,²⁵⁸ serta usulan Cina untuk membentuk kelompok kerja sehingga memperlancar proses perundingan, semua itu merupakan bukti-bukti bahwa Cina telah mengambil inisiatif untuk mempercepat proses normalisasi hubungan tersebut. Pertemuan Paris terjadi hanya sekitar dua bulan setelah peristiwa Tiananmen. Pada waktu itu posisi internasional Cina benar-benar sedang terpuruk baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Langkah terobosan sedang sangat dibutuhkan Cina. Dengan demikian terlihat jelas bahwa langkah Qian untuk mengambil inisiatif itu mencerminkan sikap pragmatis Cina. Keleluasaan Qian dalam mengambil keputusan, dan usulan pembentukan kelompok kerja juga merupakan bukti adanya kelenturan institusional dalam birokrasi pengambilan keputusan saat itu.

Pembicaraan tahap akhir persiapan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dilakukan dalam kunjungan Ali Alatas ke RRC tanggal 1-4 Juli

²⁵⁶ Lampiran Instruksi Presiden no 9/1985, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan dagang Langsung Antara Indonesia-Cina Angka VIII, 23 Juli 1985

²⁵⁷ Instruksi Presiden no 5/1989 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia-Cina, 25 Mei 1989

²⁵⁸ 钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛: 外交十记*.... hlm 127

1990. Dalam kunjungan tersebut Alatas melakukan pembicaraan dengan mitra kerjanya yaitu Menlu Qian dalam dua tahap. Di samping itu Alatas juga bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Li Peng pada tanggal 2 Juli malam dan dengan Sekretaris Jenderal PKC Jiang Zemin pada tanggal 3 Juli malam. Setiap selesainya suatu pertemuan kedua belah pihak selalu menghadiri atau melakukan jumpa pers untuk menjelaskan berbagai hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dalam salah satu keterangan pers Qian mengungkapkan bahwa,

“... Please note the fact that I have had two rounds of talks with Foreign Minister Alatas during his current visit to China, and we have been together for seven or eight hours in our talks, contacts and dialogues, in addition to accompanying the general secretary and the premier in their interviews that could have been 10 hours. On two occasions, however we discussed the issue of restoring diplomatic relations between the two countries half an hour on each occasion and a solid hour all together.”²⁵⁹

“Harap dicatat, kenyataan bahwa saya sudah melakukan dua kali pembicaraan dengan Menlu Alatas dalam kunjungannya ke Cina kali ini, dari dua kali pertemuan itu, kami berdua sudah menggunakan waktu untuk berbicara dan berdialog sekitar 7-8 jam, bila ditambah dengan pembicaraan dengan Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal PKC, maka jumlah waktu yang telah digunakan menjadi sekitar 10 jam. Dalam dua pertemuan itu sesungguhnya kami membicarakan masalah normalisasi hubungan diplomatik kedua negara hanya dalam setengah jam saja dalam setiap pertemuan, sehingga seluruhnya hanya sekitar satu jam saja”

Materi pembicaraan Qian-Alatas memang tidak hanya masalah normalisasi tapi juga membahas perkembangan internasional lainnya, terutama yang berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah Kamboja. Meskipun demikian, mengingat tujuan utama kunjungan Alatas ke Beijing adalah untuk menyelesaikan proses normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, maka ungkapan Qian sebagaimana kutipan di atas menjadi petunjuk bahwa pembicaraan tingkat tinggi itu lebih merupakan formalitas. Sesungguhnya kesepakatan telah dicapai dalam pembicaraan di tingkat kelompok kerja, yaitu pada bulan Desember 1989, Maret, dan Mei 1990. Besarnya peran dan wewenang kelompok kerja menunjukkan bahwa perubahan institusional dan rejim di level

²⁵⁹ Zhong guo Xinwen She ; in Chinese, report by Li Wei, July 3, 1990 in *FBIS-CHI-90-129*, July 5 1990, hlm. 14

makro telah memberi keleluasaan dalam pengambilan keputusan di level mikro. Secara keseluruhan, wewenang yang dimiliki Qian Qichen dan kelompok kerjanya telah membuat proses normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, berjalan lancar dan akhirnya kesepakatan dapat di tandatangani secara resmi pada tanggal 8 Agustus 1990 di Jakarta.

5.2 Proses Perundingan

Sejak pertemuan Menlu Qian Qichen dengan Presiden Soeharto di Tokyo, pemerintah Cina dan Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan normalisasi hubungan diplomatiknya. Meskipun demikian, sejumlah masalah yang sebagian di antaranya merupakan warisan dari era sebelum pembekuan hubungan, masih mengganjal proses perwujudan normalisasi hubungan tersebut. Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas bagaimana perubahan di tiga dimensi level makro telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan di level mikro, sehingga akhirnya Cina menetapkan kebijakan untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Semua yang terurai di sub bab itu masih merupakan gambar besar yang memuat bukti-bukti empiris dari proses normalisasi hubungan tersebut. Pembahasan di sub bab ini merupakan gambar yang lebih rinci yang akan mempertajam pemahaman atas motivasi Cina dalam kebijakan normalisasi hubungan itu.

Dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan sebuah kebijakan luar negeri Cina, pasti ada sejumlah pedoman yang mengacu kepada kepentingan nasionalnya. Selain itu dalam perundingan bilateral atau internasional, perkembangan internal dan eksternal yang terjadi sepanjang proses perundingan seringkali juga mempengaruhi keputusan dan perilaku diplomasi RRC. Suatu perundingan pasti dimaksudkan masing-masing pihak untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya kalkulasi yang tepat atas perkembangan internal dan eksternal menjadi suatu keharusan. Peter B. Evans merumuskannya seperti berikut,

“International negotiation must be seen as a double-edged process in which every actor tries to take into account expected reactions on both the domestic and international levels. Deals at the international level change the character of domestic constraints, while the movement of domestic politics opens up new possibilities for international accords. Domestic

goals are pursued via international moves, and domestic politicking is central to international negotiation.”²⁶⁰

“negosiasi internasional harus dilihat sebagai ‘proses dua mata pisau’, dimana `setiap aktor berupaya mendapatkan reaksi yang diharapkan di tingkat domestik maupun internasional. Kesepakatan di tingkat Internasional (dapat) mengubah karakter tekanan di dalam negeri, sementara gerakan politik domestik membuka kemungkinan kesepakatan internasional yang baru. Tujuan politik domestik (dapat) dikejar melalui gerakan internasional, dan politisasi perkembangan domestik merupakan sumber negosiasi internasional”.

Politik luar negeri Cina sejak awal telah memperlakukan perubahan internasional sesuai dengan budaya politiknya. RRC senantiasa memandang permasalahan secara dialektis yaitu, antara yang bersifat prinsipil atau *yuanzhexing* dan yang bersifat fleksibel atau *linghuoxing*²⁶¹ Dialektika itu menyebabkan adanya kategorisasi masalah berdasarkan tingkat kepentingannya. Ada yang bersifat esensial, retorik, dengan prioritas tinggi. biasa, atau dengan prioritas rendah. Semua itu akan tercermin dari cara dan jalur yang digunakan Cina. Apakah jalur itu bersifat resmi, tidak resmi, atau dengan cara dan jalur khusus, serta sejauh mana intervensi pemimpin tertinggi di dalamnya.²⁶²

Pilihan di antara yang prinsip dan fleksibel sesungguhnya memberi peluang yang lebih besar kepada Cina dalam perundingan. Bila sebelum perundingan Cina telah mengisyaratkan kepada negara mitranya mana yang prinsip dan mana yang fleksibel, maka hal itu dapat mencegah tindakan pemaksaan dari negara mitranya. Di sisi lain hal itu juga dapat menjadi alat bagi Cina untuk melicinkan perundingan, atau bahkan untuk mencapai target yang diharapkannya.²⁶³ Dalam praktiknya pilihan itu pasti terkait erat dengan posisi tawar dan kehormatan Cina. Oleh karena itu pengaruh konsep *mianzi* baik dalam bentuk *baoquan mianzi*, *gei mianzi*, maupun upaya pencegahan terjadinya *diu mian*, pasti sangat kental di dalamnya.

²⁶⁰ Evans, Peter B., “Building an integrative Approach to International and Domestic Politics ; Reflections and Projections”, dalam Evans, Peter B., Harold K. Jacobson, Robert D. Putman, 1993, *Double-Edged Diplomacy : International Bargaining and Domestic Politics*, Berkeley - Los Angeles- London : University of California Press, hlm. 397

²⁶¹ Keith Ronald C., (2009), *China : From The Inside Out*, London : Pluto Press, hlm. 133

²⁶² Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese ...* hlm.116

²⁶³ Kim, Samuel S, (1989), diacu dari Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign ...* hlm. 143

Semua hal tersebut juga mewarnai proses perundingan antara Cina dan Indonesia. Untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang mengganjal terwujudnya normalisasi. Berlandaskan pemikiran itu maka pembahasan dalam sub bab ini akan terbagi dua, yaitu masalah yang bersifat prinsipil dan masalah yang bersifat fleksibel. Sub bab ini berfokus pada perilaku diplomasi Cina dalam proses perundingan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kendala bagi terwujudnya normalisasi hubungan Cina-Indonesia. Pembahasannya dilakukan dalam kerangka konsep *mianzi*, sehingga akan terlihat lebih jelas sejauh mana normalisasi hubungan ini menjadi bagian dari *baoguan mianzi* bagi Cina.

Rangkaian perundingan yang menjadi landasan pembahasan sub bab ini adalah perundingan yang dilakukan oleh ‘kelompok kerja’ yang dibentuk oleh masing-masing negara. Kelompok kerja itu dibentuk setelah pertemuan informal antara Qian dan Alatas di Paris pada bulan Agustus 1989. Perundingan pertama dilakukan di Jakarta pada tanggal 5-9 Desember 1989, lalu di Beijing pada tanggal 23-28 Maret 1990, di Hongkong pada bulan Mei 1990, dan pada tanggal 2 Juli 1990 bersamaan dengan kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Ali Alatas ke Beijing.

Dari empat perundingan yang membahas masalah-masalah terkait pelaksanaan normalisasi tersebut, hanya tiga perundingan yang catatan atau dokumennya dapat dirujuk. Perundingan itu adalah, 1) perundingan Jakarta 5-9 Desember 1989 yang menghasilkan ‘*Joint Press Statement*’. Tentang perundingan ini juga berhasil ditemukan artikel di koran pagi Singapura, *Lianhe Zaobao* 25 Desember 1989, yang ditulis oleh She Wenxuo, berjudul “印尼正在迎接中印 复交” atau “Indonesia Sedang Menyambut Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia”. Artikel ini memuat catatan cukup lengkap tentang proses dan hasil perundingan. 2) Perundingan Beijing 23-28 Maret 1990 yang menghasilkan ‘*Agreed Minutes of Discussion Between Officials of The People’s Republic of China and The Republic of Indonesia on Technical Matters Relating to The Settlement of Outstanding Debt Between The Two Countries*’. 3) Perundingan Beijing 2 Juli 1990 yang menghasilkan ‘*Joint Press Communique*’, dan ‘*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on The Settlement of Indonesia’s*

Debt Obligations to The People's Republic of China'. Perundingan Hongkong pada bulan Mei 1990 tidak ditemukan dokumennya, namun peristiwanya disebut dalam dokumen lainnya dan ada dalam pemberitaan media masa.

Dalam 'Pernyataan Pers Bersama' bulan Desember 1989, antara lain diungkapkan bahwa perundingan di Jakarta tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Ali Alatas dan Qian Qichen, yang dicapai dalam pertemuan di New York pada tanggal 4 Oktober 1989. Delegasi Indonesia saat itu dipimpin oleh J.P. Louhanapessy dan delegasi RRC dipimpin oleh Xu Dunxin. Perundingan itu membahas masalah-masalah fasilitas diplomatik, dwi-kewarganegaraan, penyelesaian hutang Indonesia, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kedua negara. Kedua belah pihak menyetujui untuk membahas hal-hal yang lebih rinci dalam perundingan berikutnya. Dalam perundingan berikutnya itu akan disertakan ahli-ahli yang kompeten di bidangnya, sesuai dengan masalah yang akan dirundingkan.

Pembicaraan lebih lanjut kemudian dilaksanakan di Beijing pada bulan Maret 1990. Sedangkan perundingan Hongkong bulan Mei 1990 adalah perundingan lanjutan, yang menyepakati hal-hal yang dalam perundingan Maret ditetapkan untuk diperiksa ulang kebenarannya oleh masing-masing pihak. Perundingan Beijing 2 Juli 1990 adalah pembicaraan tahap akhir yang menghasilkan ketetapan tentang waktu, tempat, dan prosesi peresmian normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, dan nota persetujuan penyelesaian masalah hutang Indonesia kepada RRC.

5.2.1 Penyelesaian Masalah yang Bersifat Prinsipil (*yuanzhexing*)

Dalam perundingan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, ada empat masalah yang dapat dikategorikan sebagai masalah yang prinsipil. Keempat masalah itu adalah, 1) pengakuan satu Cina, 2) dukungan RRC kepada gerakan komunis/PKI, 3) status kaum Tionghoa, dan 4) hutang Indonesia. Meskipun keempat masalah tersebut dikategorikan sebagai masalah yang prinsipil, namun dilihat dari tingkat prioritas ada gradasi di dalamnya. Menurut Qian Qichen, pedoman yang digunakan Cina dalam perundingan tentang normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia adalah seperti berikut,

“我们对两国复交中技术性问题的谈判, 采取 ‘坚持原则, 适当灵活’ 的方针, 对一些较为复杂的问题, 大体商定原则后留待复交后继续商谈”²⁶⁴

“Kami menggunakan pedoman ‘mempertahankan prinsip, menyesuaikan, dan fleksibel’ untuk merundingkan masalah-masalah teknis dalam perbaikan hubungan kedua negara, terhadap masalah yang relatif rumit, setelah menyepakati yang prinsip, maka meninggalkan masalah yang lebih rinci untuk dibicarakan lebih lanjut setelah perbaikan hubungan diplomatik”

Sejauh mana gradasi prioritas di setiap masalah, akan terurai dalam paparan berikut ini.

5.2.1.1 Pengakuan Satu Cina

Terjadinya peristiwa Tiananmen 1989 yang disusul dengan keruntuhan kubu sosialis-komunis di dunia, membuat pemerintahan Cina menjadi sangat peka terhadap masalah kedaulatannya. Kecemasan atas ancaman terhadap kedaulatan itu bukan hanya karena embargo dan sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara Barat kepada Cina, namun juga karena adanya upaya sistematis untuk mengubah pola pikir bangsa Cina, terutama generasi mudanya. Menurut pemerintah Cina ada pihak-pihak asing (Barat dan Amerika Serikat) yang berkedok gerakan hak azasi manusia (HAM), berupaya mempengaruhi pola pikir dan ideologi generasi muda Cina. Disinyalir ancaman itu amat kuat, dan muncul dalam bentuk ‘polusi spiritual’, ‘evolusi damai’, atau ‘liberalisasi borjuis’.²⁶⁵ Upaya yang dilakukan pemerintah Cina untuk mengantisipasi ancaman tersebut adalah dengan melancarkan kampanye ‘cinta tanah air’ atau *aiguo yundong*. Seruan-seruan untuk menumbuhkembangkan patriotisme atau *aiguo zhuyi* dan nasionalisme, juga dikumandangkan secara terus menerus.

Kekhawatiran pemerintah Cina itu tercermin juga dalam politik luar negerinya. Meskipun setelah peristiwa Tiananmen 1989 Cina sangat membutuhkan teman-teman baru untuk keluar dari keterpurukannya, namun syarat bahwa setiap negara yang berhubungan dengannya harus menerapkan

²⁶⁴钱其琛 (Qian Qichen), (2003), 钱其琛: 外交十记 hlm. 129

²⁶⁵ Keith Ronald C., (2009), *China : From ...*, hlm. 66 ; lihat juga Whiting, “Chinese Nationalism and Foreign Policy After Deng”, *China Quarterly*, 1995, hlm. 297

kebijakan satu Cina, tetap tak boleh ditawar-tawar. Bagi RRC mengakui hanya satu pemerintahan sah yang mewakili Cina di dunia, merupakan syarat mutlak. Syarat itulah yang termasuk sebagai masalah yang bersifat prinsipil atau *yuanzixing* dengan prioritas tinggi.

Indonesia sejak awal pengakuannya terhadap kedaulatan RRC pada tahun 1950, telah menerapkan kebijakan ‘satu Cina’. Kebijakan itu tidak pernah diubah meskipun pada saat hubungan diplomatik kedua negara sedang membeku. Cina sangat menghargai sikap Indonesia tersebut, hal itu dapat disimak dari pernyataan berikut,

“我们十分赞赏印尼政府在苏哈托总统领导下坚持一个中国的政策，即使在两国关系中断情况下，印尼仍坚持这一立场，啊拉塔嘶外长这次又重申，印尼只承认一个中国，即中华人民共和国。”²⁶⁶

“Kami sangat menghargai pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang mempertahankan kebijakan satu Cina, bahkan ketika hubungan kedua negara dalam keadaan terputus, Indonesia tetap mempertahankan pendirian itu. Menteri Luar Negeri Alatas kali ini kembali menegaskan, Indonesia hanya mengakui satu Cina, yaitu Republik Rakyat Cina.”

Pernyataan di atas merupakan bagian dari editorial *Renmin Ribao* yang terbit pada tanggal 4 Juli 1989. Editorial itu merupakan sambutan atas diumumkannya kesepakatan untuk meresmikan normalisasi hubungan kedua negara oleh Menlu Ali Alatas dan Qian Qichen. Munculnya pernyataan itu menunjukkan bahwa Cina benar-benar puas dengan sikap Indonesia dalam hal kebijakan satu Cina. Perlu diingat bahwa, cukup eratnya hubungan Indonesia dengan Republik Cina (Taiwan) selama bekunya hubungan diplomatik RRC-Indonesia, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi RRC. Reaksi yang sangat tajam pernah ditunjukkan RRC ketika Perdana Menteri Taiwan Sun Yunsuan berkunjung ke Indonesia secara diam-diam pada tahun 1981.²⁶⁷ Sampai awal tahun 1990-an Taiwan masih merupakan salah satu investor besar di Indonesia. Sampai saat ini kantor Kamar Dagang Taiwan di Jakarta, maupun Kamar Dagang

²⁶⁶人民日报社论（editorial Harian Rakyat），“热烈庆贺中国印尼恢复外交关系”（Menyambut Hangat Perbaikan Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia），4 Juli 1990, hlm. 1

²⁶⁷ Kroef, Justus M. Van der, “Normalizing with China : Indonesia’s Policies and Perception”, *Asian Survey*, Vol. 26, No.8 (1986), hlm. 929

Indonesia di Taipei, yang berfungsi sebagai perwakilan masing-masing negara masih beroperasi. Indonesia memahami kekhawatiran RRC, karena itulah Menlu Alatas dalam jumpa pers di Beijing menyatakan bahwa. “meskipun Indonesia mempunyai hubungan ekonomi dengan Taiwan, namun mengakui hanya ada satu Cina yaitu Republik Rakyat Cina.”²⁶⁸ Masalah yang amat prinsipil bagi Cina tersebut telah disepakati dalam perundingan Jakarta pada bulan Desember 1989. Sedangkan tentang keberadaan Kamar Dagang Taiwan di Jakarta, pada perundingan itu delegasi RRC menyatakan, “Cina tidak menentang hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan Taiwan, sepanjang hubungan itu tidak ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik”.

Masih terkait dengan masalah kedaulatan, dalam perundingan Jakarta tersebut RRC juga mengajukan agar Indonesia menggunakan sebutan Republik Rakyat Tiongkok untuk nama negara Cina. Menanggapi keinginan Cina yang satu ini, Indonesia menolaknya. Indonesia bersikeras untuk tetap menggunakan nama Republik Rakyat Cina. Menghadapi penolakan itu, Ketua delegasi RRC Xu Dunxin kepada pers menyatakan, “dalam kancah internasional, kami disebut Cina dan bukan Tiongkok. Cina menerima penerjemahan Republik Rakyat Cina bagi *People Republic of China*.”²⁶⁹

Proses dan hasil perundingan itu menunjukkan bahwa, bahkan dalam masalah yang bersifat prinsipil pun ada gradasi sikap RRC. Sesungguhnya hasil maksimal yang diinginkan RRC terkait masalah kedaulatannya itu adalah, 1) Indonesia menerapkan kebijakan satu Cina, 2) Indonesia menghentikan semua hubungan dengan Taiwan, dan 3) Indonesia tidak menyebut RRC dengan kata Cina. Dari tiga keinginan RRC itu, hanya satu yang dipenuhi Indonesia secara penuh yaitu kebijakan untuk mengakui satu Cina. Tentang hubungan dengan Taiwan, Indonesia hanya memenuhi setengah dari keinginan Cina yaitu, tidak berhubungan secara penuh dengan Taiwan. Indonesia hanya akan menjalin hubungan ekonomi dan budaya saja dengan Taiwan. Sedangkan tentang cara

²⁶⁸ Beijing International Service, July 3, 1990 in *FBIS-CHI-90-129*, July 5 1990, hlm. 13

²⁶⁹ 余文锁 (She Wensuo), “印尼正在迎接中印复交” (Indonesia Sedang Menyambut Normalisasi Hubungan Cina- Indonesia”), *联合早报 (Harian Pagi ‘Persatuan’)*, Singapura, 25 Desember 1989.

menyebut nama negara, Indonesia sama sekali tidak memenuhi keinginan RRC tersebut. Hasil seperti itupun sudah memuaskan Cina saat itu.

Memasuki era tahun 2000 Cina mulai memasalahkan kembali penggunaan kata 'Cina' di Indonesia. RRC bahkan sampai sekarang tetap 'memaksakan' penggunaan sebutan 'China' di Indonesia. Dari sisi ejaan, sebutan itu menyalahi sistem ejaan bahasa Indonesia. Perubahan sikap RRC atas masalah tersebut terlihat sangat kontras dengan sikapnya pada saat perundingan normalisasi hubungan. Kontrasnya sikap Cina tersebut menunjukkan adanya pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya. Dewasa ini RRC telah berkembang menjadi negara kuat dengan peran internasional yang mumpuni, karena itu berani dan mampu memaksakan kehendaknya kepada Indonesia. Sedangkan di tahun 1989-90 RRC sedang terpuruk, butuh teman, dan harus berjuang untuk menyelamatkan kedaulatan dan kehormatannya atau *baoguan mianzi*. Posisi tawarnya sedang tidak memungkinkan untuk 'memaksa' Indonesia. Sadar akan posisinya tersebut, maka RRC saat itu tidak memaksakan kehendaknya kepada Indonesia. Bila saat itu Cina tetap 'memaksa', bukan tidak mungkin Indonesia akan melakukan penolakan yang lebih keras. Penolakan seperti itu akan menyebabkan RRC kehilangan muka atau *diu mian*. Dengan demikian dapat dipahami mengapa tidak ada upaya RRC untuk memaksakan kehendaknya saat itu. Cina memutuskan untuk fokus pada kesepakatan pengakuan satu Cina saja. Jelas dan tegasnya pendirian Indonesia dalam kebijakan satu Cina, serta 'lemahnya' posisi tawar Cina saat itu, membuat persoalan lain yang meskipun merupakan masalah prinsipil tapi tidak menjadi prioritas tinggi bagi Cina.

5.2.1.2 Dukungan RRC terhadap Gerakan Komunis/PKI

Masih adanya hubungan atau bahkan dukungan RRC dan PKC terhadap gerakan komunis di berbagai negara di Asia Tenggara, khususnya terhadap PKI merupakan masalah besar dan prinsipil bagi Indonesia. Masalah itu menjadi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan Indonesia. Sedangkan bagi RRC masalah itu bersifat prinsipil namun tidak dengan prioritas tinggi. Bersifat prinsipil karena bila Indonesia merasa 'terancam', itu menunjukkan belum adanya 'kepercayaan' penuh dari Indonesia kepada RRC. Bagi bangsa Cina

masalah kepercayaan adalah berkaitan erat dengan harga diri, kehormatan, dan reputasinya. Meskipun demikian masalah-masalah itu masih dapat dinegosiasikan, dan penyelesaiannya akan sangat tergantung kepada perkembangan kepentingan nasional RRC.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab 2 bahwa, kepercayaan, kehormatan, dan reputasi adalah sebagian dari nilai-nilai yang dicakup oleh konsep *mianzi*. Nilai-nilai itu berpengaruh terhadap bagaimana orang Cina melihat dirinya ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan konsep *mianzi* secara maknawi dapat masuk lebih jauh lagi sampai ke identitas dan integritas seseorang. Dengan demikian dapat dimengerti bila Cina sesungguhnya dari waktu ke waktu terus berupaya untuk mengembalikan kepercayaan Indonesia kepadanya, terlebih jika mengingat kebutuhannya saat itu.

Masalah dukungan RRC maupun PKC terhadap gerakan Komunis di Indonesia maupun di Asia Tenggara, adalah bersumber dari pengalaman Indonesia, khususnya dalam peristiwa G 30 S PKI tahun 1965. Indonesia masih mencurigai bahwa RRC terlibat di dalamnya atau paling tidak mengetahui rencana kudeta tersebut (lihat sub bab 3.3). Tentang kecurigaan ini, Wakil Menlu RRC Liu Shujing dalam kunjungannya ke Jakarta untuk menghadiri konferensi Komisi Ekonomi dan Sosial PBB ke 44 pada bulan April 1988 mengatakan. “sejujurnya, Cina tidak tahu apa-apa tentang kapan peristiwa itu terjadi”. Liu bahkan menambahkan, “dengan semakin membaiknya hubungan Cina-Indonesia, tidak usah menggali masalah itu lebih jauh lagi, lebih baik lupakan untuk selamanya.”²⁷⁰ Cina memang selalu membantah keterlibatannya dalam G 30 S PKI. Oleh karena itu bila terkait masalah tersebut muncul retorika bahwa ‘Cina harus meminta maaf kepada Indonesia’, maka RRC selalu dengan tegas menentangnya. Bahkan RRC juga menganggap Indonesia berlebihan bila mengatasnamakan ASEAN menyebut Cina sebagai ancaman bagi Asia Tenggara.²⁷¹

²⁷⁰ *Zhongguo Xinwenshe*, Beijing, 13 April 1988, dikutip dari, Kroef, Justus M van der, “Hesitant Normalization : Indonesia’s Slow Boat to China”, *Asian Affairs*, Vol. 16, No. 1 (Spring, 1989), hlm. 31

²⁷¹ Gao, Weinong (高伟农), “印度尼西亚与中国...”, hlm. 5

Bagi Cina memang mudah untuk melupakan peristiwa tersebut, namun tidak demikian dengan Indonesia. Khususnya bagi ABRI, sebagian kelompok Islam, dan Presiden Soeharto, kejadian itu dianggap sebagai peristiwa sejarah yang paling pahit dan menyakitkan. Perasaan itu menyebabkan Indonesia memberi syarat agar Cina menghentikan dukungannya kepada PKI, sebelum normalisasi hubungan. Pernyataan Presiden Soeharto sekembalinya dari Tokyo pada Februari 1989 mencerminkan hal tersebut. Berikut ini kutipannya,

“pemerintah RRC memberikan suatu penegasan sesuai dengan harapan atau syarat yang diajukan oleh Indonesia, yaitu, hidup berdampingan secara damai, saling menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh partainya.”²⁷²

Jaminan Cina memang telah diterima Indonesia dalam pertemuan Qian-Soeharto di Tokyo pada Februari 1989. Meskipun demikian, ternyata jaminan tersebut tidak mengurangi kewaspadaan Indonesia terhadap apa yang disebut sebagai ‘bahaya laten komunis’. Pada akhir tahun 1980-an itu gerakan ‘bersih lingkungan’ di kalangan pejabat sipil dan militer Indonesia, justru semakin digalakkan. Alasan gerakan itu adalah bahwa keluarga atau kerabat anggota PKI pasti merupakan simpatisan PKI. Lembaga intelejen Indonesia (BAKIN) menemukan ada sejumlah pemuda Indonesia di luar negeri yang ikut gerakan PKI, dan hadir dalam konferensi partai komunis internasional di Budapest pada tahun 1988. Selain itu di tengah upaya Indonesia meyakinkan diri terhadap jaminan Cina, pada bulan April 1989 tentara RRC menguasai sebuah atol di kepulauan Spratly, padahal atol itu diketahui sebagai milik Vietnam. Beijing mengabaikan protes Vietnam dan menyatakan menguasai tujuh atol lainnya. Di antara atol yang diakui Beijing itu, ada yang oleh Indonesia diakui sebagai miliknya.²⁷³ Peristiwa itu menyebabkan pihak Indonesia mempertanyakan kembali sikap damai dan anti ekspansionis yang dijanjikan RRC.

Perkembangan sikap Cina yang seperti di atas merupakan salah satu hambatan bagi terwujudnya peresmian normalisasi hubungan kedua negara. Rupanya hal itulah yang menyebabkan secara temporal ada jeda yang cukup

²⁷²“Maka mulailah kini 'huifu jiaoji' berjabat tangan dengan Cina”, *Tempo Online*, Jakarta, 04 Maret 1989

²⁷³Kroef, “Hesitant Normalization : , ...hlm.27- 29

panjang, antara kesepakatan Tokyo dengan perundingan-perundingan kelompok kerja. Perundingan yang dilakukan oleh kelompok kerja baru dilaksanakan pada bulan Desember 1989. Perundingan itu pun terjadi setelah Menlu Qian berinisiatif untuk berbicara dengan Alatas di Konferensi masalah Kamboja di Paris pada bulan Agustus. Saat itulah Qian mengusulkan pembentukan kelompok kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perundingan New York pada Oktober 1989.

Inisiatif Menlu Qian tercetus setelah peristiwa Tiananmen Juni 1989. Dari sini terlihat bahwa keterpurukan Cina yang membangkitkan semangat untuk *baoguan mianzi*. Salah satu caranya adalah dengan mencari teman sebanyak-banyaknya. Kondisi itu telah mendorong Cina mengambil inisiatif untuk segera mewujudkan normalisasi hubungannya dengan Indonesia. Di sisi lain normalisasi hubungannya dengan Indonesia juga akan mengembalikan 'kepercayaan' tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari bangsa-bangsa lain di kawasan, dan bahkan dari seluruh dunia. Dengan alasan itu maka menjelang normalisasi retorika yang mewarnainya adalah seperti yang diucapkan Jiang Zemin berikut ini,

“中国一贯坚持和平共处五项原则。这里也包伙万隆会议十项原则。平共处五项原则，说的简练一些是，一个国家采取什么样的社会制度，是这个国家人民的事。别国不应干涉。... 我们在处理同外国共产党和其他政党关系时，遵循四项原则，其中重要的一条也是不干涉别党的内政。”²⁷⁴

“Cina selalu mempertahankan lima prinsip koeksistensi damai. Di dalamnya juga tercakup dasa sila Bandung. Lima prinsip koeksistensi damai, dikatakan secara ringkas adalah, sebuah negara menggunakan sistem sosial apa, adalah urusan rakyat negara tersebut, Negara lain tidak boleh mencampuri. ... Kami pada saat menangani hubungan PKC dengan partai politik (negara) lain, mematuhi empat prinsip, salah satu yang penting di antaranya adalah, tidak mencampuri kebijakan intern partai lain.”

Pernyataan Jiang itu nampak sebagai penegasan atas jaminan yang diinginkan oleh Presiden Soeharto. Cina tidak akan mencampuri urusan dalam negeri maupun partai politik negara lain. Termasuk di dalamnya juga tidak

²⁷⁴ “江泽民会见阿拉塔撕外长” (“Jiang Zemin Bertemu Menteri Luar Negeri Alatas”), *人民日报 (Harian Rakyat)*, 4 Juli 1990, hlm. 1

berhubungan lagi dengan PKI. Tentang hal yang terakhir itu, bahkan Cina berani mengatakan bahwa, “... bahkan ada atau tidaknya partai semacam itu (PKI), kami juga tidak mengetahuinya”.²⁷⁵ Pernyataan Jiang juga menegaskan bahwa, Cina selalu menjalankan politik luar negeri yang berlandaskan kepada ‘Lima Prinsip Koeksistensi Damai’ dan ‘Dasa Sila Bandung’. Retorika tersebut kemudian selalu menjadi bagian dari pernyataan para pejabat Cina masa itu. Menyikapi pernyataan-pernyataan para pejabat Cina yang terurai di atas, Indonesia dengan berbagai pertimbangan kepentingan lainnya, dapat menerima jaminan RRC tersebut.

5.2.1.3 Status Kaum Tionghoa

Masalah status kaum Tionghoa, terutama berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Sebagian di antara kaum Tionghoa samapai tahun 1980-an masih mempunyai kewarganegaraan ganda, atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan (lihat sub bab 3.1). Khusus untuk pembahasan materi ini, penggunaan istilah pribumi dan non pribumi tak bisa dihindari. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi, namun untuk kelancaran paparan dan memudahkan pemahaman, di sub bab ini tetap digunakan istilah ‘pribumi’ untuk menunjuk kelompok penduduk Indonesia asli.

Keberadaan sejumlah besar kaum Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu kenyataan yang sering menjadi ganjalan dalam hubungan Cina-Indonesia. Kaum Tionghoa telah berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Kedatangan orang Cina yang pertama ke wilayah Indonesia terlacak sejak zaman Dinasti Han (206 SM – 220 M), khususnya pada masa pemerintahan Kaisar Wu Di (140-88SM). Lawatan maupun persinggahan orang-orang Cina ke wilayah-wilayah Nusantara terjadi sejalan dengan mulai berkembangnya jalur perdagangan melalui laut atau ‘jalur sutra laut’. Kisah tentang hal itu tercatat dalam kitab sejarah Dinasti Han yaitu, Catatan tentang Geografi atau *Han Shu Di Li Zhi*.²⁷⁶ Komunitas Tionghoa di Nusantara terbentuk

²⁷⁵钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛: 外交十记...* hlm. 122

²⁷⁶ Kong Yuanzhi, Prof., (1999), *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 507-512

dari berbagai sebab. Di antaranya karena adanya pelawat ataupun pedagang Cina yang memilih untuk menetap di tempat persinggahannya, ada pula yang sengaja didatangkan oleh pemerintah colonial Belanda untuk bekerja di perkebunan dan tambang. Di samping itu ada juga yang dikarenakan eksodus penduduk Cina yang tertimpa bencana alam, ataupun karena terjadi perang dan pertikaian di dalam negerinya.

Komunitas Tionghoa itu terus berkembang, dan selanjutnya mereka dikenali dalam dua kelompok yaitu totok dan peranakan. Secara sederhana kelompok totok dikenali sebagai Tionghoa yang masih menjalankan adat istiadat Cina secara ketat, dan berbahasa Cina atau dialek Cina. Sedangkan kelompok peranakan adalah Tionghoa yang sudah kawin mawin dengan pribumi, tidak menjalankan adat istiadat Cina secara ketat, juga cenderung tidak fasih berbahasa Cina ataupun dialeknnya.²⁷⁷ Berbeda dengan bangsa-bangsa asing lainnya yang juga mewarnai kemajemukan bangsa Indonesia, kaum Tionghoa mempunyai karakteristiknya sendiri. Jumlah mereka terus meningkat dari waktu ke waktu, dan mereka sejak awal memainkan peran yang menonjol di sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor itu merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi moderen.

Terlepas dari berbagai sebab yang mendorong mereka cenderung menguasai sektor ekonomi tersebut, pada kenyataannya posisi itu membuat pengusaha besar Tionghoa umumnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan birokrasi atau pemerintahan. Posisi itu juga sering menimbulkan persaingan yang tidak selalu sehat dengan pribumi. Persaingan tidak sehat itu dipicu oleh perilaku ‘menghalalkan segala cara’ untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagian kaum Tionghoa sering menggunakan ‘uang’ sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain kebiasaan ‘sogok-menyogok’ yang berkembang di masyarakat Indonesia sering diidentikkan dengan perilaku pebisnis Tionghoa.

Perilaku seperti itu sesungguhnya juga dilakukan oleh sejumlah pebisnis pribumi dan komunitas lainnya di dunia. Masalahnya masyarakat Indonesia umumnya sudah maklum bahwa pebisnis Tionghoa cenderung berperilaku

²⁷⁷ Suryadinata Leo, (1986), *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

demikian. Tetap bertahanya stigma buruk yang dilekatkan kepada kaum Tionghoa itu, adalah sejalan dengan temuan dalam penanganan berbagai kasus korupsi para pejabat Indonesia. Dalam proses di pengadilan sering terungkap bahwa, salah satu faktor pendorong tindak korupsi itu adalah iming-iming materi yang diberikan oleh para pebisnis Tionghoa. Mereka sengaja memberikan sejumlah uang kepada para pejabat terkait, agar dapat memenangkan tender proyek pemerintah atau untuk kepentingan bisnis lainnya.²⁷⁸

Banyak karya ilmiah yang mengungkapkan bahwa adanya jarak maupun kecurigaan pribumi terhadap kaum Tionghoa, adalah dampak lanjutan yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu pemerintah kolonial di Indonesia menempatkan kaum Tionghoa lebih tinggi dari kaum pribumi. Mereka juga menjalankan kebijakan buruk seperti, politik '*divide et impera*' (politik memecah belah), kebijakan '*permiessibriefje*' (surat izin tinggal), '*Passenstelsel*' (surat izin bepergian), '*Wijkenstelsel*' (penentuan wilayah tempat tinggal) dan '*Politie rol*' (hak polisi untuk melakukan penangkapan dan penghukuman tanpa pengadilan) dan lain-lain. Semua kebijakan tersebut telah menyuburkan kecemburuan di antara kaum Tionghoa dan Pribumi, juga menyuburkan budaya sogok-menyogok dalam masyarakat Indonesia. Semua hal di atas masuk akal dan sudah menjadi bagian sejarah. Meskipun demikian sampai sekarang masih terlihat bahwa, sikap tertutup kaum Tionghoa khususnya kelompok totok, sering menimbulkan kesan 'eksklusif'. Hal itu juga turut memberi andil terhadap tetap bertahannya jarak maupun sikap saling curiga di antara kaum Tionghoa dan pribumi.²⁷⁹

Perlakuan pemerintah RRC terhadap kaum Tionghoa juga sering mengganggu dan kadang-kadang memperuncing hubungan kaum Tionghoa dengan pribumi maupun dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah RRC cenderung 'memanfaatkan' keterikatan budaya dan emosional kaum Tionghoa dengan tanah leluhur atau Daratan Cina, untuk kepentingan pembangunan negaranya. Kenyataan itu menyebabkan populernya ungkapan 'sekali Cina tetap

²⁷⁸ Contoh kasusnya a.l. Eddy Tanzil, dan contoh yang paling baru adalah kasus 'Ayin dan Jaksa Urip', 'Anggodo *versus* Bibit-Chandra', 'Robert Tantular dan Bank Century', dll.

²⁷⁹ Lihat R.Tuty & Eddy, "Aktualisasi Peran Sosial Wanita Cina di Jabodetabek", *Makara, Seri Sosial Humaniora*, Vol. 9, Desember 2006, h. 34-45 ; Litbang Deplu & USU, "Prospek Hubungan RI-RRC dan Negara-Negara Eropah Timur", h. 47-48

Cina' dalam masyarakat Indonesia. Ungkapan itu merupakan sebuah cermin dalamnya 'ketidakpercayaan' pribumi terhadap kaum Tionghoa. Terutama berkaitan dengan kesetiaannya kepada tanah air dan bangsa Indonesia.²⁸⁰

Penelitian dan pembahasan yang cukup komprehensif tentang kebijakan Cina terhadap *Huaqiao* telah dilakukan oleh Joanessa M.J.S. Seda dalam Tesis yang berjudul *Perkembangan Kebijakan Pemerintah Cina Mengenai Kewarganegaraan Etnis Cina di Asia Tenggara*. Salah satu temuan penting penelitian itu adalah, adanya lembaga yang dihidupkan kembali atau didirikan pemerintah RRC untuk mengurus etnis Cina dan keluarganya yang ada di luar RRC. Lembaga yang dibentuk RRC itu adalah *China Federation of Returned Overseas Chinese (ACRFOC)* dan *Quanguo Renmin Daibiao Dahui Huaqiao Weiyuanhui* atau Komite *Huaqiao* di Kongres Rakyat Nasional.

ACRFOC dihidupkan kembali pada tahun 1978, yang berfungsi sebagai penghubung antara PKC dengan *Huaqiao* yang menetap kembali di RRC, serta keluarga dari *Huaqiao* yang berdiam di RRC. Sedangkan Komite *Huaqiao* di KRN dibentuk pada tahun 1983, yang bertugas memonitor pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah RRC yang berkaitan dengan kedua kelompok etnis Cina tersebut.²⁸¹ Tujuan akhir kedua lembaga itu tiada lain adalah menghimpun dana dari etnis Cina di luar RRC yang kemudian mengalir dalam bentuk dana remitensi. Meskipun kebijakan di atas dalam praktiknya lebih banyak ditujukan kepada etnis Cina yang sukses di negara-negara maju, tapi pengaruhnya terhadap kaum Tionghoa yang ada di Indonesia juga tidak dapat diingkari.

Hal-hal di atas merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah Cina maupun Indonesia. Keduanya terlihat menyadari betul pentingnya penyelesaian masalah kaum Tionghoa. Dalam hal ini berfokus pada masalah dwi kewarganegaraan. Pihak RRC terlihat sangat paham bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah 'jaminan' atas sikap yang diambil Cina terhadap masalah tersebut. Pada dasarnya kedua negara memang tidak mengakui dwi kewarganegaraan. Dalam perundingan Jakarta Desember 1989 dilaporkan bahwa, kesimpulan tentang hal ini adalah sebagai berikut,

²⁸⁰ Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*, London: Routledge, hlm. 57

²⁸¹ Seda, Joanessa M.I.S., (2007), Tesis, Depok : FIB UI, hlm. 131

“关于被视为中国公民的 32 万 2000 名 华侨国籍问题， 中国代表团接受 一项 解决 方案， 即那些能出示他们为中国公民证件的华侨， 中国将推许他们 回去中国定居。 如果他们要继续留在印尼居住， 中国大使馆将发给中国护照。 不过中国代表团不接受印尼提出这类华侨人数的数据， 他们表示须要 进一步的核对. ... 至于既无印尼公民地位又 无中国公民证件的无国籍华侨问题， 中国代表团拒绝 加以讨论。 中国代表团认为这是内部事物， 中国不便 加以干预”²⁸²

“Mengenai masalah kewarganegaraan *Huaqiao* yang berjumlah 32.000 orang yang dianggap sebagai warga RRC, delegasi Cina menerima sebuah anjakan penyelesaian yaitu, bagi mereka yang dapat menunjukkan bukti sebagai *Huaqiao* warga RRC, pemerintah RRC akan mengizinkan mereka kembali menetap di Cina. Jika mereka ingin terus tinggal di Indonesia, kedutaan besar RRC akan memberi mereka paspor RRC. Tapi delegasi RRC tidak menerima data jumlah *Huaqiao* yang dikemukakan Indonesia, mereka menyatakan harus memeriksa lebih lanjut. . . . Tentang masalah *Huaqiao* yang bukan warga Indonesia maupun Cina dan sudah dipastikan tidak memiliki kewarganegaraan, delegasi Cina menolak untuk membicarakannya lebih lanjut. Delegasi Cina menganggap ini adalah urusan dalam negeri Indonesia, Cina tidak nyaman untuk turut campur ”

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam masalah kaum Tionghoa, hanya satu unsur yang belum disepakati yaitu tentang jumlah *Huaqiao*. Menurut Indonesia ada sekitar 32. 000 orang, namun RRC tidak sepakat. Meskipun demikian soal perbedaan jumlah tentu bukan hal sulit untuk diatasi. Sedangkan tentang *Huaqiao* yang sudah dipastikan tidak mempunyai kewarganegaraan, Cina menyerahkan kepada Indonesia untuk menyelesaikannya. Sedangkan tentang kebijakan pemerintah Cina yang seringkali ‘mengundang’ kaum Tionghoa untuk berbakti kepada tanah leluhurnya, RRC menegaskan dan menjamin bahwa Cina tidak akan mengakui keturunan Cina atau kaum Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia, sebagai warga negaranya. RRC juga tidak akan memanfaatkan mereka, dikatakan bahwa, “RRC tidak akan memanfaatkan warga negara Indonesia keturunan Cina untuk kepentingannya... RRC menolak kewarganegaraan ganda”,²⁸³ Demikianlah persisnya yang diucapkan Perdana Menteri Cina Li Peng saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kaum Tionghoa di Indonesia.

²⁸² 余文销 (Shi Wenxiao), “印尼正在. . . .”, 25 Desember 1989

²⁸³ “Report on PRC Prime Minister Li Peng’s News Conference”, Beijing International Service, FBIS=CHI-90-153, 8 Agustus 1990, hlm. 11

Pemerintah Cina bahkan menghimbau kaum Tionghoa untuk menjadi warga negara yang baik, dengan selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. RRC juga menyatakan bahwa dengan cara apa dan bagaimana Indonesia menangani masalah yang terkait dengan kaum Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia, sepenuhnya adalah masalah dalam negeri Indonesia. RRC yakin bahwa Indonesia bisa menjamin hak seluruh warga negaranya.

“We regard all those who have been naturalized as nationals or acquired the nationality of the country of their residence as nationals of that country. They are no longer Chinese nationals. They should fulfil their obligations to their adopted country just like all the other citizens of that country. As for those Overseas Chinese who retain Chinese nationality, ... we have all along requested and educated them to observe the laws and decrees of the country of their residence, respect the local customs and...”²⁸⁴

“Kami menganjurkan kepada semua yang telah dinaturalisasi atau sudah menjadi warga negara tempat tinggalnya, mereka bukan lagi warga negara Cina. Mereka harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara seperti warga lainnya di negara tersebut. Sedangkan bagi yang tetap mempertahankan kewarganegaraan RRC, kami selalu meminta dan mendidik mereka untuk mematuhi undang-undang dan peraturan negara yang mereka tinggali, menghormati adat istiadat setempat, dan ...”

Kutipan di atas adalah bagian dari pernyataan Li Peng dalam perundingan dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Jakarta, pada saat kunjungannya dalam rangka meresmikan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Jaminan seorang Perdana Menteri sudah selayaknya dapat membuat Indonesia percaya, namun sejauh mana hal itu dijalankan tentu masih harus dibuktikan. Dalam kaitan penelitian ini, pernyataan itu merupakan bukti lain lagi yang menunjukkan betapa kuatnya upaya Cina untuk mendapatkan ‘kepercayaan’ dan mewujudkan normalisasi hubungannya dengan Indonesia. Cina telah bersikap sangat akomodatif terhadap Indonesia. Kepercayaan mitra adalah sebuah ‘kehormatan’, dan di sisi lain kepercayaan Indonesia akan menumbuhkan kepercayaan bangsa-bangsa lain terhadap Cina, terutama di Asia Tenggara.

²⁸⁴“Dual Nationality Issue Discussed”, Xinhua, Beijing, August 8, 1990 in *FBIS-CHI-90-153*, hlm. 12

5.2.1.4 Penyelesaian Hutang Indonesia

Masalah prinsipil lainnya yang harus diselesaikan sebelum diresmikannya normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia adalah ‘penyelesaian hutang Indonesia kepada RRC’. Rumitnya penyelesaian masalah ini terlihat dari jalur yang digunakan dan panjangnya waktu yang dibutuhkan. Pembahasan masalah penyelesaian hutang itu selain dibicarakan melalui jalur formal maupun informal. Jalur informal dilakukan melalui wakil-wakil kedua negara dalam berbagai kesempatan yang tersedia yang tidak diatur oleh kedua belah pihak. Misalnya, forum-forum internasional yang memungkinkan wakil-wakil dari kedua negara bertemu dan berkomunikasi. Sedangkan jalur formal adalah forum perundingan yang diatur oleh kedua belah pihak. Sedikitnya terjadi empat kali perundingan antara ‘kelompok kerja’ yang dibentuk oleh masing-masing negara.

Pembahasan penyelesaian masalah hutang dalam disertasi ini, dilakukan berdasarkan penelitian terhadap perubahan-perubahan angka maupun klausal, yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan dari setiap perundingan. Dokumen-dokumen itu adalah,

- a. Butir-butir kesepakatan yang dicapai dalam diskusi (*Agreed Minutes of Discussion*) selanjutnya akan disebut ‘butir-butir kesepakatan Maret 1990’
- b. Nota kesepakatan penyelesaian hutang RI kepada RRC’ (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on The Settlement of Indonesia’s Debt Obligations to The People’s Republic of China*), selanjutnya disebut ‘nota kesepakatan Juli 1990’

Dari dua dokumen itu ditemukan beberapa perbedaan kesepakatan di dokumen yang satu dengan yang berikutnya, yang menunjukkan adanya perubahan. Dalam butir-butir kesepakatan Maret 1990, selain mencantumkan hal-hal yang sudah dapat disepakati, disebutkan pula bahwa kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pandangan terkait dengan tiga rekening yaitu,

- a. Rekening kredit no. 3L40601 SUB, A/C dengan 'Credit A/C no. 3 Local Expense' yang dibuka berkaitan dengan perjanjian kerjasama teknis dan ekonomi yang ditandatangani pada 11 Oktober 1961. Jumlah hutangnya sudah disepakati yaitu CHF 20.144.774.78, namun belum sepakat dalam perhitungan bunga. Menurut Bank Indonesia (BI) sebesar CHF 2.618.820.72, sedangkan menurut Bank of China (BOC) sebesar CHF 4.716.909.40.
- b. Dalam 'rekening Indonesia' dan 'rekening Cina' yang dibuka berkaitan dengan perjanjian pembayaran perdagangan yang ditandatangani kedua belah pihak pada 1 September 1954, jumlahnya belum diverifikasi oleh kedua belah pihak. Dalam catatan Indonesia jumlahnya GBP 2.135.610.67, sedangkan menurut Cina adalah GBP 3.987.717.01. dengan demikian ada perbedaan sebesar GBP 1.852.106.31. Pihak RRC menunjukkan sejumlah bukti pembayaran di periode Desember 1965-Desember 1967, sementara pihak Indonesia akan memberikan salinan bukti pembayaran yang mungkin belum diterima Cina.
- c. Mengenai 'rekening pinjaman no. 5' yang dibuka berkaitan dengan perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis yang ditandatangani kedua pemerintahan pada 28 Januari 1965. Menurut catatan BOC jumlah hutang Indonesia adalah CHF 25, 176.433.20, sedangkan pihak Indonesia tidak memiliki catatan tentang hal ini. Delegasi Cina telah menunjukkan naskah asli perjanjian tersebut dan melengkapinya dengan salinan pernyataan pemerintah dan *voucher*. Pihak Indonesia setuju untuk menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen terkait.

Ketiga hal yang belum disepakati tersebut dalam 'nota kesepakatan Juli 1990' terlihat sudah dapat diselesaikan, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut,

- a. Pasal 1, poin b, catatan pihak RRC menunjukkan bahwa jumlah hutang Indonesia kepada Cina termasuk bunga, seluruhnya adalah CHF 124.217.299.61 dan GBP 8.126.829.34. Sedangkan menurut catatan pihak Indonesia jumlah seluruhnya adalah sebesar CHF 98.847.151.37 dan GBP 8.126.829.34.

- b. Pasal 1, poin c. RRC menyetujui jumlah yang ditunjukkan pihak Indonesia di atas sebagai jumlah pokok yang final yang diakui sebagai hutang-piutang diantara kedua belah pihak
- c. Pasal 1, poin d. RRC setuju dengan perhitungan bunga yang diajukan Indonesia dan penjadwalan kembali pembayaran hutang tersebut berlandaskan '*Paris Formula*'.

Setelah memperhatikan dengan seksama dan membandingkan isi kedua dokumen tersebut, dan melakukan analisa lebih lanjut terhadap perbedaan atau perubahan yang terlihat dari keduanya, ada beberapa fakta yang dapat diungkap yaitu sebagai berikut,

- a. Ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam hal penghitungan bunga pinjaman, sebagaimana tertuang dalam butir-butir kesepakatan Maret 1990, tentang rekening kredit no. 3L40601 SUB, A/C dengan 'Credit A/C no. 3 Local Expense', akhirnya dapat mencapai titik temu. RRC setuju dengan cara penghitungan Indonesia yaitu bunga yang harus dibayar adalah sebesar CHF 2.618.820.72, bukan seperti yang dihitung pihak Cina yaitu sebesar CHF 4.716.909.40²⁸⁵
- b. Tentang hutang yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran perdagangan yang ditandatangani pada 1 September 1954, Indonesia setuju untuk membayar sesuai dengan perhitungan RRC yaitu sebesar GBP 3.987.717.01²⁸⁶
- c. Mengenai 'rekening pinjaman no. 5' yang dibuka berkaitan dengan perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis yang ditandatangani kedua pemerintahan pada 28 Januari 1965, kedua belah pihak setuju untuk menganolir perjanjian itu. Dengan demikian Indonesia tidak perlu membayar hutang yang menurut BOC jumlahnya mencapai CHF 25, 176.433.20²⁸⁷
- d. Hasil akhir yang tertuang dalam nota kesepakatan Juli 1990, RRC setuju untuk menerima hasil penghitungan Indonesia. Dengan demikian RRC telah merelakan selisihnya yang menurut perhitungan kurs saat itu adalah

²⁸⁵ Nota Kesepakatan, Lampiran A, no. 2

²⁸⁶ Nota Kesepakatan, Lampiran A, no. 4

²⁸⁷ Nota Kesepakatan", Lampiran A, no.6

setara dengan USD 84 juta, yang merupakan salah satu kendala akhir (*last major issue*) dalam perundingan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia.²⁸⁸

- e. Disepakatinya penerapan 'Formula Paris' dalam pembayaran hutang Indonesia kepada RRC (Nota Kesepakatan Juli 1990, Pasal 1 poin d), itu juga merupakan 'keberhasilan' Indonesia. Sejak awal Indonesia sudah mengusulkan hal tersebut, karena Formula Paris meringankan pihak yang berhutang. Dalam 'Formula Paris' hutang yang dibayar adalah hanya 'sisa pinjaman pokok' dan 'sisa bunga awal'. Artinya bunga yang dibayar hanyalah bunga sampai batas waktu yang disepakati di awal perjanjian, selanjutnya tidak ada lagi bunga yang harus dibayar. Selain itu jadwal pembayaran juga diperbarui dimulai dari saat jatuh tempo sampai tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian baru. Dalam hal ini Indonesia meminta waktu selama 30 tahun untuk menyelesaikan semua hutangnya. Dengan demikian hutang Indonesia kepada Cina yang dibuat pada era Presiden Soekarno itu, rata-rata jatuh tempo pada tahun 1999.
- f. Pembayaran tidak harus seluruhnya dalam bentuk tunai, dapat juga dikonversi ke komoditas ekspor Indonesia yang dibutuhkan Cina, asalkan jumlahnya tidak lebih dari 50% jumlah hutang seluruhnya (Nota Kesepakatan Juli 1990, Pasal 4). Hal ini merupakan kemudahan lainnya yang diberikan Cina kepada Indonesia.

Penelitian dan analisa terhadap data yang terdapat dalam dokumen-dokumen perundingan penyelesaian masalah hutang Indonesia kepada Cina, yang telah menjadi kendala peresmian normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, menunjukkan bahwa ada perubahan sikap kedua belah pihak yang sangat bermakna dalam setiap tahapannya. Perubahan sikap Cina yang paling menonjol adalah dalam proses penyelesaian masalah hutang Indonesia kepada Cina. Pada mulanya Cina cenderung bertahan dengan data-data yang dimilikinya, namun akhirnya merelakan sejumlah nominal yang cukup besar yaitu sekitar USD 84.000.000. Jumlah itu seharusnya bisa sangat berguna untuk mendukung pembangunan kembali ekonomi Cina. Selain itu Cina juga menyepakati sejumlah

²⁸⁸Tokyo Kyodo, July 2, 1990 in *FBIS-CHI-90-128*, July 3, 1990, h. 6.

kemudahan dalam cara pembayaran kembali seluruh hutang tersebut, termasuk tenggang waktu pembayaran yang juga diperbarui.

Berbagai perubahan positif dalam sikap Cina itu tentu tidak dapat hanya dilihat semata-mata karena Cina merupakan bangsa yang murah hati. Apalagi bila mempertimbangkan bahwa proses perundingannya tidaklah mudah. Selain itu mengacu pada kondisi yang melingkupi Cina saat itu, sangatlah tidak rasional bagi Cina untuk bermurah hati. Indonesia sendiri pun akan sangat tersinggung bila landasan penyelesaian masalah itu adalah 'kemurahan hati' Cina. Sejumlah kompromi yang terjadi telah memperlihatkan dengan jelas bagaimana kedua belah pihak saling menjaga, agar masalah yang peka itu dapat diselesaikan tanpa ada yang kehilangan muka atau *diu mian*.

Sikap akomodatif Cina misalnya, tidaklah menunjukkan hal itu dilakukan tanpa pertimbangan yang rasional. Perhitungan dan pemeriksaan seksama terhadap semua dokumen yang mencatat semua hutang-piutang tersebut telah menjadi bukti adanya rasionalitas dalam tindakan Cina. Demikian pula dengan Indonesia, meskipun ada peluang untuk 'menekan' Cina, namun Indonesia tidak memforsirnya. Sangat terlihat jelas bahwa Indonesia bukan ingin bebas dari kewajiban membayar hutangnya, namun berupaya agar jumlahnya sesuai dengan fakta yang ada, cara pembayarannya mudah dan sesuai dengan kemampuan ekonomi Indonesia saat itu.

Meskipun demikian, kecenderungan Cina untuk setuju terhadap perhitungan dan usul-usul penyelesaian yang diajukan Indonesia, tetap menjadi petunjuk menonjolnya sikap *gei mianzi* dalam keputusan Cina. Hal itu menunjukkan pula bahwa Cina sangat ingin proses normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia segera selesai. Harapannya adalah dengan normal kembalinya hubungan dengan Indonesia, maka Cina dapat melakukan langkah diplomasi selanjutnya di kawasan Asia Tenggara. Cina dapat segera membuka hubungan diplomatik dengan Singapura serta Brunei, dan membangun kerjasama yang lebih erat dan luas dengan ASEAN.

5.2.2 Penyelesaian Masalah yang Bersifat Fleksibel (*linghuoxing*)

Berbagai masalah prinsipil yang menjadi kendala bagi terwujudnya normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, telah dapat diselesaikan. Meskipun demikian masih ada masalah-masalah teknis administratif maupun teknis seremonial yang juga harus dirundingkan. Bagi Cina masalah-masalah seperti itu dapat dinegosiasikan dengan tingkat prioritas yang sangat tergantung pada suasana perundingan dan desakan kebutuhan Cina. Masalah-masalah semacam itulah yang masuk dalam kategori *linghuoxing* atau fleksibel.

Masalah teknis administratif yaitu hal-hal yang terkait dengan fasilitas diplomatik seperti lokasi dan gedung untuk kedutaan besar masing-masing, jumlah personil/diplomat yang ditempatkan khususnya di tahap awal, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pembukaan kembali kedutaan besar masing-masing. Dalam hal lokasi dan gedung kedutaan besar RRC yang lama yaitu yang terletak di jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, saat itu telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Kondisi gedung tersebut pada tahun 1989 tidak terawat, sekarang berfungsi sebagai 'Gedung Arsip Nasional'. Sedangkan kondisi gedung kedutaan besar Indonesia di Beijing masih ada dan relatif masih terawat baik.²⁸⁹ Mengetahui kondisi yang demikian dalam tulisan Shi Wenxiao dikatakan bahwa, pihak Cina setuju untuk tidak menggunakan gedung kedutaan besar yang lama. Pihak Indonesia menyatakan akan menyediakan lokasi di Jakarta Selatan di mana RRC dapat membangun gedung kedutaannya yang baru. Sedangkan tentang jumlah personilnya, kedua pihak juga menyepakati usul Indonesia bahwa personil yang akan ditempatkan pada tahap awal adalah berjumlah 20 orang.²⁹⁰

Masalah teknis lainnya adalah yang terkait dengan tempat, waktu, dan cara meresmikan normalisasi hubungan yang sudah membeku lebih dari dua puluh tahun. Secara umum penyelesaiannya tergambar sebagai berikut,

“。。。在代表团抵达当日的下午，根据印尼方建议，两国外长就复交问题还先进行了一次“单独会议”。阿拉塔斯开门见山地说，。。经过几次技术性会谈，有关两国复交的问题都已经解决。关于复交的时间和方式苏哈托总统指示，在今年内合适的时间完成。。现在不是建交而是复交。。因此，方式可以简单一

²⁸⁹“Maka mulailah kini 'huifu jiaoji' berjabat tangan dengan Cina”, *Tempo Online*, Jakarta, 04 Maret 1989

²⁹⁰余文销 (Shi Wenxiao), “印尼正在。。。”, 25 Desember 1989

些，。。当然，仪式可以隆重些，以强调其重要性。。苏哈拖总统有意延请李鹏总理访问印尼，复交可以在这次访问中宣布。访问时间可8月17日印尼独立之前，也可在今年其他双方方便的时间“²⁹¹

“Sore hari ketika delegasi (Indonesia) tiba, atas usul pihak Indonesia Menlu kedua negara melakukan ‘pembicaraan eksklusif’. Alas membukanya dengan mengatakan...melalui beberapa kali perundingan yang bersifat teknis, masalah yang berkaitan dengan normalisasi kedua negara sudah terpecahkan. Mengenai masalah cara dan waktu normalisasi Presiden Soeharto telah menginstruksikan agar selesai dalam waktu yang cocok di tahun ini ...sekarang ini bukan membuka hubungan, tapi menormalisasi hubungan... karena itu caranya bisa sederhana saja... tentu saja, upacaranya harus agak besar-besaran, untuk menegaskan sifat pentingnya... Presiden Soeharto bermaksud mengundang Perdana Menteri Li Peng berkunjung ke Indonesia, normalisasi dapat diumumkan dalam kunjungan tersebut. Waktu kunjungan itu dapat dilakukan sebelum perayaan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, boleh juga di waktu yang lain yang cocok bagi kedua pihak di tahun ini”

Kutipan di atas merupakan paparan Qian Qichen tentang salah satu bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan Ali Alatas ke Beijing bulan Juli 1990. Membandingkan kenyataan yang terjadi dengan paparan tersebut, terlihat bahwa dalam hal teknis seremonial yang diwujudkan adalah semua yang diusulkan oleh pihak Indonesia sebagaimana yang disampaikan Alatas kepada Qian Qichen. Dari sini tampak jelas bahwa untuk hal yang satu ini, RRC melepaskan semua posisi tawarnya kepada Indonesia. Padahal dalam pergaulan antar bangsa pada umumnya, penetapan waktu, tempat, dan cara bagaimana sebuah hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut dilaksanakan, mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar bagi keduanya. Artinya, hal-hal teknis seremonial itu merupakan etalase bagi dunia, yang mampu menaikkan ataupun menurunkan ‘pamor’ negara yang menjadi tuan rumah.

Seorang pengamat Cina ketika mengulas tentang kunjungan Alatas ke Beijing telah mengungkapkan hal itu. Dikatakannya bahwa, “...Orang akan memusatkan perhatian pada empat hal yaitu, waktu, tempat, penandatanganan, dan perjanjian lain yang akan ditandatangani untuk meningkatkan hubungan

²⁹¹钱其琛 (Qian Qichen), (2003), 钱其琛: 外交十记... hlm.129-130

bilateral”.²⁹² RRC tampaknya tidak terlalu peduli pada hal-hal seremonial tersebut, sehingga RRC ‘menurut’ saja pada apa yang diusulkan Indonesia.

Ungkapan dalam kutipan di atas, juga mengingatkan kembali bahwa semua sikap Indonesia tentang normalisasi sangat tergantung kepada Presiden Soeharto. Tentang hal ini dapat dikatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Cina tidak akan terjadi saat itu bila Pak Harto tidak menginginkannya. Presiden Soeharto mengatur sampai ke masalah waktu dan cara, bagaimana peresmian normalisasi hubungan itu harus dilakukan. Soeharto merasa perlu melakukan semua itu karena dia lah yang telah menjalani pengalaman pahit dalam berhubungan dengan Cina yang tidak mudah dilupakannya. Terutama ketika terjadi peristiwa G 30 S PKI. Selain itu, sebagai orang Jawa Presiden Soeharto sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat simbolis, khususnya ketika hal itu bersinggungan dengan ‘martabat’ atau ‘harga diri’ pribadi maupun bangsa (lihat sub bab 4.1). Dengan mengatur hal-hal seremonial yang terlihat sepele itu, sesungguhnya Soeharto telah membuat Indonesia mendapatkan ‘kemenangan psikologis’ sampai di tahap akhir proses normalisasi hubungan tersebut.

Sikap fleksibel RRC dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kendala bagi terwujudnya normalisasi hubungan, tidak dapat sepenuhnya dinilai sebagai ‘ketulusan’. Perundingan yang berulang kali dan panjang, secara formal maupun informal, terutama dalam pembahasan masalah penyelesaian hutang Indonesia membuktikan hal itu. Masalah penetapan tempat, waktu, dan masalah teknis lainnya, menjadi agenda perundingan paling akhir, dan Cina cenderung mengikuti saja apa yang diusulkan Indonesia. Mengacu pada karakter bangsa Cina yang sangat dipengaruhi oleh konsep *Zhong guo* atau negara pusat yang biasanya berperan sebagai ‘penentu’, sikap fleksibel yang amat longgar itu menjadi tidak sesuai dan bahkan kontradiktif. Hal itu karenanya dapat dijadikan petunjuk bahwa Cina ingin normalisasi itu segera terwujud. Cina lebih melihat manfaat lebih besar yang akan didapatkannya setelah normalisasi terjadi. Artinya, hal-hal teknis administratif maupun seremonial tidak menjadi prioritas Cina. Penyebab utama dari sikap Cina itu adalah karena mendesaknya pencapaian kepentingan nasional yang lebih besar dibalikinya. Bukan semata-mata karena

²⁹² “China and Indonesia will soon announce details about restoration of their diplomatic relationship”, Hsin Wan Bao, Hongkong, 3 July 1990, *FBIS-CHN-90-128*, hlm. 10

Cina tidak peduli pentingnya hal-hal teknis yang terkait dengan masalah psikologis tersebut.

Penetapan Jakarta sebagai tempat penandatanganan ‘nota kesepakatan’ normalisasi, dan waktunya seperti diinginkan Indonesia yaitu sebelum ulang tahun kemerdekaan RI, dan ‘perjanjian kerjasama perdagangan’ yang juga diusulkan Indonesia sebagai perwujudan resminya hubungan kedua negara, merupakan ‘kemenangan’ psikologis bagi pihak Indonesia. Semua itu dapat menjadi bukti bahwa Indonesia bisa ‘mengendalikan’ Cina. Kehadiran Perdana Menteri Li Peng ke Jakarta untuk menyaksikan peristiwa itu, juga menjadi penyempurna ‘kemenangan’ psikologis itu bagi Indonesia. Berbeda dengan di zaman kedinastian dulu dimana Cina sebagai negara pusat didatangi oleh negara vasalnya untuk meminta pengakuan dengan melakukan *ke tou*. Kali itu Perdana Menteri RRC datang ke Indonesia untuk menyaksikan peresmian pembukaan kembali hubungan diplomatik Cina dengan Indonesia.

5.3. Simpulan

Setelah melalui masa pendekatan dengan pasang surut yang amat dinamis, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membuka kembali hubungan diplomatik di antara kedua negara. Analisis yang berpedoman pada pendekatan ‘keterkaitan mikro-makro’ untuk menginterpretasikan politik luar negeri Cina yang dikembangkan oleh Zhao Quansheng, berhasil membuktikan bahwa berbagai perubahan yang dilihat dalam tiga dimensi di level makro telah memberi pengaruh yang amat besar terhadap proses pengambilan keputusan tentang normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia di level mikro. Dalam analisis perkembangan domestik dan internasional pada era tahun 1980-an menjadi pokok perhatian. Meskipun demikian karena topik disertasi adalah kebijakan RRC tentang normalisasi hubungan dengan Indonesia, maka pengamatan lebih terfokus pada perkembangan di akhir dekade tersebut.

Niat, tekad, dan upaya pemerintah Cina untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan bangsa dan negaranya dilakukan melalui program *gaige-kaifang*. Pelaksanaan program itu sempat kacau dan nyaris terhenti karena terjadinya peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989. Kekacauan yang menimbulkan kegalauan

hebat secara struktural maupun personal di dalam pemerintahan RRC. Kegagalan itu menjadi semakin luar biasa dengan berubahnya konstalasi kekuatan dunia akibat menurunnya kekuatan sosialis-komunis. RRC sebagai satu-satunya negara besar berideologi sosialis-komunis yang tersisa saat itu, menanggung beban yang berlipat ganda untuk menyelamatkan eksistensi dan citranya secara domestik maupun internasional.

Unsur yang dicakup eksistensi dan citra sebuah negara di antaranya adalah kedaulatan, kewibawaan, kehormatan, dan kepercayaan. Semua unsur tersebut dalam budaya Cina tercakup dalam konsep *mianzi*. Bagi bangsa Cina *mianzi* adalah sesuatu yang harus dijaga sekuat tenaga. Upaya yang dilakukan ketika eksistensi dan citra diri terancam adalah bagian dari *baquan mianzi* atau menyelamatkan muka. *Baoquan mianzi* adalah sebuah tindakan heroik dan karenanya dapat atau bahkan harus dilakukan dengan segala cara. RRC melakukan hal yang sama ketika terpuruk di pertengahan tahun 1989. Dengan semangat mencari terobosan melalui jalinan hubungan pertemanan sebanyak-banyaknya RRC mengangkat tinggi-tinggi Lima Prinsip Koeksistensi Damai dan Dasa Sila Bandung.

Berlandaskan semangat itu pula akhirnya RRC mengambil inisiatif untuk mendorong munculnya langkah-langkah kongkrit menuju normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Sejak perundingan Tokyo pada Februari 1989 yang menyepakati untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik Cina-Indonesia, sampai bulan Agustus hampir tak ada langkah berarti untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Bertemunya Qian Qichen dan Alatas di konferensi Paris yang membahas penyelesaian konflik Kamboja, menjadi momen penting bagi proses perwujudan normalisasi. Di sanalah Qian mengusulkan pembentukan kelompok kerja, dan kedua pihak merancang perundingan-perundingan selanjutnya. Hal itu dimaksudkan untuk menemukan solusi yang tepat bagi berbagai kendala yang menghadang normalisasi. Dari sini bergulir rangkaian perundingan Jakarta, Beijing, Hongkong, dan akhirnya perundingan Beijing Juli 1989. Berbagai perundingan itu berhasil menyepakati penyelesaian berbagai masalah, baik yang bersifat prinsipil maupun fleksibel. Masalah pengakuan satu Cina, dukungan RRC terhadap gerakan komunis, status

kaum Tionghoa dan masalah hutang piutang yang tersisa dari era tahun 1965-an, semuanya berhasil diselesaikan dengan memuaskan kedua belah pihak. Perundingan juga berhasil menyepakati penetapan waktu, tempat, dan cara prosesi peresmian normalisasi hubungan tersebut.

Hubungan diplomatik Cina-Indonesia membeku selama 23 tahun, dan butuh rentang waktu sekitar satu setengah tahun untuk menyelesaikan berbagai kendala terwujudnya keinginan normalisasi hubungan di antara kedua pihak. Hal itu menjadi bukti bahwa kendalanya memang rumit, dan kompromi atau kesepakatan tidak selalu mudah didapatkan. Tidak mudahnya dicapai kesepakatan di antara kedua bangsa, juga disebabkan karena secara psikologis masing-masing mempunyai sifat *ego-sentris* yang tinggi. Di sinilah pendekatan budaya berperan. *Mianzi* sebagai kerangka konseptual memberikan nilai lebihnya. Melalui pendekatan konsep *mianzi* tergambar lebih jelas bahwa demi menyelamatkan muka (*baoquan mianzi*), dalam hal ini menegakkan kembali kedaulatan dan kewibawaannya di dalam maupun di luar negeri, serta mengembalikan kepercayaan para tetangga dan dunia kepadanya, Cina telah bersikap sangat kooperatif dalam rangkaian perundingan dengan Indonesia. Sikap kooperatif itu bukan semata-mata karena secara alami Cina ‘cinta damai’, namun lebih dikarenakan adanya dorongan kebutuhan yang membuat Cina banyak memberi muka (*gei mianzi*) kepada Indonesia. Sikap-sikap yang akomodatif itu menyebabkan normalisasi hubungan dapat segera terwujud dan RRC dapat segera memainkan perannya yang lebih luas di kawasan Asia maupun di dunia.

BAB 6

“MIANZI” DALAM SIKAP RRC TERHADAP INDONESIA

Bagaimana dan seberapa besar pengaruh konsep *mianzi* dalam sikap atau perilaku seseorang adalah sesuatu yang sulit diukur dengan pasti, namun indikator-indikator adanya pengaruh itu dapat dikenali. Misalnya seseorang yang ketahuan berbohong, bagaimana reaksinya?. Apakah hanya memerah mukanya, mencoba membantah, berdebat untuk membela diri, ketakutan, atau hingga menunjukkan kepanikan?. Semua reaksi itu dapat menjadi indikator adanya rasa malu hingga rasa bersalah yang bermuara pada rasa ‘kehilangan muka’ sehingga reaksi selanjutnya bisa sampai batas tidak terduga. Dalam budaya Cina batas hingga ‘kehilangan muka’ atau *diu mian* itulah yang harus paling dihindari. Oleh karenanya upaya ‘menjaga muka’ atau *gu mianzi* hingga ‘menyelamatkan muka’ atau *baoquan mianzi* adalah yang harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Makna dan nilai-nilai seperti itulah yang dicakup dalam konsep *mianzi*.

Seperti telah diungkapkan di bagian Pendahuluan maupun bab Kerangka Teoritis dan Konseptual, nilai-nilai yang dikandung oleh kata *mianzi* adalah norma atau tuntunan yang dipraktikkan oleh bangsa Cina dari generasi ke generasi. Bahkan hampir dapat dikatakan telah diajarkan secara ‘menurun’ atau ‘menular’ secara alamiah. Dikatakan demikian karena orang tua di era Cina moderen seperti sekarang ini, mungkin secara otomatis saja mengajarkan nilai-nilai itu kepada anak-anaknya tanpa ia sendiri menyadarinya. Artinya proses itu dimulai dari lingkungan rumah. Sejak kecil seseorang telah diberi pesan, “jangan membuat keluargamu kehilangan muka”²⁹³, atau “manusia perlu muka, pohon perlu kulit”.²⁹⁴ Kemudian ketika ia mulai bergaul di lingkungan masyarakat, agar dapat diterima dengan baik ada sejumlah ‘ketentuan’ yang harus diperhatikannya. Sejumlah ‘ketentuan’ itu menggunakan kata *mianzi* di dalamnya. Beberapa contoh di antaranya adalah,

- a. *Gu mianzi* (顾面子; menjaga muka ; memperhatikan penampilan ; untuk meningkatkan kewibawaan maupun prestise)

²⁹³ “别丢咱们的脸” (*bie diu zanmenjia de lian*)

²⁹⁴ “人要脸， 树要皮”(*ren yao lian, shu yao pi*)

- b. *Jiang mianzi* (讲面子; menjadikan muka sebagai perhatian ; mempertimbangkan perasaan orang lain)
- c. *Ai mianzi* (碍面子; terhalang oleh muka ; takut melukati hati orang lain)
- d. *Bo mianzi* (驳面子; menentang muka ; tidak menghormati orang lain),
- e. *Shang mianzi* (伤面子; melukai/mencoreng muka)
- f. *Liu mianzi* (留面子; meninggalkan muka ; mempermalukan orang lain),
- g. *Mai mianzi* (买面子; membeli muka ; menghormati orang lain dengan maksud tertentu)

Dari contoh di atas, *gu mianzi*, *jiang mianzi*, dan *ai mianzi* merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan *bo mianzi*, *shang mianzi*, *liu mianzi*, dan *mai mianzi* sedapat mungkin harus dihindari. Ungkapan-ungkapan di atas juga memperlihatkan bahwa, konsep *mianzi* atau ‘muka’ yang bermakna ‘kehormatan’, secara alamiah bersifat relasional dan resiprokal. Seseorang harus menghargai ‘muka’ orang lain sebagaimana ia menghargai ‘muka’ nya sendiri.²⁹⁵ Hal ini adalah sejalan dengan ajaran Konfusius bahwa, seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia mengharapkan orang lain memperlakukan dirinya. Dalam kitab Lun Yu terdapat ujaran “apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan lakukan kepada orang lain”.²⁹⁶ Jia Wenshan menegaskan bahwa, ketika seseorang ‘memberi muka’ kepada orang lain, sesungguhnya ia mengharapkan suatu saat ‘muka’ itu akan dikembalikan. ‘Pengembalian muka’ atau *huan mianzi* (换面子) itu tidak harus dalam bentuk yang sama dan tidak ada batas waktunya, namun diharapkan orang yang diberi muka tahu bentuk dan saat yang tepat untuk melakukannya. Ketidakpekaan orang yang diberi muka, dalam situasi tertentu dapat menimbulkan konflik.²⁹⁷

²⁹⁵ Ning Yu, “What Does Our Face Mean To Us?”, *Pragmatics & Cognition* 9:1 (2001), hlm. 13

²⁹⁶ “己所不欲，勿施於人” (*ji suo bu yu , wu shi yu ren*) , *Lun Yu*, Jilid XIV ayat 23 ; Legge, James, D.D. LL D., *中英对照四书* (*The Four Books : Confucian Analects, The Great Learning, The Doctrine of The Mean, and The Works of Mencius. With English Translation and Notes*), hlm. 229

²⁹⁷ Jia Wenshan, (2001), *The Remaking of the Chinese Character and Identity in the 21st Century : The Chinese Face Practices*, Greenwood Publishing Group. http://books.google.co.id/books?id=YyU FKnf1h-4C&dq=mai+mianzi&hl=id&source=gbs_navlinks_s, hlm. 47-48

Dengan cara seperti itu nilai-nilai yang terkandung dalam *mianzi* menyebar dan menyerap ke alam pikiran bangsa Cina, menembus batas-batas ideologi yang dianut secara formal oleh negara dan pemerintah RRC. Kadar pengaruh nilai-nilai itu dalam setiap individu pasti berbeda, dan mungkin muncul dalam bentuk yang berbeda pula. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Secara alamiah ‘muka’ memang merupakan bagian penting dari tubuh manusia, merupakan pembeda utama antara manusia yang satu dengan yang lain. ‘Muka’ juga merupakan jendela hati manusia. Artinya ‘muka’ bisa menjadi acuan tentang suasana hati atau emosi seseorang, atau bahkan menjadi gambaran karakter seseorang. Selain itu dalam komunikasi, ‘muka’ juga menjadi fokus perhatian. Seseorang akan menghadap atau memperhatikan muka orang lain yang sedang berbicara padanya, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, konsep muka bukanlah spesifik milik bangsa Cina, semua bangsa di dunia memilikinya. Hanya saja, konsep *mianzi* bagi bangsa Cina mempunyai nilai-nilai dengan akar budaya tersendiri di dalamnya, dan nilai-nilai itu berpengaruh dalam sikap dan perilaku mereka ketika berhubungan dengan orang lain.

Pembahasan bab-bab sebelumnya, juga menggunakan *mianzi* sebagai bagian dari kerangka konseptual. Dalam bab ini akan dibahas secara khusus bagaimana konsep *mianzi* tersebut berpengaruh, mewarnai, atau paling tidak terlihat, dalam sikap pemerintah RRC ketika berhubungan dengan pemerintah Indonesia. Terutama yang berhubungan dengan makna yang terkandung dalam *baoguan mianzi* (menyelamatkan muka), *diu mian* (kehilangan muka), *gei mianzi* (memberi muka), dan *gu mianzi* (menjaga muka).

Menggunakan konsep *mianzi* untuk menganalisis, berarti harus memfokuskan perhatian pada tindakan, sikap, atau perilaku, yang ditunjukkan, dalam sebuah peristiwa, atau dalam sebuah kebijakan bila itu berkaitan dengan hubungan antar negara. Sejarah hubungan Cina-Indonesia dalam hal ini RRC-RI, dapat dibagi dalam dua periode utama yaitu sebelum dan sesudah normalisasi hubungan diplomatik. Fokus utama disertasi ini adalah peristiwa normalisasi hubungan diplomatik RRC-Indonesia. Berdasarkan hal itu maka perhatian diarahkan kepada beberapa peristiwa sejarah pada era sebelum normalisasi, dan

pada saat berprosesnya peristiwa normalisasi itu sendiri. Sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah pada era pasca normalisasi tidak akan tercakup dalam pembahasan di bab ini.

Hubungan diplomatik Cina-Indonesia sejak awal telah dibebani oleh dua masalah sensitif yaitu, ideologi komunis yang dianut Cina, dan berbagai hal yang berkaitan kaum Tionghoa. Dalam hal ideologi, umumnya permasalahan muncul berkaitan dengan kebijakan RRC di era kepemimpinan Mao Zedong yang menyebarkan paham komunis dengan ‘mengekspor’ revolusi, khususnya di era revolusi kebudayaan. Perjalanan sejarah hubungan kedua negara mencatat bahwa, selama RRC dapat meyakinkan Indonesia tentang tidak adanya upaya untuk melakukan hegemonisme ataupun mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, maka masalah ideologi tidak mengganggu hubungan kedua negara di bidang lainnya.

Berbeda dengan masalah ideologi, urusan kaum Tionghoa lebih sering menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Cina-Indonesia. Pada era pra normalisasi atau bahkan pra pembekuan hubungan, ada beberapa peristiwa sejarah terkait dengan masalah ini dan dapat menunjukkan adanya pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya. Di antaranya adalah dalam peristiwa penarikan pulang Duta Besar (Dubes) Wang Renshu, peristiwa PP 10 tahun 1959, peristiwa pembekuan hubungan tahun 1967, dan peristiwa kunjungan Wu Xueqian yang tidak berhasil melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Soeharto. Sedangkan dalam proses normalisasi hubungan, konsep *mianzi* akan dilihat dalam rangkaian perundingan dan hasil yang dicapainya.

6.1 Penarikan Duta Besar Wang Renshu

Dalam bab 3 telah diuraikan bahwa proses saling mengakui kedaulatan di antara RRC-RI tidak langsung berjalan mulus. Kawat tentang keinginan untuk saling mengakui kedaulatan dikirimkan Wakil Presiden RI Muhamad Hatta pada 11 Januari 1950. Meskipun Mao Zedong telah menginstruksikan untuk segera menanggapi kawat Hatta tersebut, Zhou Enlai baru mengirimkan jawaban setelah hampir tiga bulan, yaitu pada tanggal 28 Maret 1950. Hal itu disebabkan oleh masih adanya tujuh konsulat Taiwan di Indonesia, sehingga RRC mengira

Indonesia akan menjalankan kebijakan dua Cina. Pada kenyataannya Indonesia telah membiarkan atau tidak menanggapi surat pengakuan Taiwan atas kedaulatan Indonesia, yang telah dikirimkan Taiwan sejak tanggal 27 Desember 1949. Bahkan Bung Hatta telah meminta Taiwan untuk menutup tujuh konsulatnya yang dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Sikap RRC berubah menjadi antusias setelah mengetahui semua fakta tersebut. Sikap antusias RRC tampaknya juga dipicu oleh kesadaran atas adanya potensi nyata yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat baginya, yaitu kaum Tionghoa. Jika RRC mampu mempengaruhi kaum Tionghoa, maka akan memberi keuntungan ganda. Di satu sisi dapat 'memukul' Taiwan, dan di sisi lain bisa mendapatkan dukungan finansial dari kaum Tionghoa. Keberhasilan misi itu akan meningkatkan kewibawaan dan prestise RRC, baik secara internasional (karena merebut pengaruh dari Taiwan), maupun di hadapan kaum Tionghoa itu sendiri. Dalam kerangka konsep *mianzi*, hal itu dapat dikategorikan sebagai bagian dari *gu mianzi* yaitu menjaga (merawat) muka untuk meningkatkan kewibawaan. RRC punya 'senjata' untuk melakukan hal itu, yakni pasal 37 dan 58 Program Umum²⁹⁸ atau UUD RRC. Isi pokok pasal-pasal itu menetapkan bahwa, seluruh keturunan Cina yang berada di luar negeri adalah warga negara RRC, dan pemerintah RRC wajib memberi perlindungan terhadap keselamatan diri dan aset mereka.

Wang Renshu adalah duta besar RRC pertama untuk Jakarta. Ia menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Soekarno pada bulan Agustus 1950. Pada bulan Oktober Wang menyampaikan keinginan RRC untuk membuka kembali tujuh konsulat yang ditinggalkan Taiwan. Menurutnya ketujuh konsulat itu perlu segera dibuka kembali agar pemerintah RRC dapat melayani

²⁹⁸ Program Umum adalah terjemahan dari *Common Program* yang menunjuk kepada dokumen 中国人民政治协会议 共同纲领 (*Zhongguo Renmin Zhengzhi Xiehuiyi Gongtong Gangling* ; Program Bersama Konferensi Permusyawaratan Politik Cina) . Dokumen ini ditetapkan sebagai 'Undang-Undang Dasar/ UUD' sementara RRC pada 29 September 1949. UUD RRC ini mengalami beberapa kali perubahan atau diamandemen, di antaranya pada tahun 1954, 1977, 1982, dan 1999. (Mozingo, David, (2007), *Chinese Policy toward Indonesia : 1949-1967*, Jakarta, Kuala Lumpur : Equinox Publishing, hlm. 90-91 ; Abdullah Dahana, (1986), *The Evolution of China's Policy Toward Malaysia Since 1949*, A Dissertation Submitted to The Graduate Division of The University of Hawaii in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in History, hlm. 65)

kepentingan kaum Tionghoa yang juga merupakan warga negaranya. Pemerintah Indonesia tidak dapat menerima keinginan itu. Alasan Indonesia, pertama karena RRC berbeda dengan Taiwan, artinya RRC tidak bisa secara otomatis mengambil alih aset yang ditinggalkan Taiwan. Ke dua, pembukaan tujuh konsulat sekaligus di tahap yang masih sangat awal adalah tidak rasional. Ke tiga, menurut ketetapan Konferensi Meja Bundar (KMB), keturunan Cina yang lahir di Indonesia dalam dua tahun terhitung sejak tanggal 27 Desember 1949, akan menjadi warga negara Indonesia, kecuali bila yang bersangkutan secara resmi memilih atau telah menjadi warga negara lain.²⁹⁹ Khusus berkaitan dengan alasan ke tiga tersebut, maka Indonesia menganggap masalah kewarganegaraan kaum Tionghoa baru relevan untuk dibicarakan setelah Desember 1951.

Menanggapi alasan Indonesia tentang kewarganegaraan kaum Tionghoa, Wang menyatakan bahwa, sesuai dengan UUD RRC kaum Tionghoa adalah warga negara RRC. Dengan demikian bila mereka ingin mengubah kewarganegaraannya maka mereka harus mendapatkan surat keterangan dari pemerintah RRC, karena itulah dibutuhkan konsulat-konsulat tersebut agar memudahkan mereka.³⁰⁰ Perundingan berlangsung alot, sampai akhirnya pada bulan Maret 1951 Indonesia mengizinkan RRC untuk membuka konsulatnya di empat kota besar yang mewakili pulau-pulau besar di Indonesia. Keempat konsulat itu adalah di Jakarta untuk pulau Jawa, Medan untuk pulau Sumatera, Banjarmasin untuk Kalimantan, dan Makasar untuk pulau Sulawesi.

Langkah Wang untuk menarik kaum Tionghoa tidak berhenti di sana. Kemampuannya berbahasa Indonesia membuatnya mudah diterima di lingkungan kaum Tionghoa, maupun masyarakat Indonesia lainnya. Beralihnya orientasi *Bank of China* yang semula ke Taiwan menjadi ke RRC, adalah keberhasilan Wang yang lainnya. Sepak terjang Wang itu semakin meresahkan pemerintah Indonesia. Sebagai bentuk protes, pada bulan Juli 1951 Indonesia menolak kedatangan 16 dari 20 orang staf kedutaan RRC yang semula akan ditempatkan di Indonesia. Menurut Indonesia, hal itu dilakukan karena RRC tidak membuat pemberitahuan terlebih dahulu, meskipun Indonesia telah mengingatkannya.

²⁹⁹ Suryadinata Leo, Dr., (1984), *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Press, hlm. 117

³⁰⁰ Mozingo, David, (2007), *Chinese Policy toward Indonesia : 1949-1967*, Jakarta, Kuala Lumpur : Equinox Publishing, hlm. 93

Alasan Indonesia itu sesungguhnya kurang rasional karena ke 16 orang tersebut telah mendapatkan visa untuk masuk ke Indonesia. Meskipun demikian Indonesia tidak menarik keputusannya. Bagi Indonesia, banyaknya staf di kedutaan besar RRC akan menyulitkan Indonesia untuk melakukan pengawasan. Terlebih telah terbukti upaya-upaya RRC dalam membujuk kaum Tionghoa untuk berafiliasi ke RRC. Indonesia bahkan kemudian mem-*persona non grata*-kan Wang Renshu, berkaitan dengan kegiatan provokasi anti Amerika yang dilakukannya.³⁰¹

Tindakan Indonesia menyadarkan RRC bahwa, bila diteruskan langkah-langkah Wang tersebut akan membahayakan hubungan kedua negara dan merugikan RRC. Bagaimana pun saat itu RRC masih membutuhkan Indonesia. Bukan hanya karena keberadaan kaum Tionghoanya saja, tapi juga karena posisi strategis Indonesia di hadapan Amerika Serikat. Bila Indonesia sampai melakukan tindakan yang lebih keras lagi, misalnya sampai memutuskan hubungan dengan RRC, maka hal itu akan membuat RRC menanggung malu. RRC akan kehilangan muka atau *diu mian*. Lepasnya kepercayaan Indonesia akan membuat RRC kehilangan pamor di hadapan bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan akan membuatnya semakin sulit untuk keluar dari politik pembendungan AS. Selain itu juga akan membuat RRC kehilangan kepercayaan dan dukungan dari kaum Tionghoa dan bahkan mungkin dari kaum *Huaqiao*³⁰² di wilayah-wilayah lainnya di dunia.

Berlandaskan kalkulasi itu maka untuk menghindari terjadinya *diu mian*, pada akhir tahun 1951 RRC menarik pulang Dubes Wang Renshu. Keputusan RRC itu merupakan langkah penyelamatan muka atau *baoquan mianzi*. Langkah itu tidak hanya telah menyelamatkan hubungannya dengan Indonesia, tapi juga merupakan langkah awal ke arah hubungan yang lebih baik. Ini adalah contoh pertama sikap RRC terhadap Indonesia yang dipengaruhi konsep *mianzi*. Semula RRC berupaya *gu mianzi* (meningkatkan kewibawaan), namun langkah yang salah hampir menyebabkan RRC *diu mian* (kehilangan muka), sehingga akhirnya

³⁰¹ Hong Liu, (2011), *China and The Shaping of Indonesia, 1949-1965*, Singapore : NUS Press in association with Kyoto University Press, Japan, hlm. 176

³⁰² Dalam disertasi ini sebutan *Huaqiao* digunakan untuk menunjuk para perantau Cina yang ada di berbagai negara di dunia, sedang sebutan Tionghoa adalah untuk menunjuk keturunan Cina yang ada di Indonesia.

RRC harus *gei mianzi* (memberi muka) kepada Indonesia, sebagai upaya untuk *baoquan mianzi* (menyelamatkan muka).

6.2 PP 10 Tahun 1959

Setelah Wang Renshu dipanggil pulang, RRC kemudian mengirim Huang Zhen untuk menggantikannya. Indonesia pun kemudian mengirim Dubesnya yang pertama yaitu Arnold Monomutu untuk menempati posnya di Beijing. Perkembangan itu menandai mulai membaiknya hubungan Cina-Indonesia. Hubungan itu semakin baik setelah hadirnya Perdana Menteri Cina Zhou Enlai dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung di Bandung pada tahun 1955. Bahkan pada kesempatan itu juga sempat ditandatangani perjanjian dwi kewarganegaraan, antara pemerintah RRC dengan Indonesia. Perjanjian ini dianggap sebagai jalan pemecahan yang paling tepat untuk mengatasi masalah kewarganegaraan ganda kaum Tionghoa. Bahkan cara itu kemudian menjadi model untuk menyelesaikan masalah yang sama di negara-negara lainnya, khususnya di Asia Tenggara. Setelah Konferensi Asia Afrika upaya menggalang kerja sama dengan berbagai negara di dunia dilakukan RRC agar lebih leluasa keluar dari politik pembendungan Amerika Serikat.

Eratnya hubungan Cina-Indonesia di era tersebut juga terlihat dari cukup kerapnya kunjungan persahabatan yang dilakukan oleh para pemimpin kedua negara. Sebulan setelah KAA Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo atas undangan pemerintah RRC berkunjung ke Beijing. Selanjutnya pada bulan Juni 1956 Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional RRC Madame Song Qingling juga melakukan kunjungan ke Jakarta. Presiden Soekarno sendiri melakukan kunjungan pertamanya ke RRC selama sekitar dua minggu, yaitu sejak 30 September sampai 14 Oktober 1956, sejumlah kota menjadi tujuan kunjungannya saat itu. Selama masa kepemimpinannya Presiden Soekarno tercatat tiga kali melakukan kunjungan kenegaraan ke RRC. Setelah yang pertama pada tahun 1956, kunjungan ke dua dilakukan pada tahun 1961, dan yang ke tiga pada bulan September 1964. Bung Hatta juga berkesempatan diundang Cina untuk berkunjung ke Beijing dan beberapa kota lainnya di RRC. Kunjungan itu dilakukan setahun setelah kunjungan Soekarno yang pertama atau tepatnya pada

bulan September 1957.³⁰³ Sedangkan kunjungan para pejabat tinggi RRC ke Indonesia banyak dilakukan pada periode tahun 1961-65. Termasuk di dalamnya kunjungan Presiden Liu Shaoqi yang dilakukan pada tahun 1964.

Pada periode pasca KAA pemerintahan Indonesia tidak terlalu stabil. Pemerintahan Soekarno yang semakin dekat dengan PKI mengundang reaksi negatif. Runtuhnya pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) membuat posisi militer (ABRI) semakin kuat. Kondisi itu mendorong Soekarno menyetujui usulan Jenderal Nasution untuk membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Peristiwa ini dikenal sebagai Dekrit 5 Juli 1959. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno mengumumkan Manipol USDEK (Manifesto politik UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).³⁰⁴ Di tengah semangat untuk melakukan revolusi berkesinambungan, pada bulan November Soekarno juga mengumumkan diberlakukannya Peraturan Presiden nomor 10 tahun 1959 atau PP 10 tahun 1959. Peraturan itu antara lain berisi larangan perdagangan eceran di pedesaan oleh orang asing, dan mewajibkan orang asing untuk mengalihkan usahanya tersebut kepada warga negara Indonesia sebelum 1 Januari 1960.³⁰⁵

Aturan pelaksanaan PP 10 tersebut sebenarnya telah dibuat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Di antaranya ada ketentuan agar pengalihan dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan yang sebaik mungkin. Kenyataannya banyak penyimpangan dalam penerapan peraturan tersebut. Selain itu seharusnya peraturan itu berlaku untuk semua orang yang bukan warga negara Indonesia (WNI). Artinya tidak hanya kaum Tionghoa yang bukan WNI yang akan terkena, namun keturunan Arab dan India atau yang lainnya yang bukan WNI juga harus tunduk pada peraturan tersebut. Pada praktiknya hanya kaum Tionghoa yang menjadi sasaran. Daerah Jawa Barat merupakan wilayah yang paling gencar dan paling lengkap dalam

³⁰³ Liang Liji, (2012), *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis : 2.000 tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*, Jakarta : Penerbit KOMPAS, hlm. 504-506

³⁰⁴ Ricklefs M.C., (2005), *Sejarah Indonesia Modern ; 1200-2004*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 518-527

³⁰⁵ Suryadinata Leo, Dr., (1984), *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Press, hlm. 140-141

memberlakukan peraturan tersebut, sehingga menimbulkan korban jiwa dari kalangan kaum Tionghoa. Peristiwa itu menimbulkan reaksi keras dari pemerintah RRC.³⁰⁶

Pemerintah RRC menganggap Indonesia tidak menepati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dwi kewarganegaraan. Seharusnya Indonesia dapat menjamin keselamatan diri dan aset kaum Tionghoa, khususnya yang berkewarganegaraan RRC. Dalam peristiwa tersebut kaum Tionghoa memang menjadi sasaran utama, namun sulit membedakan apakah yang menjadi korban tersebut WNI atau non WNI. Sebagaimana telah diungkapkan di bab 3 bahwa, dalam menanggapi kasus ini RRC punya kecenderungan memanfaatkannya untuk menekan Indonesia. Cina berasumsi bahwa, bila banyak warga Tionghoa yang ditarik pulang maka perekonomian Indonesia akan terganggu, dan hasil akhirnya diharapkan Indonesia akan merasa tergantung kepada RRC. Selain itu RRC juga melihat kemungkinan adanya sejumlah modal yang akan dibawa oleh kaum Tionghoa tersebut. Menurut Mazingo hal itu tercermin dari surat usulan kompromi yang dikirimkan Menlu Chen Yi pada bulan Desember 1959.³⁰⁷ Usulan yang ditulis Chen Yi dalam surat itu antara lain adalah,³⁰⁸

- 1) Pemerintah kedua negara segera saling menyerahkan surat pengesahan persetujuan tentang masalah dwi kewarganegaraan dan merundingkan langkah-langkah pelaksanaannya
- 2) Menjamin dengan pasti hak-hak dan kepentingan yang sah dari orang Tionghoa yang dengan sukarela mempertahankan kewarganegaraan Tionghoknya atau yang sudah memilih kewarganegaraan Indonesia tapi belum disahkan
- 3) Pemerintah Tiongkok akan berusaha mengatur supaya orang Tionghoa yang sudah kehilangan tempat tinggal atau yang sudah tidak bersedia tinggal di Indonesia lagi dipulangkan ke Tiongkok dan berharap pemerintah Indonesia bisa mengaturnya dengan baik dan menjamin keselamatannya.

³⁰⁶ Coppel Charles A., (1994), *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 84

³⁰⁷ Mazingo, David, (2007), *Chinese Policy toward...*, hlm. 174

³⁰⁸ Liang Liji, (2012), *Dari Relasi Upeti...* hlm. 511

Dari ketiga usulan yang diajukan Chen Yi di atas terlihat upaya Cina untuk menunjukkan dominasinya atas Indonesia. Bila Indonesia mengikuti usulan Cina tersebut maka hal itu akan menunjukkan bahwa Cina bisa ‘mengatur’ Indonesia. Dalam sebuah hasil penelitian Badan Litbang Deplu juga terungkap, Wakil Ketua Komisi Urusan Cina Perantauan, Fang Fang pada tanggal 17 Desember 1959 menyatakan bahwa,

“pemerintah Cina telah menyediakan anggaran untuk menampung 600.000 orang, pulau Hainan saja dapat menampung 500,000 orang, dan sebuah stasiun tenaga listrik di propinsi Fujian akan menyediakan lapangan kerja kepada 10.000 orang lainnya”.³⁰⁹

Melalui pernyataan di atas, Cina ingin menunjukkan kemampuan dalam melindungi warga negaranya. Tindakan atau perilaku Cina itu dari sudut *mianzi* menunjukkan bahwa RRC sedang menggunakan potensi yang dimilikinya untuk *gu mianzi* atau *zengjia mianzi* (增加面子 – menambah muka), yang akan meningkatkan wibawanya. Dalam hal ini wibawanya di hadapan pemerintah Indonesia maupun di hadapan kaum Tionghoa.

Pemerintahan Soekarno menanggapi dengan baik usulan Chen Yi, khususnya tentang pengesahan UU dwi kewarganegaraan. Pertukaran ratifikasi pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan pun dilaksanakan di Beijing pada 20 Januari 1960. Meskipun demikian dalam hal repatriasi, Indonesia sama sekali tidak mau berkompromi. Bagi kaum Tionghoa yang ingin meninggalkan Indonesia, pemerintah Indonesia bahkan ‘memaksa’ mereka untuk segera keluar dari Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan orang Tionghoa yang akan meninggalkan Indonesia membawa barang-barang yang bisa dibawanya, dan menolak memberi kompensasi atas aset yang ditinggalkannya di Indonesia.³¹⁰ Dengan demikian kaum Tionghoa yang keluar dari Indonesia umumnya tanpa modal sama sekali, dan hal itu tentu saja mengecewakan pemerintah Cina. Tindakan pemerintah Indonesia itu kemudian sering diinterpretasikan sebagai peristiwa ‘pengusiran’ kaum Tionghoa dari Indonesia.

³⁰⁹ Badan Pengembangan dan Penelitian Departemen Luar Negeri dan FISIP USU, (Litbang Deplu & USU), “Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara RI-RRC, Kerjasama dan Tantangan-Tantangannya”, Jakarta : Departemen Luar Negeri RI (laporan Hasil Penelitian), hlm. 93-94

³¹⁰ Mozingo, David, (2007), *Chinese Policy toward...*, hlm. 174

Menghadapi sikap Indonesia tersebut, pemerintah Cina terpaksa harus menelan pil pahit. RRC menyadari bahwa, pendukung kuat Soekarno saat itu adalah PKI. Bila RRC tetap melakukan tekanan kepada pemerintah Soekarno, hal itu dapat menjadi bumerang. Selain itu RRC juga melihat bahwa, setelah mengetahui adanya peran AS dalam pemberontakan PRRI, Soekarno mulai mengarahkan diplomasinya ke Uni Sovyet. Padahal sejak sekitar tahun 1956 ketegangan antara RRC dengan Uni Sovyet terus meningkat. Cina dan USSR bahkan sedang bersaing untuk menanamkan pengaruhnya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki posisi penting di Asia Tenggara, karena itulah RRC tidak ingin kehilangan Indonesia. Bila Indonesia sampai jatuh ke dalam pengaruh USSR, maka hal itu akan membuat Cina malu dan kehilangan muka atau *diu mian*. Berlandaskan pertimbangan itu Cina segera menghentikan pemulangan kaum Tionghoa, dan bahkan menganjurkan kepada mereka untuk mematuhi semua peraturan yang ada di Indonesia.

Melunaknya sikap RRC itu tercermin dari pernyataan Menlu Chen Yi kepada para wartawan pada bulan Agustus 1960 yaitu, “Kami ingin memelihara persahabatan dengan Indonesia, masalah Cina perantauan hanyalah sebuah isu kecil (minor) dan kami berharap tidak akan menjadi besar ...”.³¹¹ Pernyataan itu harus diberikan RRC agar ketegangan antara kedua negara tidak berlanjut. Demi kepentingan nasional yang lebih besar yaitu terjaganya pamor atau kewibawaan RRC di dunia, maka RRC harus ‘mengalah’. Dari sudut konsep *mianzi*, langkah RRC itu merupakan bagian dari *baoquan mianzi*. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan internasional yang melingkupinya di tahun 1960-an, sikap RRC terhadap Indonesia terlihat semakin lunak. RRC semakin menguatkan dukungannya kepada pemerintahan Soekarno, sehingga terciptalah poros Jakarta-Beijing (Peking).

6.3 Pembekuan Hubungan Diplomatik

Setelah peristiwa yang berkaitan dengan PP 10 tahun 1959, RRC terlihat lebih berhati-hati dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Indonesia. Landasan sikap itu tentu saja bukanlah semata-mata karena RRC takut kehilangan

³¹¹ Arsip Kementerian Luar Negeri RRC no. 105-00985-03, dikutip dari Hong Liu, (2011), *China and The Shaping of Indonesia ...*, hlm. 180

muka lagi, melainkan karena perkembangan internal dan eksternal yang melingkupi kedua negara memungkinkan keduanya untuk saling mendekat. Era perang dingin, yang ditandai dengan semakin meningkatnya perseteruan di antara kubu sosialis dengan kapitalis di dunia, menyebabkan kawasan Asia Tenggara menjadi ajang perebutan pengaruh yang strategis. Posisi Indonesia di mata RRC pun semakin penting. Bukan hanya karena kepemimpinan Soekarno yang sangat anti imperialis dan kapitalis, namun juga karena di era awal tahun 1960-an itu RRC harus menjadi pemain tangguh dalam menghadapi dua pesaing utama sekaligus yaitu AS dan USSR.

Hubungan mesra dengan Indonesia itu tercermin dari terbentuknya poros Jakarta-Beijing. Sejak tahun 1960-an tersebut RRC seperti ‘memanjakan’ Indonesia. Hal itu juga berkaitan erat dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki PKI di Indonesia. Pada pemilu 1957 PKI berhasil menempati posisi ke empat, dan beberapa orang kadernya menjadi bagian dari kabinet. Kondisi politik Indonesia yang seperti itu menyebabkan Indonesia penting bagi kubu sosialis maupun kapitalis. Kubu kapitalis (AS dan sekutunya) tidak ingin kekuatan sosialis atau komunis terus berkembang. Sebaliknya kubu sosialis berkepentingan untuk terus meningkatkan kekuatan komunis di Indonesia. Cina sebagai negara sosialis yang sedang berkonflik dengan Uni Sovyet, tentu sangat ingin Indonesia berada di bawah pengaruhnya. Menjadi masuk akal bila Cina terlihat ‘memanjakan’ Indonesia. Hal itu antara lain dapat disimak dari kesaksian Soebandrio yang menyatakan,

“Pada akhir tahun 1963 saya selaku Waperdam dan Menlu berkunjung ke RRT... pimpinan RRT menawarkan kepada Indonesia bantuan peralatan militer untuk 40 batalyon tentara. Ini peralatan lengkap, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Hebatnya, semua itu gratis. Juga tanpa syarat.”³¹²

Dalam kesaksiannya Soebandrio juga menjelaskan bahwa meskipun Soekarno menerima tawaran tersebut, namun bantuan itu tidak segera diwujudkan. Masalah bantuan itu kemudian oleh kelompok Soeharto dijadikan ‘bukti’ keterlibatan RRC dalam G 30 S. Terutama karena pada tahun 1965 Soekarno pernah

³¹² Soebandrio, Dr. H., “Kesaksianku tentang G 30 S”, [PDF] xa.yimg.com/.../2676586-Kesaksianku-Tentang-G30S-oleh-DrSoebandrio, hlm. 9

melontarkan untuk membentuk ‘pasukan angkatan ke lima’. Pasukan itu akan memanfaatkan bantuan peralatan militer gratis yang dijanjikan RRC tersebut.

Bagi penelitian ini kesaksian Soebandrio tersebut telah menjadi bukti upaya keras Cina untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Dari sudut konsep *mianzi*, tindakan ‘memanjakan’ itu menunjukkan RRC sedang melakukan *mai mianzi* atau ‘membeli muka’. Ketika seseorang mampu ‘membeli muka’ orang lain, maka ia berharap suatu saat dapat menggunakan ‘muka yang dibelinya’ itu untuk kepentingannya. Hong Liu menggambarkan hubungan Cina-Indonesia di era tersebut dalam ungkapan, “RRC sedang berusaha dengan antusias untuk merebut hati dan pikiran bangsa Indonesia”.³¹³ Upaya RRC itu dilakukan secara simultan dari dua sisi. Di Indonesia melalui para diplomatnya, Cina berupaya keras untuk mempengaruhi opini publik dengan mempropagandakan citra baik dirinya. Di sisi lain Cina juga mengundang tokoh-tokoh Indonesia datang ke Cina untuk menyaksikan ‘kehebatan’ negerinya, dengan harapan mereka akan menyebarkan cerita itu ketika kembali ke Indonesia.

Tiga organ penting yang digerakkan RRC secara maksimal untuk meraih simpati masyarakat Indonesia adalah, Kedutaan Besar RRC di Jakarta, Penerbit Bahasa Asing (*Foreign Language Press - FLP*) dan Radio Peking, dan berbagai delegasi resmi maupun semi resmi yang didatangkan ke Indonesia. Masing-masing organ itu menjalankan tugas sesuai jalur dan bidangnya. Kedutaan Besar melalui duta besar dan para diplomat menjalin hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Mereka menjadi sumber informasi utama tentang Cina, khususnya bagi kalangan politisi dan intelektual. Propaganda melalui pemutaran film, penyediaan referensi tentang Cina, pertemuan dan kerjasama dengan berbagai organisasi lokal, menjadi bagian dari tugas mereka. Asosiasi persahabatan Cina-Indonesia adalah salah satu organisasi yang banyak bekerjasama dengan kedutaan besar RRC.

Sementara itu, organ penerbitan dan radio bertugas menterjemahkan, menerbitkan atau memproduksi, dan menyebarluaskan berbagai material untuk menggambarkan keberhasilan revolusi dan pembangunan Cina. Di Era 1950-1965, buku dengan topik tersebut yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia,

³¹³ Hong Liu, (2011), *China and The Shaping of Indonesia ...*, hlm. 155

menempati posisi terbanyak ke 2 setelah terjemahan ke bahasa Inggris, yang diterbitkan oleh FLP. Buku-buku itu disebarluaskan di Indonesia oleh *China International Book Company*, kedutaan dan konsulat RRC di Indonesia, toko-toko buku yang berafiliasi ke RRC maupun PKI, atau diberikan secara gratis sebagai hadiah ke perorangan maupun lembaga. Bahkan jurnal terkemuka RRC “*Peking Review*” pada tahun 1963 terbit pula dalam edisi bahasa Indonesia. Sedangkan berbagai delegasi yang didatangkan RRC, umumnya merupakan delegasi budaya. Mereka mempertunjukkan aneka karya seni Cina yang menggambarkan kehebatan dan kejayaan budaya Cina, ke berbagai wilayah Indonesia. Salah satu delegasi budaya RRC yang sukses adalah yang dipimpin oleh Zheng Zhenduo pada tahun 1955. Delegasi itu melakukan pertunjukan keliling Indonesia selama 54 hari, dan pertunjukan di setiap kota dihadiri tidak kurang dari 50.000 penonton.³¹⁴

Data-data di atas hanya sebagian dari upaya yang telah dilakukan RRC untuk merebut simpati bangsa Indonesia di era tahun 1960-an. RRC seperti tidak ‘berhitung’ ketika memberikan bantuannya kepada Indonesia. Selain di bidang politik dan budaya, hubungan ekonomi RRC-RI di era itu juga meningkat pesat. Tidak hanya dalam bentuk perdagangan yang saling menguntungkan, namun RRC juga banyak memberikan bantuan finansial, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman. Hal itu dapat dibuktikan dari jumlah hutang pemerintah orde lama yang harus dilunasi Indonesia ketika normalisasi hubungan diplomatik kedua negara akan dilakukan.

Sampai tahun 1965 hubungan kedua negara berjalan dengan sangat baik. Menjelang akhir tahun yaitu pada tanggal 30 September 1965, di Indonesia terjadi peristiwa berdarah yang menyebabkan tewasnya enam orang jenderal Angkatan Darat. Peristiwa itu kemudian diketahui merupakan gerakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa itu dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G 30 S PKI. Dalam upaya menghentikan kekacauan saat itu, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad), yaitu Jenderal Soeharto muncul sebagai pemimpin

³¹⁴ Hong Liu, (2011), *China and The Shaping of Indonesia ...*, bab 6. (Buku ini merupakan hasil penelitian yang sangat komprehensif. Di dalamnya memuat data yang amat kaya tentang upaya RRC merebut hati dan pikiran bangsa Indonesia.)

Indonesia yang baru. Soeharto kemudian menggantikan Presiden Soekarno yang mulai sakit-sakitan dan kehilangan legitimasi politiknya.

Soeharto yang mendapat dukungan penuh dari Angkatan Bersenjata RI (ABRI), sangat anti komunis. Soeharto dan ABRI sangat yakin bahwa PKI merupakan satu-satunya otak dan penggerak G 30 S. Keduanya juga yakin bahwa RRC tidak hanya telah mengetahui rencana PKI, tapi juga telah memberikan dukungannya kepada PKI untuk melakukan gerakan tersebut. Secara terang-terangan surat kabar di Indonesia menuliskan berita tentang keterlibatan RRC dalam G 30 S tersebut. Pemberitaan tersebut membangkitkan kembali pandangan negatif berbagai lapisan masyarakat Indonesia terhadap RRC. Apalagi kemudian kedutaan RRC di Jakarta menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan penguasa baru Indonesia. Salah satu sikap itu adalah kedutaan RRC tidak menurunkan benderanya menjadi setengah tiang, sebagai tanda bela sungkawa atas meninggalnya para jenderal dalam gerakan kudeta tersebut.³¹⁵ Gelombang protes yang digerakkan oleh para pemuda, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya ke Kedutaan Besar dan Kantor Perwakilan RRC tak dapat dibendung. Ketika kebencian terhadap RRC bangkit, maka kaum Tionghoa juga menjadi salah satu sasaran utama kaum demonstran. Kaum Tionghoa dianggap sebagai ‘antek-antek’ RRC dan pemasok dana bagi gerakan PKI. Tak ayal lagi maka sentimen anti Cina yang kemudian identik dengan anti Tionghoa pun kembali merebak hampir di seluruh Indonesia.

RRC menyangkal keras tuduhan Indonesia dan menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu sama sekali tentang gerakan tersebut. Pada tanggal 4 November 1965 RRC mulai mengajukan protes keras atas serangan para demonstran ke kantor-kantor perwakilan RRC di Indonesia dan meminta Indonesia untuk menyatakan permohonan maaf.³¹⁶ Indonesia tidak mengubris protes RRC tersebut, ketegangan hubungan Cina-Indonesia pun terus berlanjut. Hal itu juga terkait dengan perkembangan di dalam negeri RRC yang saat itu sedang melaksanakan revolusi kebudayaan atau *wenhua da geming*. RRC menyebut pemerintahan

³¹⁵ Kroef, Justus M van der, “The Sino-Indonesian Rupture”, *The China Quarterly*, (January-March 1968), Reprint in New York : American-Asian Educational Exchange. INC, hlm. 19

³¹⁶ 黄安余 (Huang Anyu), (2005), *新中国外交史 (Sejarah Diplomasi Cina Baru)*, Beijing : 人民出版社 (Penerbit Rakyat), hlm. 153-154 ; Kroef, Justus M van der, “The Sino-Indonesian Rupture” ..., hlm. 20

Indonesia saat itu sebagai bagian dari Fasisme. Contoh pemberitaan di Beijing tentang ‘serangan’ terhadap Kedutaan Besar RRC di Jakarta adalah seperti berikut,

“ 中国驻印度尼西亚大使馆工作人员赵小寿同志，在印度尼西亚右派势力武装袭击我大使馆的时候，赤手空拳保卫我国国旗，被印度尼西亚陆军部队开枪击中胸部，身负重伤。赵小寿同志在法西斯暴力面前正义凛然，奋不顾身地保卫我们伟大祖国的五星红旗，表现了对祖国对人民的无限忠诚，表现了毛泽东思想武装起来的中国人民的伟大爱国主义精神。”³¹⁷

“Kawan Zhao Xiaoshou yaitu staf Kedutaan Besar RRC untuk Indonesia, pada saat kelompok sayap kanan melakukan serangan bersenjata ke kedutaan besar RRC di Indonesia, mempertahankan bendera negara kita dengan tangan kosong, ditembak di bagian dada oleh tentara (AD) Indonesia, dan menderita luka parah. Kawan Zhao Xiaoshou di hadapan kekerasan militer fasis bersikap tegas, berjuang sekuat tenaga mempertahankan bendera merah dengan lima bintang milik negara kita yang jaya, telah menunjukkan kesetiaan tanpa batas kepada tanah air dan rakyat, telah menunjukkan semangat patriotisme tinggi yang dipersenjatai oleh pemikiran Mao Zedong”

Sepanjang tahun 1967 ketegangan hubungan itu semakin memuncak, terjadi balas membalas serangan fisik terhadap Kedutaan Besar RRC di Jakarta maupun terhadap Kedutaan Besar RI di Beijing. Bulan Februari 1967 pemerintah Indonesia mengusir Asisten Angkatan laut Kedutaan Besar RRC di Jakarta karena sikap bermusuhannya kepada pemerintah RI. Tindakan itu dibalas Beijing dengan mempersonanongratakan Atase Pertahanan KBRI Beijing pada akhir bulan yang sama. Selanjutnya, perilaku Kuasa Usaha RRC Yao Dengshan yang sedang menggantikan Duta Besarnya yang dipanggil pulang terkait *wenhua da geming*, turut memperkeruh suasana. Jakarta akhirnya mengusir Yao Dengshan, dan tindakan itu dibalas Beijing dengan mempersonanongrata dan mengusir pejabat Kuasa Usaha KBRI Beijing, Baron Sutadisastra.

Bulan Agustus 1967 sejumlah Pengawal Merah menyerang KBRI Beijing, dan kedubes RRC di Jakarta juga diserang oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia. Ketegangan mencapai puncaknya pada 1 Oktober 1967, saat itu terjadi lagi kerusuhan di Kedutaan Besar RRC di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa,

³¹⁷ “祖国尊严不可侮”（Kehormatan Negara Tidak Boleh Dilecehkan），解放军报（Harian Tentara Pembebasan），Beijing 20 April 1966, <https://dlib.castview.com/browse/doc/13982583>, diunduh pada 26 Juli 2010

dan peristiwa itu kemudian membawa pada keputusan pembekuan hubungan Cina-Indonesia. Pembekuan itu ditandai dengan diumumkannya penutupan KBRI Beijing oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1967, yang kemudian disusul dengan pengumuman penutupan Kedutaan Besar RRC di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1967.³¹⁸

Rangkaian reaksi keras Cina terhadap kecurigaan dan tuduhan yang dilontarkan Indonesia sehubungan dengan peristiwa G 30 S PKI mengesankan bahwa Cina merasa masih “punya kuasa” di Indonesia. Setelah berhasil ‘membeli muka’ melalui berbagai lapisan masyarakat Indonesia di sepanjang era 1960-1965, RRC tampaknya berharap hubungannya dengan Indonesia tidak hancur dengan mudah. Harapan itu tentu saja tidak bisa terwujud, karena Cina mengabaikan kenyataan bahwa rezim penguasa Indonesia telah berubah total. Pemerintahan Indonesia telah dikuasai Soeharto dan ABRI yang kemudian dinamakan sebagai pemerintahan Orde Baru. Andalan kekuatan RRC di Indonesia yaitu Presiden Soekarno dan PKI telah benar-benar kehilangan kekuatan dan legitimasinya. Soekarno telah terkucil, selain karena kondisinya yang sakit-sakitan juga karena seluruh kekuasaannya telah diambil alih. Sedangkan PKI telah dinyatakan sebagai partai terlarang. Tokoh-tokoh maupun simpatisannya diburu, ditangkap, dipenjarakan, dan bahkan ada yang dihukum mati. Ideologi komunis pun menjadi paham yang harus dikikis habis, tidak boleh dipelajari dimana dan oleh siapapun di Indonesia, bahkan sebagai kajian akademis sekalipun juga tidak diizinkan.

Setelah melihat kenyataan tidak bergemangnya sikap pemerintahan Orde Baru oleh segala tekanan yang dilakukannya, RRC pun menyadari bahwa posisinya ada di ambang *diu mian*. Telah terlambat baginya untuk bersikap manis kepada Indonesia. RRC telah terlanjur bereaksi tidak kooperatif terhadap penguasa baru Indonesia. Misalnya dengan tidak mengibarkan bendera setengah tiang, mengancam bahkan memprotes keras demonstrasi massa yang diarahkan kepadanya, dan membalas setiap tindak kebrutalan terhadap perwakilannya di Indonesia dengan melakukan hal yang sama terhadap perwakilan Indonesia di RRC. Pada saat itu dapat dikatakan gendang perang memang telah ditabuh oleh

³¹⁸ KBRI di RRC, *Informasi Singkat...*, 1996, hlm. 5

kedua belah pihak, masing-masing yakin dengan sikap yang diambilnya. Penutupan dan penarikan semua staf kedutaan besar Indonesia di Beijing, merupakan sikap permusuhan Indonesia yang menohok RRC. Sikap Indonesia itu telah membuat Cina ‘kehilangan muka’. Oleh karenanya seminggu kemudian RRC pun menutup dan menarik semua staf kedubesnya dari Jakarta. Dengan akhir peristiwa seperti itu, maka jalan terbaik bagi RRC untuk *baoguan mianzi* adalah dengan melepaskan Indonesia dan memberi cap fasis terhadap pemerintahan Indonesia yang baru.

6.4 Kunjungan Wu Xueqian

Wu Xueqian adalah menteri luar negeri RRC yang hadir dalam peringatan 30 tahun KAA, bulan April 1985. Kedatangan Wu di Indonesia merupakan kunjungan pejabat tinggi setingkat menteri pertama sejak dibekukannya hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Ketika rencana kehadiran Wu di Jakarta dan Bandung tersebut mulai diketahui publik, media massa cetak maupun elektronik di Indonesia ramai membahas berbagai kemungkinan hasil yang akan dicapai dari kunjungan tersebut. Terutama dikaitkan dengan prospek upaya normalisasi hubungan Cina-Indonesia. Sejumlah surat kabar bahkan menulis tajuk atau editorial yang secara khusus menganalisis masalah tersebut. Di antaranya, *The Jakarta Post* dalam editorialsnya menulis “Kunjungan ini dapat disebut sebagai akhir dari periode kerenggangan di antara kedua negara”.³¹⁹ Bahkan radio pemerintah Malaysia pun memberitakan bahwa, “Cina mengindikasikan kembali keinginannya untuk menormalisasi hubungannya dengan Indonesia”.³²⁰

Optimisme itu cukup beralasan karena sebelumnya pada bulan Januari 1985 Wu Xueqian telah bertemu dengan pimpinan KADIN di Singapura. Pada kesempatan itu KADIN juga telah melakukan pembicaraan pendahuluan dengan perwakilan perdagangan RRC di Singapura. Perkembangan itu menjanjikan prospek yang amat baik bagi terbukanya hubungan dagang langsung Cina-Indonesia. Sukamdani selaku Ketua KADIN bahkan mengirim utusan ke Beijing

³¹⁹ *The Jakarta Post*, 25 April 1985, Kroef, Justus M van der, *Asian Survey*, Vol. 26, No.8 (1986), hlm.909

³²⁰ FBIS, 1 April 1985, hlm. N2, dari Kroef, ibid. hlm. 910

untuk menindaklanjuti pembicaraan Singapura tersebut. Sampai bulan Maret 1985 masih ada beberapa hal penting yang belum bisa disepakati KADIN dan CCPIT, di antaranya tentang sebutan untuk negara Cina, tempat penandatanganan kesepakatan, dan yang paling pelik adalah permintaan CCPIT agar KADIN mempunyai 'mandat' dari pemerintah Indonesia.³²¹ Meskipun kendala-kendala itu belum tuntas, namun kedua pihak sama-sama berharap rencana hubungan dagang langsung itu akan mendapatkan wujud yang lebih kongkrit dalam kunjungan Wu ke Jakarta dan Bandung tersebut.

Harapan besar itu ternyata tidak terwujud. Jangankan pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, bahkan pertemuan KADIN dengan Wu Xueqian pun tidak terjadi. Sukamdani terpaksa melakukan perjalanan ke Jayapura-Irian Jaya. Hal itu dilakukannya hanya untuk memberikan alasan yang 'manis' atas tidak terjadinya pertemuan KADIN-Wu Xueqian yang semula sangat diharapkan itu. Persoalan yang lebih besar timbul, berkaitan dengan tidak terjadinya pertemuan khusus atau kunjungan kehormatan (*courtesy call*), antara Wu dengan Presiden Soeharto. Hal itu dengan segera mengundang perdebatan publik, banyak pihak menganalisis tentang berbagai alasan yang mungkin menyebabkan tidak terjadinya pertemuan tersebut.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengatakan bahwa penyebab tidak terjadinya pertemuan adalah karena Wu meminta bertemu pada tanggal 25 April. Sedangkan pihak istana kepresidenan menjadwalkan Wu akan diterima Presiden Soeharto pada keesokan harinya, yaitu tanggal 26 April 1985. Menlu Wu tidak bisa menunggu dan harus segera meninggalkan Indonesia. Meskipun sudah ada alasan resmi, namun analisis publik tentang hal itu terus berkembang. Di antaranya ada yang mengungkapkan bahwa hal itu disengaja pihak Indonesia. Kesengajaan itu berkaitan dengan pandangan Presiden Soeharto yang menganggap masih belum waktunya untuk membicarakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina.³²² Sedangkan isu yang beredar di Hongkong menyebutkan bahwa, tidak terjadinya pertemuan Wu-Soeharto adalah karena Wu tidak membawa surat permintaan maaf pemerintah Cina kepada Indonesia. Surat

³²¹ Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid Gitosardjono: Wirausaha Mengabdikan Pembangunan*, (Otobiografi), Jakarta : CV. Haji Masagung, hlm. 353-356

³²² Suryadinata, Leo, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia...* hlm137

itu diminta Indonesia berkaitan dengan keyakinan Indonesia atas keterlibatan RRC dalam peristiwa G30S PKI, pada tahun 1965.³²³

Mencermati berbagai alasan di atas, terlihat bahwa adanya unsur ‘kesengajaan’ dari pihak Indonesia adalah masuk akal. Terutama bila dikaitkan dengan pengakuan Sukamdani tentang penyebab yang benar atas tindakannya menghindari pertemuan dengan Wu, adalah karena adanya pesan Presiden Soeharto. Dalam biografinya Sukamdani mengisahkan bahwa, ketika ia melaporkan perkembangan upaya pembukaan hubungan dagang langsung kepada Soeharto, jawaban yang diterimanya adalah “tidak usah tergesa-gesa”.³²⁴ Sebagai orang Jawa dan orang yang cukup dekat dengan Soeharto, ia sangat paham maksud sebenarnya dari ucapan singkat Soeharto tersebut. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk menunda pertemuan dengan Wu Xueqian. Meskipun untuk itu Sukamdani harus mencari ‘alasan yang manis’ yaitu dengan meninggalkan Jakarta menuju Jayapura.

Dilihat dari sudut pandang RRC, adalah sangat tidak masuk akal bila Cina dalam hal ini Wu Xueqian melepaskan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Terlebih bila ia sudah tahu sebelumnya bahwa pertemuan itu sudah ditetapkan waktunya. Sedangkan tentang surat resmi yang berisi permintaan maaf berkaitan dengan peristiwa G 30 S PKI, Menlu Mochtar Kusumaatmadja telah membantahnya dengan tegas. Menurut Mochtar, Indonesia tidak pernah meminta hal seperti itu. Indonesia hanya meminta Beijing secara resmi menyatakan bahwa, telah menghentikan dukungannya kepada organisasi anti pemerintah di Asia Tenggara.³²⁵

Berlandaskan uraian di atas, dalam kasus ini sangat kental terasa adanya upaya kedua belah pihak untuk saling ‘menjaga muka’ atau *gu mianzi*. RRC tidak mau ‘kehilangan muka’ karena Wu Xueqian tidak diterima Soeharto. Dengan posisi internasional RRC yang saat itu semakin berkibar, pastilah ‘penolakan’ itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu untuk menunjukkan ‘harga dirinya’ Wu segera meninggalkan Indonesia yaitu hanya setengah jam sebelum jadwal pertemuan dengan Soeharto. Lebih menarik lagi, bila menyimak tanggapan Wu

³²³ Gao, Weinong (高伟农), “Indonesia-China relationship normalization: the driving force”, hlm. 5

³²⁴ Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid...*, hlm 366-369

³²⁵ Kroef, Justus M van der, “Normalizing with China :...”, hlm. 914

tentang keinginan Indonesia agar RRC menghentikan hubungan dan dukungannya kepada PKI maupun gerakan komunis di Asia Tenggara. Wu mengatakan bahwa, “adalah normal bila partai politik di satu negara berhubungan dengan partai seideologi yang ada di negara lain”. Wu pun menambahkan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah.³²⁶ Tanggapan Wu itu seperti ingin menegaskan bahwa, Cina adalah negara berdaulat yang mandiri, yang bebas melakukan apapun yang diinginkannya selama hal itu normal dan wajar.

Dari sudut konsep *mianzi*, langkah-langkah Wu Xueqian tersebut merupakan bagian dari upaya ‘menjaga muka’ atau *gu mianzi* untuk meningkatkan kewibawaan. Dalam kaitan kasus ini dengan memberi pemaknaan yang lebih luas, maka hal itu juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari *baoquan mianzi*. Sedangkan Indonesia sendiri melakukan ‘penolakan’ itu dengan cara yang amat halus, yakni ketidaksesuaian jadwal. Dengan cara seperti itu Indonesia telah berupaya untuk menjaga perasaan RRC atau *jiang mianzi*, yang dilandasi oleh keinginan untuk menghormati RRC atau *gei mianzi*, sehingga peristiwa itu tidak menimbulkan ketegangan lebih lanjut.

6.5 Perundingan Normalisasi Hubungan

Dalam bab 5 telah dipaparkan secara rinci bahwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia terjadi melalui proses yang rumit dan panjang. Perkembangan domestik dan internasional yang melingkupi kedua negara turut menentukan pasang surut proses normalisasi tersebut. Paparan dalam sub bab 5.2 telah menggunakan *mianzi* sebagai kerangka konseptual untuk mengungkap motivasi RRC dalam menormalisir hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Dalam sub bab ini paparan akan ditunjukkan untuk menunjukkan bagaimana konsep *mianzi* berfungsi dalam mempertajam pengungkapan motivasi Cina tersebut. Sesungguhnya tanpa menggunakan konsep *mianzi* pun motivasi itu dapat terungkap. Dengan menganalisis data-data yang tersedia dapat terungkap motivasi yang bersifat empiris. Adanya kepentingan strategis yang berkaitan dengan dominasi AS dan peran Indonesia di Asia Tenggara, adanya kepentingan ekonomi di antara Cina dan Indonesia, dan adanya tekanan sosial di lingkup

³²⁶Kroef, Justus M van der, “Normalizing with China :..., hlm. 910

domestik Cina berkaitan dengan peristiwa Tiananmen 1989, adalah beberapa motivasi empiris yang menyebabkan Cina menormalisir hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Analisis melalui kerangka konsep *mianzi* akan menggunakan data empiris untuk mengungkapkan motivasi yang bersifat psikologis.

Seperti bangsa-bangsa lain di dunia, dalam pengambilan keputusan tentang politik luar negerinya Cina pasti mempertimbangkan empat hal dasar yaitu, kekuatan yang dimilikinya, persepsinya terhadap perkembangan internasional, identitas atau posisinya di dunia, dan bentuk lingkungan internasional yang cocok dengannya.³²⁷ Dalam hal kekuatan, Cina cenderung melihat dirinya sebagai “kekuatan regional dengan pengaruh global”. Artinya, Cina sadar bahwa kekuatannya – secara ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, militer, dan lainnya – baru mampu untuk berperan di tingkat regional. Cina pun sadar bahwa ia mempunyai berbagai potensi yang menyebabkan ia tidak bisa diabaikan dunia. Potensi itu antara lain adalah, jumlah penduduk terbanyak di dunia, wilayah yang luas, sumber daya alam yang cukup, dan kejayaan masa lalu dengan warisan budaya yang tinggi dan beragam. Khusus berkaitan dengan kejayaan masa lalu dan warisan budaya yang tinggi, ternyata telah memberi Cina beban psikologis yang kompleks. Hal itu menyebabkan Cina dalam pergaulan internasional cenderung bersikap defensif dan reaktif terhadap masalah sekecil apapun yang menyangkut kepentingan nasionalnya.³²⁸ Hal itu pulalah yang menyebabkan Cina dalam pergaulan internasional dikenali sebagai “kekuatan yang tidak puas”.³²⁹

Sikap defensif dan reaktif itulah yang terlihat jelas ketika Cina menghadapi berbagai tekanan internasional dan domestik sehubungan dengan peristiwa Tiananmen 1989. Saat itu tekanan internasional terakumulasi dalam bentuk cacian, embargo, sanksi ekonomi, dan bahkan pengucilan. Sedangkan tekanan dari dalam negeri pada dasarnya merupakan tuntutan untuk transparansi dan kebebasan yang lebih luas. Semua tekanan itu diinterpretasikan Cina sebagai

³²⁷ Ni Feng, “*The Shaping of China Foreign Policy*”, dalam Kokubun Ryosei, Wang Jisi, (Eds.) (2004), *The Rise of China and a Changing East asian Order*, Tokyo ; New York : Japan Center for International Exchange, hlm. 139

³²⁸ Yusuf wanandi, “China and Asia Pacific Regionalism”, dalam Kokubun Ryosei, Wang Jisi, (Eds.) (2004), hlm. 38

³²⁹ Lihat pembahasan di sub bab 1.4

ancaman serius terhadap eksistensi bangsa dan kedaulatan negaranya. Kedua hal itu merupakan kepentingan nasional Cina yang paling mutlak, yang harus dibela dan diperjuangkan sekuat tenaga. Dalam kerangka konsep *mianzi*, eksistensi bangsa dan kedaulatan negara adalah bagian tak terpisahkan dari reputasi dan kehormatan bangsa dan negara. Membiarkan kedua hal itu terancam akan membuat bangsa dan negara Cina ‘kehilangan muka’ atau *diu mian*. Hal itu merupakan hal yang tidak boleh terjadi. Andaikan Cina terdesak dalam posisi itu, maka upaya ‘menyelamatkan muka’ atau *baoquan mianzi* harus dilakukan sekuat tenaga.

Deng Xiaoping adalah pemimpin RRC generasi ke dua. Meskipun secara ideologis ia seorang sosialis, namun sebagai orang Cina yang terpelajar Deng pasti paham tentang ajaran-ajaran Konfusius. Nilai-nilai budaya Cina seperti yang terkandung dalam konsep *mianzi* pasti juga tertanam dalam di jiwanya. Saat itu Deng merupakan pemimpin Cina yang paling berpengaruh. Dalam menghadapi kasus Tiananmen tersebut ternyata Deng telah mengambil sikap tegas yang tidak populer, yaitu menindas habis semua pihak yang dianggap dapat membahayakan kepentingan nasional Cina. Jelas terlihat Deng menyadari bahwa Cina ada di ambang *diu mian*. Oleh karena itu bagi Deng Xiaoping mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya yang berdemonstrasi dan kemudian tewas, terluka, atau ditangkap dan dipenjara, adalah para perusuh.³³⁰ Meskipun mereka berkata sedang memperjuangkan hak azasi dan kehormatan manusia, namun bagi Deng “di antara hak azasi manusia juga ada hak negara, di antara kehormatan juga ada kehormatan negara.”³³¹ Berlandaskan itu maka tindak kekerasan militer yang telah dilakukan Cina terhadap para demonstran di lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989, adalah sah adanya. Semua tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya *baoquan mianzi* yang harus dilakukan oleh bangsa dan pemerintah Cina dengan sekuat tenaga dan segala cara.

³³⁰Jean- Philippe Béja, (2009) “China Since Tiananmen ; The Massacre’s Long Shadow”, dalam *Journal of Democracy* , Vol. 20, No. 3, July 2009, hlm 5

³³¹ Ucapan Deng selengkapnya adalah, “人们支持人权。但不要忘记还有一个国权。谈到人格，不要忘记还有一个国格” (Manusia menjunjung hak azasi . tapi jangan lupa masih ada (sebuah) hak negara. Jika bicara tentang kehormatan, jangan lupa masih ada (sebuah) kehormatan negara), 邓小平 (Deng Xiaoping), (1989), “结束严峻的中美关系 要由 美国采取主动” (“Mengakhiri hubungan Cina-Amerika yang Kaku Harus dari Amerika Menerapkan Kesukarelaan” , dalam *邓小平文选*, 第三卷 (jilid III), hlm. 331

Semangat *baoquan mianzi* itu pula yang mendorong Cina melakukan segala cara untuk mengembalikan citranya di dalam maupun di luar negeri. Normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia adalah bagian penting dari upaya *baoquan mianzi* tersebut. Paparan berikut ini akan mengungkapkan rangkaian fakta sejarah yang menunjukkan bahwa, konsep *mianzi* telah berperan pada pola pikir dan tindakan para pemimpin Cina yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun perundingan tentang normalisasi hubungan tersebut.

6.5.1 Dari Sudut Temporal

Telah terungkap bahwa setidaknya sejak dicapainya kesepakatan CCPIT-KADIN untuk membuka hubungan dagang langsung pada tahun 1985, telah ada keinginan dari kedua belah pihak untuk menormalisasi hubungan. Keinginan itu mulai menjadi definitif ketika berlangsung pertemuan Presiden Soeharto dan Menlu Qian Qichen di Tokyo pada bulan Februari 1989. Kesepakatan untuk membicarakan peresmian normalisasi hubungan melalui perwakilan masing-masing yang ada di PBB ternyata tidak efektif. Bahkan dapat dikatakan tidak ada kemajuan yang berarti.

Situasi menjadi berbeda setelah terjadinya peristiwa Tiananmen Juni 1989. Menlu Qian langsung memanfaatkan kesempatan bertemu Menlu Alatas di forum konferensi Paris yang membahas penyelesaian konflik Kamboja pada bulan Agustus 1989. Dalam kesempatan itu Qian mengusulkan pembentukan kelompok kerja oleh masing-masing pihak yang akan merundingkan secara khusus upaya untuk mewujudkan normalisasi hubungan. Pembicaraan tingkat Menlu kemudian dilanjutkan di New York pada Oktober 1989. Dari sana bergulirlah perundingan-perundingan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja hingga akhirnya dicapai kesepakatan untuk meresmikan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Kemudian peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 1990 di Jakarta.

Keterpurukan akibat peristiwa Tiananmen 1989 secara psikologis telah membangkitkan tekad Cina untuk melakukan *baoquan mianzi*. Oleh karenanya ketika Cina diberi sanksi dan dikucilkan oleh AS dan Barat, RRC berupaya keras menggalang kekuatan melalui kerjasama dengan USSR dan negara-negara dunia

ke tiga.³³² Di bulan Maret 1990 RRC meresmikan hubungan diplomatik dengan Namibia, dan di bulan Juli dengan Saudi Arabia. Hubungan-hubungan itu tentu saja penting, namun efektifitasnya terhadap upaya menaikkan kembali Citra RRC tidaklah terlalu besar. Berbagai sanksi internasional khususnya yang diberikan oleh AS dan negara-negara maju (Eropa dan Jepang) pada tahun 1990 memang perlahan mulai dicabut. Melemahnya sikap AS dan Barat adalah berkaitan erat dengan sikap kooperatif Cina. Bulan Juni 1990 Cina akhirnya mengizinkan tokoh penggerak Tiananmen 1989 yaitu Fang Lizhi dan istrinya keluar dari Cina menuju Inggris. Pada bulan Juli 1990 dalam pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kelompok Tujuh (G7),³³³ AS memang mulai memberi tanda untuk melonggarkan sanksi terhadap Cina, namun efektifitas keinginan itu butuh waktu yang cukup panjang. Di samping itu Cina sendiri cenderung berhati-hati dalam menanggapi sikap AS. Cina mencurigai AS sebagai sumber dari gerakan ‘evolusi damai’ yang melahirkan gerakan Tiananmen 1989.³³⁴

Hasil yang didapat dari semua upaya di atas sangat berbeda dengan yang didapat RRC dari normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 18 bulan setelah normalisasi hubungan itu, RRC berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan seluruh pemerintahan di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik RRC-Singapura diresmikan pada bulan Oktober 1990, dengan Brunei Darussalam pada September 1991, dan dengan Vietnam pada bulan November 1991. Dengan keberhasilan itu maka peluang kerjasama RRC dengan ASEAN sebagai lembaga juga semakin terbuka lebar.

Paparan di atas merupakan bandingan kontras yang memperlihatkan bahwa dari sisi temporal dan efektifitas, normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia adalah keberhasilan diplomasi RRC yang paling cepat memberikan jalan keluar. Secara empiris RRC melihat dengan jelas peluang-peluang besar yang akan didapatnya dari normalisasi hubungan itu dan karenanya RRC termotivasi untuk mewujudkannya. Di sisi lain secara psikologis RRC menyadari

³³² Shambaugh, David, “China in 1990 : The Year of Damage Control”, *Asian Survey*, Vol. 31, No.1 (1991), hlm. 46

³³³ G 7 atau Kelompok Tujuh adalah perkumpulan tujuh negara industri maju yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama di antara mereka. Negara-negara anggota Kelompok Tujuh adalah AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis.

³³⁴ Lihat pembahasan di sub bab 5.2.1

bahwa ia harus melakukan segala cara untuk *baoquan mianzi*, karenanya RRC mengambil inisiatif untuk mempercepat proses normalisasi hubungan tersebut. Fakta itu terlihat dari inisiatif Qian Qichen sebagaimana terurai di atas.

6.5.2 Dari Sudut Prosedural

Baoquan mianzi yang menjadi motivasi psikologis bagi Cina dalam menjalankan kebijakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia, juga terlihat dalam langkah prosedural yang diambil Cina. Hal itu terlihat dari sikap kompromistis dan fleksibel yang ditunjukkan Cina dalam proses perundingan. Sikap itu menyebabkan prosedur perundingan menjadi lebih mudah. Di sisi lain hal itu juga menunjukkan adanya ketergesaan yang tentunya berkaitan erat dengan kebutuhan. Sesuai budaya politiknya RRC cenderung melihat permasalahan secara dialektis, yaitu di antara yang bersifat prinsipil dan fleksibel atau *yuanxexing* dan *linghuoxing*.³³⁵ Demikian juga ketika RRC menyikapi masalah-masalah yang menjadi kendala terwujudnya normalisasi hubungan Cina-Indonesia. Ada empat masalah yang bersifat prinsipil yaitu, 1) pengakuan satu Cina, 2) dukungan RRC terhadap PKI, 3) status kaum Tionghoa, dan 4) hutang Indonesia kepada RRC. Sedangkan masalah teknis administrasi dan seremonial, adalah masalah yang bersifat fleksibel.

Sikap RRC terhadap masalah-masalah yang prinsipil pun ternyata memiliki gradasi prioritas yang berbeda. Menyimak hasil akhir perundingan tentang masalah pengakuan satu Cina, ada yang sangat menarik di dalamnya. Masalah pengakuan satu Cina adalah masalah pengakuan terhadap kedaulatan Cina. Terlihat pada mulanya hasil maksimal yang diinginkan RRC terkait masalah kedaulatannya itu adalah, 1) Indonesia menerapkan kebijakan satu Cina, 2) Indonesia menghentikan semua hubungan dengan Taiwan, dan 3) Indonesia tidak menyebut RRC dengan kata Cina. Dari tiga keinginan RRC itu hanya satu yang dipenuhi Indonesia secara penuh yaitu kebijakan untuk mengakui satu Cina. Tentang hubungan dengan Taiwan, Indonesia hanya memenuhi setengah dari keinginan Cina yaitu tidak berhubungan secara penuh dengan Taiwan. Indonesia hanya akan menjalin hubungan ekonomi dan budaya saja dengan Taiwan.

³³⁵ Lihat sub bab 5.2

Sedangkan tentang cara menyebut nama negara, Indonesia sama sekali tidak memenuhi keinginan RRC tersebut.

Hasil seperti di atas pada saat itu sudah memuaskan Cina. Hal berbeda terjadi pada awal tahun 2000-an. Cina mulai memasalahkan kembali penggunaan kata 'Cina' di Indonesia. RRC bahkan sampai sekarang tetap 'memaksakan' penggunaan sebutan 'China' di Indonesia. Padahal dari sisi ejaan sebutan itu menyalahi sistem ejaan bahasa Indonesia. Perubahan sikap RRC atas masalah tersebut terlihat sangat kontras dengan sikapnya pada saat perundingan normalisasi hubungan. Kontrasnya sikap Cina tersebut menunjukkan adanya pengaruh konsep *mianzi* di dalamnya.

Dewasa ini RRC telah berkembang menjadi negara kuat dengan peran internasional yang mumpuni, karena itu berani dan mampu memaksakan kehendaknya kepada Indonesia. Sedangkan di tahun 1989-90 RRC sedang terpuruk, butuh teman, dan harus berjuang untuk menyelamatkan kedaulatan dan kehormatannya atau *baoquan mianzi*. Posisi tawarnya sedang tidak memungkinkan untuk 'memaksa' Indonesia. Sadar akan posisinya tersebut, maka RRC saat itu tidak memaksakan kehendaknya kepada Indonesia. Bila saat itu Cina tetap 'memaksa', bukan tidak mungkin Indonesia akan melakukan penolakan yang lebih keras. Penolakan seperti itu akan menyebabkan RRC kehilangan muka atau *diu mian*. Dengan demikian dapat dipahami mengapa tidak ada upaya RRC untuk memaksakan kehendaknya saat itu, dan memutuskan untuk fokus pada kesepakatan pengakuan satu Cina saja.

Sikap tidak ingin terhambat secara prosedural juga terlihat dalam penyelesaian ketiga masalah lain yang bersifat prinsipil, dan masalah-masalah yang bersifat fleksibel. RRC cenderung mengikuti yang diusulkan Indonesia. Sebagai gambaran dapat disebutkan di sini bahwa, terutama dalam hal penetapan waktu, tempat, dan teknis seremonial lainnya, hampir sepenuh RRC mengikuti yang diusulkan Indonesia.³³⁶ Hanya saja dalam masalah kecurigaan Indonesia bahwa RRC dan PKC masih memberi dukungan kepada gerakan PKI, dan kecenderungan RRC 'memanfaatkan' kaum Tionghoa, RRC menyikapinya dengan memberi jaminan penuh. Melalui pernyataan para pemimpinnya, RRC

³³⁶ Lihat Paparan rinci di sub bab 5.2 dan 5.3

menjamin sepenuhnya bahwa hal itu tidak perlu dirisaukan. Bahkan dikatakan bahwa “Cina tidak tahu sama sekali kalau PKI itu masih ada.” Hal itu harus dilakukan Cina karena kecurigaan adalah sama dengan ketidakpercayaan. Hilangnya kepercayaan mitra adalah bagian dari *diu mian*. RRC tentu tidak ingin hal itu terus berlangsung. Oleh karena itulah berulang kali RRC menegaskan bahwa landasan politik luar negerinya adalah Lima Prinsip Koeksistensi damai dan Dasa Sila Bandung, RRC tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

6.5.3 Dari Sudut Material

Pembahasan dari sudut material dilakukan berlandaskan hasil perundingan yang berkaitan dengan penyelesaian hutang Indonesia kepada RRC. Di sini juga terlihat bahwa semangat *baoguan mianzi* telah memotivasi Cina untuk melepaskan sejumlah dana yang cukup besar, dan memberi kemudahan dalam cara pembayaran hutang Indonesia. Semua dilakukan Cina untuk melancarkan perwujudan normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia.

Hutang Indonesia itu merupakan warisan pemerintah orde lama. Pinjaman Cina kepada Indonesia diberikan dalam kerangka kerja sama ekonomi dan perdagangan yang berlangsung pada era tahun 1950-1965. Dari berbagai dokumen kerja sama itu didapatkan data bahwa, menurut catatan pihak RRC jumlah hutang Indonesia kepada Cina termasuk bunga, seluruhnya adalah CHF 124.217. 299.61 dan GBP 8.126.829.34. Sedangkan menurut catatan pihak Indonesia jumlah seluruhnya adalah sebesar CHF 98.847.151.37 dan GBP 8. 126. 829.34.³³⁷ Terdapat perbedaan jumlah dalam dua catatan tersebut. Jumlah yang dikemukakan Cina jauh lebih besar dari yang diajukan Indonesia. Selisihnya bila dihitung dengan nilai tukar pada saat peresmian normalisasi adalah mencapai sekitar USD 84.000.000.³³⁸

Hasil akhir yang disepakati kedua belah pihak adalah, RRC setuju untuk menerima hasil penghitungan Indonesia. RRC juga sepakat untuk menerapkan

³³⁷ *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Settlement of Indonesia's Debt Obligations to The People's Republic of China*, pasal 1 poin b

³³⁸ Tokyo Kyodo, July 2, T 1990 in *FBIS-CHI-90-128*, July 3, 1990, h. 6.

‘Formula Paris’ sebagai cara pembayaran hutang Indonesia kepada RRC.³³⁹ Dengan demikian RRC telah merelakan nominal yang jumlahnya setara dengan USD 84.000.000, dan memberi kemudahan dalam cara pembayaran hutang tersebut. Sejak awal Indonesia sudah mengusulkan cara pembayaran dengan Formula Paris, karena cara itu meringankan pihak yang berhutang. Dengan formula itu Indonesia hanya wajib membayar ‘sisa pinjaman pokok’ dan ‘sisa bunga awal’.

Kemudahan lain yang diberikan Cina adalah diperbaruinya jadwal pembayaran. RRC memenuhi usul Indonesia yang meminta waktu selama 30 tahun untuk menyelesaikan semua hutang tersebut. Dengan demikian hutang Indonesia kepada Cina yang dibuat pada era Presiden Soekarno itu, rata-rata akan jatuh tempo pada tahun 1999. Pembayaran itu pun tidak harus seluruhnya dalam bentuk tunai, tapi dapat dikonversi ke komoditas ekspor Indonesia yang dibutuhkan Cina.³⁴⁰ Sikap RRC yang begitu kompromistis dan tidak terlalu ‘perhitungan’ dalam masalah finansial, mengingatkan pada sikapnya pada era 1960-an. Saat itu demi merebut hati dan pikiran bangsa Indonesia, Cina mengucurkan bantuan dalam berbagai bentuk, juga seperti tanpa ‘perhitungan’. Dari sudut konsep *mianzi* tindakan Cina itu dapat disebut sebagai *mai mianzi* atau ‘membeli muka’. Posisi Indonesia pada saat perundingan normalisasi hubungan berbeda dengan posisi di tahun 1960-an. Tindakan Cina dalam perundingan itu lebih mengarah ke sikap menghormati daripada membujuk. Oleh karenanya sikap Cina terhadap Indonesia saat itu, lebih tepat disebut sebagai *gei mianzi* atau ‘memberi muka’ bukan *mai mianzi*.

6.6 Simpulan

“*Mianzi*” yang mengandung makna kehormatan, prestise, gengsi, kewibawaan, dan kepercayaan, merupakan konsep budaya Cina yang nilai-nilainya terus terpelihara secara turun temurun. Bangsa Cina sendiri mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruh konsep itu dalam dirinya. Sejalan

³³⁹ *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on The Settlement of Indonesia’s Debt Obligations to The People’s Republic of China*, pasal 1 poin d

³⁴⁰ *Ibid*, pasal 4

dengan perjalanan sejarahnya yang pernah mengalami masa-masa kelam, hingga saat ini bangsa Cina dikenal sebagai bangsa yang sangat sensitif. Khususnya bila membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan bangsanya. Kedaulatan bangsa dan negara mengandung dimensi yang amat luas. Tidak hanya berkaitan dengan teritorial dan otonomi, namun juga terkait dengan semua aspek yang dikategorikan sebagai kepentingan nasional. Satu yang sudah pasti adalah bahwa masalah kedaulatan bangsa dan negara itu identik dengan kehormatan dan wibawa bangsa dan negara tersebut. Oleh karena itu bila bangsa Cina sangat sensitif terhadap masalah kedaulatannya, maka hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai *mianzi* telah mendarah daging dalam dirinya.

Sikap atau kebijakan Cina terhadap Indonesia di sepanjang sejarah hubungan RRC-RI yang dimulai sejak tahun 1950, memperlihatkan ada saat-saat di mana *mianzi* berperan atau berpengaruh di dalamnya. Setidaknya ada lima peristiwa sejarah dalam kurun waktu sampai tahun 1990 yang menunjukkan hal tersebut. Kelima peristiwa itu adalah pemanggilan pulang Dubes Wang Renshu, PP 10 Tahun 1959, Pembekuan Hubungan, Kunjungan Wu Xueqian, dan Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia. Terbentuknya sikap-sikap RRC itu tentu bukan secara murni hanya didorong atau dipengaruhi oleh nilai-nilai *mianzi* saja. Berbagai perkembangan internal dan eksternal yang melingkupi kondisi hubungan kedua negara tetap merupakan bukti-bukti empiris yang menjadi pertimbangan utama dalam penelitian ini. Konsep *mianzi* memberinya kerangka pendekatan psikologis yang bersumber dari nilai-nilai budaya untuk mengenali sikap atau kebijakan yang diambil RRC. Dengan cara seperti itu pemahaman atas sikap atau kebijakan RRC terhadap Indonesia dalam peristiwa-peristiwa tersebut menjadi lebih dalam.

Dari paparan di atas ditemukan fakta bahwa, bagi bangsa Cina *diu mian* atau 'kehilangan muka' adalah sesuatu yang paling dihindari. Bila situasi sudah menunjukkan gejala-gejala akan terjadinya *diu mian*, maka langkah-langkah untuk *baoquan mianzi* pasti segera dilakukan dengan mengerahkan segenap tenaga dan segala cara. Upaya *baoquan mianzi* untuk mempertahankan atau menunjukkan kewibawaan dan kedaulatan bangsa dan negara adalah sebuah tindakan heroik. Pada masing-masing peristiwa yang terjadi dalam sejarah

hubungan Cina-Indonesia, pengaruh nilai-nilai itu muncul dalam variasi bentuk dan kadar yang berbeda. Khusus dalam peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia yang terjadi pada tahun 1990, tuntutan untuk *baoquan mianzi* telah menjadi motivasi psikologis utama, sehingga melancarkan proses perwujudan peristiwa penting tersebut.



BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Tujuan utama penelitian dan penulisan disertasi ini adalah mengungkapkan motivasi utama yang mendorong Cina untuk menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, dan memperhatikan peran konsep *mianzi* di dalamnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan keterkaitan mikro-makro untuk menginterpretasikan politik luar negeri RRC yang dikembangkan oleh Zhao Quansheng. Dengan pendekatan yang bersumber dari ilmu Hubungan Internasional tersebut analisis harus memperhatikan secara komprehensif pengaruh berbagai perkembangan di level makro (internasional dan domestik) terhadap perubahan prioritas politik luar negeri RRC, yang tercermin dalam kebijakan yang diambilnya di level mikro (proses pengambilan keputusan). Pekatan pada adanya keterkaitan antara perkembangan di level makro dengan yang diputuskan di level mikro menyebabkan analisis dapat dilakukan secara bolak-balik. Dalam praktiknya hal itu berguna untuk merasionalisasikan hubungan di antara keduanya, sehingga pengungkapan fakta menjadi lebih akurat.

Analisis yang mengaitkan perkembangan internasional dan domestik (level makro) yang melingkupi Cina pada era 1980-1990 yang terinci dalam dimensi simbolik, institusional dan rejim, dengan kebijakan RRC tentang normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia (hasil di level mikro), telah mampu mengangkat gambar besar dari motivasi Cina dalam mewujudkan normalisasi hubungan tersebut. Termasuk gambaran tentang proses pengambilan keputusannya yang fleksibel, rasional, dan kooperatif. Motivasi itu terangkum dalam variabel faktor strategis, ekonomi, dan sosial. Gambar besar motivasi tersebut merupakan fakta-fakta empiris yang digali dan dianalisis dari data-data yang tersedia dalam bentuk arsip, buku, makalah, berita, dan sebagainya. Kerangka konsep *mianzi* berperan mengangkat aspek psikologis yang bersumber dari nilai-nilai budaya. Dari sana muncul tampilan ‘gambar’ motivasi yang lebih tajam yaitu semangat untuk *baoquean mianzi* atau ‘menyelamatkan muka’.

Nilai-nilai ‘kehormatan’ yang dikandung konsep *mianzi* mempunyai akar yang amat kuat dalam budaya Cina yaitu Konfusianisme. Nilai-nilai itu pun telah

meresap dalam alam pikiran bangsa Cina. Wang Gungwu seorang ahli tentang Cina mengatakan bahwa, “meskipun nilai-nilai budaya Cina di kalangan generasi muda terlihat merosot, namun nilai-nilai yang telah diwariskan turun temurun selama ribuan tahun pasti tetap mengakar.” Pada dasarnya nilai-nilai budaya itu dimiliki seseorang melalui proses penyerapan dari kehidupan sehari-hari. Secara perlahan tapi pasti nilai-nilai itu akan melekat, walaupun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda pada setiap individu. Secara sadar ataupun tidak setiap orang Cina pasti memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *mianzi* tersebut dalam gerak langkah kehidupan sosialnya, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Kebijakan normalisasi hubungan diplomatik adalah menyangkut hubungan dua negara yang dijalankan oleh aktor (dalam hal ini para pejabat) yang mendapatkan mandat dari negara masing-masing. Oleh karenanya kerangka konsep *mianzi* sangat tepat digunakan dalam penelitian ini.

Memasuki tahun 1980-an di bawah kendali Deng Xiaoping Cina semakin kuat tekadnya untuk mencapai kejayaan dengan mengubah pola operasional modernisasi. Perubahan itu adalah dari revolusi menjadi reformasi dan keterbukaan (*gaige kaifang*). Semangat reformasi mampu menggerakkan perubahan secara masif, dimulai dari pelonggaran ideologi dengan mengusung retorika sosialisme berkarakter Cina dan tahap awal sosialisme. Dibarengi dengan perubahan secara institusional dengan menyesuaikan atau membuat sejumlah aturan dan lembaga untuk menunjang *gaige kaifang*. Ditambah lagi dengan upaya mendorong rakyat untuk mengembangkan diri. Berbagai slogan pun dipopulerkan di antaranya, “tidak peduli kucing hitam atau putih yang penting bisa menangkap tikus” ataupun “menjadi kaya itu mulia” dan slogan-slogan senada lainnya. Propaganda dengan slogan-slogan seperti itu dibarengi dengan tingkat persaingan hidup yang semakin ketat perlahan tapi pasti telah mengembangkan sikap pragmatis dalam masyarakat Cina.

Menjelang akhir tahun 1980-an ketidakseimbangan laju reformasi di antara berbagai bidang, menyebabkan perekonomian Cina guncang, kehidupan rakyat sulit, dan muncul tuntutan kebebasan di bidang sosial-politik. Akumulasi dari kekecewaan dan semakin luasnya tuntutan kebebasan, menyebabkan terjadinya protes massal yang berujung pada peristiwa berdarah Tiananmen 4 Juni 1989.

Tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap para demonstran, menimbulkan reaksi keras dari berbagai negara di dunia, khususnya dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Peristiwa Tiananmen 1989 mengacaukan stabilitas dan pembangunan dalam negeri serta menyudutkan posisi Cina di dunia. Di rentang waktu yang sama muncul kecenderungan perubahan konstalasi kekuatan internasional dari bipolar menjadi multi polar karena melemahnya pusat kekuatan sosialis-komunis. Kecenderungan regionalisasi yang tidak hanya berlandaskan geografis namun juga berlandaskan kepentingan nasional masing-masing negara pun berkembang pesat.

Guncangan beruntun dari dalam dan luar negeri itu berdampak sangat negatif terhadap Cina khususnya terhadap laju pembangunan ekonominya. Sikap negara-negara Barat terhadap RRC sehubungan dengan peristiwa Tiananmen dianggap sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negeri Cina. RRC menginterpretasikan berbagai tekanan dari dua arah itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan Cina dan eksistensi sosialisme di dunia. Ada beban ganda yang harus ditanggung RRC saat itu yakni mempertahankan dan menaikkan kembali eksistensinya dan membuktikan kemampuannya untuk menjadi alternatif tumpuan kekuatan sosialis-komunis di dunia. Dengan beban seperti itu RRC membutuhkan suatu kekuatan luar biasa yang dapat mendorongnya untuk bangkit.

Pemerintah Cina butuh suatu cara yang efektif untuk menghimpun kembali kepercayaan rakyat di dalam negeri dan untuk mengembalikan citranya di luar negeri. Seruan untuk membangkitkan nasionalisme saja tidaklah cukup, namun semangat yang dikandung *baoguan mianzi* mampu mengemas semua tujuan itu. Bagi rakyat Cina *baoguan mianzi* dalam konteks menyelamatkan kehormatan dan kedaulatan bangsa mempunyai makna yang lebih dalam daripada nasionalisme. Hal itu berhubungan erat dengan *qiangguomeng* atau ‘mimpi (menjadi) negara kuat’ yang bebas dari tekanan kekuatan atau negara manapun. ‘Mimpi’ itu tumbuh seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Cina sejak perang candu pertama yang terjadi pada tahun 1839-1842. Kekalahan Cina dalam perang melawan Inggris itu menjadi awal masuknya Cina ke era ‘*hypo colony*’.³⁴¹ Era yang amat

³⁴¹ Istilah itu menggambarkan kondisi Cina di akhir abad ke 19 yang beberapa wilayahnya dikuasai oleh berbagai bangsa Barat sebagai wilayah konsesi. Sun Yatsen mengatakan bahwa saat itu Cina tidak hanya dijajah oleh satu negara tapi oleh beberapa negara sekaligus.

menyakitkan dan memalukan itu melahirkan semangat dan ‘kegeraman’ yang mampu membuat bangsa Cina sampai sekarang amat sensitif terhadap masalah kedaulatan atau kehormatan negara dan bangsanya

Nasionalisme yang dikemas dalam semangat *baoguan mianzi* itu bangkit bersamaan dengan kecenderungan masyarakat Cina yang semakin pragmatis. Slogan berbasis kehormatan dan kedaulatan bangsa menjadi alat yang amat efektif untuk merebut kembali hati rakyat Cina. Deng Xiaoping dan PKC mengobarkan semangat itu melalui gerakan patriotisme atau *aiguozhuyi*. Seruan “kedaulatan negara harus ditegakkan” secara internal membangkitkan kesetiaan tidak hanya kepada negara tapi juga setia atau taat kepada rejim pemerintahan yang mengelola negara, dan itu berarti legitimasi bagi PKC. Sedangkan secara eksternal, tekad *baoguan mianzi* tersebut diartikan sebagai RRC harus mampu dengan segera mengembalikan citranya di dunia.

Strategi diplomasi baru harus segera ditetapkan. Deng dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa terhadap perkembangan internasional yang berkembang saat itu Cina harus, “amati dan analisa situasi dengan tenang, stabilkan posisi, hadapi dengan percaya diri. jangan tergesa-gesa, harus tenang, tenang, dan sekali lagi tenang”.³⁴² Pesan utama dari strategi itu adalah Cina harus mengkonsolidasikan kemampuan dan kekuatannya untuk bangkit tanpa panik. Strategi itu kemudian diformulasikan dalam bentuk semakin tinggi mengangkat Lima Prinsip Koeksistensi Damai dan Dasa Sila Bandung dalam upaya mencari teman sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teman yang dapat direngkuh semakin baik citra Cina di dalam negeri maupun secara internasional. Pembukaan hubungan diplomatik dengan Namibia pada Maret 1990 dan dengan Saudi Arabia pada 1 Juli 1990 adalah keberhasilan awal diplomasi RRC pasca peristiwa Tiananmen 1989. Proses normalisasi hubungan Cina-Indonesia yang saat itu masih jalan di tempat mendapatkan momentum yang amat tepat untuk segera diwujudkan. Sejak Agustus 1989 sikap Cina yang semula sabar menunggu merubah menjadi penuh inisiatif dan pro aktif.

³⁴² “... 冷静观察, 稳住阵脚, 沉着应付。不要急也急不得, 要冷静, 冷静, 再冷静, ...。”邓小平 (Deng Xiaoping), (1989), “改革开放稳定, 中国大有希望” (“Reformasi dan Keterbukaan Stabil, Cina mempunyai harapan besar”), dalam 邓小平文选, 第三卷, (jilid III), hlm. 320-321

Normalisasi hubungannya dengan Indonesia adalah sebuah keberhasilan beruntun. Saat itu posisi internasional Indonesia memang sangat strategis, terutama sehubungan dengan perannya yang amat penting di ASEAN maupun dalam upaya menciptakan Asia Tenggara sebagai kawasan damai. Terwujudnya normalisasi hubungan diplomatik Cina dengan Indonesia yang pembicaraannya sudah diawali sejak bulan Februari 1989 memberi peluang yang amat besar bagi Cina. Setelah normalisasi hubungan itu dalam tenggang waktu yang relatif singkat RRC dapat kembali menunjukkan eksistensinya secara regional maupun internasional.

Secara khusus hal itu berkaitan pula dengan sikap Singapura yang tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan RRC sebelum Indonesia melakukannya. Peresmian hubungan dengan Singapura terwujud hanya selang beberapa bulan setelah peresmian normalisasi hubungan dengan Indonesia yaitu pada 3 Oktober 1990. Sedangkan hubungan diplomatik Cina-Brunei diresmikan pada 30 September 1991. Sekitar dua bulan kemudian setelah upaya penyelesaian konflik yang cukup panjang, Cina juga menormalisasi hubungannya dengan Vietnam yaitu pada bulan November 1991. Dengan demikian dalam waktu sekitar 18 bulan setelah menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, RRC telah menjalin hubungan resmi dengan semua negara anggota ASEAN dan negara-negara di Indocina yang pada saat itu belum menjadi anggota ASEAN.

Terjalannya hubungan diplomatik antara RRC dengan semua negara di kawasan Asia Tenggara, telah mengamankan posisinya di kawasan tersebut. Posisi aman itu kemudian membawa pula dampak lanjutannya yaitu memberi RRC peluang untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN sebagai lembaga. Posisi tersebut memungkinkan Cina berperan dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) serta *ASEAN-Europe Meeting* (ASEM). Setelah itu kerjasama RRC dengan ASEAN pun menjadi semakin lancar sehingga kemudian RRC menjadi bagian dari apa yang disebut ASEAN + 3 yang terbentuk tahun 1997. Selanjutnya berkembang lebih jauh lagi menjadi ASEAN + 6 dan seterusnya. RRC benar-benar memanfaatkan peluang yang ada untuk terus mengembangkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara umumnya dan dengan ASEAN khususnya.

Posisi Asia Tenggara penting bagi RRC bukan hanya dari segi ekonomi yang berhubungan dengan tersedianya pasar yang luas dan bahan baku yang

melimpah. Secara strategis saat itu di Asia Tenggara setidaknya ada dua kekuatan dunia yaitu Amerika Serikat dan Jepang yang sedang bersaing dengan RRC. Ketiganya berkepentingan untuk meraih simpati bangsa-bangsa di kawasan tersebut. Selain itu semakin kuatnya perekonomian Taiwan juga menjadi ancaman tersendiri bagi RRC dalam menjaga posisinya di Asia Tenggara. Berlandaskan itu maka dapat dimengerti bila kemudian RRC sangat gencar menawarkan kerjasama di berbagai bidang dengan ASEAN maupun anggota-anggotanya secara individual.

Dalam hal kerjasama dengan ASEAN sebagai lembaga, tercatat sejak tahun 2000 Perdana Menteri Zhu Rongji terus menawarkan konsep area perdagangan bebas bagi Cina dan ASEAN. Usulan Zhu telah melahirkan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) pada tahun 2001. Kesepakatan itu kemudian disusul pula oleh dua perjanjian lainnya yang ditandatangani RRC dengan ASEAN. Kedua perjanjian tersebut ditandatangani di Phnom Penh pada tahun 2002, yaitu perjanjian yang membekukan konflik di Laut Cina Selatan (Kepulauan Spartyly)³⁴³ dan perjanjian membuka pasar Cina untuk negara-negara ASEAN dalam perjanjian pasar bebas.³⁴⁴ Semua langkah itu semakin memperlihatkan usaha RRC untuk mendekati diri dengan ASEAN. Kalau ditarik lebih jauh lagi, maka lanjutannya adalah pada Oktober 2004 Cina akhirnya diterima sebagai sahabat ASEAN dengan ditandatanganinya “*Strategic Partnership for Peace and Prosperity*” pada perundingan puncak di Bali. Disusul pula dengan “*ASEAN Treaty of Amity and Cooperation*.” (TAC). Dengan demikian Cina telah memperlihatkan diri kepada dunia bahwa ia tidak menakutkan dan mau diikat dalam perjanjian-perjanjian kerjasama. Cina juga siap menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Dalam istilah Kurtlantzick Cina telah mengembangkan *charm diplomacy*.³⁴⁵

Meningkatnya pengaruh Cina di Asia Tenggara tentu saja meningkatkan pula posisi tawar Cina di dunia. Terlebih lagi kemudian RRC juga bisa

³⁴³ “*Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea*”

³⁴⁴ “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People’s Republic of China*”

³⁴⁵ *Charm diplomacy* adalah sebuah model diplomasi untuk menepis persepsi “ancaman” dengan mengembangkan *soft power* berupa sikap yang bersahabat dengan negara-negara seluruh dunia, terutama yang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lih. Joshua Kurtlantzick, 2007, *Charm Offensive: How China’s Soft Power is Transforming the World*, New Haven: Yale University Press

menyelesaikan masalah pengembalian Hongkong dari tangan Inggris, dan Makao dari tangan Portugis ke pangkuannya tanpa gejolak yang berlebihan. Seiring dengan kembali stabilnya pembangunan ekonomi RRC, maka posisinya di Asia Timur juga semakin kuat. RRC adalah salah satu negara yang mampu bertahan ketika terjadi krisis ekonomi global tahun 1997-1998. Cina bahkan mampu memberikan bantuan kepada negara-negara tetangganya yang menderita parah karena krisis tersebut terutama kepada Thailand dan Indonesia. Tahun 2001 RRC akhirnya diterima sebagai anggota organisasi perdagangan dunia atau WTO. Cina juga berhasil ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2008 yang dilaksanakan di Beijing, dan menjadi tuan rumah pameran dagang sedunia yang dilaksanakan di Shanghai pada tahun 2010. Semua itu menandai semakin kokohnya posisi RRC di dunia. Salah satu landasan pertamanya terjadi pada tahun 1990 yaitu normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Rangkaian fakta keberhasilan RRC di atas merupakan suatu pembuktian terbalik untuk memperkuat bukti-bukti yang telah terungkap sebelumnya. Bila diasumsikan bahwa berbagai keberhasilan itu telah menjadi bagian dari perspektif RRC atas posisi strategis Indonesia, maka menjadi semakin masuk akal bila dalam perundingan proses normalisasi sikap RRC sangat kooperatif.

Indikator adanya peran konsep *mianzi* khususnya dalam proses perundingan, terlihat dalam rangkaian fakta berikut. Setelah masalah yang prinsipil yaitu pengakuan satu Cina tercapai, RRC cenderung 'mengalah' dalam penyelesaian hal-hal lainnya. Tidak ada keberatan untuk sebutan 'Cina' bagi negaranya, juga tidak keberatan bila Indonesia menjalin hubungan terbatas dengan Taiwan. RRC juga memberi jaminan penuh atas sikapnya yang tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Khususnya sehubungan dengan kekhawatiran Indonesia atas hubungan RRC dan PKC dengan gerakan komunis maupun hubungan RRC dengan kaum Tionghoa. RRC juga merelakan selisih perhitungan hutang Indonesia yang mencapai jumlah sekitar USD 84 juta dengan cara pembayaran yang ringan sesuai keinginan Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan teknis seremonial RRC juga cenderung mengikuti keinginan Indonesia. Padahal seharusnya hal itu pun penting bagi pencitraan sebuah negara.

Posisi di ambang *diu mian* pada akhir tahun 1980-an menyebabkan RRC harus sekuat tenaga melakukan *baoquan mianzi*. Berbagai terobosan harus dibuat untuk menyelamatkan kehormatannya. Potensi strategis dan ekonomi yang dimiliki Indonesia telah terbukti secara empiris merupakan motivasi yang mendorong RRC untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Semangat untuk *baoquan mianzi* telah memperkuat motivasi tersebut. Hal itu terbukti dari sikap kooperatif dan kompromistis yang ditunjukkan RRC dalam perundingan. Delegasi Cina fokus hanya pada hal yang amat prinsipil yaitu pengakuan satu Cina. Sedangkan hal-hal lainnya menjadi masalah yang dapat dikompromikan dengan tingkat keeluasaan dan kelenturan yang amat tinggi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia cepat atau lambat pasti terwujud. Meskipun demikian, bila saat itu RRC tidak dalam semangat *baoquan mianzi* maka sikap RRC terhadap masalah normalisasi hubungan itu umumnya dan dalam perundingan khususnya pasti tidak akan sedemikian fleksibel, kompromistis, dan kooperatif. Berbagai peran dan pengaruh konsep *mianzi* yang terlihat dalam sikap-sikap RRC terhadap Indonesia di periode 1950-1990 yang telah diuraikan dalam bab 6 dapat menjadi acuan dari kesimpulan tersebut. Di sisi lain semangat *baoquan mianzi* telah menunjukkan makna yang amat positif bagi pembentukan karakter bangsa. Sebagaimana yang telah terlihat dalam sikap Cina yaitu, mendahulukan kepentingan nasional yang mencakup kehormatan bangsa dan negara di dalamnya daripada kepentingan lainnya.

7.2 Catatan Replektif

Normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia telah menjadi terobosan bagi RRC dalam menata kembali posisi internasionalnya. Hal itu juga bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang menjadi bagian utama dari program *gaige kaifang*. Keberhasilan itu pada akhirnya akan menegaskan kembali eksistensi RRC di dunia. Normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia tentu saja bukanlah satu-satunya landasan yang memungkinkan Cina lebih cepat bangkit

dari keterpurukannya. Meskipun demikian tidak bisa pula diartikan bahwa manfaat atau perannya dalam mengembalikan citra atau kebangkitan kembali Cina tidak signifikan. Rangkaian keberhasilan diplomasi dan peran Cina di kawasan Asia seperti yang terpapar di atas adalah bukti bahwa normalisasi hubungannya dengan Indonesia telah memberi peluang beruntun. Berlandaskan fakta tersebut selayaknyalah bila RRC bisa lebih 'jujur' ketika menjelaskan posisi Indonesia dalam sejarah diplomasinya.

Sesungguhnya, hubungan diplomatik yang normal memang dibutuhkan baik oleh Cina maupun Indonesia. RRC adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Potensi kerjasama untuk saling menguntungkan kedua belah pihak bukan hanya di bidang ekonomi. RRC yang aman dan sejahtera juga akan sangat menguntungkan bagi kemajuan dan perdamaian regional maupun global. Dalam sejarah hubungan kedua negara ada beberapa hal yang patut membuat Indonesia merasa 'malu' terhadap Cina. Misalnya masalah hutang yang terbengkalai, rasa curiga yang berlebihan, dan lain-lain. Meskipun demikian memperhatikan begitu pentingnya posisi Indonesia dalam pengembangan politik luar negeri RRC, maka sudah selayaknya Indonesia tampil lebih percaya diri dan lebih tegas dalam menghadapi strategi diplomasi RRC.

Peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia merupakan satu lagi bukti bahwa secara historis posisi tawar Indonesia terhadap RRC adalah sangat berarti. Ada sejumlah fakta historis lainnya tentang peran atau bahkan dapat disebut sebagai 'jasa' yang telah diberikan Indonesia dalam momentum kemunculan maupun kemunculan kembali RRC di kancah pergaulan internasional. Pertama, ketika RRC baru berdiri (1 Oktober 1949) Indonesia adalah salah satu dari 17 negara pertama yang bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan RRC, bahkan Indonesia lebih dulu mengajukannya. Saat itu sesungguhnya Indonesia belum lepas dari trauma peristiwa gerakan PKI di Madiun (1948), sehingga masih banyak tokoh maupun kelompok masyarakat yang menentang pengakuan terhadap RRC tersebut. Bung Hatta berpendapat sebagai negara yang menganut politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia harus konsisten untuk mengakui dan berhubungan dengan RRC meskipun negara itu berideologi komunis.

Ke dua, pada tahun 1955 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Perdana Menteri Zhou Enlai telah mengambil kesempatan itu untuk menampilkan sisi baik Cina. Pidato Zhou telah berhasil menarik simpati bangsa-bangsa Asia Afrika secara mendalam terhadap Cina. Padahal, saat itu RRC masih menjalankan kebijakan *yibian dao* atau condong ke satu sisi yaitu ke Uni Sovyet. RRC juga sedang berada dalam kepungan politik pembendungan Amerika Serikat. Setelah KAA tak dapat disangkal bahwa gerak langkah Cina semakin mendapat perhatian dunia. Momentum ke tiga adalah pada tahun 1971 yaitu saat diterimanya RRC sebagai anggota PBB menggeser Republik Cina (Taiwan). Indonesia tetap mendukung RRC walaupun hubungan di antara keduanya masih beku. Saat itu yang menjadi pimpinan Sidang Umum PBB adalah Adam Malik yang tak lain dan tak bukan adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Posisi Adam Malik itu pasti berpengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan di forum dunia tersebut.

Diakui atau tidak, disengaja atau tidak, besar ataupun kecil peran atau jasa yang telah diberikan Indonesia dalam setiap momentum kemunculan ataupun kemunculan kembali Cina di kancah pergaulan dunia, selayaknya dapat menjadi landasan penting bagi terjalinnya hubungan yang lebih bermakna di antara kedua negara. Setidaknya, tidak ada alasan bagi Cina untuk berlaku 'sombong' dan tidak ada pula alasan bagi Indonesia untuk merasa *minder* (rendah diri). Indonesia harus lebih tegak dan tegas ketika berhadapan dengan RRC, meskipun saat ini posisi ekonomi dan peran internasional Cina telah jauh meninggalkan Indonesia.

Ketika hubungan Cina-Indonesia sangat erat di tahun 1960-65, Cina telah menggunakan segala dayanya untuk merebut hati bangsa Indonesia. Dewasa ini dengan posisi Indonesia sebagai 'mitra strategis' bagi Cina, tampaknya RRC sedang menggunakan kuasa lunaknya kepada Indonesia. Sudah selayaknya Indonesia belajar dari sejarah. Jangan menghadapi RRC dengan rasa curiga. Sikap bersahabat yang ditopang dengan kemampuan bersaing secara sehat dan beretika akan lebih efektif untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di hadapan RRC. Indonesia harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Cina sebaik mungkin agar mampu mencapai kemajuan sebagaimana yang telah dicapai Cina, atau bahkan melampauinya kalau bisa. Selain itu jangan melihat Cina hanya dari sisi

ideologi dan strategi politiknya saja, namun pahami pula pengaruh nilai-nilai budaya yang sudah melekat dalam diri bangsa Cina agar komunikasi menjadi lebih lancar dan target diplomasi tercapai secara maksimal.

Dalam proses perundingan terlihat bahwa sikap Cina sangat kooperatif, fleksibel, pragmatis, dan rasional. Dari sisi pendekatan keterkaitan mikro-makro sikap itu adalah terkait erat dengan faktor ‘kepentingan nasional’, namun dari sisi budaya pada dasarnya pilihan sikap tersebut tidak terlepas dari pengaruh konsep *mianzi* yang telah melekat dalam diri bangsa Cina. Sebagaimana dikatakan Toomey bahwa “pengaruh konsep *mianzi* tercermin dari kecenderungan bangsa Cina untuk menghindari konflik”. Terlebih bila ada kepentingan lebih besar yang dapat diraih dibaliknya. Pilihan sikap cenderung ‘mengalah’ tersebut selain karena dorongan kebutuhan adalah juga merupakan bagian dari sikap *gei mianzi* atau penghormatan terhadap Indonesia. Bagi Cina tidak sulit untuk bersikap seperti itu, karena dalam strategi perang Sun Zi juga dikenal strategi “pohon prem berkorban untuk pohon persik”. Artinya untuk mendapatkan yang lebih baik, tidak ada salahnya mengorbankan yang dimiliki.

Dalam proses pendekatan Cina-Indonesia peran tokoh Tong Djoe tak dapat dikesampingkan. Terutama perannya sebagai ‘penghubung’ atau ‘mediator’ sejak terjadinya upaya pendekatan antara CCPIT dan KADIN untuk menjalin hubungan dagang langsung. Kehadiran tokoh Tong Djoe juga menjadi penanda kuatnya pengaruh konsep *mianzi* dalam proses perundingan normalisasi hubungan tersebut. Peran seorang penghubung yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sangat dibutuhkan terutama ketika perundingan mengalami kebuntuan. Penghubung dibutuhkan agar tidak ada pihak yang ‘kehilangan muka’ atau *diu mian*. Berbagai unsur itulah yang telah membuktikan bahwa konsep *mianzi* berikut cakupannya telah mempertajam analisis sehingga mampu mengangkat aspek psikologis yang sangat berpengaruh dalam proses perundingan maupun pengambilan keputusan.

Pemanfaatan konsep *mianzi* yang berakar pada budaya Cina sebagai kerangka konseptual telah terbukti mampu mempertajam hasil penelitian sejarah diplomasi ini. Meskipun penggunaan konsep *mianzi* dalam penelitian sejarah diplomasi Cina (mungkin) merupakan yang pertama kali dilakukan, namun manfaatnya sangat terlihat. Berlandaskan itu sudah selayaknya dapat terus

dikembangkan untuk memperkaya pendekatan-pendekatan dalam ilmu Sejarah secara umum, dan secara khusus dalam Sejarah Diplomasi serta Studi Cina. Ilmu Sejarah adalah ilmu yang bersifat terbuka. Berbagai teori dan pendekatan yang dikembangkan cabang-cabang ilmu lain dapat digunakan dalam penelitian sejarah, sepanjang hal itu relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu semangat *baoquan mianzi* yang telah ditunjukkan Cina patut diperhatikan. Di tengah kegalauan atas fenomena semakin menurunnya nasionalisme Indonesia, semangat *baoquan mianzi* yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, dapat menjadi suatu referensi dalam membangun karakter bangsa.



Daftar Pustaka

Dokumen

Agreed Minutes of Discussion Between Officials of The People's Republic of China and The Republic of Indonesia on Technical Matters Relating to The Settlement of Outstanding Debt Between The Two Countries, Beijing 23-28 March 1990

Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Settlement of Indonesia's Debt Obligations to The People's Republic of China, Beijing July 2, 1990

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 5/HI/VII/1980, *Dokumentasi Hubungan Diplomatik RI-RRC*

Communique of The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Resumption of Diplomatic Relations Between The Two Countries, Beijing July 3, 1990

邓小平 (Deng Xiaoping), “坚持四项基本原则”(“Mempertahankan Empat Prinsip Dasar), dalam *邓小平文选 (Karya Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第二卷 (Jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 158-184 (Pidato di forum diskusi masalah teoritik partai, 30 Maret 1979)

-----, “社会主义也可以搞市场经济”(Sosialisme juga boleh menjalankan ekonomi pasar), dalam *邓小平文选, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第二卷 (jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 231-236 (Wawancara dengan Wakil Editor Ensiklopedia Amerika-Britanika, 26 November 1979)

-----, “目前的形势和任务“ (Tugas dan Situasi Dewasa ini), dalam *邓小平文选, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第二卷 (jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 239-273 (Pidato di pertemuan kader PKC tingkat pusat, 16 Januari 1980)

-----, “中国共产党地十二次全国代表大会开翕词 ” (Pidato pada Pembukaan Kongres PKC ke 12), dalam *邓小平文选,, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第三卷 (jilid III), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 1-4 (1 September 1982)

-----, “改革是中国第二次革命” (“Reformasi adalah Revolusi Ke Dua Bagi Cina”), dalam *邓小平文选*, (*Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping*), (2008), 第三卷 (jilid III), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 113-118 (Bagian dari pembicaraan Deng dengan pimpinan LDP Jepang, 26 Maret 1985)

-----, “改革开放稳定, 中国大有希望” (“Reformasi dan Keterbukaan Stabil, Cina Mempunyai Harapan Besar”), dalam *邓小平文选*, 第三卷,(jilid III), hlm. 320-321 (Pokok-pokok pembicaraan Deng dengan rekan-rekan penanggung jawab PKC, 4 September 1989)

邓小平 (Deng Xiaoping), (1989), “结束严峻的中美关系 要由 美国采取主动” (“Mengakhiri hubungan Cina-Amerika yang kaku, harus (mulai) dari Amerika menerapkan kesukarelaan”, dalam *邓小平文选*, 第三卷 (jilid III), (*Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping*), (2008), hlm. 330-333 (Bagian dari pembicaraan Deng ketika bertemu mantan Presiden Amerika Nixon, 31 Oktober 1989)

Foreign Broadcast Information Service (FBIS-CHI-89-036), 24 February 1989

FBIS-CHI-90-127, 2 July 1990, hlm. 8-13

FBIS-CHI-90-128, 3 July 1990, hlm. 6-12

FBIS-CHI-90-129, 5 July 1990, hlm. 11-21

FBIS-CHI-90-151, 6 August 1990, hlm. 9-12

FBIS-CHI-90-152, 7 August 1990, hlm. 6-9

FBIS-CHI-90-153, 8 August 1990, hlm. 3-15

FBIS-CHI-90-154, 9 August 1990, hlm. 9-13

FBIS-CHI-90-155, 10 August 1990, hlm. 5-7

Instruksi Presiden no 9/1985, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan dagang Langsung Antara Indonesia-Cina Angka VIII, 23 Juli 1985, beserta lampirannya

Instruksi Presiden no 5/1989 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia-Cina, 25 Mei 1989

IMF Year book, 1989

Joint Press Statement, Jakarta December 9, 1989

Joint Press Communique, Beijing July 3, 1990

毛泽东 (Mao Zedong), “中国革命和中国共产党”(Revolusi Cina dan Partai Komunis Cina”, dalam *毛泽东选读 (Antologi Mao Zedong)*, (1960), 第二卷 (jilid 2), 北京: 人民出版社 (Beijing: Penerbit Rakyat), hlm. 615-650 (Desember 1939)

-----, “和美国记者安娜·路易斯·斯特朗的谈话“(Percakapan dengan wartawan Amerika Anna Louise Strong), 1946年8月6日(6 Agustus 1946), dalam *毛泽东选集 (Antologi Mao Zedong)*, (1960), 第四卷 (jilid IV), hlm. 1189-1194.

-----, “论人民民主专政”(”Pembahasan Kediktatoran Demokrasi Rakyat”), *毛泽东选读 (Antologi Mao Zedong)*. (1960), 第四卷 (jilid IV), 北京: 人民出版社 (Beijing: Penerbit Rakyat), hlm. 1473-1486 (30 Juni 1949)

Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on The Resumption of Diplomatic Relations, Jakarta, August 8, 1990

人民日报 (Renmin Ribao/Harian Rakyat), “热烈庆贺 中国印尼恢复外交关系”(Menyambut Hangat Perbaikan Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia”), 4 Juli 1990, hlm. 1 (人民日报社论/Renmin Ribao Shelun/Editorial Harian Rakyat)

余文锁 (She Wensuo), “印尼正在迎接中印复交“(Indonesia Sedang Menyambut Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia”), *联合早报 (Harian Pagi ‘Persatuan’)*, Singapura, 25 Desember 1989.

Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China, Jakarta August 8, 1990

USA Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence, *Intelligence Report : Mao’s Red Guard Diplomacy : 1967*, Reference Title : POLO XXXI, 21 June 1968, <http://www.foia.cia.gov/CPE/POLO/polo-21.pdf>, diunduh pada 12 Maret 2011, pkl. 21.15

Zhou Enlai, “Chinese People Will not Tolerate Aggression”, *World News and Views*, Vol. 30, No. 41 (October 14, 1950), Pidato pada peringatan hari Kemerdekaan Republik Rakyat Cina yang pertama, <http://www.marxists.org/reference/archive/zhou-enlai/1950/10/x01.htm>, diunduh pada 12 Januari 2011, pukul 22.00.

“祖国尊严不可侮” (Kehormatan Negara Tidak Boleh Dilecehkan), 解放军报 (Harian Tentara Pembebasan), Beijing 20 April 1966, <https://dlib.castview.com/browse/doc/13982583>, diunduh pada 26 Juli 2010

Buku-Buku

Adam Malik, (1979), *Mengabdikan Republik ; Angkatan Pembangunan*, (Jilid III), Jakarta : PT. Gunung Agung

Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, (1982), *RRC Sebagai Kekuatan di Asia*

Bambang Cipto, MA, Dr., (2007), *Hubungan Internasional di Asia Tenggara ; Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Barnett, Doak, (1985), *The Making Foreign Policy in China : Structure and Process*, Boulder, Colo : Westview Press

Camilleri Joseph, (1980), *Chinese Foreign Policy ; The Maoist era & its aftermath*, Seattle University of Washington Press.

Cannadine, David, (Ed.), (2004), *What is History Now?*, New York : Palgrave Macmillan

Carlson, Allen, Peter Katzenstein, J.J. Suh, (Eds), (2004), *Rethinking Security in East Asia: Identity, Power and Efficiency*, Stanford University Press

Chia, Siew Yue, Cheng Bifan (eds.), (1989), *ASEAN-China : Economic Relations Development in ASEAN and China*, Singapore : ISEAS

Chesneaux, Jean, Françoise Le Barbier, Marie-Claire Bergere, (1977), *China From The 1911 Revolution To Liberation*, New York : Pantheon Books

Chien-min Chao & Bruce J. Dickson, (Ed.), (2001), *Remaking the Chinese State : Strategies, Society, and Security*, London & New York : Routledge

Choudhury Golam W., (1982), *China in World Affairs : The Foreign Policy of the PRC since 1970*, Boulder, Colorado : Westview Press.

Coppel Charles A., (1994), *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

De Mente, Boye Lapayette, (1996), *NTC's Dictionary of China's Cultural CodeWords*, Illinois : NTC Publishing Group, hlm. 247

-----, (2009), *The Chinese Mind : Understanding Traditional Chinese Beliefs and Their Influence on Contemporary Culture*, Tokyo, Rutland, Vermont, Singapore : Tuttle Publishing

Evans, Peter B., Harold K. Jacobson, Robert D. Putman, 1993, *Double-Edged Diplomacy : International Bargaining and Domestic Politics*, Berkeley - Los Angeles- London : University of California Press.

Fairbank, John King, Merle Goldman, 2006, *China : A New History*, Cambridge, Massachuset, London : The Belknap Press of Harvard University Press

Farquhar, Roderick Mac, John King Fairbank, (1991), *Cambridge History of China*, Vol. 15, Part 2, New York : Cambridge University Press

Farquhar, Roderick Mac, (Ed.), 1997, *The Politic of China, Second Edition ; The Eras of Mao and Deng*, United State of America : Cambridge University Press

Findlay, Trevor, (1995), *Cambodia : The Legacy and Lessons of UNTAC*, SIPRI Report no. 9, Oxpord University Press

Gardiner, Juliet, (Ed), (1988), *What Is History Today ...?*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, and London : Macmilan Education INC.

Garrison, Jean A., (2005), *Making China Policy : From Nixon to G.W. Bush*, London : Lynne Rienner Publisher

Giesen, Bernhard, (1987), "Beyond Reductionism : Four Models Relating Micro and Macro Levels", In Jeffrey Alexander, at.al. (Eds.), *The Micro-Macro Link*, Berkley : University of California Press.

Ho Khai Leong & Samuel C.Y. Ku, (Eds). *China and Southeast Asia : Global Changes and Regional Challenges*, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.

Holsti, K.J. (1988), *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*, (M.Tahir Azhary, Penerjemah), Jakarta : Penerbit Erlangga

Hong Liu, (2011), *China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965*, Singapore : NUS Press in association with Kyoto University Press, Japan.

Hsu, Immanuel C Y, (1990), *The Rise of Modern China*, New York, Oxford : Oxford University Press.

Hu Sheng (Chief Ed.), (1994), *A Concise History of The Communist Party of China*, Beijing : Foreign Languages Press

黄安余(Huang Anyu), (2005), *新中国外交史 (Sejarah Diplomasi Cina Baru)* , Beijing : 人民出版社 (Penerbit Rakyat)

黄楠森 (Huang Nansen), (2004), *邓小平理论的哲学基础研究 (Analisa Pemikiran Dasar Teori Deng Xiaoping)*, 北京: 中国人民大学出版社 (Beijing : Penerbit Universitas Rakyat Cina)

Hunter Helen-Louise, (2007), *Sukarno and The Indonesian Coup : The Untold Story*, Westport, Connecticut, London : Praeger Security International

Ipyong, Kim, (Ed.), (1987), *The Strategic Triangle : China, United State, and Sovyet Union*, New York : paragon Press

Ignatius, Wibowo, (2004), *Belajar Dari Cina*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Jia Wenshan, (2001), *The Remaking of the Chinese Character and Identity in the 21st Century : The Chinese Face Practices*, Greenwood Publishing Group.
http://books.google.co.id/books?id=YyUFKnf1h-4C&dq=mai+mianzi&hl=id&source=gbs_navlinks_s

姜华宜 (Jiang Huayi), (1990), *新编 中国革命史 (Sejarah Baru Revolusi Cina)*, 北京: 北京东光印刷厂 (Beijing : Percetakan Cahaya Timur Beijing)

Jones Walter S., (1992), *Logika Hubungan Internasional : Persepsi Nasional 1*, (Budiono, Penerjemah), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Jung, Chang, Jon Halliday,(2005), *Mao : Kisah-Kisah yang Tidak Diketahui*, (Martha Wijaya & Widya Kirana, Penerjemah), (2007), Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama

Kartodirdjo, Sartono, (1992), *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : PT. Gramedia

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Republik Rakyat Cina, (Beijing Desember 1996), *Informasi Singkat Mengenai Fakta Perkembangan Hubungan RI-RRC Sejak KBRI di Beijing Didirikan pada tahun 1950*

Keith Ronald C., (2009), *China : From The Inside Out*, London : Pluto Press

Kokubun Ryosei, Wang Jisi, (Eds.) (2004), *The Rise of China and a Changing East asian Order*, Tokyo ; New York : Japan Center for International Exchange

Kong Yuanzhi, Prof., (1999), *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer

Kornberg Judith F & John F Faust, (2005), *China World Politic : Policies, Processes, Prospects*, Boulder, London : Lynne Rienner Publisher

Kroef Juntus M.van der, (1968), *The Sino-Indonesian Rupture*, New York : American-Asian Educational Exchange.

Kuntowijoyo, (1994). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta ; Tiara Wacana

Kurlantzick, Joshua, (2007), *Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World*, New Haven : Yale University Press

Lampton, David M., (Ed). (2001), *The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the era of Reform, 1978-2000*, Stanford, California : Stanford University Press

Lanteigne, Marc, 2009, *Chinese Foreign Policy ; An Introduction*, London & New York : Routledge

Leifer, Michael, (1999), "Indonesia's Encounters with China and The Dilemmas of Engagement", In Alastair Iain Johnston & Robert S. Ross (Eds.), *Engaging China. The Management of an Emerging Power*, London: Routledge

Legge, James, D.D. LL D., 中英对照四书 (*The Four Books : Confucian Analects, The Great Learning, The Doctrine of The Mean, and The Works of Mencius. With English Translation and Notes*) .

Lemon, M.C. (2003), *Philosophy of History ; A guide for Students*, London and New York : Routledge Taylor & Francis Group

Liang Liji, (2012), Natalia Soebagjo & Tuty Enoch Muas, (Eds.), *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis : 2.000 tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*, Jakarta : Penerbit KOMPAS

Liu Guoli, (Ed). (2007), *Chinese Foreign Policy in Transition*, New Brunswick (USA) and London (UK) : Aldine Transaction, A Division of Transaction Publishers

Luhulima, C. P. F. (1997). *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies,

Mozingo, David, (2007), *Chinese Policy toward Indonesia : 1949-1967*, Jakarta, Kuala Lumpur : Equinox Publishing

钱其琛 (Qian Qichen), (2003), *钱其琛：外交十记 (Qian Qichen : Sepuluh Catatan Diplomatik)*, 北京：知识世界出版社 (Beijing : Penerbit Dunia Ilmu Pengetahuan)

Ricklefs M.C., (1993), *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Ricklefs M.C., (2005), *Sejarah Indonesia Modern : 1200-2004*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta

Rizal Sukma, (1999), *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*, London: Routledge

Robert M. Blum, (1982). *Drawing The Line : The Origin of The American Containment Policy in East Asia*, New York : Norton

Robinson Thomas W., David Shambaugh, (1994), *Chinese Foreign Policy : Theory and Practice*, Oxford : Clarendon Press

Ryosei, Konkubun, Wang Jisi, (Eds.), (2004), *The Rise of China and a Changing East Asian Order*, Tokyo, New York : Japan Center for International Exchange (JCIE)

Sabir, H.M., (1987), *Politik Bebas Aktif : Tantangan dan Kesempatan*, Jakarta : CV Haji Masagung

Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah, (Ed.), (2005), *ASEAN-China Relations : Realities and Prospects*, Singapore : ISEAS

Soeharto, (1989), *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Seperti dituturkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., Jakarta : Citra Lamtoro Gung Persada

Sukamdani, Sahid Gitosardjono, (1993), *Sukamdani Sahid Gitosardjono: Wirausaha Mengabdikan Pembangunan*, (Otobiografi), Jakarta : CV. Haji Masagung

Suryadinata Leo, Dr., (1984), *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Press.

-----, (1986), *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

-----, (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta : LP3ES

Su Si (Kitab Agama Khonghucu), diterbitkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia

Sutter, Robert G., (2008), *Chinese Foreign Relations : Power and Policy Since The Cold War*, London, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK : Rowman & Littlefield Publishers, INC.

Said, Tribuana (1998), *Indonesia dalam Politik Global Amerika : Tinjauan atas Kebijakan Dan Strategi Pembendungan AS dari Truman hingga Nixon*, Medan : Waspada

Scalapino, Robert A, Seizaburo Sato, Jusuf Wanandi, (Eds.), (1990), *Masalah Keamanan Asia*, Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.

Taylor, Jay, (1976), *China and Southeast Asia : Peking's Relations with Revolutionary China Movements*, (2nd.ed.), New York : Preager Publisher

Tim Perkamusian Universitas Indonesia, (1997), *Kamus Mandarin-Indonesia*, Jakarta UI Press

Universitas Indonesia, (2008), *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*, Depok

Walker. Richard L., (1955), *China Under Communism*, New Heaven : Yale University Press

Waltz, Kenneth, (1959), *Man, The State, and War: a Theoretical Analysis*, (With a new Preface, 2001), New York : Columbia University Press. Diakses melalui <http://books.google.co.id/books?id=qUsb210ml48C&pg=PA4&lpg=PA5&ots=zbMuXFvV&dq=men++the+state+and+war#v=onepage&q=men%20%20the%20state%20and%20war&f=false>

Wang, Yiwei, (2009), "Akhir Teori Hubungan Internasional dan bangkitnya Mazhab Cina" dlm Asrudin & Mirza Jaka Suryana, (Eds.), *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Yahuda, Michael, (1983), *Towards the End of Isolationism ; China's Foreign Policy After Mao*, London : The Macmillan Press LTD

杨奎松(Yang Kuisong), *冷战时期的中国对外关系 (Hubungan Luar negeri Cina pada Era Perang Dingin)*, 北京 : 北京大学出版社 (Beijing : Penerbit Universitas Beijing)

Yee, Herbert and Ian Storey, (Ed.), (2002), *The China Threat : Perceptions, Myths and reality*, London & New York : Routledge Curzon

赵鹏飞, 肖根黎 (Zhao, Pengfei, Xiao Genli), (1989), *共和国的成长* (Pertumbuhan Republik), Beijing : 农村读物出版社 (Penerbit Bacaan Pedesaan)

赵金康, 席副群, 翁有为 (Zhao, Jinkang, Xi Fuqun, Weng Youwei), (1999) *当代中国政治思想史 (Sejarah Pemikiran Politik Cina Modern)*, 河南大学出版社 (Penerbit Universitas Hunan)

Zhao, Quansheng, (1996), *Interpreting Chinese Foreign Policy ; The Micro-Macro Linkage Approach*, Oxford, New York : Oxford University Press

周宁编 (Zhou Ningbian), *世界之中国 : 域外中国形象研究 (Cina di Dunia : Kajian Citra Cina di Dunia)*, 南京大学出版社 (Penerbit Universitas Nanjing)

Makalah dan Artikel

Abdullah Dahana, "Dirangkul atau Merangkul Cina", <http://www.inilah.com/read/detail/118537/dirangkul-atau-merangkul-cina>, Senin, 22 Juni 2009, diakses tanggal 18 Maret 2011.

Abdul Syani "Pelestarian Budaya-Budaya Lokal dan Strategi Pemberdayaan masyarakat adat Lampung" blog.unila.ac.id/abdulsyani/.../artikel-pelestarian-nilai2-budaya-lokal.pdf, diunduh pada 23 Mei 2011, pukul 09.30

Ba, Alice D, "China and ASEAN", *Asian Survey*, Vol. XLIII, No. 4, July/August 2003, hlm. 622-647

Cheng, Joseph Yu-Shek & Fanklin Wankung Zhang, "Chinese Foreign Relation Strategies Under Mao and Deng: A Systematic and Comparative Analysis", *Journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/download/1415/1373*, diunduh pada, 14 Januari 2011, pkl 10.30

Cheng, Yingchang, "The concept of face and its Confucian roots". *Journal of Chinese Philosophy*, 13, 1986, hlm. 329- 348

Curtis, Grant, "Transition to What? ; Cambodia, UNTAC, and The Peace Process", United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) paper, November, 1993, <http://www.peacedividendtrust.org/EIPdata/Library/Economic%20Impact%20of%20Peacekeeping/UNTAC%20in%20Cambodia.pdf>, Diunduh pada 3 November 2010, pkl 21.00

Dibb, Paul, "Indonesia: The Key to South-East Asia's Security", *International Affairs*, vol.77, no. 4. (2001), <http://www.jstor.org/stable/3095597>, diunduh :pada 23 November 2010, pukul 04:03

Dittmer, Lowell, "China in 1989", *Asian Survey*, Vol. XXX, No. 1 (Januari 1990)

高飞 (Gao, Fei), "中国外交 60 年的历史演进与学术思考", (Evolusi Sejarah 60 tahun Diplomasi Cina dan Analisa Ilmiah), *外交评论 (Kajian Diplomasi)*, Vol. 6, No. 143, (25 December 2009)

高伟农 (Gao, Weinong), "印度尼西亚与中国关系正常化的动因", ("Motivasi Normalisasi Hubungan Cina-Indonesia"), *东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara)*, No. 3 (1989)

Hu, Hsien Chin, "The Chinese Concept of 'Face'", *American Anthropologist*, 46 (1), (1944)

黄道根 (Huang, Daogen), "中、印 (尼) 复交及两国面临世界形势的桃展" (Perbaikan Hubungan Cina-Indonesia dan Tantangan Perkembangan Dunia yang Dihadapi Kedua Negara), *东南亚研究 (Kajian Asia Tenggara)*, No. 4 (1990)

http://bangsabugis.blogspot.com/2011/05/konsep-siri-na-pesse-bagi-bangsa-bugis_02.html, diunduh pada 23 Mei 2011 pukul 10.15

Jia Wenshan, (2001), *The Remaking of the Chinese Character and Identity in the 21st Century : The Chinese Face Practices*, Greenwood Publishing Group. http://books.google.co.id/books?id=YyUFKnf1h-4C&dq=mai+mianzi&hl=id&source=gbs_navlinks_s, diunduh pada 2 Februari 2012, pukul 16.30

Kroef, Justus M van der, "The Sino-Indonesian Rupture", *The China Quarterly*, (January-March 1968), Reprint in New York : American-Asian Educational Exchange. INC

-----, "Before the Thaw Recent Indonesian Attitudes toward People's China", *Asian Survey*, Vol. 13, No. 5 (May 1973) (<http://www.jstor.org/pss/2642799>), Diunduh pada 4 Juli 2010, pkl. 20.15

-----, "Normalizing with China : Indonesia's Policies and Perception", *Asian Survey*, Vol. 26, No.8 (1986)

-----, "Hesitant 'Normalization' : Indonesia's Slow Boat to China", *Asian Affairs*, Vol. 16, No. 1 (Spring, 1989)

Kurlantzick, Joshua, "China's Charm Implications of Chinese Soft Power", *Policy Brief*, No. 4, (June.2006)

李思辉 (Li Sihui). “论面子观念” (Lun Mianzi Guannian/ Mengkaji Konsep Mian zi), <http://www.naweeklytimes.com/xingling/xingling24.htm>, diakses pada tanggal 15 Juni 2011, pkl. 19.30

Ma Ying & Zhao, 2008, “Evolution of Guiding Principles and Strategies of China’s Periphery Policy”, http://www.siis.org.cn/en/zhuanti_view_en.aspx?id=10012, diunduh pada 4 Juli 2010, pukul. 19.20

Ning Yu, “What Does Our Face Mean To Us?”, *Pragmatics & Cognition* 9:1 (2001), 1–36. John Benjamins Publishing Company, diunduh dari <http://faculty-staff.ou.edu/Y/Ning.Yu-1/Yu-2001.pdf>, 15 Oktober 2011, pkl 20.30

“Peaceful Coexistence – Two Diametrically Opposed Politics”, <http://www.marxist.org/subject/china/documents/polemic/peaceful.htm>, diunduh pada 23 Mei 2011, pkl.10.15

R.Tuty Nur Mutia & Eddy Prabowo, “Aktualisasi Peran Sosial Wanita Cina di Jabodetabek”, *Makara, Seri Sosial-Humaniora*, Vol. 9, Desember 2006

Shambaugh, David, “China in 1990 : The Year of Damage Control”, *Asian Survey*, Vol. 31, No.1 (1991)

-----, 2004, “China Engages Asia: Reshaping the Regional Order”, *International Security*, Vol. 29, No. 3, 64 (2004)

<http://www.jstor.org/stable/4137556>, diunduh 12 Januari 2011, pukul 03:05

Soebandrio, Dr. H., “Kesaksianku tentang G 30 S”, [PDF] [xa.yimg.com/.../2676586-Kesaksianku Tentang-G30S-oleh-DrSoebandrio](http://xa.yimg.com/.../2676586-Kesaksianku-Tentang-G30S-oleh-DrSoebandrio), diunduh pada 10 Mei 2012, pukul. 10.15

Song, Xining, “Building International Relations Theory with Chinese Characteristics”, *Journal of Contemporary China*, , 10 (26), 2001

Suryadinata, Leo, “Indonesia-China Relations : A Recent Breakthrough”, *Asian Survey*, Vol. 30, No. 7, 1990, h. 682-696

Thayer, Carlyde A, “Vietnam: Beleaguered Outspot of Socialism”, *Current History*, Vol. 79, no 461, December 1980, hlm. 165-197

Thuno, Mette, “Reaching Out and Incorporating Chinese Overseas: The Trans-territorial Scope of the PRC by the End of the 20th Century”, *China Quarterly*, No. 168, December 2001.

Vaughn, Bruce, & Wayne M. Morrison, 2006, *China-Southeast Asia Relations:Trends, Issues, and Implications for the United States*, CRS Report for Congress

Wang Gungwu, "The Cultural Implication of the Rise of China On the Region", dalam Ryosei, Konkubun, Wang Jisi, (Eds.). (2004), *The Rise of China and a Changing East Asian Order*, Tokyo, New York : Japan Center for International Exchange (JCIE)

Wayne, Bert, "Chinese Policy Toward Burma and Indonesia : A Post mao Perpective", *Asian survey*, vol. 25, (9 September 1985)

Weng Wenzhang, "Indonesia : Improving Relations With China", *Beijing Review*, (February 19-25, 1990)

Whiting, Allen S., "Chinese Nationalism and Foreign Policy After Deng", *China Quarterly*, 1995

Disertasi, Tesis, dan Laporan Hasil Penelitian

Abdullah Dahana, (1986), *The Evolution of China's Policy Toward Malaysia Since 1949*, A Dissertation Submitted to The Graduate Division of The University of Hawaii in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in History.

Badan Pengembangan dan Penelitian Departemen Luar Negeri dan FISIP USU, (Litbang Deplu & USU), "Prospek Hubungan RI-RRC dan Negara-Negara Sosialis Eropah Timur", Jakarta : Departemen Luar Negeri RI (1989) (Laporan Hasil Penelitian)

-----, "Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara RI-RRC, Kerjasama dan Tantangan-Tantangannya", Jakarta : Departemen Luar Negeri RI (laporan Hasil Penelitian)

R. Tuty Nur Mutia, "Serangan Hukuman Cina Terhadap Vietnam" , Laporan Hasil Penelitian, Pusat Pengembangan Penelitian FIB UI, 2005

Seda, Joanessa M.J.S. (2007). *Perkembangan Kebijakan Pemerintah Cina Mengenai Kewarganegaraan Etnis Cina Di Asia Tenggara (1909-2000)*, Tesis yang diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelah Magister Humaniora, Pada Program Pascasarjana Ilmu Sejarah, fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Surat kabar dan Terbitan Berkala

Asia Week (Hongkong)

Berita Buana (Jakarta)

Beijing Review (Beijing)

Jiefangjun bao (解放军报) (Beijing)

Merdeka (Jakarta)

Peking Review

Renmin Ribao (人民日报) (Beijing)

Shanghai Star

Suara Karya (Jakarta)

Tempo (*Online* – Jakarta- <http://majalah.tempointeraktif.com/>)



INDEKS

- 'Cina sebagai ancaman, 53
ACFTA, 214
Adam Malik, 18, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 218
aiguo yundong, 151
Ali Alatas, 14, 15, 17, 129, 131, 143, 144, 145, 149, 171
Ali Sastroamidjojo, 65, 183
Amerika, 8, 11, 21, 52, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 87, 92, 93, 99, 100, 101, 104, 105, 116, 119, 120, 121, 124, 129, 151, 200, 211, 214, 215, 218
anti imperialis, 56, 58, 59
Arab Saudi, 131
ARF, 213
Arnold Mononutu, 64
AS, 8, 59, 61, 65, 71, 72, 73, 74, 100, 101, 134, 182, 187, 188, 198, 201, 202
ASEAN, 6, 9, 13, 93, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 115, 116, 131, 132, 155, 169, 213, 214
ASEM, 213
Asia Tenggara, 2, 6, 7, 9, 13, 27, 53, 66, 67, 77, 82, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 117, 130, 133, 134, 141, 155, 161, 164, 169, 213, 214, 215
BAKIN, 90, 91, 111, 156
Bank of China, 165, 181
baoquan mianzi, 3, 19, 148, 174, 175, 211
bebas aktif, 65
Benny Moerdani, 111
budaya 'Pi'il, 4
budaya 'Siri', 4
Burma, 5, 7, 9, 62, 66, 67, 82
Canton Fair, 94, 107
CCPIT, 12, 89, 112, 114, 115, 219
Chen Yi, 56, 80, 185, 186, 187
Chen Yun, 138, 139
Chiang Kaishek, 52, 58
CONEFO, 78
da yue jin, 72, 73, 79
Dasa Sila Bandung, 13, 67, 158, 174, 212
dasao ganjing wuzi zai qingke, 56
Deng Xiaoping, 7, 10, 28, 102, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 127, 130, 132, 136, 138, 139, 140, 200, 210, 212
Diaoyutai, 1
Dimensi institusional, 39, 135
Dimensi penguasa/rejim, 39
dimensi simbolik, 39
diu lian, 3
diu mian, 3, 49, 50, 51, 97, 148, 168, 219
divide et impera, 160
ego-sentris, 4, 5, 175
ekonomi pasar, 108, 110, 123
Faktor Ekonomi, 134
Faktor Sosial, 135
Faktor Strategis, 134
Filipina, 9, 66, 94, 95, 100
Financial Agreed Minutes, 27
Financial Agreement, 27
Formula Paris, 167, 205
Front Persatuan, 52, 55
G 30 S PKI, 83, 97, 114, 155, 171
G30 S PKI, 5
G30S PKI, 6, 113
gaige kaifang, 10, 11, 43, 108, 123, 127, 128, 134, 135, 136, 210, 217
GANEF0, 78
Garis Diplomasi Revolusioner, 8
gei mianzi, 3, 99, 117, 148, 175
Gorbachev, 119, 141
gu mianzi, 97, 99, 117, 176, 177, 178, 180, 182, 186, 197
Hatta, 63, 218
hegemonisme, 53, 83, 121
Heng Samrin, 103
Hongkong, 27, 90, 107, 113, 117, 129, 143, 149, 150, 171, 174, 215
Hu Yaobang, 138
Hua Guofeng, 95, 96, 121
Hua Qiao, 7
Huang Hua, 18, 90, 94
Huang Zhen, 64, 183

Huaqiao, 7, 8, 10, 53, 68, 82, 103, 161, 162
 Hun Sen, 103
 Indocina, 9, 66, 67, 82, 89, 100, 103, 105, 213
interlocutor, 105, 106
 Isak Mahdi, 63
Jakarta Informal Meeting, 106
Jiang mianzi, 176
 Jiang Zemin, 139, 145, 157
Joint Press Communiqué, 15, 27
Joint Press Statement, 27
 KAA, 67, 68, 69, 107, 113, 114, 117, 141, 142, 218
 KADIN, 12, 89, 94, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 142, 219
 Kamboja, 9, 14, 82, 88, 89, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 131, 143, 146, 157, 174
 kaum Tionghoa, 4, 5, 7, 51, 64, 68, 76, 81, 84, 86, 134, 158, 159, 160, 161, 162, 163
 kekuatan konservatif, 139
 kekuatan moderat, 139
 kekuatan reformis, 139
 Khmer Merah, 9, 103, 104
 Khrushchev, 62, 70
 Koeksistensi damai, 54
 komunike Shanghai, 8
 Konferensi Asia Afrika, 12, 67, 141, 218
 Konfusianisme, 8, 47, 48
 level makro, 37, 38, 39
 level mikro, 37, 38
 Li Peng, 15, 16, 139, 140, 145, 163, 164, 170, 172
lian, 3, 45, 46, 48
linghuoxing, 147, 169
lingqi luzao, 56
 Liu Shaoqi, 62, 73, 80, 184
Mai mianzi, 177
 Malaysia, 9, 14, 21, 60, 77, 78, 93, 95, 100, 104
 Mao, 7, 8, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 93, 96, 99, 109, 121, 125, 129, 136
 Mao Zedong, 8, 28, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 72, 73, 74, 75, 79, 93, 99, 109, 121, 125, 129, 136
 Marxisme, 55, 70
 Menlu Alatas, 14, 145, 152, 201
 Menlu Qian, 12, 13, 145, 146, 156, 157, 201
mianzi, 3, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 89, 97, 98, 99, 117, 119, 135, 140, 148, 154, 155, 157, 169, 173, 175, 204, 209, 212, 219, 220
 Mochtar Kusumaatmadja, 98
 model Sovyet, 65
 Moerdiono, 112, 144
 Namibia, 131, 212
 Nixon, 8, 92
 Nota Kesepakatan Normalisasi, 142
 otorisasi horizontal, 136, 140
 Otorisasi vertikal, 136
 Pakta Warsawa, 120
Paris Formula, 166
 Partai Komunis Cina (PKC/*Gongchandang*), 2
 Partai Nasionalis Cina (PNC/*Guomindang*), 2
Passenstelsel, 160
 pembekuan hubungan, 5, 6, 20, 31, 45, 84, 88, 96, 98, 146, 179, 193
 pendekatan 'keterkaitan mikro-makro', 31, 173
 pendekatan keterkaitan mikro-makro, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 118, 119, 219
 Peng Zhen, 139
 peranakan, 159
 Perang Candu, 21
 perang dingin, 55, 60, 101
 Perang Korea, 60, 61, 65
 peristiwa Tiananmen, 11, 17, 41, 51, 121, 127, 128, 130, 133, 136, 137, 139, 140, 144, 157, 173, 211, 212
 perjanjian dwi kewarganegaraan, 68, 183, 185, 186
 Perjanjian Dwi Kewarganegaraan, 68
permissibriefje, 160
 pertemuan Tokyo, 13, 14, 142, 143, 144, 174
 Pham Van Dong, 102
 PKC, 2, 9, 13, 26, 29, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 69, 79, 81, 82, 94, 98, 109, 121, 122, 127, 138, 139, 145, 154, 155, 157, 161, 204, 212, 216
 PKC., 26, 29

PKI, 1, 13, 51, 64, 77, 81, 83, 85, 86, 87,
 91, 150, 154, 155, 156, 157, 184, 187,
 188, 190, 191, 193, 196, 197, 203,
 204, 218
 PNC, 2, 52, 55, 57
 Pol Pot, 9, 102, 103
Politie rol, 160
 politik pembendungan, 60
 PP 10 tahun 1959, 4, 75, 179, 184, 188
 Presiden Soeharto, 12, 13, 14, 16, 24, 91,
 93, 94, 98, 111, 113, 114, 115, 116,
 131, 142, 143, 144, 146, 152, 155,
 157, 170, 171
 Presiden Soekarno, 63, 86, 180, 183,
 191, 193
 pribumi, 158, 159, 160, 161
 Program Umum, 180
 Qian, 1, 2, 13, 14, 15, 28, 93, 94, 105,
 116, 131, 132, 140, 141, 142, 143,
 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152,
 156, 157, 158, 170, 171, 174, 201,
 202
 Qian Qichen, 1, 2, 12, 13, 14, 15, 28, 93,
 94, 105, 116, 131, 140, 141, 142, 143,
 144, 146, 149, 150, 158, 170, 171,
 174
qiangguomeng, 126, 211
 Qiao Shi, 139
 Republik Cina, 52, 54, 55, 59, 63, 78,
 152, 218
 Revolusi Kebudayaan, 54, 73, 79
 Revolusi Xinhai, 54
 Rumania, 62, 88
 SEATO, 66
 Sejarah Naratif, 30
 serangan hukuman, 103
 Shanghai., 73, 139
shehuizhuyi chujing jieduan, 123
si bu liang chao, 133
si ge xiandahua, 108
 Sihanouk, 103
 Singapura, 6, 28, 95, 107, 112, 114, 115,
 132, 142, 149, 153, 169, 213
 sistem tributer, 2
 sistem tributer', 2
 Soebandrio, 188, 189
 Soeharto, 13, 16, 18, 83, 85, 87, 91, 93,
 94, 104, 111, 112, 113, 114, 117, 131,
 141, 143, 144, 156, 170, 171, 179,
 189, 191, 193, 196, 197, 201
 Soekarno, 1, 5, 66, 77, 78, 83, 86, 87,
 167, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
 194, 206
 Song Qingling, 183
 Sovyet., 59, 61, 70, 73, 105, 119, 120,
 140
 Stalin, 59, 60, 61, 69, 70
 strategi 28 aksara', 132, 141
 Strategi Kekuatan ke Tiga, 54
 Sukamdani, 95, 107, 111, 112, 113, 114,
 195, 196
 Sun Yatsen, 54, 55, 58
 Sun Yunsuan, 152
 TAC, 214
 Taiwan, 8, 9, 15, 52, 59, 61, 63, 64, 71,
 73, 78, 92, 100, 122, 132, 152, 153,
 203, 214, 218
 teori domino', 66
 Teori Tiga Dunia, 75
Test Ban Treaty, 72
 Thailand, 9, 66, 93, 95, 100, 104, 106,
 215
 Tionghoa, 64, 68, 76, 78, 81, 84, 86, 150,
 158, 159, 160, 161, 163, 174, 178,
 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
 186, 187, 192, 203, 204, 216
 Tokyo, 4, 13, 27, 28, 29, 31, 34, 116,
 131, 142, 143, 146, 156, 167, 205
 Tong Djoe, 112, 219
 totok, 159
 Uni Sovyet, 12, 41, 56, 58, 59, 60, 61,
 62, 69, 70, 77, 79, 83, 87, 99, 101,
 102, 105, 117, 119, 120, 127, 128,
 218
 USSR, 9, 60, 61, 70, 71, 72, 101, 134,
 187, 188, 201
 Vietnam, 9, 14, 62, 99, 100, 101, 102,
 103, 104, 105, 106, 156, 213
 Wang Renshu, 8, 63, 64, 179, 180, 182,
 183, 207
wenhua da geming, 79, 82, 83, 84, 93,
 96, 99
Wenhua Da Geming, 79
Wijkenstelsel', 160
 Wu Xueqian, 12, 97, 98, 107, 112, 113,
 114, 117, 141, 142, 179, 194, 195,
 197, 207
wulun, 47, 48
Wusi yundong, 55
 Xu Dunxin, 149, 153

Yao Dengshan, 81, 193
Yao Tengshan, 81, 84
Yao Yilin, 139
yi bian dao, 58, 59, 65
Yi bian dao, 54
you Zhongguotese de shehuizhuyi, 123
yuanzexing, 147, 150

Zhao Ziyang, 138
Zhongguo, 2, 12, 27, 112, 155
Zhonghua Minguo, 52
zhongjian didai, 56, 73, 74
Zhou Enlai, 10, 61, 62, 67, 69, 70, 92,
121, 218
zona ekonomi khusus, 110



Daftar Pustaka

Dokumen

Agreed Minutes of Discussion Between Officials of The People's Republic of China and The Republic of Indonesia on Technical Matters Relating to The Settlement of Outstanding Debt Between The Two Countries, Beijing 23-28 March 1990

Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Settlement of Indonesia's Debt Obligations to The People's Republic of China, Beijing July 2, 1990

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 5/HI/VII/1980, *Dokumentasi Hubungan Diplomatik RI-RRC*

Communique of The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China on The Resumption of Diplomatic Relations Between The Two Countries, Beijing July 3, 1990

邓小平 (Deng Xiaoping), “坚持四项基本原则”(“Mempertahankan Empat Prinsip Dasar), dalam *邓小平文选 (Karya Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第二卷 (Jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 158-184 (Pidato di forum diskusi masalah teoritik partai, 30 Maret 1979)

-----, “社会主义也可以搞市场经济”(Sosialisme juga boleh menjalankan ekonomi pasar), dalam *邓小平文选, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第二卷 (jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 231-236 (Wawancara dengan Wakil Editor Ensiklopedia Amerika-Britanika, 26 November 1979)

-----, “目前的形势和任务“ (Tugas dan Situasi Dewasa ini), dalam *邓小平文选, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第二卷 (jilid II), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 239-273 (Pidato di pertemuan kader PKC tingkat pusat, 16 Januari 1980)

-----, “中国共产党地十二次全国代表大会开翕词 ” (Pidato pada Pembukaan Kongres PKC ke 12), dalam *邓小平文选,, (Karya Tulis Terpilih dari Deng Xiaoping)*, (2008), 第三卷 (jilid III), 北京: 人民出版社 (Beijing : Penerbit Rakyat), hlm. 1-4 (1 September 1982)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON THE SETTLEMENT OF INDONESIA'S DEBT OBLIGATIONS TO THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Republic of Indonesia (Indonesia) and the Government of the People's Republic of China (PRC) desirous of resolving the outstanding debt of Indonesia to PRC, have agreed on the following:

Article 1

(a). The subject of this Agreement is the consolidation and settlement of Indonesia's debt obligations to PRC, in the amounts and currencies set forth in Exhibit A.

(b). PRC side's record shows that Indonesia owed to PRC 6 debts with principal and interest totalling Swiss Francs (CHF) 124,217,299.61 and Pounds Sterling (GBP) 8,126,829.34 while the Indonesia side's record shows the principal and interest of the debts totalling Swiss Francs (CHF) 98,847,151.37 and Pounds Sterling (GBP) 8,126,829.34.

(c). PRC agrees that the record of the Indonesia side mentioned above be the final basis for settling the outstanding debts between the two countries.

(d). PRC agrees to the Indonesia's proposal of calculating the debt interest and rearranging the debt repayment schedule according to the Paris Formula.

Article 2

The total principal amount of the debts specified in Exhibit A is Swiss Francs (CHF) 96,228,329.59 and Pounds Sterling (GBP) 7,982,829.34. Such principal amount shall be repaid by Indonesia in thirty equal annual installments, commencing on December 31, 1970 as further specified in Exhibit B, Schedules 1, 2, 3, 4 and 5 attached hereto. Notwithstanding the foregoing, the aggregate principal payments scheduled for the period beginning December 31, 1970 and ending December 31, 1989 equalling Swiss Francs (CHF) 64,152,219.60 and Pounds Sterling (GBP) 5,321,886.20 shall be payable in a single instalment by no later than December 31, 1990.

Article 3

The total interest amount of the debts is Swiss Francs (CHF) 2,618,821.78 and Pounds Sterling (GBP) 144,000.00. Such interest amount shall be repaid by Indonesia in fifteen equal annual instalments, commencing on December 31, 1985 as further specified in Exhibit B, Schedules 2 and 5 attached hereto. Notwithstanding the foregoing, the aggregate interest payments scheduled for the period beginning December 31, 1985 and ending December 31, 1989, equalling Swiss Francs (CHF) 872,940.60 and Pounds Sterling (GBP) 48,000.00 shall be payable in a single instalment by no later than December 31, 1990.

No moratorium or any other interest shall be charged on the repayment schedule specified in Articles 2 and 3 hereof.

Article 4

Both sides decided through discussions that repayment of the debts by Indonesia shall be made by convertible currencies or Indonesia's export commodities, with details as follows :

(a). The commodity payment shall not exceed 50 % of the amounts due on any payment date.

(b). Payment in convertible currencies shall be effected in the original currencies (Swiss Francs and Pounds Sterling) as stipulated in Exhibit A.

(c). The specific commodities for the payment of the debts are crude oil, natural rubber, timber, plywood, chemical fertilizer (urea) and other commodities subject to mutual agreement between the two countries.

Article 5

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade of the People's Republic of China shall represent their respective government in the implementation of this agreement. The Bank of China and Bank Indonesia shall arrange technical details for the implementation of this agreement.

Article 6

(a). With the coming into force of this Agreement, all provisions of the original agreements governing the loans shall be null and void.

(b). This Agreement shall come into force on the date of its signing and shall remain in force until all obligations of this Agreement are met by both sides.

Done in Beijing, China on July 2, 1990 in two originals in the English language, both being equally authentic.



For THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



For THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EXHIBIT A

1. Debt under Credit Agreement dated April 17, 1958:

Principal	:	CHF. 30,450,982.23
Interest	:	-----
Total	:	CHF. 30,450,982.23

2. Debt under Economic and Technical Cooperation Agreement dated October 11, 1961:

Principal	:	CHF. 22,049,147.36
Interest	:	CHF. 2,618,821.78
Total	:	CHF. 24,667,969.14

3. Debt under Loan Agreement dated January 28, 1965:

Principal	:	CHF. 43,728,200.00
Interest	:	-----
Total	:	CHF. 43,728,200.00

4. Debt under Payment Agreement dated September 30, 1965
(replacing agreement dated September 1, 1954):

Principal	:	GBP. 3,987,717.01
Interest	:	-----
Total	:	GBP. 3,987,717.01

5. Debt under Exchange of Notes dated January 6, 1963:

Principal	:	GBP. 3,995,112.33
Interest	:	GBP. 144,000.00
Total	:	GBP. 4,139,112.33

6. Debt under Economic and Technical Cooperation Agreement dated January 28, 1965:

Principal	:	Nil
Interest	:	Nil
Total	:	Nil

CONSOLIDATED DEBT SERVICE PAYMENTS

Date: Dec. 31		Payment of Principal		Payment of Interest		Total payments	
		CHF	GBP	CHF	GBP	CHF	GBP
1970	(1)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1971	(2)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1972	(3)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1973	(4)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1974	(5)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1975	(6)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1976	(7)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1977	(8)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1978	(9)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1979	(10)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1980	(11)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1981	(12)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1982	(13)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1983	(14)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1984	(15)	3,207,610.98	266,094.31			3,207,610.98	266,094.31
1985	(16)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1986	(17)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1987	(18)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1988	(19)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1989	(20)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
Total		64,152,219.60	5,321,886.20	872,940.60	48,000.00	65,025,160.20	5,369,886.20
1990	(21)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1991	(22)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1992	(23)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1993	(24)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1994	(25)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1995	(26)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1996	(27)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1997	(28)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1998	(29)	3,207,610.98	266,094.31	174,588.12	9,600.00	3,382,199.10	275,694.31
1999	(30)	3,207,611.17	266,094.35	174,588.10	9,600.00	3,382,199.27	275,694.35
Grand total		96,228,329.59 =====	7,982,829.34 =====	2,618,821.78 =====	144,000.00 =====	98,847,151.37 =====	8,126,829.34 =====

EXHIBIT B
Schedule 1

REPAYMENT OF DEBT UNDER CREDIT AGREEMENT DATED APRIL 17, 1958

Date : 31 Dec.	Outstanding balance of Principal	Repayment Schedule		
		Principal	Interest	Total
1970 (1)	CHF. 30,450,982.23	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1971 (2)	CHF. 29,435,949.49	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1972 (3)	CHF. 28,420,916.75	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1973 (4)	CHF. 27,405,884.01	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1974 (5)	CHF. 26,390,851.27	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1975 (6)	CHF. 25,375,818.53	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1976 (7)	CHF. 24,360,785.79	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1977 (8)	CHF. 23,345,753.05	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1978 (9)	CHF. 22,330,720.31	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1979 (10)	CHF. 21,315,687.57	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1980 (11)	CHF. 20,300,654.83	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1981 (12)	CHF. 19,285,622.09	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1982 (13)	CHF. 18,270,589.35	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1983 (14)	CHF. 17,255,556.61	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1984 (15)	CHF. 16,240,523.87	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1985 (16)	CHF. 15,225,491.13	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1986 (17)	CHF. 14,210,458.39	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1987 (18)	CHF. 13,195,425.65	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1988 (19)	CHF. 12,180,392.91	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1989 (20)	CHF. 11,165,360.17	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
Total		CHF. 20,300,654.80	-----	CHF. 20,300,654.80
1990 (21)	CHF. 10,150,327.43	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1991 (22)	CHF. 9,135,294.69	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1992 (23)	CHF. 8,120,261.95	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1993 (24)	CHF. 7,105,229.21	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1994 (25)	CHF. 6,090,196.47	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1995 (26)	CHF. 5,075,163.73	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1996 (27)	CHF. 4,060,130.99	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1997 (28)	CHF. 3,045,098.25	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1998 (29)	CHF. 2,030,065.51	CHF. 1,015,032.74	-----	CHF. 1,015,032.74
1999 (30)	CHF. 1,015,032.77	CHF. 1,015,032.77	-----	CHF. 1,015,032.77
Grand total		CHF. 30,450,982.23 =====	-----	CHF. 30,450,982.23 =====

EXHIBIT B
Schedule 2

REPAYMENT SCHEDULE OF DEBT UNDER ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT DATED OCTOBER 11, 1961

Date : 31 Dec.	Outstanding balance of Principal	Repayment Schedule			
		Principal	Interest	Total	
1970	(1)	CHF. 22,049,147.36	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1971	(2)	CHF. 21,314,175.78	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1972	(3)	CHF. 20,579,204.20	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1973	(4)	CHF. 19,844,232.62	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1974	(5)	CHF. 19,109,261.04	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1975	(6)	CHF. 18,374,289.46	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1976	(7)	CHF. 17,639,317.88	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1977	(8)	CHF. 16,904,346.30	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1978	(9)	CHF. 16,169,374.72	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1979	(10)	CHF. 15,434,403.14	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1980	(11)	CHF. 14,699,431.56	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1981	(12)	CHF. 13,964,459.98	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1982	(13)	CHF. 13,229,488.40	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1983	(14)	CHF. 12,494,516.82	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1984	(15)	CHF. 11,759,545.24	CHF. 734,971.58	-----	CHF. 734,971.58
1985	(16)	CHF. 11,024,573.66	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1986	(17)	CHF. 10,289,602.08	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1987	(18)	CHF. 9,554,630.50	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1988	(19)	CHF. 8,819,658.92	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1989	(20)	CHF. 8,084,687.34	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
Total			CHF. 14,699,431.60	CHF. 872,940.60	CHF. 15,572,372.20
1990	(21)	CHF. 7,349,715.76	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1991	(22)	CHF. 6,614,744.18	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1992	(23)	CHF. 5,879,772.60	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1993	(24)	CHF. 5,144,801.02	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1994	(25)	CHF. 4,409,829.44	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1995	(26)	CHF. 3,674,857.86	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1996	(27)	CHF. 2,939,886.28	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1997	(28)	CHF. 2,204,914.70	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1998	(29)	CHF. 1,469,943.12	CHF. 734,971.58	CHF. 174,588.12	CHF. 909,559.70
1999	(30)	CHF. 734,971.54	CHF. 734,971.54	CHF. 174,588.10	CHF. 909,559.64
Grand total			CHF. 22,049,147.36 =====	CHF. 2,618,821.78 =====	CHF. 24,667,969.14 =====

REPAYMENT SCHEDULE OF DEBT UNDER LOAN AGREEMENT DATED JANUARY 28, 1965

Date : 31 Dec.		Outstanding balance of Principal	Repayment Schedule		
			Principal	Interest	Total
1970	(1)	CHF. 43,728,200.00	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1971	(2)	CHF. 42,270,593.34	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1972	(3)	CHF. 40,812,986.68	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1973	(4)	CHF. 39,355,380.02	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1974	(5)	CHF. 37,897,773.36	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1975	(6)	CHF. 36,440,166.70	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1976	(7)	CHF. 34,982,560.04	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1977	(8)	CHF. 33,524,953.38	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1978	(9)	CHF. 32,067,346.72	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1979	(10)	CHF. 30,609,740.06	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1980	(11)	CHF. 29,152,133.40	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1981	(12)	CHF. 27,694,526.74	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1982	(13)	CHF. 26,236,920.08	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1983	(14)	CHF. 24,779,313.42	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1984	(15)	CHF. 23,321,706.76	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1985	(16)	CHF. 21,864,100.10	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1986	(17)	CHF. 20,406,493.44	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1987	(18)	CHF. 18,948,886.78	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1988	(19)	CHF. 17,491,280.12	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1989	(20)	CHF. 16,033,673.46	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
Total			CHF. 29,152,133.20	-----	CHF. 29,152,133.20
1990	(21)	CHF. 14,576,066.80	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1991	(22)	CHF. 13,118,460.14	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1992	(23)	CHF. 11,660,853.48	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1993	(24)	CHF. 10,203,246.82	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1994	(25)	CHF. 8,745,640.16	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1995	(26)	CHF. 7,288,033.50	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1996	(27)	CHF. 5,830,426.84	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1997	(28)	CHF. 4,372,820.18	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1998	(29)	CHF. 2,915,213.52	CHF. 1,457,606.66	-----	CHF. 1,457,606.66
1999	(30)	CHF. 1,457,606.86	CHF. 1,457,606.86	-----	CHF. 1,457,606.86
Grand total			CHF. 43,728,200.00 =====	-----	CHF. 43,728,200.00 =====

EXHIBIT B
Schedule 4

REPAYMENT SCHEDULE OF DEBT UNDER PAYMENT AGREEMENT DATED SEPTEMBER 30, 1965
(REPLACING AGREEMENT DATED SEPTEMBER 1, 1954)

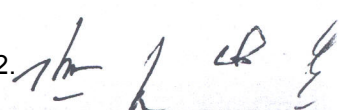
Date : 31 Dec		Outstanding balance of Principal	Repayment Schedule		
			Principal	Interest	Total
1970	(1)	GBP. 3,987,717.01	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1971	(2)	GBP. 3,854,793.11	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1972	(3)	GBP. 3,721,869.21	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1973	(4)	GBP. 3,588,945.31	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1974	(5)	GBP. 3,456,021.41	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1975	(6)	GBP. 3,323,097.51	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1976	(7)	GBP. 3,190,173.61	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1977	(8)	GBP. 3,057,249.71	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1978	(9)	GBP. 2,924,325.81	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1979	(10)	GBP. 2,791,401.91	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1980	(11)	GBP. 2,658,478.01	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1981	(12)	GBP. 2,525,554.11	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1982	(13)	GBP. 2,392,630.21	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1983	(14)	GBP. 2,259,706.31	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1984	(15)	GBP. 2,126,782.41	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1985	(16)	GBP. 1,993,858.51	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1986	(17)	GBP. 1,860,934.61	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1987	(18)	GBP. 1,728,010.71	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1988	(19)	GBP. 1,595,086.81	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1989	(20)	GBP. 1,462,162.91	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
Total			GBP. 2,658,478.00	-----	GBP. 2,658,478.00
1990	(21)	GBP. 1,329,239.01	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1991	(22)	GBP. 1,196,315.11	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1992	(23)	GBP. 1,063,391.21	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1993	(24)	GBP. 930,467.31	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1994	(25)	GBP. 797,543.41	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1995	(26)	GBP. 664,619.51	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1996	(27)	GBP. 531,695.61	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1997	(28)	GBP. 398,771.71	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1998	(29)	GBP. 265,847.81	GBP. 132,923.90	-----	GBP. 132,923.90
1999	(30)	GBP. 132,923.91	GBP. 132,923.91	-----	GBP. 132,923.91
Grand total			GBP. 3,987,717.01 =====	-----	GBP. 3,987,717.01 =====

REPAYMENT SCHEDULE OF DEBT UNDER EXCHANGE OF NOTES DATED JANUARY 6, 1963

Date : 31 Dec.		Outstanding balance of Principal	Repayment Schedule		
			Principal	Interest	Total
1970	(1)	GBP. 3,995,112.33	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1971	(2)	GBP. 3,861,941.92	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1972	(3)	GBP. 3,728,771.51	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1973	(4)	GBP. 3,595,601.10	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1974	(5)	GBP. 3,462,430.69	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1975	(6)	GBP. 3,329,260.28	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1976	(7)	GBP. 3,196,089.87	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1977	(8)	GBP. 3,062,919.46	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1978	(9)	GBP. 2,929,749.05	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1979	(10)	GBP. 2,796,578.64	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1980	(11)	GBP. 2,663,408.23	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1981	(12)	GBP. 2,530,237.82	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1982	(13)	GBP. 2,397,067.41	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1983	(14)	GBP. 2,263,897.00	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1984	(15)	GBP. 2,130,726.59	GBP. 133,170.41	-----	GBP. 133,170.41
1985	(16)	GBP. 1,997,556.18	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1986	(17)	GBP. 1,864,385.77	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1987	(18)	GBP. 1,731,215.36	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1988	(19)	GBP. 1,598,044.95	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1989	(20)	GBP. 1,464,874.54	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
Total			GBP. 2,663,408.20	GBP. 48,000.00	GBP. 2,711,408.20
1990	(21)	GBP. 1,331,704.13	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1991	(22)	GBP. 1,198,533.72	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1992	(23)	GBP. 1,065,363.31	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1993	(24)	GBP. 932,192.90	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1994	(25)	GBP. 799,022.49	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1995	(26)	GBP. 665,852.08	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1996	(27)	GBP. 532,681.67	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1997	(28)	GBP. 399,511.26	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1998	(29)	GBP. 266,340.85	GBP. 133,170.41	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.41
1999	(30)	GBP. 133,170.44	GBP. 133,170.44	GBP. 9,600.00	GBP. 142,770.44
Grand total			GBP. 3,995,112.33 =====	GBP. 144,000.00 =====	GBP. 4,139,112.33 =====

AGREED MINUTES OF DISCUSSION
BETWEEN OFFICIALS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
AND OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON TECHNICAL MATTERS
RELATING TO THE SETTLEMENT OF OUTSTANDING
DEBT BETWEEN THE TWO COUNTRIES

BEIJING, 23 - 28 MARCH 1990



AGREED MINUTES OF DISCUSSION BETWEEN OFFICIALS OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON TECHNICAL MATTERS RELATING TO THE SETTLEMENT OF
OUTSTANDING DEBT BETWEEN THE TWO COUNTRIES.

A meeting of officials of the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on technical matters relating to the settlement of outstanding debt between the two countries was held in Beijing on 23 - 28 March 1990. The meeting took place in accordance with the Agreed Minutes of the Meeting Between Senior Officials of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Technical Matters Relating to the Resumption of Diplomatic Relations Between the Two Countries, 5 - 9 December 1989. The meeting was held in a friendly, frank and cooperative atmosphere and has achieved positive results.

Delegation of the People's Republic of China was led by Mr. Zhang Qing, Deputy Director of Department of Asian Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China while the Indonesian Delegation was led by Mr. Jusuf Anwar, Director of External Funds, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (The name lists of the two Delegations appear as Annexes 1 and 2 of this Minutes.) The agenda adopted by the Meeting is as follows:

1. Introduction remarks by the two Heads of delegations.
2. Review of each outstanding debt and Document verification.

3. Settlement of outstanding debt.

4. Others.

The two delegations conducted careful discussions on the outstanding debt issues and, at the conclusion of the meeting, signed the following Agreed Minutes of Discussion.

1. The Head of Chinese Delegation stated that this meeting was of great significance as a part of efforts toward the resumption of diplomatic relations between the two countries. Outstanding debt matters were considered as an issue of minor importance and the problems were not difficult to settle. He also confirmed the Chinese Government's decision to accept the Indonesian Government's proposal at the last December meeting in Jakarta regarding the application of the Paris Formula for the settlement of the outstanding debt between the two countries.

The Head of the Indonesian Delegation expressed his appreciation on behalf of the Indonesian Government for the acceptance of Paris Formula by the Chinese Government for the settlement of the Indonesian outstanding debt. He proposed that concentration will be given on technical issues relating to the outstanding debt of the Republic of Indonesia to China and that during the discussion each agreement should be reviewed including confirmation on the original loan agreement documentations. Copies of the documents sent through China's Representative in the United Nations had been received and proper examination had been conducted accordingly.

2. The two sides have verified and confirmed the outstanding balances and interests of the following three accounts:

a. On the "Loan Account" opened in accordance with the letters exchanged on April 17, 1958 between the two Governments, the outstanding balance is CHF 28,000,903.21 and the interest accrued thereon is CHF 2,450,079.02. The two amounts add up to CHF 30,450,982.23 in favour of the Chinese side (see Annex 3).

b. On the "Loan Account No. 4" opened in accordance with the loan agreement signed on January 28, 1965 between the two Governments, the outstanding balance is CHF 43,728,200.00 (see Annex 4).

c. On the "Special Account" opened in accordance with the letters exchanged on January 6, 1963 between the two Governments, the outstanding balance is GBP 3,600,000.00 and the interest accrued thereon is GBP 539,112.33 (see Annex 5).

3. After verification, the two sides still have differences with regard to the following three accounts:

d. On the "Credit Account No. 3 L40601 SUB. A/C" and the "Credit A/C No. 3 Local Expense Account" opened in accordance with the economic and technical cooperation

agreement signed on 11 October 1961 between the two Governments, the total outstanding balance verified by the two sides is CHF 20,144,774.78, with difference in the amount of interest. The total interest calculated by Bank Indonesia is CHF 2,618,820.72, whereas the total interest from the Bank of China is CHF 4,716,909.40. The Chinese side presented the Indonesian side the statements of interest and briefed them their method of counting interest. The Indonesian Delegation expressed their understanding of the calculation and will verify the disbursement dates presented by the Chinese side.

e. On the "Indonesia Account" and "China Account" opened in accordance with the trade payments agreement signed on 1 September 1954 between the two Governments, the outstanding balance has not been verified by both sides. The outstanding balance in the books of the Indonesian side stands at GBP 2,135,610.67 in favour of the Chinese side, whereas in the books of Bank of China at GBP 3,987,717.01 in favour of the Chinese side. The difference in the outstanding balance is GBP 1,852,106.34. The Chinese side had provided the Indonesian side with copies of statements and vouchers under the "Indonesia Account" during the period from December 1965 to December 1967. The Indonesian side will provide available copies of statements under the "China Account" which the Chinese side had not received from the Indonesian side.

f. Regarding the "Loan Account No.5" opened in accordance

with the economic and technical cooperation agreement signed on 28 January 1965 between the two Governments, the outstanding balance in the books of Bank of China is CHF 25,176,433.20 in favour of the Chinese side and no record was made by the Indonesian side. The Chinese Delegation showed the Indonesian Delegation the original text of the government agreement and provided them with copies of the government agreement, statements and vouchers. The Indonesian side agreed to further verify the relevant documents after their return to Jakarta.

4. Settlement of the outstanding debt

- a. The two sides agreed to apply the Paris Formula to the calculation of interest and the determination of repayment period for the final settlement of the confirmed accounts as appeared in items a,b,c in Part 2 of this Minutes and the accounts to be verified as appeared in items d,e,f, in Part 3 of this Minutes.
- b. The Chinese side had submitted all the necessary evidence they could provide to the Indonesian side. The Indonesian side stated that they would further verify the accounts in Part 3 in this Minutes on the basis of the evidence provided by the Chinese side. Apart from the three accounts in Part 2, the outstanding debt in Part 3 would be settled between the Foreign Ministers of the two countries or the representatives of the two Governments in accordance

with the results of final verification by the Indonesian side.

c. The two sides agreed that the Chinese Government and the Indonesian Government would sign a repayment agreement as the final settlement to the Indonesian outstanding debt to China. The agreement will cover the principal and interest amount, means of payment and repayment period. It is the hope of the Chinese side that the repayment agreement will be signed simultaneously with the communique on the resumption of diplomatic relations between China and Indonesia.

d. As has been agreed upon in the last December meeting in Jakarta, repayment can in principle be settled by using convertible currency and Indonesia export commodities acceptable to China.

In this spirit, both sides have, through friendly discussions, reached agreement as follows:

d.1. The ratio between cash payment and commodity payment is 50 : 50.

d.2. payment in cash will be executed in its original currency as stated in the respective loan agreement.

d.3. The China Delegation submitted a list of commodities acceptable to China as follows:

- crude oil
- natural rubber
- timber
- plywood
- chemical fertilizer(urea)

- other commodities subject to mutual agreement
between the two countries.

Technical settlement of commodity payment will
be arranged through the relevant departments, banks
and agencies of the two countries.

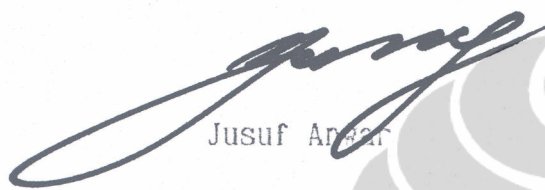
e. The two delegations agreed that the results of this
meeting would be reported to their respective
Government authorities.

5. During the visit in Beijing, the Indonesian Delegation
called on Mr. Qi Huaiyuan, Vice Minister of Foreign Affairs.
Mr. Qi Huaiyuan mentioned during the meeting that the
settlement of the outstanding debt was a minor issue and
therefore should not be considered as an obstacle to the
efforts towards the resumption of diplomatic relations
between the two countries. He further mentioned that
verification of the outstanding issues could be conducted by
the Indonesian Delegation after their return to Indonesia.

Mr. Qi Huaiyuan asked the Indonesian Delegation to convey
greetings from H.E. Mr. Qian Qichen, Foreign Minister of the
PRC to H.E. Mr. Ali Alatas, Foreign Minister of the Republic
of Indonesia. He extended an invitation to H.E. Mr. Ali
Alatas to visit China in late April or early May 1990 in
order to solve the issues relating to the resumption of
diplomatic relations between the two countries, including the
outstanding debt.

The Head of the Indonesian Delegation stated that he would convey this message to H.E., the Foreign Minister of the Republic of Indonesia with pleasure.

6. Both Delegations expressed their satisfaction on the progress made during the discussion.



Jusuf Anwar

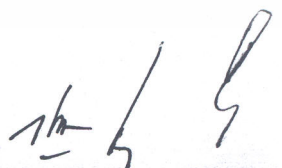
张青

Zhang Qing

Head of Delegation
of the Republic of
Indonesia

Head of Delegation
of the People's Republic of
China

Beijing, 28 March 1990



6. Mr. Giang Yi Member
Officer Second Department for
Regional Affairs
Ministry of Foreign Economic Relations
and Trade

7. Mr. Li Aihua Member
Assistant Manager
International Department
Bank of China Head Office



TERMS AND CONDITIONS:

LOAN AMOUNT : CHF48,000,000.00
 INTEREST : 2.5% p.a.
 REPAYMENT OF PRINCIPAL: 10 YEARS FROM 1959 UP TO 1968

DISBURSEMENT AND REPAYMENT:

AMOUNT DISBURSED : CHF46,668,172.01
 AMOUNT REPAYED FOR
 PRINCIPAL (UP TO 31/12/69): CHF18,667,268.80 -
 BALANCE : CHF28,000,903.21
 AMOUNT OF INTEREST UP
 TO 1968 : CHF7,156,817.99
 AMOUNT REPAYED FOR
 INTEREST (UP TO 31/12/69): CHF4,706,738.97 -
 BALANCE : CHF2,450,079.02

APPLICATION OF PARIS FORMULA:

NEW PRINCIPAL : CHF28,000,903.21
 CHF 2,450,079.02 +
 CHF30,450,982.23

INTEREST : NONE

ANNUAL INSTALMENT OF PRINCIPAL:

$$\text{CHF}30,450,982.23/30=\text{CHF}1,015,032.74$$

SCHEDULE OF PAYMENT : SEE ATTACHMENT

	<u>31 DEC</u>	<u>AMOUNT</u>
1	1970	CHF. 1,015,032.74
2	1971	CHF. 1,015,032.74
3	1972	CHF. 1,015,032.74
4	1973	CHF. 1,015,032.74
5	1974	CHF. 1,015,032.74
6	1975	CHF. 1,015,032.74
7	1976	CHF. 1,015,032.74
8	1977	CHF. 1,015,032.74
9	1978	CHF. 1,015,032.74
10	1979	CHF. 1,015,032.74
11	1980	CHF. 1,015,032.74
12	1981	CHF. 1,015,032.74
13	1982	CHF. 1,015,032.74
14	1983	CHF. 1,015,032.74
15	1984	CHF. 1,015,032.74
16	1985	CHF. 1,015,032.74
17	1986	CHF. 1,015,032.74
18	1987	CHF. 1,015,032.74
19	1988	CHF. 1,015,032.74
20	1989	CHF. 1,015,032.74
21	1990	CHF. 1,015,032.74
22	1991	CHF. 1,015,032.74
23	1992	CHF. 1,015,032.74
24	1993	CHF. 1,015,032.74
25	1994	CHF. 1,015,032.74
26	1995	CHF. 1,015,032.74
27	1996	CHF. 1,015,032.74
28	1997	CHF. 1,015,032.74
29	1998	CHF. 1,015,032.74
30	1999	CHF. 1,015,032.77
	<u>TOTAL</u>	<u>CHF. 30,450,982.23</u>



TERMS AND CONDITIONS:

LOAN AMOUNT : CHF43,728,200.00
INTEREST : 0%
REPAYMENT : 10 YEARS SINCE 1975

DISBURSEMENT AND REPAYMENT:

AMOUNT DISBURSED : CHF43,728,200.00
AMOUNT REPAID : — —
BALANCE : CHF43,728,200.00

APPLICATION OF PARIS FORMULA:

NEW PRINCIPAL : CHF43,728,200.00
INTEREST : NONE

ANNUAL INSTALMENT OF PRINCIPAL:

$\text{CHF}43,728,200.00/30 = \text{CHF}1,475,606.66$

SCHEDULE OF PAYMENT : SEE ATTACHMENT



	31 DEC.	AMOUNT
1	1970	CHF 1,457,606.66
2	1971	CHF 1,457,606.66
3	1972	CHF 1,457,606.66
4	1973	CHF 1,457,606.66
5	1974	CHF 1,457,606.66
6	1975	CHF 1,457,606.66
7	1976	CHF 1,457,606.66
8	1977	CHF 1,457,606.66
9	1978	CHF 1,457,606.66
10	1979	CHF 1,457,606.66
11	1980	CHF 1,457,606.66
12	1981	CHF 1,457,606.66
13	1982	CHF 1,457,606.66
14	1983	CHF 1,457,606.66
15	1984	CHF 1,457,606.66
16	1985	CHF 1,457,606.66
17	1986	CHF 1,457,606.66
18	1987	CHF 1,457,606.66
19	1988	CHF 1,457,606.66
20	1989	CHF 1,457,606.66
21	1990	CHF 1,457,606.66
22	1991	CHF 1,457,606.66
23	1992	CHF 1,457,606.66
24	1993	CHF 1,457,606.66
25	1994	CHF 1,457,606.66
26	1995	CHF 1,457,606.66
27	1996	CHF 1,457,606.66
28	1997	CHF 1,457,606.66
29	1998	CHF 1,457,606.66
30	1999	CHF 1,457,606.86
TOTAL:		43,728,200.00

TERMS AND CONDITIONS:

LOAN AMOUNT	:	GBP 3,600,000.00
INTEREST	:	2 % P.A.
REPAYMENT OF PRINCIPAL	:	FROM 31/12/1969 TO 31/12/1973

DISBURSEMENT AND REPAYMENT:

AMOUNT DISBURSED	:	GBP 3,600,000.00
AMOUNT REPAYED FOR PRINCIPAL	:	NONE -
BALANCE	:	GBP 3,600,000.00
AMOUNT OF INTEREST UP TO 1973	:	GBP 539,112.33
AMOUNT REPAYED FOR INTEREST	:	NONE -
BALANCE	:	GBP 539,112.33

APPLICATION OF PARIS FORMULA:

PRINCIPAL	:	GBP 3,600,000.00
PLUS INTEREST UP TO 1969:		GBP 395,112.33 +
NEW PRINCIPAL	:	GBP 3,995,112.33
INTEREST	:	GBP 539,112.33
LESS INTEREST UP TO 1969:		GBP 395,112.33 -
NEW INTEREST	:	GBP 144,000.00
ANNUAL INSTALMENT	:	
PRINCIPAL		$\frac{GBP 3,995,112.33}{30} = GBP 133,170.41$
INTEREST		$: \frac{GBP 144,000.00}{15} = GBP 9,600.00$
SCHEDULE OF PAYMENT	:	SEE ATTACHMENT

	31.DEC.	PRINCIPAL AMOUNT	INTEREST AMOUNT
1	1970	GBP 133,170.41	
2	1971	GBP 133,170.41	
3	1972	GBP 133,170.41	
4	1973	GBP 133,170.41	
5	1974	GBP 133,170.41	
6	1975	GBP 133,170.41	
7	1976	GBP 133,170.41	
8	1977	GBP 133,170.41	
9	1978	GBP 133,170.41	
10	1979	GBP 133,170.41	
11	1980	GBP 133,170.41	
12	1981	GBP 133,170.41	
13	1982	GBP 133,170.41	
14	1983	GBP 133,170.41	
15	1984	GBP 133,170.41	
16	1985	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
17	1986	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
18	1987	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
19	1988	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
20	1989	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
21	1990	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
22	1991	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
23	1992	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
24	1993	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
25	1994	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
26	1995	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
27	1996	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
28	1997	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
29	1998	GBP 133,170.41	GBP 9,600.00
30	1999	GBP 133,170.44	GBP 9,600.00
	TOTAL	GBP 3,995,112.33	GBP 144,000.00
	GRAND TOTAL		GBP 4,139,112.33

印尼正在迎接中印复交

· 余文锁 ·

早报

时事专栏

中国外交部部长助理兼亚洲司司长徐敦信率领的一个七人代表团，经于本月5日至9日，一连五天在椰加达的印度尼西亚大酒店，与印尼外交部政治事务司总司长卢汉纳佩西率领的代表团，举行了印中复交技术谈判。

这次谈判虽然已对一些久悬未决的“技术性问题”的解决办法达成协议，但是对于受到世人注意的复交日期，仍然没有答案。中国代表团团长徐敦信在谈判中曾宛转地表达了要求订下复交日期的愿望，然而印尼首席代表卢汉纳佩西却表示他只是奉命针对“技术性问题”进行谈判。至于复交日期和具体步骤，则有待于明年2月23日在北京举行的两国外长会议去讨论了。

在这次印中复交技术谈判期间，椰城政界中流传一种说法，认为这次技术谈判，必将导致明年2月23日印中两国正式复交。他们的根据是这个日子刚好是苏哈多总统与钱其琛外长去年在东京达致印中复交谅解的一周年。

印中财务专家谈判

但是本月6日印尼外长阿拉达斯在接见徐敦信团长后对记者发表的一番谈话，却否定了这项传说。他说：“双方已同意只在技术性问题获得解决后，两国外长才会举行会谈，讨论下个进程。到了这个阶段，双方才会讨论复交的日期和方式。”他还强调说：“两国外长的会谈并非是复交谈判的最后一个步骤。它不过是整个复交过程的一个组织部分”。

阿拉达斯的上述谈话显示，在他与中国外长钱其琛于明年2月举行另一轮会谈之前，印中两国还会针对60年代苏卡诺总统时期印尼向中国取得的信贷数额的核算问题，举行另一轮财务专家谈判。

徐敦信团长在这次谈判后对记者说：双方现在只是对这项贷款具有一个“粗略的数字”，至于究竟数额多大，还有待双方具有专长的技术官员作进一步的谈判。

根据印尼报章的消息：在1965年印中经济合作协定下，中国给予印尼的无息贷款达到3亿4982万5600瑞士法郎（4亿5000万新元），同时在1965年提供信贷协定下，中国提供给印尼的无息和无条件贷款达到8745万6400瑞士法郎（1亿1224万新元）。两项贷款约达4亿3728万2000瑞士法郎（约5亿6000万新元）。

中国国名的印尼文译名

对于这项信贷数额的主要争执点为究竟是以上述两项协定生效时的币值来计算，抑或是依照过去24年来瑞士法郎与以黄金为单位的兑换率变化来计算。因为根据1965年信贷协定的第一节条文，上述第二项信贷中每一个瑞士法郎含有零点2032258克的黄金单位。

这次技术谈判的结果，除了上述有关信贷数额的核算有待进一步谈商之外，其他问题都获得顺利解决。已经解决的问题包括：

*有关“中华人民共和国”国名的印尼文译名问题，印尼反对中国采用“Republik Rakyat Tiongkok”的译名，坚持使用“Republik Rakyat Cina”。印尼观察家认为，印尼反对中国使用“Tiongkok”一词，似有反对中国把神州大地视为世界中心的含意。中国代表没有坚持其立场，徐敦信团长对记者说：“在国际上，我们被称为China，不是Tiongkok”。中国接受“Republik Rakyat Cina”的译名。

限制中国外交人员数目

*中国同意不再使用椰城华人区牙渣马打路的旧使馆馆址。印中双方同意遵照彼此首都的市区发展规划的需求而择区设立大使馆。印尼将在椰城南部的一个使馆区让中国设立新大使馆。中国的外交人员初期将限定在20名内。

*关于被视为中国公民的32万2000名华裔的国籍问题，中国代表团接受一项解决方案，即那些能出示他们为中国公民证件的华裔，中国将准许他们回去中国定居。如果他们要继续留在印尼居住，中国大使馆将发给他们中国护照。不过中国代表团不接受印尼提出这类华裔人数的数据，他们表示须要进一步的核对。

这批华裔的国籍问题是50年代印中双重国籍协定于1969年印尼颁发第4号法令而被宣布无效后遗留的一个问题。经过这次谈判后，这个棘手的问题终于有了一个答案。印尼观察家认为，这32万名华裔将不会选择回去中国，他们将会继续在印尼居留下来。

至于既无印尼公民地位，又无中国公民证件的无国籍华裔问题，中国代表团拒绝加以讨论。中国代表团认为这是印尼内部事务，中国不便加以干预。

技术谈判的圆满结束

*对于台湾在椰加达设立商务代表的问题，中国代表团的立场是中国不反对印尼与台湾保持经济和贸易关系。徐敦信团长说：只要印尼不把印台关系升级为外交关系，中国不表反对。他称赞印尼一贯地坚持一个中国的立场。

印中高级官员技术谈判所取得的成果是显而易见。这次谈判的圆满结束使印中复交进程，减少了许多有形的绊脚石，并且也使两国朝向外交关系的解冻迈前一步。

但是妨碍复交的无形绊脚石依然存在。从印尼国内的情况来说，就是如何消除与“华裔少数民族问题”有关的偏见、猜疑及恐惧感。印尼大学国际关系系主任朱武诺·苏达梭诺博士最近撰文谈到“印中复交与印尼民族建设问题”时说：过去人们把中华人民共和国、华族、华裔文化和毛泽东思想及马列主义纠缠在一起。人们一提到华人，就会想到中国及与印尼共产党的关系。他说：“今天仍然有相当多的

‘土著’印尼公民有意或无意地把华裔文化、华族及中华人民共和国等三个因素纠缠在一起。在他们的思想中，中共分子经常都会隐藏在每项‘经济颠覆’行动或‘思想渗透’的幕后，以危害印尼的国家安全。”

消除对华裔的偏见

这位在印尼学术界具有威望的学者说：面对着印中复交的前景，现在是澈底消除对华裔所存的猜忌和偏见的时候。

他认为与复交有关的经济、政治和安全问题，须由诸如安全、司法、移民事务等政府部门去处理。他们将根据苏哈多总统在今年2月以后所阐述的政策执行。但是作为“大多数集团”的印尼公民来说，他们是有责任去确保印尼民族建设的成功。

苏达梭诺博士语重心长地说：一个不能摆脱过去的偏见、恐惧感和猜忌心的民族没法迅速地面对挑战和攫取未来出现的机会。

(PA)

联合早报

Dec 25, 1989

第8页 言论版

Article Title 祖国尊严不可侮

Author(s) 本报评论员

Source 解放军报 / *Jiefangjun Bao (PLA Daily)*, April 20, 1966

<https://dlib.eastview.com/browse/doc/13982583>

祖国尊严不可侮

作者:本报评论员

中国驻印度尼西亚大使馆工作人员赵小寿同志，在印度尼西亚右派势力武装袭击我大使馆的时候，赤手空拳保卫我国国旗，被印度尼西亚陆军部队开枪击中胸部，身负重伤。赵小寿同志在法西斯暴力面前正义凛然，奋不顾身地保卫我们伟大祖国的五星红旗，表现了对祖国对人民的无限忠诚，表现了毛泽东思想武装起来的中国人民的伟大爱国主义精神。我们向远离祖国、正在医院中治疗的赵小寿同志表示无限的关怀，并遥致亲切的慰问和崇高的敬意。

我们祖国的五星红旗，是无数革命先烈的鲜血染红的。她代表着我们伟大祖国神圣不可侵犯的尊严。保卫国旗，人人有责。保卫国旗，就是保卫她所代表的可爱的祖国。赵小寿同志把祖国的国旗，把祖国的尊严，看得比自己的生命还可贵，不惜用自己的鲜血来保卫她。赵小寿同志这种热爱祖国、威武不屈的无产阶级硬骨头精神，值得我们学习。

我国外事工作人员是毛泽东思想哺育下的优秀的革命工作者。他们忠实地执行我们党和国家的外交政策，不遗余力地发展和加强我国和驻在国人民的友好关系，受到这些国家广大人民的欢迎和热爱。当某些国家一小撮反动分子为了适应美帝国主义反华的需要，对我国外事工作人员进行迫害，借以恶化同我国的关系的时候，我外事工作人员紧密地团结在一起，不被任何暴力所吓倒。他们虽然远离祖国，但是颗颗红心却向着祖国、向着党、向着毛主席。伟大的祖国和六亿五千万人民给了他们坚持真理、坚持斗争的无穷力量。去年，我们曾经欢迎了同巴西反动派进行顽强斗争胜利归来的王耀庭等九同志，我们深深钦佩他们那种崇高的革命气节和不屈不挠的英雄气概。今天，我们又为用鲜血保卫祖国国旗的赵小寿同志的英勇行为而感动。人民解放军是祖国的保卫者。我们一定要发扬他们心怀祖国忠心耿耿的革命精神，当祖国和人民一旦需要的时候，就是上刀山、下火海，也在所不辞。

印度尼西亚右派反动势力纠集暴徒，闯进中国大使馆，恣意行凶破坏，侮辱我国国旗，这是十足的法西斯暴行。我们对此表示万分愤慨。中国人民是不好惹的，中国的尊严是不可侮的。世界上所有反华小丑，从来都没有好下场，印度尼西亚右派反动势力，也逃脱不了悲惨的结局。
(附图片)

洪炉画(图片)@@祖国尊严不可侮 本报评论员